BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, tahun ketiga disusun berdasarkan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan* Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan* Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa *depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan* sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu *Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah* dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke-3 RPJMD 2014-2019 untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
9. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun* 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke-3 RPJMD 2013-2018 yang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
10. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKP 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional tahun ke-3 RPJMN 2015-2019 yang Memuat Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Rancangan Kerangka Makro Ekonomi Nasional, Arah Kebijakan Keuangan Nasional, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun ke Depan yang merupakan Penjabaran dari Dokumen Renstra SKPD.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya *disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk* periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program acuan dan penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2014-2019 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2017, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2017, bertujuan:
   a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
   c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
   d. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
   e. menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
   f. menjamin komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakeholders pembangunan daerah dalam Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD hingga Musrenbang RKPD;

g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunn sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta memiliki Daya Saing.

(3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017;

b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;

c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran *Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016;

c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017;

f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2017.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2017 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Mei 2016
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Program dan kegiatan yang terangkum dalam dokumen RKPD ini merupakan hasil konsolidasi dan koordinasi organisasi, program dan kegiatan antar Instansi Pemerintah dan pertisipasi aktif seluruh stakeholder pelaku pembangunan melalui Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Forum Gabungan SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014 – 2019 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Dengan tersusunnya Dokumen RKPD ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 2016

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I – 1**

1.1 Latar Belakang ..... I – 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 4

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I – 6

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I – 8

1.5 Maksud dan Tujuan ..... I – 9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..... **II – 1**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II – 1

2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi ..... II – 1

2.1.1.1 Geografi ..... II – 1

2.1.1.2 Topografi ..... II – 4

2.1.1.3 Geologi ..... II – 4

2.1.1.4 Hidrologi ..... II – 7

2.1.1.5 Klimatologi ..... II – 13

2.1.1.6 Penggunaan Lahan ..... II – 13

2.1.2 Aspek Demografi ..... II – 18

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 56

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II – 56

A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) ..... II – 56

B. Laju Inflasi Kabupaten ..... II – 62

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ..... II – 62

D. Indeks Gini/Koefisien Gini ..... II – 63
E. Pemerataan Pendapatan ..... II – 64
F. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ..... II – 65
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II – 66
A. Pendidikan ..... II – 66
B. Kesehatan ..... II – 72
C. Kemiskinan ..... II – 75
D. Kepemilikan Tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan) ..... II – 78
E. Kesempatan Kerja ..... II – 78
F. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani) ..... II – 81
2.1.3.3 Seni Budaya dan Olahraga ..... II – 82
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ..... II – 82
2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II – 82
1. Pendidikan ..... II – 82
2. Kesehatan ..... II – 87
3. Lingkungan Hidup ..... II – 95
4. Sarana dan Prasarana Umum ..... II – 97
5. Penataan Ruang ..... II – 110
6. Perhubungan ..... II – 112
2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II – 118
1. Penanaman Modal ..... II – 118
2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..... II – 120
3. Kependudukan ..... II – 123
4. Ketenagakerjaan ..... II – 128
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 131
6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... II – 133

7. Komunikasi dan Informasi ..... II – 136
8. Pertanahan ..... II – 138
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .... II – 139
10. Perpustakaan ..... II – 140
11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ..... II – 142
12. Pemuda dan Olahraga ..... II – 146

2.1.5 Aspek Daya Saing ..... II – 149

2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II – 150

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ..... II – 150
2. Nilai Tukar Petani ..... II – 151
3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan) ..... II – 152
4. Produktivitas Total Daerah ..... II – 153

2.1.5.2 Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur ..... II – 159

1. Aksesibilitas Daerah ..... II – 159
2. Penataan Wilayah ..... II – 161
3. Fasilitas Bank dan Non Bank ..... II – 161
4. Ketersediaan Air Bersih ..... II – 163
5. Fasilitas Listrik dan Telpon ..... II – 164
6. Ketersediaan Restoran ..... II – 167
7. Ketersediaan Penginapan ..... II – 168

2.1.5.3 Iklim Berinvestasi ..... II – 170

1. Keamanan dan Ketertiban ..... II – 170
2. Kemudahan Perijinan ..... II – 171
3. Penggunaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah) ..... II – 173
4. Status Desa ..... II – 174

2.1.5.4 Sumber Daya Manusia ..... II – 176

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Kelulusan S1, S2, S3) ..... II – 176

2. Tingkat Ketergantungan ..... II – 177

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ... II – 179

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 203

2.3.1 Urusan Pendidikan ..... II – 203

2.3.2 Urusan Kesehatan ..... II – 203

2.3.3 Urusan Lingkungan Hidup ..... II – 203

2.3.4 Urusan Pekerjaan Umum ..... II – 204

2.3.5 Urusan Penataan Ruang ..... II – 207

2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan ..... II – 207

2.3.7 Urusan Perumahan ..... II – 208

2.3.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II – 209

2.3.9 Urusan Penanaman Modal ..... II – 210

2.3.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..... II – 210

2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..... II – 211

2.3.12 Urusan Ketenagakerjaan ..... II – 212

2.3.13 Urusan Ketahanan Pangan ..... II – 212

2.3.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 213

2.3.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .. II – 214

2.3.16 Urusan Perhubungan ..... II – 214

2.3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika ..... II – 215

2.3.18 Urusan Pertanahan ..... II – 215

2.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .... II – 215

2.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..... II – 216

2.3.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II – 227

2.3.22 Urusan Sosial ..... II – 228
2.3.23 Urusan Kebudayaan ..... II – 228
2.3.24 Urusan Statistik ..... II – 229
2.3.25 Urusan Kearsipan ..... II – 229
2.3.26 Urusan Perpustakaan ..... II – 230
2.3.27 Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II – 230
2.3.28 Urusan Pertanian ..... II – 231
2.3.29 Urusan Kehutanan ..... II – 232
2.3.30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II – 233
2.3.31 Urusan Pariwisata ..... II – 234
2.3.32 Urusan Industri ..... II – 236
2.3.33 Urusan Perdagangan ..... II – 236
2.3.34 Urusan Ketransmigrasian ..... II – 236

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 1
3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ..... III – 2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III – 12
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III – 19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III – 26

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV – 2
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV – 27

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017 ..... V – 1
5.1 Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... V – 1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2017 ..... V – 7

BAB VI Penutup ..... VI – 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 4

Tabel 2.2 Persentase Luas Areal Berhutan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 14

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarakan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 20

Tabel 2.4 Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 21

Tabel 2.5 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 22

Tabel 2.6 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kuala Mandor B Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 23

Tabel 2.7 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 24

Tabel 2.8 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 25

Tabel 2.9 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Batu Ampar Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 26

Tabel 2.10 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 27

Tabel 2.11 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 28

Tabel 2.12 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 29

Tabel 2.13 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia tahun 2015 ..... II – 30

Tabel 2.14 Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 31

Tabel 2.15 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 33

Tabel 2.16 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kualam Mandor B Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 34

Tabel 2.17 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 35

Tabel 2.18 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 36

Tabel 2.19 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 37

Tabel 2.20 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 39

Tabel 2.21 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 40

Tabel 2.22 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 41

Tabel 2.23 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki tahun 2015 ..... II – 42

Tabel 2.24 Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 43

Tabel 2.25 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 44

Tabel 2.26 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kuala Mandor B Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 46

Tabel 2.27 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 47

Tabel 2.28 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 48

Tabel 2.29 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 49

Tabel 2.30 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 50

Tabel 2.31 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 52

Tabel 2.32 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 53

Tabel 2.33 Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan tahun 2015 ..... II – 54

Tabel 2.34 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 58

Tabel 2.35 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya ..... II – 59

Tabel 2.36 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kubu Raya ..... II – 60

Tabel 2.37 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 61

Tabel 2.38 Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 - 2017 ..... II – 62

Tabel 2.39 PDRB Perkapita Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 63

Tabel 2.40 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat ..... II – 64

Tabel 2.41 Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 67

Tabel 2.42 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 68

Tabel 2.43 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 69

Tabel 2.44 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 70

Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 71

Tabel 2.46 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 72

Tabel 2.47 Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 73

Tabel 2.48 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya ..... II – 74

Tabel 2.49 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 s/d Tahun 2014 ..... II – 77

Tabel 2.50 Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 ..... II – 79

Tabel 2.51 Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 ..... II – 81

Tabel 2.52 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 82

Tabel 2.53 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 83

Tabel 2.54 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 84

Tabel 2.55 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 85

Tabel 2.56 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya .. II – 86

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 86

Tabel 2.58 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 87

Tabel 2.59 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 88

Tabel 2.60 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 89

Tabel 2.61 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 89

Tabel 2.62 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 90

Tabel 2.63 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 90

Tabel 2.64 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 92

Tabel 2.65 Jumlah Dokter Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 93

Tabel 2.66 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 93

Tabel 2.67 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 94

Tabel 2.68 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 94

Tabel 2.69 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 95

Tabel 2.70 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 95

Tabel 2.71 Jumlah Pelanggan dan Air Terpakai Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 96

Tabel 2.72 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 97

Tabel 2.73 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 98

Tabel 2.74 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 99

Tabel 2.75 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 100

Tabel 2.76 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 100

Tabel 2.77 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 101

Tabel 2.78 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 102

Tabel 2.79 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 104

Tabel 2.80 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 105

Tabel 2.81 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012 s/d Tahun .2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 106

Tabel 2.82 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 106

Tabel 2.83 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 107

Tabel 2.84 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya II – 108

Tabel 2.85 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 109

Tabel 2.86 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 109

Tabel 2.87 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 110

Tabel 2.88 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 111

Tabel 2.89 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 111

Tabel 2.90 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 112

Tabel 2.91 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 112

Tabel 2.92 Rasio Ijin Trayek Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 113

Tabel 2.93 Rasio Ijin Trayek Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 114

Tabel 2.94 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 116

Tabel 2.95 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun pada Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 117

Tabel 2.96 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 118

Tabel 2.97 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 119

Tabel 2.98 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 119

Tabel 2.99 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 120

Tabel 2.100 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 121

Tabel 2.101 Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 122

Tabel 2.102 Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 123

Tabel 2.103 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat ..... II – 124

Tabel 2.104 Proyeksi Penduduk Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya ..... II – 124

Tabel 2.105 Proyeksi Penduduk Tahun 2016 Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya ..... II – 125

Tabel 2.106 Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 126

Tabel 2.107 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 127

Tabel 2.108 Penduduk Angkatan Tahun 2015 Kerja Kabupaten Kubu Raya ... II – 128

Tabel 2.109 Penduduk Bekerja Tahun 2015 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya ..... II – 130

Tabel 2.110 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 131

Tabel 2.111 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 132

Tabel 2.112 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 133

Tabel 2.113 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 133

Tabel 2.114 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 134

Tabel 2.115 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 134

Tabel 2.116 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabuapten Kubu Raya ..... II – 135

Tabel 2.117 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 135

Tabel 2.118 Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 136

Tabel 2.119 Rasio Warnet Per 1000 Penduduk Tahun 2011 s/dTahun 2014 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 137

Tabel 2.120 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 138

Tabel 2.121 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 138

Tabel 2.122 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 139

Tabel 2.123 Jumlah LPM Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 139

Tabel 2.124 Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 140

Tabel 2.125 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 141

Tabel 2.126 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 142

Tabel 2.127 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 143

Tabel 2.128 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 145

Tabel 2.129 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 146

Tabel 2.130 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 147

Tabel 2.131 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 148

Tabel 2.132 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 149

Tabel 2.133 Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2010 s/s Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 150

Tabel 2.134 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat ..... II – 151

Tabel 2.135 Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 153

Tabel 2.136 Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan ..... II – 155

Tabel 2.137 Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku ..... II – 157

Tabel 2.138 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 159

Tabel 2.139 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 160

Tabel 2.140 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 160

Tabel 2.141 Rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 ..... II – 161

Tabel 2.142 Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya ..... II – 162

Tabel 2.143 Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 162

Tabel 2.144 Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama Kabupaten Kubu Raya ..... II – 163

Tabel 2.145 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya ..... II – 164

Tabel 2.146 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ..... II – 166

Tabel 2.147 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Kubu Raya ..... II – 167

Tabel 2.148 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Kubu Raya ..... II – 168

Tabel 2.149 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya ..... II – 169

Tabel 2.150 Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya ..... II – 170

Tabel 2.151 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Kubu Raya ..... II – 171

Tabel 2.152 Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 172

Tabel 2.153 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Kubu Raya ..... II – 173

Tabel 2.154 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya ..... II – 174

Tabel 2.155 Status Desa Kabupaten Kubu Raya ..... II – 176

Tabel 2.156 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 177

Tabel 2.157 Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya ..... II – 178

Tabel 2.158 Evaluasi Pelaksanaan Perogram dan Kegiatan SKPD Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ..... II – 181

Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 – 2017 ..... III – 6

Tabel 3.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 s/d Tahun 2017 ..... III – 14

Tabel 3.3 Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ..... III – 16

Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017 ..... III – 21

Tabel 3.5 Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ..... III – 23

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya ..... III – 28

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya ..... III – 30

Tabel 4.1 Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 s/d Tahun 2019 ..... IV – 2

Tabel 4.2	Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RKPD 2017 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten kubu Raya Tahun 2014 – 2019	IV – 4
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	IV – 28
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional	IV – 29
Tabel 4.5	Keselarasan Kewilayahan Tahun 2017	IV – 33
Tabel 4.6	Strategi Dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun Yang Terkait Dengan Tujuan, Sasaran, Dan Prioritas RKP 2017 ...	IV – 35
Tabel 4.7	Strategi Dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia Dan Masyarakat, Sektor Unggulan, Dan Pemerataan Kewilayahan	IV – 59
Tabel 5.1	Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	V – 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..... I – 3

Gambar 1.2 Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD ..... I – 7

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya ..... II – 2

Gambar 2.2 Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya ..... II – 6

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya ..... II – 8

Gambar 2.4 Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya ..... II – 11

Gambar 2.5 Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya .... II – 12

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya ..... II – 15

Gambar 2.7 Peta Penutupan Lahan kabupaten Kubu Raya ..... II – 17

Gambar 2.8 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 s/d Tahun 2015 ..... II – 18

Gambar 2.9 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015 ..... II – 19

Gambar 2.10 Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015 ..... II – 19

Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya..... II – 76

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Jadi KUA dan PPAS pemerintah Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.

Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur tahun sebelumnya, disamping itu juga difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, sanitasi, lingkungan pemukiman dan peningkatan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergi antar sektor dan antar wilayah, memperhatikan koordinasi antar SKPD dan berbagai pihak, baik akademisi, DPRD, lembaga kemasyarakatan non pemerintah, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi, serta memperhatikan hasil Musrenbang di tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD).

Dalam hubungannya dengan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar perencanaan dan penganggaran, dapat digambarkan melalui proses sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Persiapan Penyusunan RKPD; Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan Penetapan RKPD, dengan menggabungkan beberapa unsur yaitu unsur politik, unsur teknokratik, unsur partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

Pendekatan Teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan didalam penyusunan RKPD Tahun 2017.

Pendekatan Partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *Bottom-Up* dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan proses *Top-Down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*. Penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 memperhatikan RPJPD Kabupaten Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 serta RKP Tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

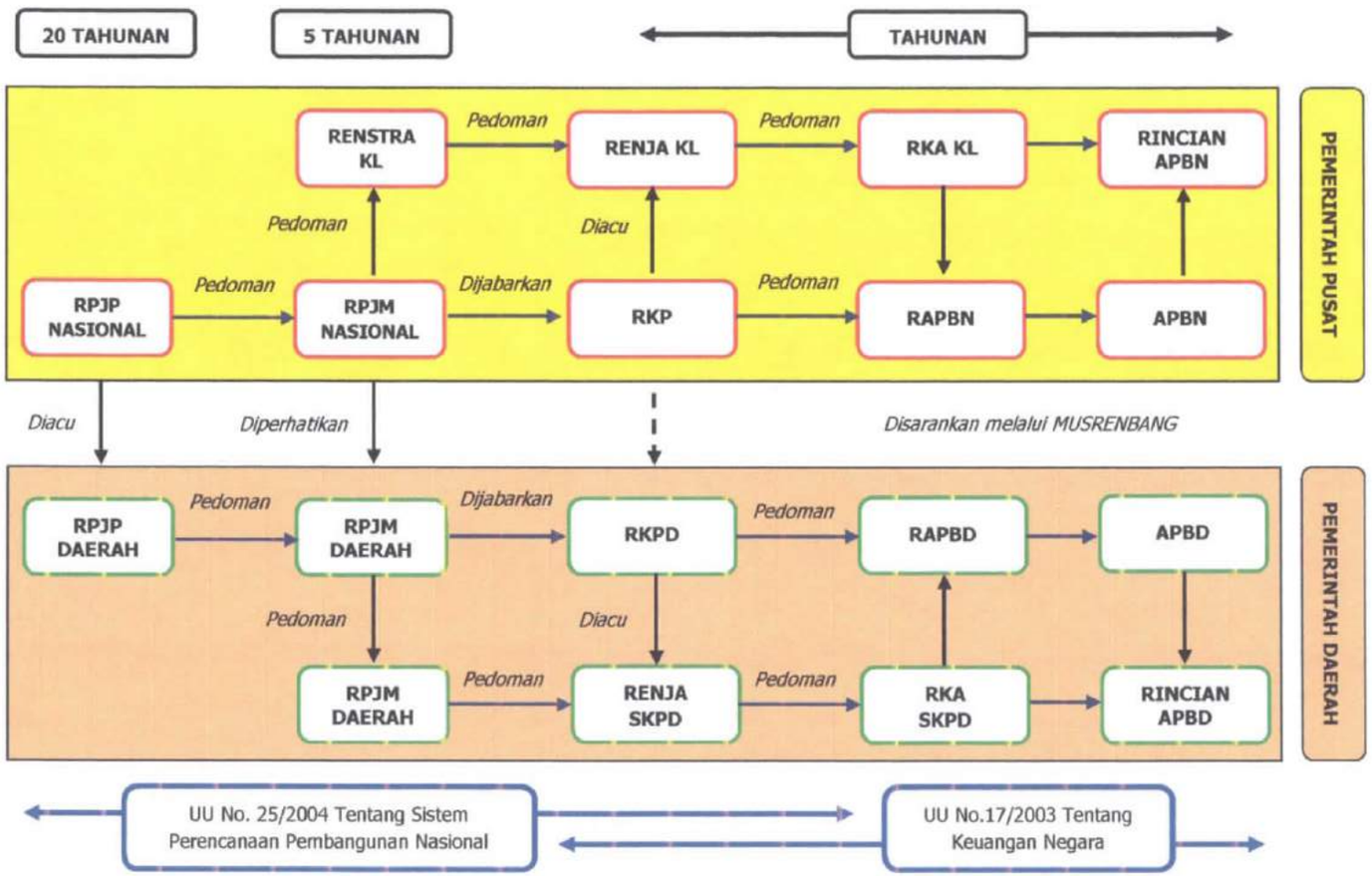
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan, untuk itu substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan memperhatikan dokumen perencanaan kabupaten/kota berbatasan pada umumnya dan kabupaten Kubu Raya pada khususnya, sehingga terwujud sinergi perencanaan.

Keterkaitan antar dokumen RKPD dan dokumen lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2

Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD



Berdasarkan Gambar 1.2. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

a. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas.
b. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
c. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.
d. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond an Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 disusun menjadi 6 (enam) Bab dan beberapa Sub Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.2 Dasar Hukum.
1.3 Hubungan Antar Dokumen.
1.4 Sistematika Dokumen SKPD.
1.5 Maksud dan Tujuan.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 :

a. Acuan dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.
b. Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
c. Pedoman dan penjabaran bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2017.
d. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2017 sesuai dengan target tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Administrasi dan Geografi

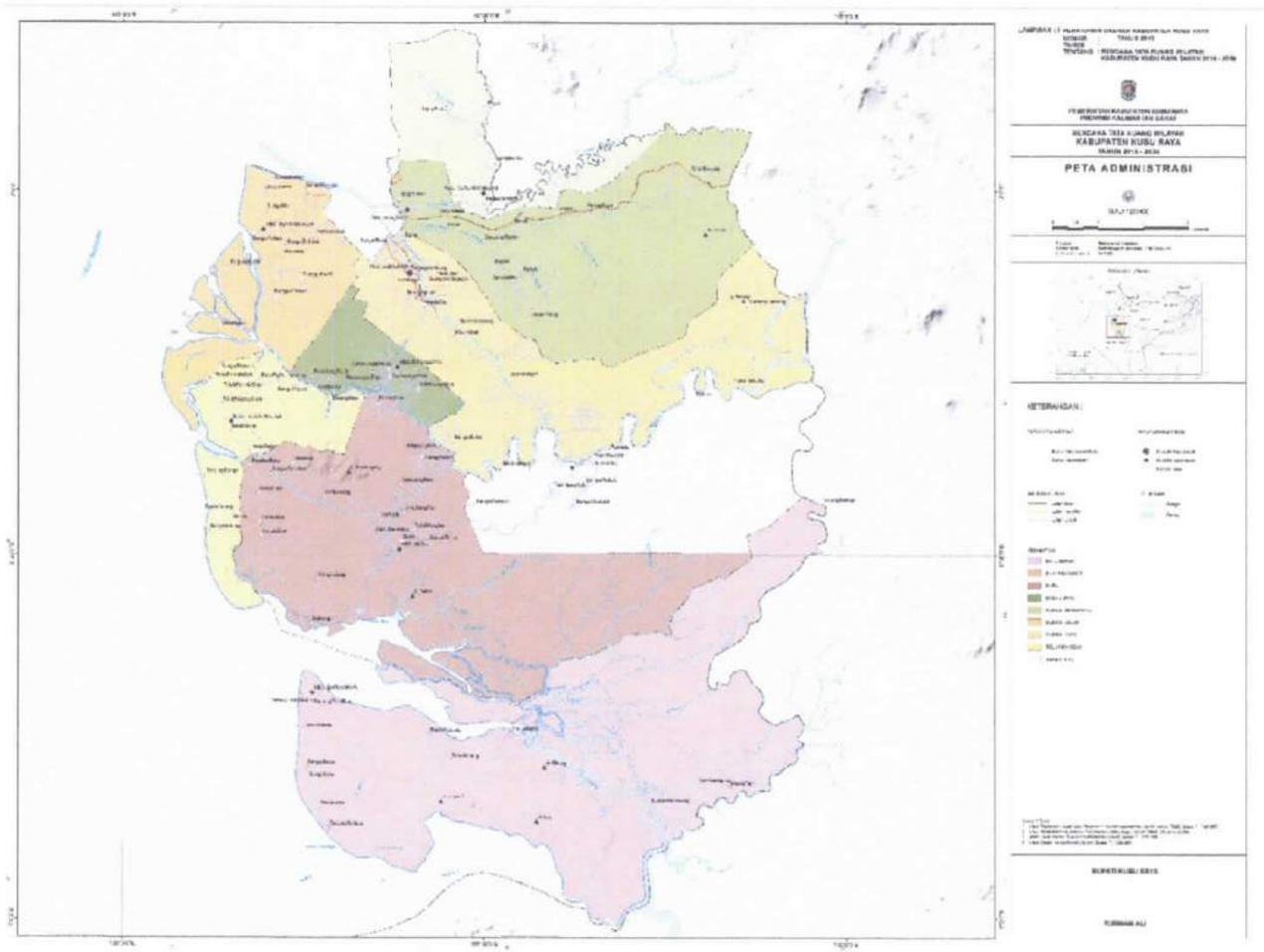
2.1.1.1 Geografi

Secara Geografis, Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 0° 13' 27" Lintang Utara sampai dengan 1° 00' 15" Lintang Selatan dan 109° 02' 47" Bujur Timur sampai dengan 109° 58' 17" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kubu Raya secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Aspek geografi merupakan karakteristik lokasi dan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana.Kondisi letak yang strategis menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupuntransportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi. Simpul transportasi utama dimaksud ditunjang dengan keberadaan Bandara Supadio di Kecamatan Sungai Raya, dan Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) di Kecamatan Sungai Ambawang.

Di sisi lain, faktor ketersediaan lahan yang masih luas dan merupakan daerah *hinterland* yang berbatasan dengan Kota Pontianak, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Kalimantan yang melintasi wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai penghubung antar Kabupaten bahkan antar provinsi, serta masuknya wilayah Kecamatan sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ke dalam pusat kegiatan nasional, menjadi keunggulan Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan dan pertumbuhan kota baru di masa mendatang.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 118 Desa, sedangkan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2008 Skala 1:50.000 Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah mencapai 872.537,01 Ha. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batu Ampar, dengan luas 247.715,80 Ha atau 28,39% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya yaitu 19.289,17 Ha atau 2,21% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Dan Jumlah Desa
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	JUMLAH DESA	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	247.715,80	28,39
2	Terentang	Terentang	10	103.052,52	11,81
3	Kubu	Kubu	20	129.961,00	14,89
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	44.219,78	5,07
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	58.958,48	6,76
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	19.289,17	2,21
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	132.052,58	15,31
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	104.773,14	12,01
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	32.514,54	3,73
Kabupaten Kubu Raya			**118**	**872.537,01**	**100**

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2008 Skala 1:50.000

2.1.1.2. Topografi

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dataran yang relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 3% seluas 702.320 Ha (98%), daerah lereng 3-14% seluas 7.205 Ha dan kelerengan diatas 40% seluas 850 Ha. Luas wilayah lautan seluas 2.197 Km2 terdiri dari 1.437 km^2 luas laut dan 760 Km^2 luas perairan umum, dengan garis pantai sepanjang 194 Km dan memiliki 39 pulau-pulau kecil.

2.1.1.3. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak. Berdasarkan posisinya, terletak pada formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup

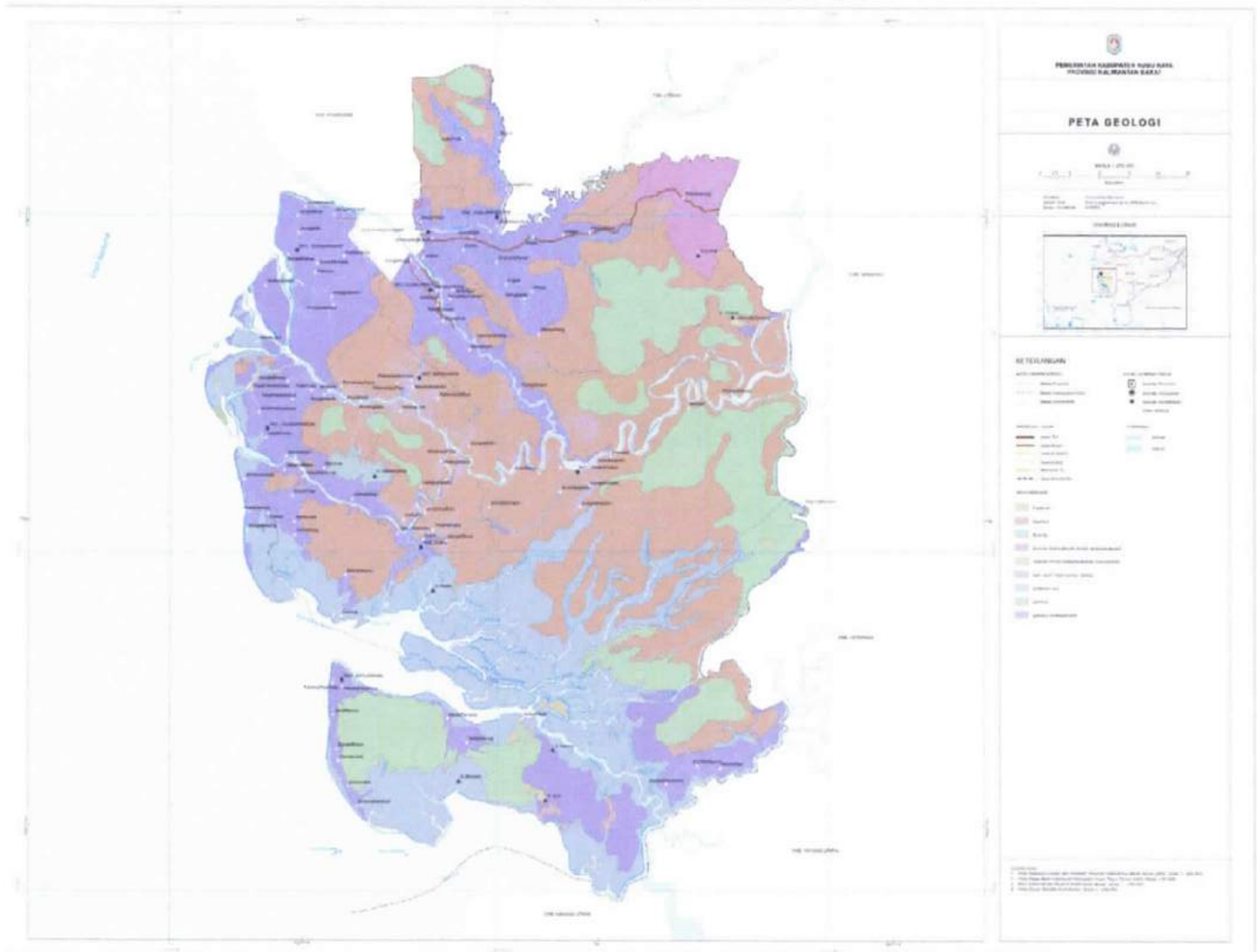
gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. ***Aluvial,*** jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Secara keseluruhan tanah aluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, tekstur beraneka ragam, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur, serta konsistensinya keras waktu kering dan teguh waktu lembab. Sifat kimia dari tanah jenis ini sedang sampai baik, reaksi tanahnya masam sampai netral, kandungan bahan organiknya rendah, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, kesuburan tanahnya sedang sampai tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. ***Gleisol***, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. ***Organosol Gley Humus*** atau ***Tanah Gambut*** atau ***Tanah Organik***, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi deferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. ***Regosol,*** tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.1 Hidrologi

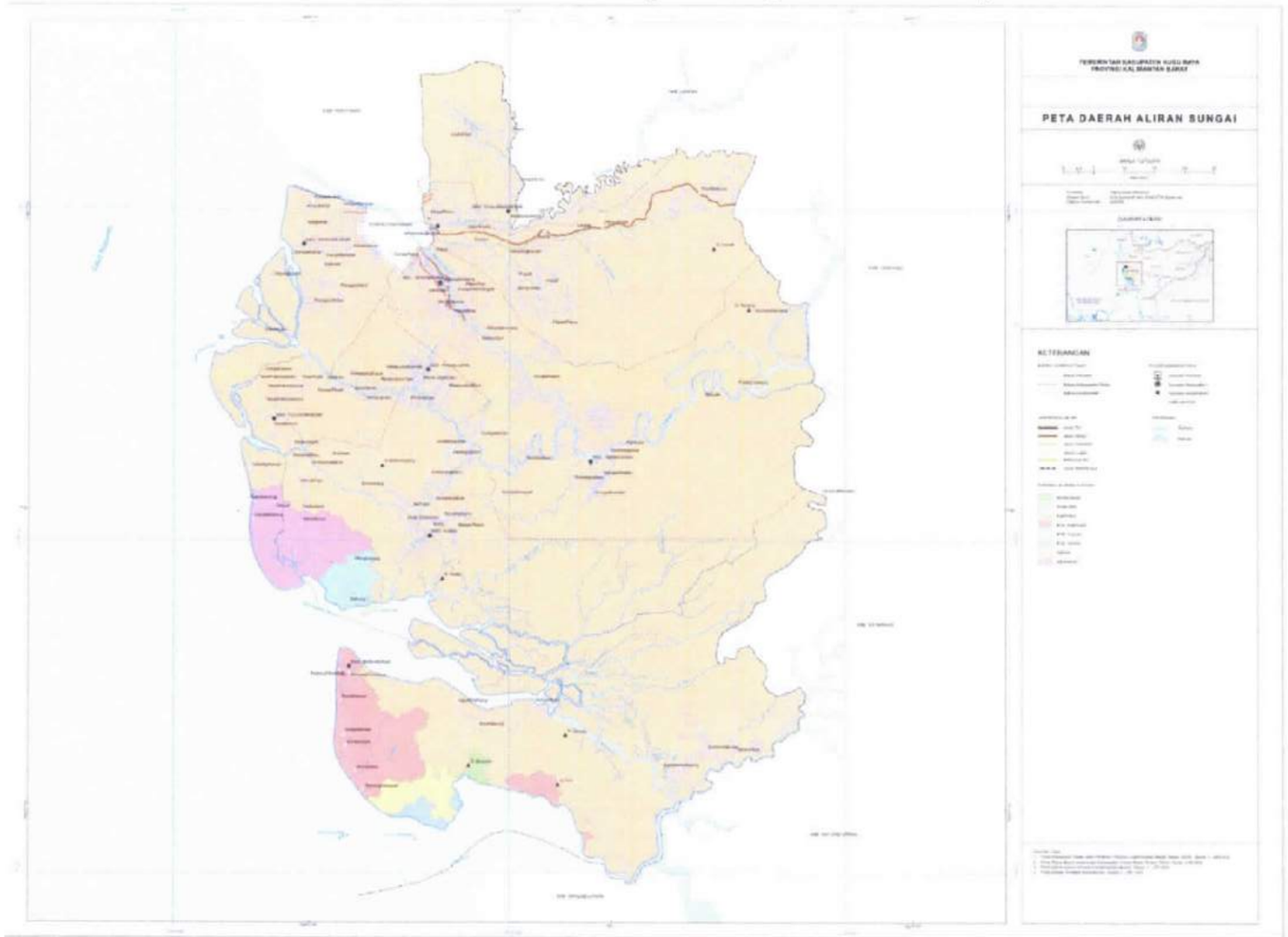
Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa Kabupaten bahkan beberapa provinsi.

Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Peta Daerah Aliran Sungai kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya

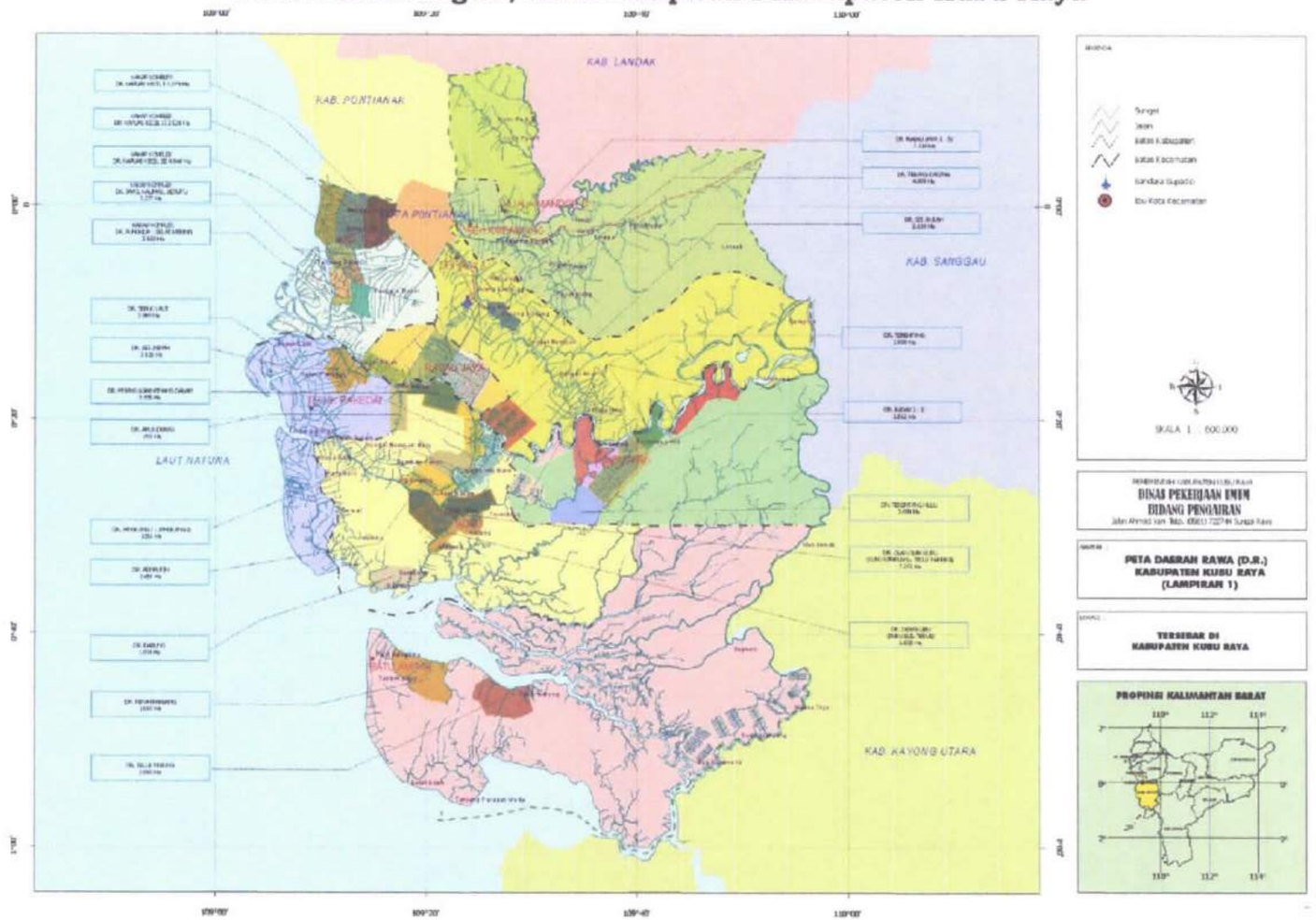


Sedangkan Daerah Rawa terdiri dari:

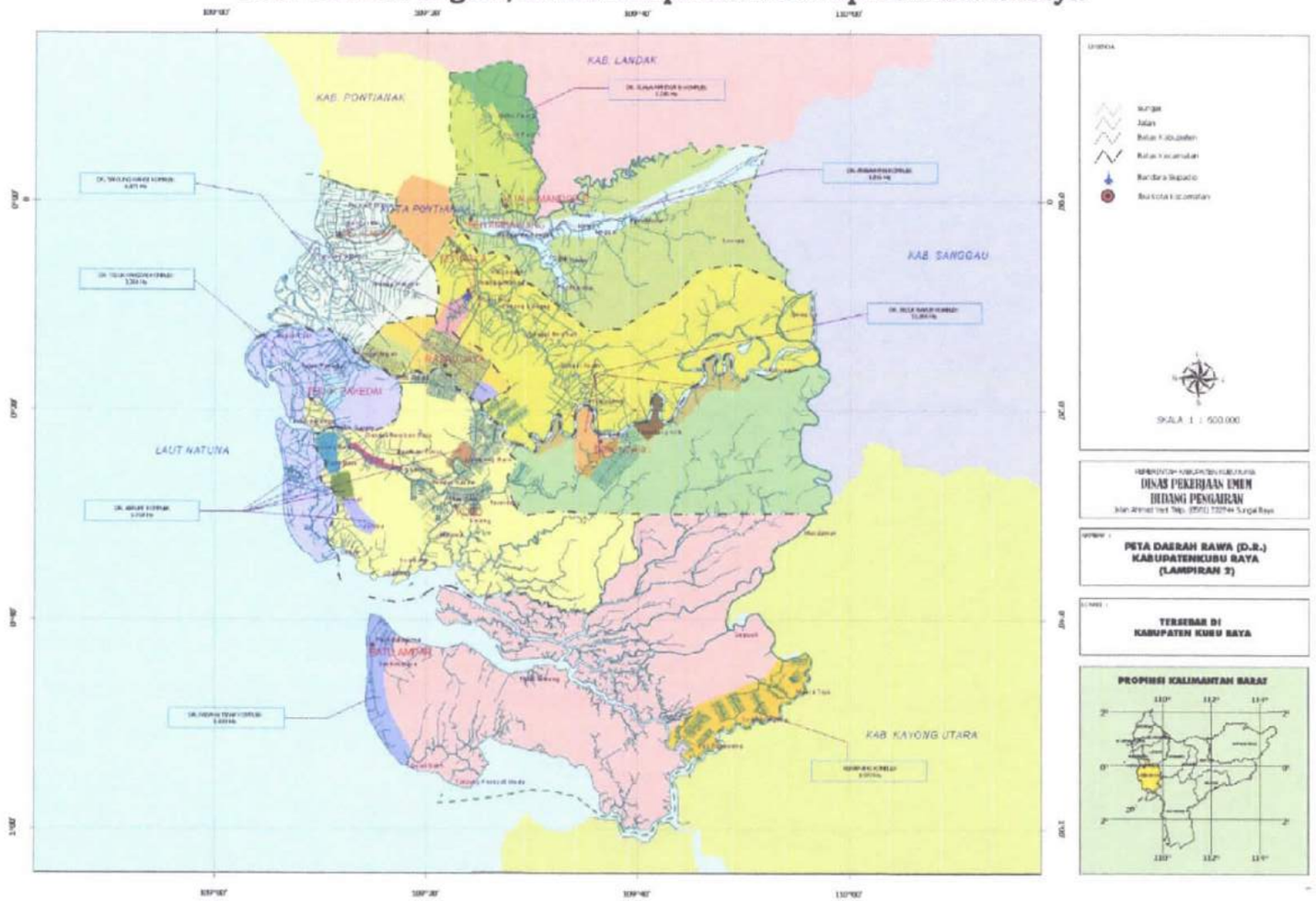
1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas – Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III ,IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR.Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl.Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;
3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.4 sebagai berikut :

Gambar 2.4
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya



Gambar 2.5
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.2 Klimatologi

Iklim di Kubu Raya termasuk dalam type Iklim A (Schmit & Ferguson) yaitu iklim sangat basah dengan curah hujan bulanan diatas 100 mm dengan total curah hujan Tahunan rata-rata berkisar 3000 mm. Suhu rata-rata maksimum 33,4^{0} C terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum rata-rata 22,5^{0}C terjadi pada bulan Agustus. Kondisi topografi dan iklim di Kubu Raya sangan menunjang untuk invenstasi agrikultur.

Adapun keadaan angin di wilayah Kabupaten Kubu Raya kecepatan angin rata-rata tercatat sebesar 2 knot dan kecepatan maksimum terjadi pada bulan Juni yakni sebesar 45 knot. Temperatur dan Kelembaban Udara di suatu daerah antara lain dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dan iklim daerah tersebut. Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu wilayah Indonesia yang beriklim tropis salah satu cirinya adalah mempunyai temperatur udara yang tinggi atau panas. Apalagi letak Kabupaten Kubu Raya yang sangat dekat dengan garis Khatulistiwa sehingga temperatur udaranya lebih panas. Pada Tahun 2013, temperatur udara rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio Kubu Raya berkisar 26,4°C sampai dengan 27,8° C. Suhu terendah tercatat pada bulan Pebruari yang tercatat sebesar 26,4° C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu sebesar 27,7° C. Pada Tahun 2014, rata-rata kelembaban nisbi tercatat sekitar 85 persen. Lebih rendah apabila kita bandingkan dengan Tahun sebelumnya. Adapun kelembabannisbi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 88 persen dan kelembaban udara terendah tercatat pada bulan Agustus dan bulan September yaitu sebesar 82 persen.

2.1.1.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil klasifikasi penutupan lahan di Kabupaten Kubu Raya dapat diidentifikasi sebanyak 19 kelas penutupan lahan (Tidak terdapat penutupan lahan yang berupa kelas awan dan kelas savanna/padang rumput) dengan persentase terbesar adalah kelas Hutan Rawa Sekunder yaitu seluas 248.813,08 Ha atau 28,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Persentase areal berhutan di Kabupaten Kubu Raya sebenarnya masih relatif besar jika dibandingkan dengan kelas penutupan lain, yaitu seluas 389.788,24 Ha atau sekitar 44,67 % dari luas Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 5.718,81 Ha (0,66%), Hutan

Mangrove Primer seluas 34,25 Ha (0,00%), Hutan Mangrove Sekunder seluas 118.956,04 Ha (13,63%), Hutan Rawa Primer seluas 12.203,23 Ha (1,40%), Hutan Rawa Sekunder seluas 248.813,08 Ha (28,51%) dan Hutan Tanaman seluas 4.062,81 Ha (0,47%) sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

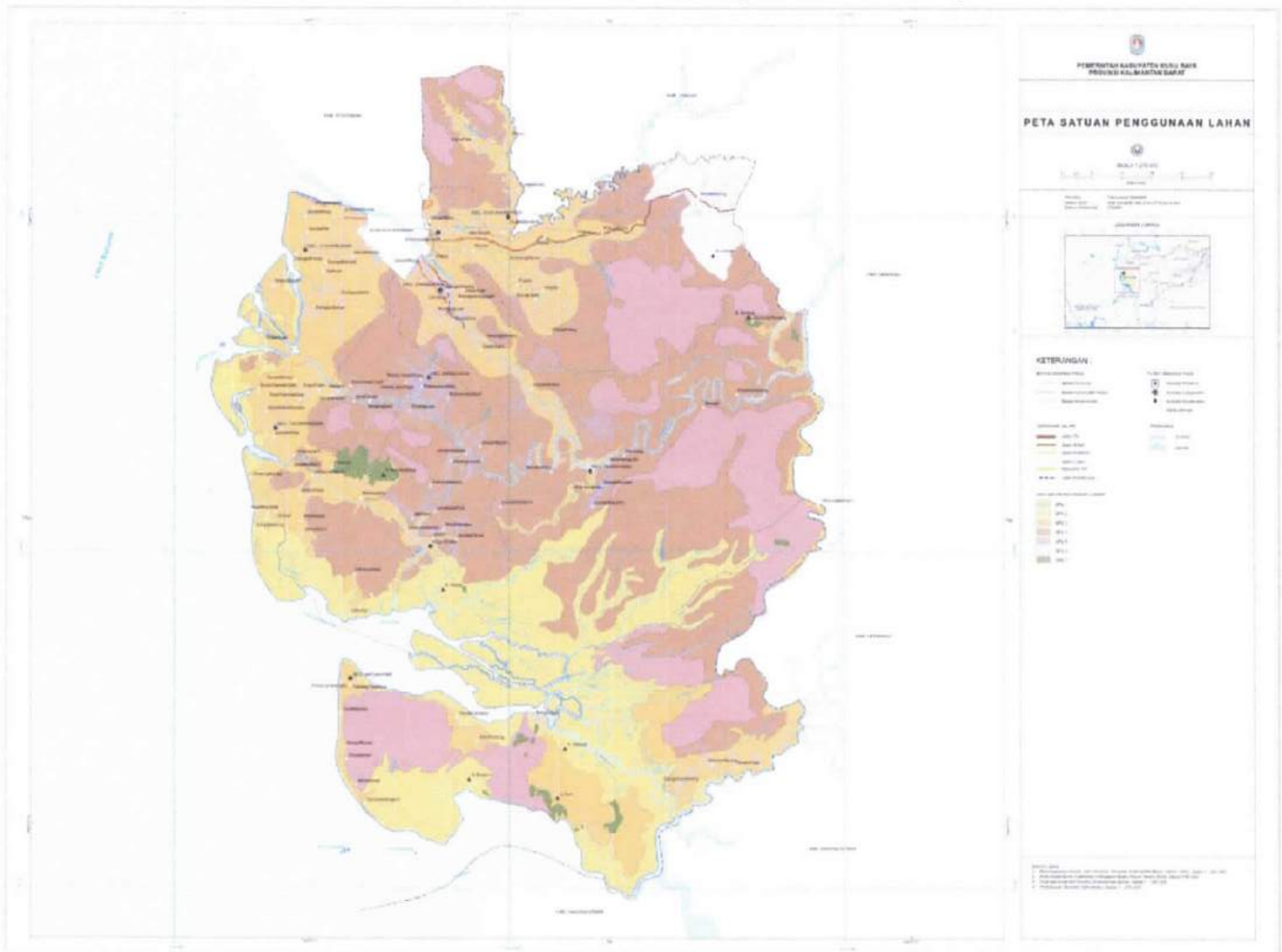
Tabel 2.2
Persentase Luas Areal Berhutan Kabupaten Kubu Raya

NO	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.718,81	0,66
2	Hutan Mangrove Primer	34.25	0,00
3	Hutan Mangrove Sekunder	118.956,04	13,63
4	Hutan Rawa Primer	12.203,23	1,40
5	Hutan Rawa Sekunder	248.813,08	28,51
6	Hutan Tanaman	4.062,81	0,47
7	Non Hutan	482.796,82	55,63
	Jumlah	**872.585,06**	**100**

Sumber : Penataan dan Pengelolaan Data Tematik Spasial KKR 2014 Bappeda Kabupaten Kubu Raya

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.6 berikut :

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya

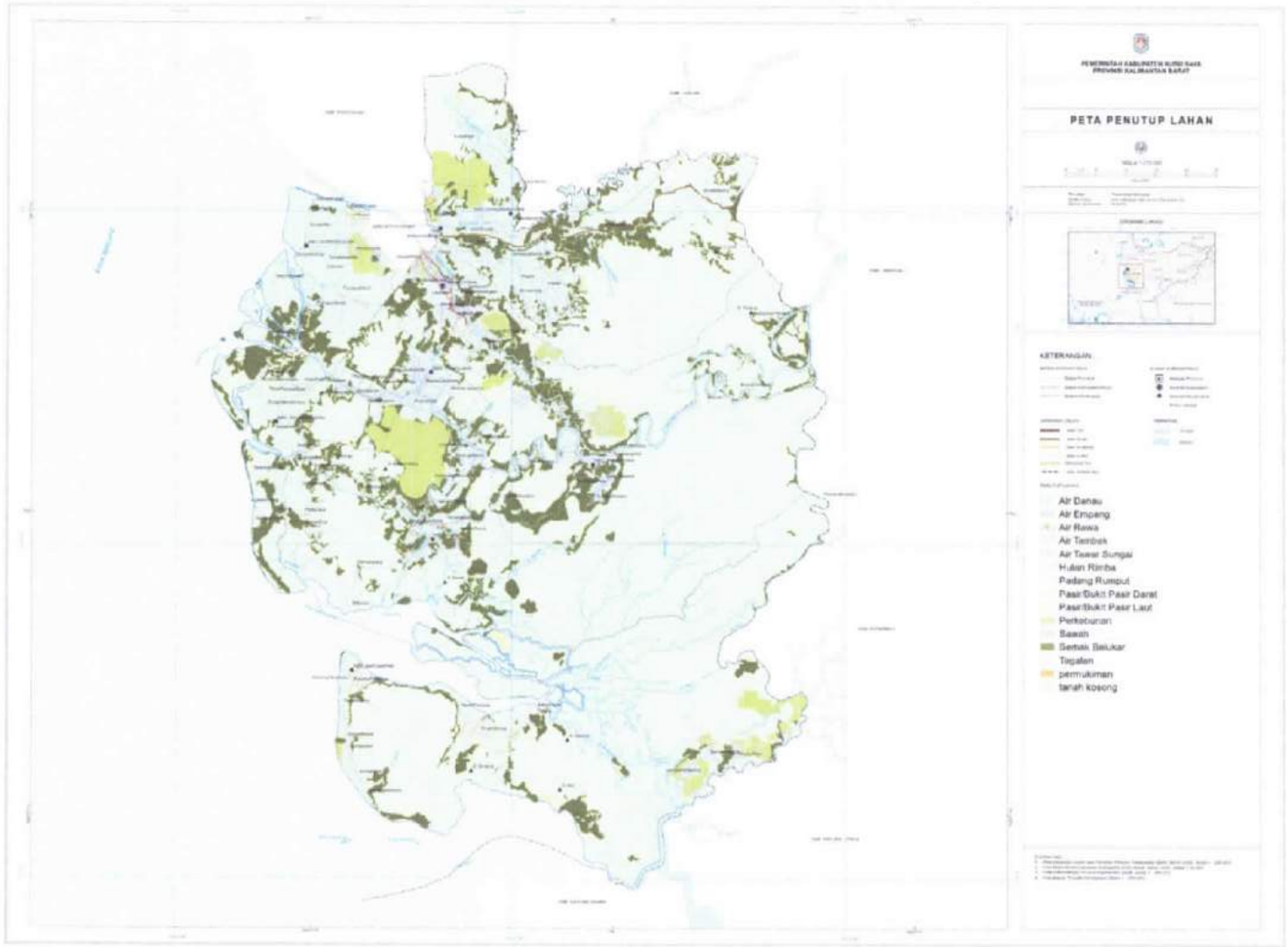


Sebaran areal berhutan di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdapat di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai (Hutan Lahan Kering Sekunder), Kecamatan Batu Ampar (Hutan Mangrove Primer), Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang (Hutan Mangrove Sekunder), Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Terentang (Hutan Rawa Primer dan Sekunder), Kecamatan Batu ampar dan Sungai Ambawang (Hutan Tanaman). Selain lokasi-lokasi tersebut masih banyak terdapat lokasi-lokasi tertentu yang masih memiliki potensi kayu namun tidak dalam area yang luas dan sebagian besar merupakan daerah perbukitan.

Persentase lahan-lahan tidak produktif di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil penafsiran citra SPOT 4 mencapai 228.628,84 Ha atau sekitar 26,20% dari luas Kabupaten, yang antara lain berupa Semak Belukar seluas 4.755,53 Ha (0,54%), Semak Belukar Rawa seluas 97.448,68 Ha (11,17%), Lahan Terbuka seluas 53.269,81 Ha (6,10%)dan Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas 73.154,82 Ha (8,38%). Sebagian besar lahan-lahan tidak produktif tersebut berada di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Terentang.

Peta penutupan lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.7 berikut:

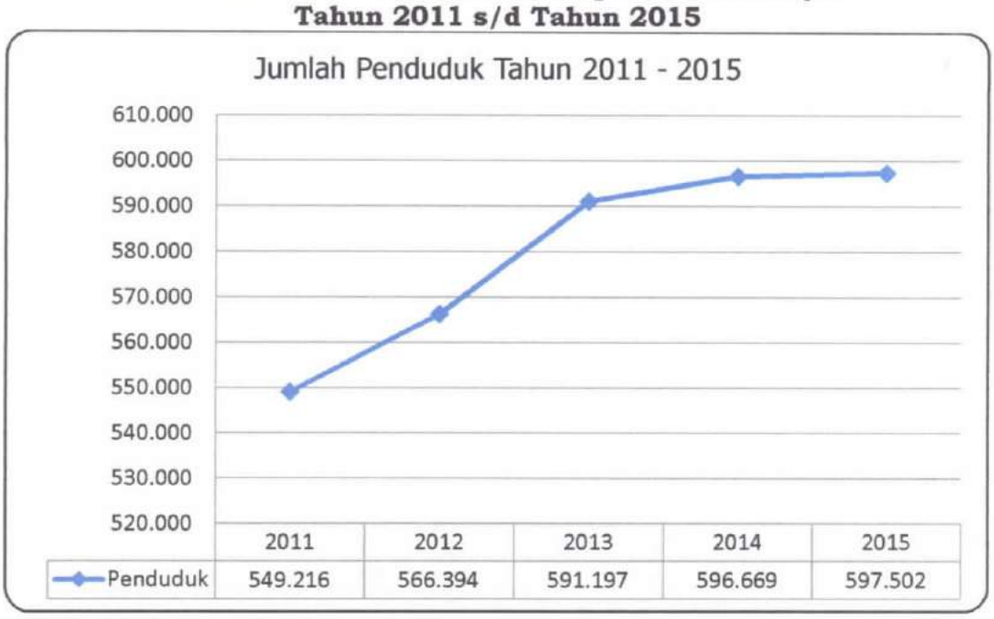
Gambar 2.7
Peta Penutupan Lahan Kabupaten Kubu Raya



2.1.2 Aspek Demografi

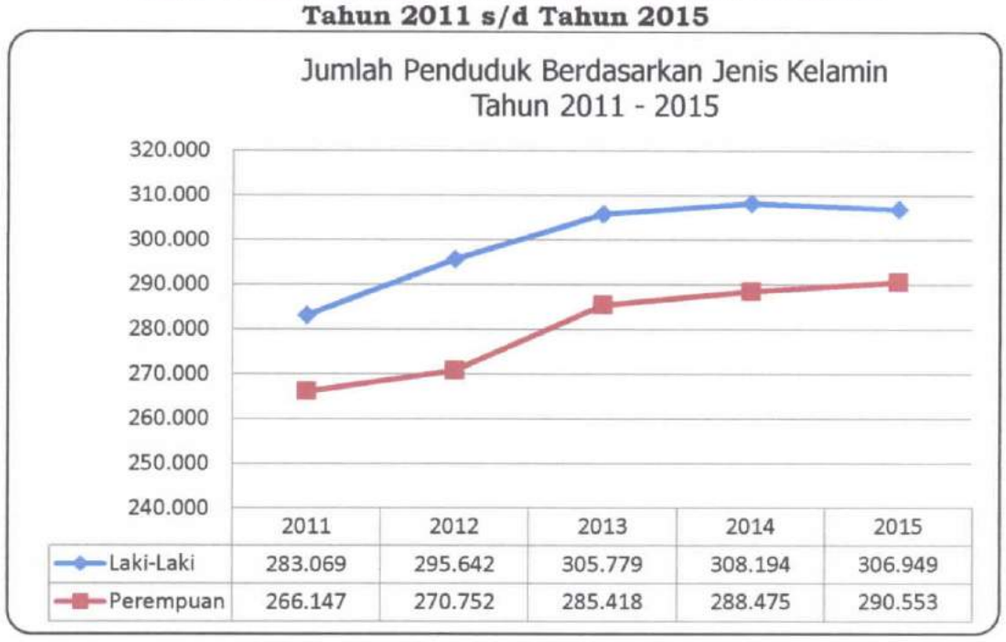
Perubahan jumlah penduduk disebabkan kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar dibawah:

Gambar 2.8
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

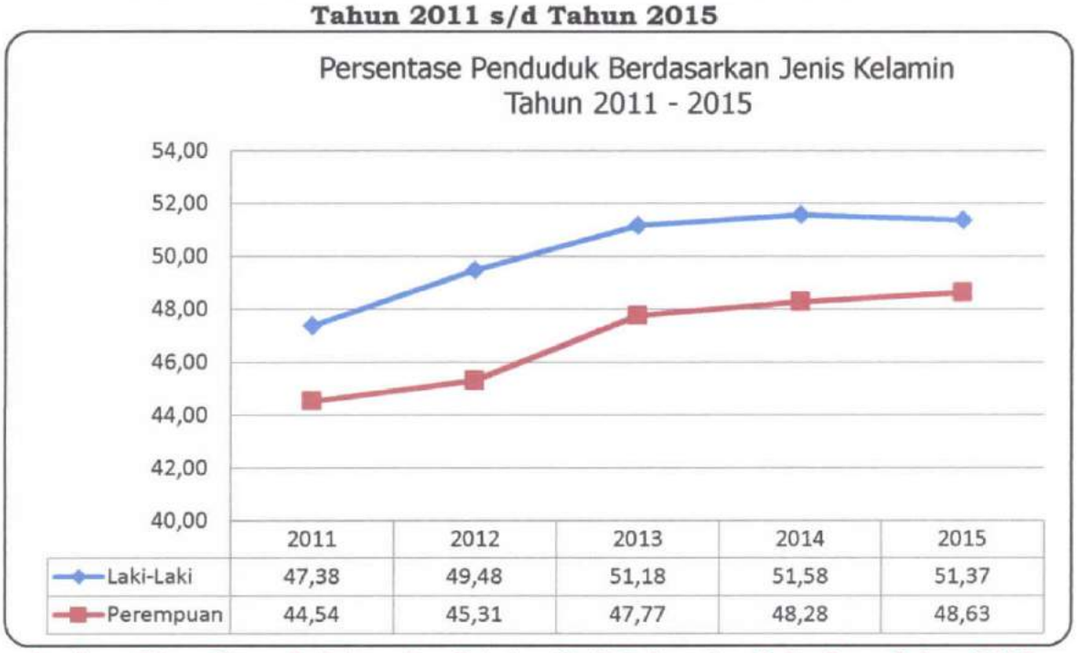
Gambar 2.9
Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-Laki	283.069	295.642	305.779	308.194	306.949
Perempuan	266.147	270.752	285.418	288.475	290.553

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Gambar 2.10
Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 s/d Tahun 2015



	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-Laki	47,38	49,48	51,18	51,58	51,37
Perempuan	44,54	45,31	47,77	48,28	48,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari Gambar diatas bahwajumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 tercatat sebanyak 549.216 jiwa. Pada Tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2011 sebanyak 17.178 Jiwa atau 3,03% yaitu dari 549.216 jiwa menjadi 566.394 Jiwa. Tahun 2013 masih terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 24.803 jiwa atau 4,20% jumlah

penduduk menjadi 591,197 jiwa. Di Tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya tercatat sebanyak 596.669 jiwa atau naik sebanyak 5.472 jiwa atau 0,92% dari jumlah penduduk Tahun 2013. Dari 597.502 jiwa pada Tahun 2015, sebanyak 306.949 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 290.553 yang berjenis kelamin perempuan, dan Kecamatan Sungai Raya memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 227.714 atau sebesar 37,98% jiwa sedangkan yang terendah di Kecamatan Terentang sebanyak 13.135 jiwa atau sebesar 2,20%. Untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarakan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	(%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Batu Ampar	18.878	17.594	36.472	6,01
2	Terentang	6.864	6.271	13.135	2,20
3	Kubu	21.776	20.679	42.455	7,11
4	Teluk Pakedai	10.400	9.777	20.177	3,57
5	Sungai Kakap	62.273	59.120	121.393	20,32
6	Rasau Jaya	15.728	14.606	30.334	4,92
7	Sungai Raya	116.561	111.153	227.714	37,98
8	Sungai Ambawang	39.692	37.105	76.797	12,73
9	Kuala Mandor B	14.777	14.248	29.025	5,23
Jumlah		**306.949**	**290.553**	**597.502**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia Tahun 2015 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Agregat Kependudukan Kab. Kubu Raya Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA KECAMATAN	USIA															JUMLAH
		0-4 Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI RAYA	12.538	21.257	22.692	21.566	20.854	21.355	21.368	19.209	16.726	14.483	11.155	8.365	5.860	4.071	3.028	3.187	**227.714**
2	KUALA MANDOR B	1.067	2.658	3.594	3.798	3.032	2.763	2.563	2.064	1.743	1.532	1.235	987	684	573	387	345	**29.025**
3	SUNGAI AMBAWANG	3.403	7.617	7.968	8.173	7.698	7.453	7.303	6.058	5.102	4.244	3.504	2.908	1.945	1.431	931	1.059	**76.797**
4	TERENTANG	631	1.461	1.486	1.250	1.037	1.146	1.224	1.044	943	762	621	523	378	244	167	218	**13.135**
5	BATU AMPAR	1.369	3.498	4.050	3.809	3.413	3.101	3.327	2.941	2.511	2.193	1.811	1.501	1.053	821	531	543	**36.472**
6	KUBU	1.760	4.126	4.648	4.244	3.851	3.606	3.619	3.351	3.071	2.564	2.143	1.722	1.254	999	619	878	**42.455**
7	RASAU JAYA	1.345	2.816	2.902	2.766	2.570	2.475	2.798	2.611	2.497	2.080	1.740	1.235	783	580	480	656	**30.334**
8	TELUK PAKEDAI	827	2.126	2.300	2.083	1.680	1.667	1.670	1.529	1.415	1.168	1.087	862	605	509	317	332	**20.177**
9	SUNGAI KAKAP	4.832	11.738	12.116	11.313	10.532	11.007	11.401	10.238	8.868	7.398	6.347	5.325	3.654	2.757	1.926	1.941	**121.393**
JUMLAH		**27.772**	**57.297**	**61.756**	**59.002**	**54.667**	**54.573**	**55.273**	**49.045**	**42.876**	**36.424**	**29.643**	**23.428**	**16.216**	**11.985**	**8.386**	**9.159**	**597.502**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 597.502 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Kecamatan Sungai Raya yaitu tercatat sebanyak 227.714 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 22.692 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 3.187 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk terendah berada di Kecamatan Terentang yaitu tercatat sebanyak 13.135 jiwa dimana jumlah penduduknya tertinggi berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 1,486 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 167 jiwa.

Tabel 2.5
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI RAYA	1.077	1.752	1.798	1.578	1.681	1.935	1.937	1.894	1.420	1.243	927	764	641	451	362	328	19.788
2	SUNGAI AMBANGAH	310	564	516	503	572	571	561	439	343	343	264	258	177	122	82	93	5.718
3	ARANG LIMBUNG	1.453	2.318	2.460	2.213	2.144	2.075	2.172	2.088	1.981	1.683	1.305	865	581	343	276	313	24.270
4	KUALA DUA	1.554	2.714	2.993	2.932	2.726	2.445	2.427	2.434	2.497	2.082	1.289	845	554	379	293	308	28.472
5	TEBANG KACANG	241	497	548	529	468	510	501	410	337	304	246	203	134	97	79	69	5.173
6	SUNGAI ASAM	603	1.440	1.749	1.913	1.509	1.457	1.357	1.125	876	763	635	519	352	254	197	238	14.987
7	PULAU LIMBUNG	93	271	290	239	202	216	227	232	173	127	132	94	69	65	23	25	2.478
8	KAPUR	721	1.155	1.089	1.004	1.017	1.116	1.131	896	727	712	508	315	226	173	123	140	11.053
9	GUNUNG TAMANG	51	159	162	176	112	171	146	109	92	92	93	75	62	29	23	20	1.572
10	SUNGAI BULAN	211	343	321	308	268	318	264	266	278	208	180	142	110	97	47	54	3.415
11	LIMBUNG	1.002	1.566	1.773	1.499	1.392	1.539	1.577	1.439	1.325	1.049	848	595	407	234	191	219	16.655
12	TELUK KAPUAS	763	1.245	1.393	1.191	1.241	1.314	1.376	1.282	1.057	917	718	591	394	251	189	170	14.092
13	MADU SARI	256	402	376	445	434	393	372	297	250	219	137	114	93	67	44	70	3.969
14	MEKAR SARI	664	1.200	1.324	1.380	1.337	1.281	1.286	1.010	820	644	430	366	252	205	160	203	12.562
15	MEKAR BARU	317	532	530	465	512	516	499	462	376	292	244	174	143	87	70	76	5.295
16	SUNGAIRAYA DALAM	1.165	1.902	1.986	1.883	1.824	1.795	1.850	1.748	1.649	1.560	1.215	774	465	365	276	238	20.695
17	PARIT BARU	1.874	2.806	2.914	2.879	3.084	3.298	3.305	2.788	2.312	2.012	1.766	1.540	1.115	780	523	566	33.562
18	PULAU JAMBU	42	75	97	73	74	87	93	52	44	47	41	26	18	8	5	6	788
19	KALIBANDUNG	86	207	259	237	169	198	178	154	105	107	101	68	37	46	50	41	2.043
20	MUARA BARU	55	109	114	119	88	120	109	84	64	79	76	37	30	18	15	10	1.127
JUMLAH		**12.538**	**21.257**	**22.692**	**21.566**	**20.854**	**21.355**	**21.368**	**19.209**	**16.726**	**14.483**	**11.155**	**8.365**	**5.860**	**4.071**	**3.028**	**3.187**	**227.714**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Raya berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 227.714 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Parit Baru yaitu tercatat sebanyak 33.562 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 3.305 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 523 jiwa. Sedangkan untuk Desa yang memiliki penduduk terendah berada di Desa Pulau Jambu yaitu tercatat sebanyak 788 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 97 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 5 jiwa.

Tabel 2.6
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kuala Mandor B Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9 Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	KUALA MANDOR B	250	519	622	642	556	503	551	431	351	268	222	187	149	129	88	63	5.531
2	KUBU PADI	202	585	939	989	663	525	513	395	342	271	226	184	126	100	70	53	6.183
3	KUALA MANDOR A	218	611	837	920	723	724	619	486	432	361	319	233	151	142	99	95	6.970
4	RETOK	177	370	503	525	365	340	328	308	244	250	181	153	108	89	67	49	4.057
5	SUNGAI ENAU	220	573	693	722	725	671	552	444	374	382	287	230	150	113	63	85	6.284
JUMLAH		**1.067**	**2.658**	**3.594**	**3.798**	**3.032**	**2.763**	**2.563**	**2.064**	**1.743**	**1.532**	**1.235**	**987**	**684**	**573**	**387**	**345**	**29.025**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kuala Mandor Bberdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 29.025 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Kuala Mandor A yaitu tercatat sebanyak 6.970 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 15-19 yaitu sebanyak 920 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 95 jiwa. Sedangkan untuk Desa yang memiliki penduduk terendah

berada di Desa Retok yaitu tercatat sebanyak 4.057 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 525 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 49 jiwa.

Tabel 2.7
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74 Thn	
1	SIMPANG KANAN	207	532	701	751	596	547	567	447	360	313	227	224	132	149	74	117	5.944
2	MEGA TIMUR	420	894	902	755	737	804	840	749	628	497	466	333	226	157	109	124	8.641
3	BENGKAREK	108	325	353	383	403	331	322	236	209	192	173	135	96	74	45	47	3.432
4	LINGGA	253	583	514	598	627	622	571	483	383	312	314	266	189	154	102	131	6.102
5	SUNGAI AMBAWANG KUALA	683	1.441	1.343	1.292	1.190	1.169	1.283	1.153	1.013	779	565	444	270	201	149	135	13.110
6	JAWATENGAH	331	501	437	411	415	412	481	384	305	222	219	172	132	68	64	74	4.628
7	DURIAN	281	590	583	622	565	576	573	457	405	310	248	207	147	94	72	103	5.833
8	PANCA ROBA	156	378	369	450	408	408	424	321	225	233	206	192	155	64	53	51	4.093
9	PUGUK	122	402	562	599	586	437	434	310	283	258	172	160	91	83	53	37	4.589
10	KOREK	222	475	528	568	559	504	489	411	365	308	265	195	157	111	65	92	5.314
11	PASAK	154	412	505	604	523	449	362	291	247	275	194	186	111	110	43	45	4.511
12	PASAK PIANG	104	256	362	337	379	295	232	206	171	147	140	136	79	53	23	27	2.947
13	TELUK BAKUNG	212	510	517	479	420	567	430	363	325	227	192	166	100	80	56	52	4.696
14	SUNGAI MALAYA	150	318	292	324	290	332	295	247	183	171	123	92	60	33	23	24	2.957
JUMLAH		**3.403**	**7.617**	**7.968**	**8.173**	**7.698**	**7.453**	**7.303**	**6.058**	**5.102**	**4.244**	**3.504**	**2.908**	**1.945**	**1.431**	**931**	**1.059**	**76.797**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 76.797 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Sungai Ambawang Kuala

yaitu tercatat sebanyak 13.110 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 yaitu sebanyak 1.441 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 135 jiwa. Sedangkan untuk Desa yang memiliki penduduk terendah berada di Desa Pasak Piang yaitu tercatat sebanyak 2.947 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 20-24 yaitu sebanyak 379 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 23 jiwa.

Tabel 2.8
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4 Thn	5-9 Thn	10-14 Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TELUK BAYUR	64	156	157	143	113	153	137	130	107	87	65	62	42	30	29	33	1.508
2	TELUK EMPENING	54	141	160	119	92	114	102	101	79	67	33	50	33	24	11	24	1.204
3	TERENTANG HILIR	28	45	52	53	56	44	50	37	30	28	27	23	17	12	8	10	520
4	TERENTANG HULU	87	180	177	154	136	132	155	127	126	94	70	63	31	26	23	23	1.604
5	PERMATA	72	196	176	119	91	122	146	122	98	86	53	38	30	16	4	18	1.387
6	BETUAH	22	82	89	72	77	87	93	63	63	40	54	26	27	11	4	15	825
7	SUNGAI RADAK SATU	95	178	179	162	141	159	165	138	111	106	89	79	61	41	40	37	1.781
8	SUNGAI RADAK DUA	170	390	393	311	257	246	297	285	279	205	176	148	110	61	40	43	3.411
9	SUNGAI DUNGUN	39	93	103	117	74	89	79	41	50	49	54	34	27	23	8	15	895
JUMLAH		**631**	**1.461**	**1.486**	**1.250**	**1.037**	**1.146**	**1.224**	**1.044**	**943**	**762**	**621**	**523**	**378**	**244**	**167**	**218**	**13.135**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Terentang berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 13.135 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Sungai Radak Dua yaitu tercatat sebanyak 3.411 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 393 jiwa dan paling

terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 40 jiwa. Sedangkan untuk Desa yang memiliki penduduk terendah berada di Terentang Hilir yaitu tercatat sebanyak 520 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 20-24 yaitu sebanyak 56 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 8 jiwa.

Tabel 2.9
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TANJUNG BERINGIN	21	56	85	67	60	69	64	58	41	42	26	29	17	9	9	8	**661**
2	BATU AMPAR	329	926	1.024	957	925	878	849	773	671	560	456	343	264	189	103	114	**9.361**
3	TELUK NIBUNG	163	345	382	402	358	341	383	354	295	240	197	199	136	115	74	95	**4.079**
4	PADANG TIKAR SATU	180	403	507	473	425	270	360	315	328	278	227	189	121	82	53	65	**4.276**
5	PADANG TIKAR DUA	177	481	534	500	399	385	436	380	294	297	245	195	123	102	63	71	**4.682**
6	TASIK MALAYA	61	106	149	147	118	106	112	90	95	66	53	32	37	24	16	20	**1.232**
7	SUNGAI BESAR	37	92	136	121	101	75	91	87	73	76	44	39	28	23	10	9	**1.042**
8	SUNGAI JAWI	30	99	82	112	100	96	68	68	51	40	56	33	21	20	18	17	**911**
9	NIPAH PANJANG	75	253	305	276	289	224	235	212	219	196	143	124	59	70	45	33	**2.758**
10	AMBARAWA	39	113	117	118	101	69	83	87	83	80	44	55	33	29	28	22	**1.101**
11	TANJUNG HARAPAN	40	159	176	130	114	129	137	102	73	78	47	42	27	21	6	13	**1.294**
12	SUNGAI KRAWANG	73	131	176	136	110	133	162	120	83	79	85	59	63	36	35	24	**1.505**
13	SUMBER AGUNG	54	104	116	105	97	103	111	94	70	56	57	61	55	32	32	16	**1.163**
14	MUARA TIGA	44	142	149	154	133	147	133	118	74	62	84	62	51	39	25	25	**1.442**
15	MEDAN MAS	46	88	112	111	83	76	103	83	61	43	47	39	18	30	14	11	**965**
JUMLAH		**1.369**	**3.498**	**4.050**	**3.809**	**3.413**	**3.101**	**3.327**	**2.941**	**2.511**	**2.193**	**1.811**	**1.501**	**1.053**	**821**	**531**	**543**	**36.472**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Batu Ampar berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 36.472 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Batu Ampar yaitu tercatat sebanyak 9.361 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 1.024 jiwa dan paling

terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 103 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk terendah berada di Desa Tanjung Beringin yaitu tercatat sebanyak 661 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 85 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia > 74 yaitu sebanyak 8 jiwa.

Tabel 2.10
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4 Thn	5-9 Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	KUBU	249	569	674	610	535	447	497	489	424	346	272	247	200	146	79	122	**5.906**
2	OLAK OLAK KUBU	171	354	500	435	381	295	311	350	363	263	236	209	124	94	63	108	**4.257**
3	SUNGAI SELAMAT	13	56	63	63	60	65	45	52	30	36	30	31	18	9	12	9	**592**
4	SUNGAI BEMBAN	78	308	309	287	237	238	240	222	223	165	144	120	89	77	48	54	**2.839**
5	PINANG LUAR	108	244	223	180	197	177	191	195	158	197	119	86	67	57	32	56	**2.287**
6	SERUAT DUA	42	124	195	210	168	150	104	102	95	103	103	86	39	35	32	27	**1.615**
7	SERUAT TIGA	62	164	231	232	193	176	145	105	102	69	92	73	42	33	28	29	**1.776**
8	DABONG	107	304	312	229	224	169	214	200	217	155	118	91	67	53	18	45	**2.523**
9	AMBAWANG	140	282	288	282	263	308	260	213	197	172	113	110	74	48	38	60	**2.848**
10	SEPAKAT BARU	17	52	63	64	54	47	50	30	28	36	43	9	15	13	8	11	**540**
11	BARU	106	274	298	247	214	236	268	220	139	141	120	98	74	47	24	33	**2.539**
12	AIR PUTIH	128	272	288	295	277	230	259	238	237	175	143	104	83	58	55	53	**2.895**
13	TELUK NANGKA	179	350	353	306	287	294	304	278	277	204	192	136	94	141	64	93	**3.552**
14	JANGKANG SATU	90	144	111	116	136	131	137	132	113	82	64	57	71	33	17	37	**1.471**
15	JANGKANG DUA	88	150	171	134	146	164	146	117	96	102	90	58	50	40	21	32	**1.605**
16	PINANG DALAM	59	138	141	149	121	111	129	130	100	93	65	54	38	30	18	39	**1.415**
17	SUNGAI TERUS	45	118	137	128	93	96	89	94	90	73	58	39	47	31	22	31	**1.191**
18	PELITA JAYA	39	83	91	103	94	98	80	60	69	56	59	32	17	17	10	7	**915**
19	MENGKALANG	27	100	149	121	120	131	99	89	82	67	57	52	35	23	26	23	**1.201**
20	MENGKALANG JAMBU	12	40	51	53	51	43	51	35	31	29	25	30	10	14	4	9	**488**
JUMLAH		**1.760**	**4.126**	**4.648**	**4.244**	**3.851**	**3.606**	**3.619**	**3.351**	**3.071**	**2.564**	**2.143**	**1.722**	**1.254**	**999**	**619**	**878**	**42.455**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.10 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kubu berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 42.455 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Kubu yaitu tercatat sebanyak 5.906 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 674 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 79 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk terendah berada di Desa Mengkalang Jambu yaitu tercatat sebanyak 488 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 53 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 4 jiwa.

Tabel 2.11
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															JMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74 Thn	
1	RASAU JAYA UMUM	284	651	651	620	507	534	597	476	426	345	296	213	144	105	82	98	**6.029**
2	RASAU JAYA SATU	412	879	970	903	874	835	969	909	905	800	687	475	275	181	124	182	**10.380**
3	RASAU JAYA DUA	238	477	475	480	439	391	396	425	411	341	257	189	108	111	109	177	**5.024**
4	RASAU JAYA TIGA	246	528	521	477	467	484	555	551	484	414	309	209	158	106	104	125	**5.738**
5	BINTANG MAS	63	131	117	146	136	98	141	110	160	91	93	66	45	46	36	38	**1.517**
6	PEMATANG TUJUH	102	150	168	140	147	133	140	140	111	89	98	83	53	31	25	36	**1.646**
JUMLAH		**1.345**	**2.816**	**2.902**	**2.766**	**2.570**	**2.475**	**2.798**	**2.611**	**2.497**	**2.080**	**1.740**	**1.235**	**783**	**580**	**480**	**656**	**30.334**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.11 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Rasau Jayaberdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 30.334 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Rasau Jaya Satu yaitu tercatat sebanyak 10.380 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 970 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 124 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk terendah

berada di Desa Bintang Mas yaitu tercatat sebanyak 1.517 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 146 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 36 jiwa.

Tabel 2.12
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24 Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54 Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69 Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TELUK PAKEDAI HULU	82	227	256	225	174	156	181	180	161	141	131	113	93	76	54	60	**2.310**
2	TELUK PAKEDAI SATU	24	126	118	126	92	83	104	84	92	84	77	63	43	41	28	33	**1.218**
3	TELUK PAKEDAI DUA	49	93	101	114	104	87	78	67	88	65	80	58	54	31	24	25	**1.118**
4	KUALA KARANG	74	193	203	179	128	147	133	132	91	98	99	67	39	32	27	23	**1.665**
5	SERUAT	8	18	34	26	17	20	30	24	24	12	18	18	12	6	5	5	**277**
6	SUNGAI DERAS	178	372	348	369	337	366	354	269	253	172	155	139	74	58	34	52	**3.530**
7	SELAT REMIS	122	338	385	280	210	193	208	237	238	183	175	110	107	94	61	47	**2.988**
8	MADURA	23	85	116	93	72	57	58	59	46	38	33	34	14	23	5	3	**759**
9	PASIR PUTIH	45	89	108	87	58	69	58	76	57	50	40	36	26	26	10	12	**847**
10	TELUK GELAM	46	95	105	79	59	50	58	46	34	41	39	22	11	12	6	1	**704**
11	TANJUNG BUNGA	39	151	164	175	154	174	129	117	114	86	81	79	54	42	16	23	**1.598**
12	SUNGAI NIBUNG	58	149	149	124	113	111	108	99	84	77	61	45	35	27	22	20	**1.282**
13	ARUS DERAS	47	102	91	74	54	64	74	65	66	54	42	34	16	25	10	18	**836**
14	SUNGAI NIPAH	32	88	122	132	108	90	97	74	67	67	56	44	27	16	15	10	**1.045**
JUMLAH		**827**	**2.126**	**2.300**	**2.083**	**1.680**	**1.667**	**1.670**	**1.529**	**1.415**	**1.168**	**1.087**	**862**	**605**	**509**	**317**	**332**	**20.177**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.12 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Pakedai berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 20.177 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Sungai Deras yaitu tercatat sebanyak 3.530 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 yaitu sebanyak 372 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 34 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk terendah berada di

Desa Seruat yaitu tercatat sebanyak 277 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 34 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 dan > 74 yaitu sebanyak 5 jiwa.

Tabel 2.13
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI KAKAP	601	1.378	1.386	1.311	1.190	1.224	1.234	1.107	920	808	694	562	372	285	199	214	13.485
2	SUNGAI ITIK	216	501	538	480	382	426	507	437	383	280	239	185	186	139	84	96	5.079
3	JERUJU BESAR	298	696	661	575	401	382	443	415	420	330	300	242	146	98	79	38	5.524
4	SUNGAI KUPAH	145	370	406	364	313	283	323	282	246	196	173	137	122	74	64	43	3.541
5	SUNGAI RENGAS	957	2.123	2.226	2.003	2.055	2.024	2.148	1.886	1.712	1.467	1.209	898	630	482	351	349	22.520
6	PAL SEMBILAN	968	2.493	2.548	2.229	2.380	2.776	2.874	2.561	2.323	1.997	1.729	1.612	940	677	415	498	29.020
7	SUNGAI BELIDAK	141	342	274	256	236	233	329	242	243	186	125	121	75	53	43	48	2.947
8	KALIMAS	361	764	752	732	614	670	702	646	569	407	358	327	198	205	160	185	7.650
9	PUNGGUR KECIL	545	1.363	1.380	1.380	1.293	1.256	1.175	1.121	899	744	591	504	392	280	202	185	13.310
10	PUNGGUR BESAR	219	706	776	812	732	719	694	653	538	392	445	303	281	183	128	125	7.706
11	TANJUNG SALEH	189	488	563	606	478	545	481	461	308	328	230	231	163	185	123	86	5.465
12	SEPUK LAUT	108	274	322	319	255	291	292	232	169	159	145	124	72	61	35	34	2.892
13	PUNGGUR KAPUAS	84	240	284	246	203	178	199	195	138	104	109	79	77	35	43	40	2.254
JUMLAH		**4.832**	**11.738**	**12.116**	**11.313**	**10.532**	**11.007**	**11.401**	**10.238**	**8.868**	**7.398**	**6.347**	**5.325**	**3.654**	**2.757**	**1.926**	**1.941**	**121.393**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.13 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan usia pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 121.393 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak berdasarkan usia berada di Desa Pal Sembilan yaitu tercatat sebanyak 29.020 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 2.874 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 415 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk terendah berada di Desa Punggur Kapuas yaitu tercatat sebanyak 2.254 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 284 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 65-69 yaitu sebanyak 35 jiwa.

Tabel 2.14
Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA KABUPATEN	USIA															JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69 Thn	70-74 Thn	>74 Thn	
1	SUNGAI RAYA	6.504	11.062	11.802	11.108	10.709	10.741	10.663	9.686	8.351	7.417	5.811	4.394	3.129	2.099	1.555	1.530	**116.561**
2	KUALA MANDOR B	538	1.311	1.837	1.899	1.544	1.389	1.329	1.063	904	785	640	521	355	293	191	178	**14.777**
3	SUNGAI AMBAWANG	1.750	3.899	4.116	4.192	3.916	3.727	3.864	3.162	2.734	2.205	1.734	1.531	1.053	793	481	535	**39.692**
4	TERENTANG	332	773	753	639	533	555	614	570	501	422	326	281	194	149	93	129	**6.864**
5	BATU AMPAR	713	1.800	1.987	1.923	1.791	1.633	1.733	1.528	1.309	1.134	928	783	585	426	306	299	**18.878**
6	KUBU	907	2.078	2.377	2.128	1.930	1.898	1.861	1.702	1.585	1.302	1.098	924	641	528	344	473	**21.776**
7	RASAU JAYA	698	1.485	1.497	1.410	1.305	1.298	1.413	1.337	1.281	1.065	910	676	434	305	238	376	**15.728**
8	TELUK PAKEDAI	437	1.120	1.184	1.061	859	850	851	785	743	599	517	461	323	264	173	173	**10.400**
9	SUNGAI KAKAP	2.495	6.142	6.263	5.689	5.346	5.623	5.890	5.321	4.528	3.744	3.160	2.784	1.904	1.440	989	955	**62.273**
JUMLAH		**14.374**	**29.670**	**31.816**	**30.049**	**27.933**	**27.714**	**28.218**	**25.154**	**21.936**	**18.673**	**15.124**	**12.355**	**8.618**	**6.297**	**4.370**	**4.648**	**306.949**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.14 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 306.949 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Raya yaitu sebanyak 116.561 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-

14 yaitu sebanyak 11.802 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 4.648 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Terentang yaitu tercatat sebanyak 6.864 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 5-9 yaitu sebanyak 773 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 93 jiwa.

Tabel 2.15
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI RAYA	553	904	921	843	951	1.021	960	964	731	666	455	388	321	207	186	143	**10.214**
2	SUNGAI AMBANGAH	160	290	280	259	291	288	273	234	175	175	140	126	96	66	36	43	**2.932**
3	ARANG LIMBUNG	747	1.230	1.274	1.118	1.097	1.046	1.069	1.018	973	863	680	464	322	187	143	151	**12.382**
4	KUALA DUA	807	1.394	1.534	1.495	1.330	1.249	1.190	1.153	1.163	1.127	734	474	291	199	160	132	**14.432**
5	TEBANG KACANG	117	260	277	260	240	258	237	217	169	154	126	106	71	49	44	34	**2.619**
6	SUNGAI ASAM	313	750	922	952	779	733	714	557	441	385	315	272	199	128	110	127	**7.697**
7	PULAU LIMBUNG	53	151	145	123	104	104	109	130	92	64	69	57	35	35	14	5	**1.290**
8	KAPUR	364	608	583	518	506	539	551	493	371	347	258	186	126	83	53	66	**5.652**
9	GUNUNG TAMANG	34	79	99	95	66	92	81	56	51	49	54	38	34	18	13	6	**865**
10	SUNGAI BULAN	123	170	167	162	125	157	139	132	139	107	97	70	58	60	29	27	**1.762**
11	LIMBUNG	518	825	943	803	743	767	812	709	695	506	445	326	197	129	87	112	**8.617**
12	TELUK KAPUAS	386	634	724	620	646	675	668	667	530	470	356	302	217	132	102	78	**7.207**
13	MADU SARI	147	206	196	242	212	211	178	153	127	112	68	53	51	35	26	39	**2.056**
14	MEKAR SARI	344	614	673	683	673	645	626	503	435	358	212	183	127	102	76	118	**6.372**
15	MEKAR BARU	162	275	285	236	273	260	264	250	210	136	130	82	86	46	41	33	**2.769**
16	SUNGAIRAYA DALAM	596	1.015	1.044	982	933	843	894	857	790	789	660	408	262	181	140	113	**10.507**
17	PARIT BARU	975	1.449	1.501	1.507	1.590	1.646	1.678	1.439	1.147	1.002	892	786	591	409	255	273	**17.140**
18	PULAU JAMBU	24	46	50	38	24	45	59	29	21	21	21	15	13	3	2	4	**415**
19	KALIBANDUNG	48	103	134	114	82	99	98	87	56	48	57	34	16	23	29	22	**1.050**
20	MUARA BARU	33	59	50	58	44	63	63	38	35	38	42	24	16	7	9	4	**583**
	JUMLAH	**6.504**	**11.062**	**11.802**	**11.108**	**10.709**	**10.741**	**10.663**	**9.686**	**8.351**	**7.417**	**5.811**	**4.394**	**3.129**	**2.099**	**1.555**	**1.530**	**116.561**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.15 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 116.561 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Parit Baru yaitu sebanyak 17.140 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 1.678 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 255 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Pulau Jambu yaitu tercatat sebanyak 415 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 30-34 yaitu sebanyak 59 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 2 jiwa.

Tabel 2.16
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kuala Mandor B Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4 Thn	5-9Thn	10-14 Thn	15-19 Thn	20-24 Thn	25-29 Thn	30-34 Thn	35-39 Thn	40-44 Thn	45-49 Thn	50-54 Thn	55-59 Thn	60-64 Thn	65-69 Thn	70-74 Thn	>74 Thn	
1	KUALA MANDOR B	125	260	324	318	286	242	283	215	195	131	101	96	68	61	37	35	**2.777**
2	KUBU PADI	105	280	472	497	332	251	271	207	179	139	115	102	65	51	42	26	**3.134**
3	KUALA MANDOR A	97	303	429	444	369	372	323	259	219	179	179	121	89	67	47	48	**3.545**
4	RETOK	105	173	283	264	197	186	161	144	130	134	97	75	53	51	36	23	**2.112**
5	SUNGAI ENAU	106	295	329	376	360	338	291	238	181	202	148	127	80	63	29	46	**3.209**
JUMLAH		**538**	**1.311**	**1.837**	**1.899**	**1.544**	**1.389**	**1.329**	**1.063**	**904**	**785**	**640**	**521**	**355**	**293**	**191**	**178**	**14.777**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.16 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kuala Mandor B berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 14.777 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Kuala Mandor A yaitu sebanyak 3.545 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 15-19 yaitu sebanyak 444 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 47 jiwa. Sedangkan untuk desa

yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Retok yaitu tercatat sebanyak 2.112 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 283 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 23 jiwa.

Tabel 2.17
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SIMPANG KANAN	112	276	365	370	307	266	296	235	195	167	92	108	67	86	41	70	**3.053**
2	MEGA TIMUR	211	462	486	374	371	381	441	397	330	259	229	186	122	86	56	61	**4.452**
3	BENGKAREK	56	164	183	206	215	144	176	126	104	87	94	62	48	41	20	22	**1.748**
4	LINGGA	136	303	275	311	325	315	309	252	229	169	157	124	107	92	51	67	**3.222**
5	SUNGAI AMBAWANG KUALA	340	737	692	668	621	591	629	560	529	407	315	253	145	101	82	62	**6.732**
6	JAWATENGAH	177	264	228	201	189	201	231	221	155	123	98	86	75	34	25	33	**2.341**
7	DURIAN	132	295	307	341	297	285	301	237	221	162	116	118	87	52	39	52	**3.042**
8	PANCA ROBA	79	193	184	237	202	208	236	182	130	117	91	103	96	39	26	23	**2.146**
9	PUGUK	65	197	300	300	293	220	250	152	135	141	89	84	41	50	29	21	**2.367**
10	KOREK	111	255	255	293	287	262	256	222	192	165	129	113	75	60	28	48	**2.751**
11	PASAK	74	207	245	310	262	241	196	144	134	128	102	82	57	63	28	23	**2.296**
12	PASAK PIANG	58	127	198	172	190	155	131	103	103	70	57	71	44	27	13	10	**1.529**
13	TELUK BAKUNG	120	256	252	241	208	279	250	203	188	126	105	83	56	44	29	30	**2.470**
14	SUNGAI MALAYA	79	163	146	168	149	179	162	128	89	84	60	58	33	18	14	13	**1.543**
JUMLAH		**1.750**	**3.899**	**4.116**	**4.192**	**3.916**	**3.727**	**3.864**	**3.162**	**2.734**	**2.205**	**1.734**	**1.531**	**1.053**	**793**	**481**	**535**	**39.692**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.17 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 39.692 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Sungai Ambawang Kuala yaitu sebanyak 6.732 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 yaitu sebanyak 737 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 62 jiwa. Sedangkan untuk desa

yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Pasak Piang yaitu tercatat sebanyak 1.529 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 198 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 10 jiwa.

Tabel 2.18
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															JUMLAH
		0-4Thn	5-9 Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TELUK BAYUR	29	84	82	66	45	79	79	63	56	44	30	33	24	16	11	21	**762**
2	TELUK EMPENING	32	76	76	56	54	61	53	54	43	33	18	28	16	11	5	12	**628**
3	TERENTANG HILIR	12	22	27	29	35	16	27	24	12	16	17	12	9	7	4	5	**274**
4	TERENTANG HULU	57	90	84	81	78	68	78	67	73	56	45	34	16	17	13	9	**866**
5	PERMATA	42	98	92	59	53	51	60	73	53	50	32	19	18	9	2	12	**723**
6	BETUAH	12	47	48	35	35	53	49	31	36	22	28	14	16	7	2	10	**445**
7	SUNGAI RADAK SATU	41	100	96	88	67	80	82	77	59	54	43	37	31	22	24	20	**921**
8	SUNGAI RADAK DUA	87	207	202	160	130	105	135	161	147	118	85	88	51	44	24	31	**1.775**
9	SUNGAI DUNGUN	20	49	46	65	36	42	51	20	22	29	28	16	13	16	8	9	**470**
JUMLAH		**332**	**773**	**753**	**639**	**533**	**555**	**614**	**570**	**501**	**422**	**326**	**281**	**194**	**149**	**93**	**129**	**6.864**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.18 diatas dapat diketahui bahwajumlah penduduk Kecamatan Terentang berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 6.864 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Sungai Radak Dua yaitu sebanyak 1.775 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 yaitu sebanyak 207 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 24 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Terentang Hilir yaitu tercatat sebanyak 274 jiwa dimana

jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 20-24 yaitu sebanyak 35 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 4 jiwa.

Tabel 2.19
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4 Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TANJUNG BERINGIN	10	28	41	35	34	31	32	30	24	26	20	10	12	5	8	4	**350**
2	BATU AMPAR	171	504	518	498	468	454	448	418	352	286	256	187	157	113	55	68	**4.953**
3	TELUK NIBUNG	90	168	189	206	194	182	192	187	158	124	101	100	76	61	45	58	**2.131**
4	PADANG TIKAR SATU	99	202	234	241	224	138	182	154	156	147	114	96	63	33	26	23	**2.132**
5	PADANG TIKAR DUA	93	248	278	245	204	198	230	200	161	152	126	108	65	50	37	36	**2.431**
6	TASIK MALAYA	31	48	73	69	61	56	61	47	45	35	26	15	23	9	8	7	**614**
7	SUNGAI BESAR	26	54	62	55	57	39	46	42	35	45	23	19	10	8	8	6	**535**
8	SUNGAI JAWI	13	42	39	68	56	55	34	34	26	21	27	20	10	10	7	9	**471**
9	NIPAH PANJANG	29	140	131	139	170	128	121	100	109	100	68	66	28	33	30	18	**1.410**
10	AMBARAWA	20	57	65	61	54	40	44	38	41	41	22	27	18	13	10	10	**561**
11	TANJUNG HARAPAN	21	84	97	59	57	74	75	52	50	35	28	24	13	12	4	7	**692**
12	SUNGAI KRAWANG	36	65	77	69	56	66	88	70	40	38	40	34	41	20	19	16	**775**
13	SUMBER AGUNG	24	57	62	50	42	58	63	47	39	31	21	26	35	17	24	14	**610**
14	MUARA TIGA	26	60	77	71	71	77	64	62	50	28	36	31	24	25	17	18	**737**
15	MEDAN MAS	24	43	44	57	43	37	53	47	23	25	20	20	10	17	8	5	**476**
JUMLAH		**713**	**1.800**	**1.987**	**1.923**	**1.791**	**1.633**	**1.733**	**1.528**	**1.309**	**1.134**	**928**	**783**	**585**	**426**	**306**	**299**	**18.878**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.19 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 18.878 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat

di Desa Batu Ampar yaitu sebanyak 4.953 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 518 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 55 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Tanjung Beringin yaitu tercatat sebanyak 350 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 41 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 4 jiwa.

Tabel 2.20
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4 Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	KUBU	131	283	371	303	256	230	249	248	223	185	129	130	113	69	41	57	**3.018**
2	OLAK OLAK KUBU	80	164	246	227	202	161	155	175	191	131	124	115	56	50	35	55	**2.167**
3	SUNGAI SELAMAT	9	27	25	32	25	31	27	25	13	17	15	18	8	5	9	3	**289**
4	SUNGAI BEMBAN	36	149	148	152	130	122	119	119	109	84	77	64	43	44	19	29	**1.444**
5	PINANG LUAR	66	118	125	84	115	93	96	108	75	87	70	48	29	28	19	40	**1.201**
6	SERUAT DUA	15	65	100	103	77	91	52	45	41	51	47	52	20	19	17	13	**808**
7	SERUAT TIGA	32	88	115	109	103	98	80	52	56	33	45	35	26	15	14	14	**915**
8	DABONG	48	156	161	120	118	98	103	100	106	77	69	58	33	31	12	26	**1.316**
9	AMBAWANG	81	136	145	160	121	140	145	117	98	93	61	57	41	23	18	28	**1.464**
10	SEPAKAT BARU	7	24	32	26	23	25	m	14	18	11	26	5	7	8	2	3	**231**
11	BARU	68	139	166	116	99	124	134	118	75	72	52	55	46	27	16	16	**1.323**
12	AIR PUTIH	59	147	152	147	153	114	136	117	134	90	77	56	39	27	27	33	**1.508**
13	TELUK NANGKA	95	178	174	147	130	154	157	129	139	107	104	72	40	73	42	61	**1.802**
14	JANGKANG SATU	43	83	60	54	61	70	77	69	60	53	31	22	37	19	9	26	**774**
15	JANGKANG DUA	43	89	81	66	59	87	79	66	47	50	44	39	24	24	13	16	**827**
16	PINANG DALAM	32	71	66	77	68	59	64	63	58	44	30	28	24	17	9	19	**729**
17	SUNGAI TERUS	26	55	70	63	52	56	39	44	50	47	28	15	27	17	13	19	**621**
18	PELITA JAYA	19	39	42	51	42	48	47	29	34	28	30	15	9	14	6	4	**457**
19	MENGKALANG	11	50	79	68	72	74	55	44	42	28	30	28	13	13	20	6	**633**
20	MENGKALANG JAMBU	6	17	19	23	24	23	26	20	16	14	9	12	6	5	3	5	**228**
JUMLAH		**907**	**2.078**	**2.377**	**2.128**	**1.930**	**1.898**	**1.840**	**1.702**	**1.585**	**1.302**	**1.098**	**924**	**641**	**528**	**344**	**473**	**21.755**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.20 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kubu berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 21.776 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Kubu yaitu sebanyak 3.018 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 371 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 41 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Mengakalang Jambu yaitu tercatat sebanyak 228 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 30-34 yaitu sebanyak 26 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 3 jiwa.

Tabel 2.21
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA															TAHUN
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	RASAU JAYA UMUM	141	350	349	328	247	268	279	250	210	187	146	103	77	59	40	53	**3.087**
2	RASAU JAYA SATU	209	463	479	452	454	465	501	470	459	405	362	266	168	103	62	106	**5.424**
3	RASAU JAYA DUA	132	262	223	240	224	205	199	208	223	176	146	102	54	56	52	102	**2.604**
4	RASAU JAYA TIGA	132	269	296	248	240	246	287	281	244	211	160	123	88	50	55	70	**3.000**
5	BINTANG MAS	33	70	57	75	68	53	69	54	84	42	47	32	24	18	18	27	**771**
6	PEMATANG TUJUH	51	71	93	67	72	61	78	74	61	44	49	50	23	19	11	18	**842**
JUMLAH		**698**	**1.485**	**1.497**	**1.410**	**1.305**	**1.298**	**1.413**	**1.337**	**1.281**	**1.065**	**910**	**676**	**434**	**305**	**238**	**376**	**15.728**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.21 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Rasau Jaya berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 15.728 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Rasau Jaya Satu yaitu sebanyak 5.424 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 501 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 62 jiwa. Sedangkan untuk desa yang

memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Bintang Mas yaitu tercatat sebanyak 771 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 75 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 65-69 dan usia 70-74 yaitu sebanyak 18 jiwa.

Tabel 2.22
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	DESA_KEL	USIA															JUMLAH
		0-4 Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29 Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74 Thn	
1	TELUK PAKEDAI HULU	47	130	140	124	85	76	94	94	81	70	66	50	47	43	27	27	**1.201**
2	TELUK PAKEDAI SATU	14	69	55	68	49	45	60	43	45	45	31	39	23	14	16	17	**633**
3	TELUK PAKEDAI DUA	25	45	48	69	58	47	40	26	45	39	34	29	23	17	10	13	**568**
4	KUALA KARANG	42	101	94	87	74	77	69	72	52	52	43	43	19	13	14	12	**864**
5	SERUAT	4	12	22	13	7	10	19	12	13	2	9	8	10	4	2	2	**149**
6	SUNGAI DERAS	95	199	193	199	163	192	190	138	135	86	73	79	47	36	18	27	**1.870**
7	SELAT REMIS	69	162	187	126	110	99	100	117	130	89	91	51	48	50	35	28	**1.492**
8	MADURA	11	41	62	43	43	27	25	30	25	15	15	19	10	15	5	3	**389**
9	PASIR PUTIH	28	51	61	44	34	38	27	34	33	27	23	18	12	13	4	5	**452**
10	TELUK GELAM	20	50	46	41	28	18	30	27	16	22	21	14	6	8	6	1	**354**
11	TANJUNG BUNGA	21	87	88	90	68	94	63	66	59	39	36	39	30	19	10	11	**820**
12	SUNGAI NIBUNG	20	76	74	56	55	57	52	53	45	49	27	28	21	17	11	8	**649**
13	ARUS DERAS	27	51	53	43	29	26	40	34	33	30	19	24	8	7	4	12	**440**
14	SUNGAI NIPAH	14	46	61	58	56	44	42	39	31	34	29	20	19	8	11	7	**519**
JUMLAH		**437**	**1.120**	**1.184**	**1.061**	**859**	**850**	**851**	**785**	**743**	**599**	**517**	**461**	**323**	**264**	**173**	**173**	**10.400**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.22 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Teluk Pakedai berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 10.400 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Sungai Deras yaitu sebanyak 1.870 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 dan 15-

19 yaitu sebanyak 199 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 18 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Seruat yaitu tercatat sebanyak 149 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 22 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 45-49, 70-74 dan usia >74 yaitu sebanyak 2 jiwa.

Tabel 2.23
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI KAKAP	302	724	720	658	614	630	602	568	464	411	347	291	216	130	107	92	**6.876**
2	SUNGAI ITIK	111	271	289	238	194	225	270	231	196	150	109	91	92	74	47	42	**2.630**
3	JERUJU BESAR	150	351	348	278	215	196	217	216	214	159	146	126	76	50	45	24	**2.811**
4	SUNGAI KUPAH	68	201	206	181	158	155	174	140	118	109	84	72	60	39	25	22	**1.812**
5	SUNGAI RENGAS	480	1.136	1.164	1.059	1.037	1.040	1.125	985	870	735	635	482	325	262	167	171	**11.673**
6	PAL SEMBILAN	537	1.280	1.311	1.078	1.203	1.430	1.492	1.361	1.175	1.018	836	905	498	356	215	265	**14.960**
7	SUNGAI BELIDAK	75	178	136	127	119	118	177	116	123	96	68	59	40	20	21	19	**1.492**
8	KALIMAS	179	400	393	384	297	330	363	337	302	212	177	168	95	108	69	93	**3.907**
9	PUNGGUR KECIL	291	727	711	691	642	610	622	576	456	378	288	243	194	165	111	89	**6.794**
10	PUNGGUR BESAR	111	360	404	404	398	376	347	329	294	185	220	149	143	100	57	52	**3.929**
11	TANJUNG SALEH	92	243	258	298	244	273	250	233	162	153	120	100	90	81	76	49	**2.722**
12	SEPUK LAUT	57	156	177	174	119	142	149	135	84	81	75	61	40	37	23	17	**1.527**
13	PUNGGUR KAPUAS	42	115	146	119	106	98	102	94	70	57	55	37	35	18	26	20	**1.140**
JUMLAH		**2.495**	**6.142**	**6.263**	**5.689**	**5.346**	**5.623**	**5.890**	**5.321**	**4.528**	**3.744**	**3.160**	**2.784**	**1.904**	**1.440**	**989**	**955**	**62.273**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.23 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Kakapberdasarkan usia jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 62.273 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Pal Sembilan yaitu sebanyak 14.960 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 1.492 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 215 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Punggur Kapuas yaitu tercatat sebanyak 1.140 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 146 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 65-69 yaitu sebanyak 18 jiwa.

Tabel 2.24
Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI RAYA	**6.034**	**10.195**	**10.890**	**10.458**	**10.145**	**10.614**	**10.705**	**9.523**	**8.375**	**7.066**	**5.344**	**3.971**	**2.731**	**1.972**	**1.473**	**1.657**	**111.153**
2	KUALA MANDOR B	529	1347	1757	1899	1488	1374	1234	1001	839	747	595	466	329	280	196	167	**14.248**
3	SUNGAI AMBAWANG	1653	3718	3852	3981	3782	3726	3439	2896	2368	2039	1770	1377	892	638	450	524	**37.105**
4	TERENTANG	299	688	733	611	504	591	610	474	442	340	295	242	184	95	74	89	**6.271**
5	BATU AMPAR	656	1698	2063	1886	1622	1468	1594	1413	1202	1059	883	718	468	395	225	244	**17.594**
6	KUBU	853	2048	2271	2116	1921	1708	1758	1649	1486	1262	1045	798	613	471	275	405	**20.679**
7	RASAU JAYA	647	1331	1405	1356	1265	1177	1385	1274	1216	1015	830	559	349	275	242	280	**14.606**
8	TELUK PAKEDAI	390	1006	1116	1022	821	817	819	744	672	569	570	401	282	245	144	159	**9.777**
9	SUNGAI KAKAP	2337	5596	5853	5624	5186	5384	5511	4917	4340	3654	3187	2541	1750	1317	937	986	**59.120**
	JUMLAH	**13.398**	**27.627**	**29.940**	**28.953**	**26.734**	**26.859**	**27.055**	**23.891**	**20.940**	**17.751**	**14.519**	**11.073**	**7.598**	**5.688**	**4.016**	**4.511**	**290.553**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.24 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 290.553 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Raya yaitu sebanyak 111.153 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 10.890 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 1.473 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Terentang yaitu tercatat sebanyak 6.271 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 733 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 74 jiwa.

Tabel 2.25
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SUNGAI RAYA	524	848	877	735	730	914	977	930	689	577	472	376	320	244	176	185	**9.574**
2	SUNGAI AMBANGAH	150	274	236	244	281	283	288	205	168	168	124	132	81	56	46	50	**2.786**
3	ARANG LIMBUNG	706	1.088	1.186	1.095	1.047	1.029	1.103	1.070	1.008	820	625	401	259	156	133	162	**11.888**
4	KUALA DUA	747	1.320	1.459	1.437	1.396	1.196	1.237	1.281	1.334	955	555	371	263	180	133	176	**14.040**
5	TEBANG KACANG	124	237	271	269	228	252	264	193	168	150	120	97	63	48	35	35	**2.554**
6	SUNGAI ASAM	290	690	827	961	730	724	643	568	435	378	320	247	153	126	87	111	**7.290**
7	PULAU LIMBUNG	40	120	145	116	98	112	118	102	81	63	63	37	34	30	9	20	**1.188**
8	KAPUR	357	547	506	486	511	577	580	403	356	365	250	129	100	90	70	74	**5.401**
9	GUNUNG TAMANG	17	80	63	81	46	79	65	53	41	43	39	37	28	11	10	14	**707**
10	SUNGAI BULAN	88	173	154	146	143	161	125	134	139	101	83	72	52	37	18	27	**1.653**
11	LIMBUNG	484	741	830	696	649	772	765	730	630	543	403	269	210	105	104	107	**8.038**
12	TELUK KAPUAS	377	611	669	571	595	639	708	615	527	447	362	289	177	119	87	92	**6.885**

13	MADU SARI	109	196	180	203	222	182	194	144	123	107	69	61	42	32	18	31	**1.913**
14	MEKAR SARI	320	586	651	697	664	636	660	507	385	286	218	183	125	103	84	85	**6.190**
15	MEKAR BARU	155	257	245	229	239	256	235	212	166	156	114	92	57	41	29	43	**2.526**
16	SUNGAIRAYA DALAM	569	887	942	901	891	952	956	891	859	771	555	366	203	184	136	125	**10.188**
17	PARIT BARU	899	1.357	1.413	1.372	1.494	1.652	1.627	1.349	1.165	1.010	874	754	524	371	268	293	**16.422**
18	PULAU JAMBU	18	29	47	35	50	42	34	23	23	26	20	11	5	5	3	2	**373**
19	KALIBANDUNG	38	104	125	123	87	99	80	67	49	59	44	34	21	23	21	19	**993**
20	MUARA BARU	22	50	64	61	44	57	46	46	29	41	34	13	14	11	6	6	**544**
	JUMLAH	**6.034**	**10.195**	**10.890**	**10.458**	**10.145**	**10.614**	**10.705**	**9.523**	**8.375**	**7.066**	**5.344**	**3.971**	**2.731**	**1.972**	**1.473**	**1.657**	111.153

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.25 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 111.153 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Parit Baru yaitu sebanyak 16.422 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 25-29 yaitu sebanyak 1.652 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 268 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Pulau Jambu yaitu tercatat sebanyak 373 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 20-24 yaitu sebanyak 50 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 2 jiwa.

Tabel 2.26
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kuala Mandor B Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	KUALA MANDOR B	125	259	298	324	270	261	268	216	156	137	121	91	81	68	51	28	**2.754**
2	KUBU PADI	97	305	467	492	331	274	242	188	163	132	111	82	61	49	28	27	**3.049**
3	KUALA MANDOR A	121	308	408	476	354	352	296	227	213	182	140	112	62	75	52	47	**3.425**
4	RETOK	72	197	220	261	168	154	167	164	114	116	84	78	55	38	31	26	**1.945**
5	SUNGAI ENAU	114	278	364	346	365	333	261	206	193	180	139	103	70	50	34	39	**3.075**
JUMLAH		**529**	**1.347**	**1.757**	**1.899**	**1.488**	**1.374**	**1.234**	**1.001**	**839**	**747**	**595**	**466**	**329**	**280**	**196**	**167**	**14.248**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.26 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kuala Mandor B berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 14.248 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Kuala Mandor A yaitu sebanyak 3.425 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 15-19 yaitu sebanyak 476 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 47 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Retok yaitu tercatat sebanyak 1.945 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 261 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 26 jiwa.

Tabel 2.27
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Ambawang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	SIMPANG KANAN	95	256	336	381	289	281	271	212	165	146	135	116	65	63	33	47	**2.891**
2	MEGA TIMUR	209	432	416	381	366	423	399	352	298	238	237	147	104	71	53	63	**4.189**
3	BENGKAREK	52	161	170	177	188	187	146	110	105	105	79	73	48	33	25	25	**1.684**
4	LINGGA	117	280	239	287	302	307	262	231	154	143	157	142	82	62	51	64	**2.880**
5	SUNGAI AMBAWANG KUALA	343	704	651	624	569	578	654	593	484	372	250	191	125	100	67	73	**6.378**
6	JAWATENGAH	154	237	209	210	226	211	250	163	150	99	121	86	57	34	39	41	**2.287**
7	DURIAN	149	295	276	281	268	291	272	220	184	148	132	89	60	42	33	51	**2.791**
8	PANCA ROBA	77	185	185	213	206	200	188	139	95	116	115	89	59	25	27	28	**1.947**
9	PUGUK	57	205	262	299	293	217	184	158	148	117	83	76	50	33	24	16	**2.222**
10	KOREK	111	220	273	275	272	242	233	189	173	143	136	82	82	51	37	44	**2.563**
11	PASAK	80	205	260	294	261	208	166	147	113	147	92	104	54	47	15	22	**2.215**
12	PASAK PIANG	46	129	164	165	189	140	101	103	68	77	83	65	35	26	10	17	**1.418**
13	TELUK BAKUNG	92	254	265	238	212	288	180	160	137	101	87	83	44	36	27	22	**2.226**
14	SUNGAI MALAYA	71	155	146	156	141	153	133	119	94	87	63	34	27	15	9	11	**1.414**
JUMLAH		**1.653**	**3.718**	**3.852**	**3.981**	**3.782**	**3.726**	**3.439**	**2.896**	**2.368**	**2.039**	**1.770**	**1.377**	**892**	**638**	**450**	**524**	**37.105**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.27 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 37.105 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Sungai Ambawang Kuala yaitu sebanyak 6.378 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 5-9 yaitu sebanyak 704 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 67 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Sungai Malaya yaitu tercatat sebanyak 1.414 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 156 jiwa dan jumlah

penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 9 jiwa.

Tabel 2.28
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Terentang Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TELUK BAYUR	35	72	75	77	68	74	58	67	51	43	35	29	18	14	18	12	**746**
2	TELUK EMPENING	22	65	84	63	38	53	49	47	36	34	15	22	17	13	6	12	**576**
3	TERENTANG HILIR	16	23	25	24	21	28	23	13	18	12	10	11	8	5	4	5	**246**
4	TERENTANG HULU	30	90	93	73	58	64	77	60	53	38	25	29	15	9	10	14	**738**
5	PERMATA	30	98	84	60	38	71	86	49	45	36	21	19	12	7	2	6	**664**
6	BETUAH	10	35	41	37	42	34	44	32	27	18	26	12	11	4	2	5	**380**
7	SUNGAI RADAK SATU	54	78	83	74	74	79	83	61	52	52	46	42	30	19	16	17	**860**
8	SUNGAI RADAK DUA	83	183	191	151	127	141	162	124	132	87	91	60	59	17	16	12	**1.636**
9	SUNGAI DUNGUN	19	44	57	52	38	47	28	21	28	20	26	18	14	7	0	6	**425**
JUMLAH		**299**	**688**	**733**	**611**	**504**	**591**	**610**	**474**	**442**	**340**	**295**	**242**	**184**	**95**	**74**	**89**	**6.271**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.28 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Terentang berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 6.271 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Sungai Radak Dua yaitu sebanyak 1.636 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 191 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 12 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Terentang Hilir yaitu tercatat sebanyak 246 jiwa dimana

jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 25-29 yaitu sebanyak 28 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 4 jiwa.

Tabel 2.29
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Batu Ampar Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TANJUNG BERINGIN	11	28	44	32	26	38	32	28	17	16	6	19	5	4	1	4	**311**
2	BATU AMPAR	158	422	506	459	457	424	401	355	319	274	200	156	107	76	48	46	**4.408**
3	TELUK NIBUNG	73	177	193	196	164	159	191	167	137	116	96	99	60	54	29	37	**1.948**
4	PADANG TIKAR SATU	81	201	273	232	201	132	178	161	172	131	113	93	58	49	27	42	**2.144**
5	PADANG TIKAR DUA	84	233	256	255	195	187	206	180	133	145	119	87	58	52	26	35	**2.251**
6	TASIK MALAYA	30	58	76	78	57	50	51	43	50	31	27	17	14	15	8	13	**618**
7	SUNGAI BESAR	11	38	74	66	44	36	45	45	38	31	21	20	18	15	2	3	**507**
8	SUNGAI JAWI	17	57	43	44	44	41	34	34	25	19	29	13	11	10	11	8	**440**
9	NIPAH PANJANG	46	113	174	137	119	96	114	112	110	96	75	58	31	37	15	15	**1.348**
10	AMBARAWA	19	56	52	57	47	29	39	49	42	39	22	28	15	16	18	12	**540**
11	TANJUNG HARAPAN	19	75	79	71	57	55	62	50	23	43	19	18	14	9	2	6	**602**
12	SUNGAI KRAWANG	37	66	99	67	54	67	74	50	43	41	45	25	22	16	16	8	**730**
13	SUMBER AGUNG	30	47	54	55	55	45	48	47	31	25	36	35	20	15	8	2	**553**
14	MUARA TIGA	18	82	72	83	62	70	69	56	24	34	48	31	27	14	8	7	**705**
15	MEDAN MAS	22	45	68	54	40	39	50	36	38	18	27	19	8	13	6	6	**489**
JUMLAH		656	1.698	2.063	1.886	1.622	1.468	1.594	1.413	1.202	1.059	883	718	468	395	225	244	17.594

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.29 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 17.594 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan

terbanyak terdapat di Desa Batu Ampar yaitu sebanyak 4.408 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 506 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia >74 sebanyak 46 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Tanjung Beringin yaitu tercatat sebanyak 311 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 44 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 1 jiwa.

Tabel 2.30
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kubu Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	KUBU	118	286	303	307	279	217	248	241	201	161	143	117	87	77	38	65	**2.888**
2	OLAK OLAK KUBU	91	190	254	208	179	134	156	175	172	132	112	94	68	44	28	53	**2.090**
3	SUNGAI SELAMAT	4	29	38	31	35	34	18	27	17	19	15	13	10	4	3	6	**303**
4	SUNGAI BEMBAN	42	159	161	135	107	116	121	103	114	81	67	56	46	33	29	25	**1.395**
5	PINANG LUAR	42	126	98	96	82	84	95	87	83	110	49	38	38	29	13	16	**1.086**
6	SERUAT DUA	27	59	95	107	91	59	52	57	54	52	56	34	19	16	15	14	**807**
7	SERUAT TIGA	30	76	116	123	90	78	65	53	46	36	47	38	16	18	14	15	**861**
8	DABONG	59	148	151	109	106	71	111	100	111	78	49	33	34	22	6	19	**1.207**
9	AMBAWANG	59	146	143	122	142	168	115	96	99	79	52	53	33	25	20	32	**1.384**
10	SEPAKAT BARU	10	28	31	38	31	22	29	16	10	25	17	4	8	5	6	8	**288**
11	BARU	38	135	132	131	115	112	134	102	64	69	68	43	28	20	8	17	**1.216**
12	AIR PUTIH	69	125	136	148	124	116	123	121	103	85	66	48	44	31	28	20	**1.387**
13	TELUK NANGKA	84	172	179	159	157	140	147	149	138	97	88	64	54	68	22	32	**1.750**
14	JANGKANG SATU	47	61	51	62	75	61	60	63	53	29	33	35	34	14	8	11	**697**
15	JANGKANG	45	61	90	68	87	77	67	51	49	52	46	19	26	16	8	16	**778**

	DUA																	
16	PINANG DALAM	27	67	75	72	53	52	65	67	42	49	35	26	14	13	9	20	**686**
17	SUNGAI TERUS	19	63	67	65	41	40	50	50	40	26	30	24	20	14	9	12	**570**
18	PELITA JAYA	20	44	49	52	52	50	33	31	35	28	29	17	8	3	4	3	**458**
19	MENGKALANG	16	50	70	53	48	57	44	45	40	39	27	24	22	10	6	17	**568**
20	MENGKALANG JAMBU	6	23	32	30	27	20	25	15	15	15	16	18	4	9	1	4	**260**
	JUMLAH	**853**	**2.048**	**2.271**	**2.116**	**1.921**	**1.708**	**1.758**	**1.649**	**1.486**	**1.262**	**1.045**	**798**	**613**	**471**	**275**	**405**	**20.679**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.30 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kubu berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 20.679 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Kubu yaitu sebanyak 2.888 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 15-19 yaitu sebanyak 307 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 38 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Mengakalang Jambu yaitu tercatat sebanyak 260 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 32 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 70-74 yaitu sebanyak 1 jiwa.

Tabel 2.31
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	RASAU JAYA UMUM	143	301	302	292	260	266	318	226	216	158	150	110	67	46	42	45	**2.942**
2	RASAU JAYA SATU	203	416	491	451	420	370	468	439	446	395	325	209	107	78	62	76	**4.956**
3	RASAU JAYA DUA	106	215	252	240	215	186	197	217	188	165	111	87	54	55	57	75	**2.420**
4	RASAU JAYA TIGA	114	259	225	229	227	238	268	270	240	203	149	86	70	56	49	55	**2.738**
5	BINTANG MAS	30	61	60	71	68	45	72	56	76	49	46	34	21	28	18	11	**746**
6	PEMATANG TUJUH	51	79	75	73	75	72	62	66	50	45	49	33	30	12	14	18	**804**
JUMLAH		**647**	**1.331**	**1.405**	**1.356**	**1.265**	**1.177**	**1.385**	**1.274**	**1.216**	**1.015**	**830**	**559**	**349**	**275**	**242**	**280**	**14.606**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.31 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Rasau Jaya berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 14.606 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Rasau Jaya Satu yaitu sebanyak 4.956 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 10-14 yaitu sebanyak 491 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 62 jiwa. Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Bintang Mas yaitu tercatat sebanyak 746 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 40-44 yaitu sebanyak 76 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia >74 yaitu sebanyak 11 jiwa.

Tabel 2.32
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Teluk Pakedai Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74Thn	
1	TELUK PAKEDAI HULU	35	97	116	101	89	80	87	86	80	71	65	63	46	33	27	33	**1.109**
2	TELUK PAKEDAI SATU	10	57	63	58	43	38	44	41	47	39	46	24	20	27	12	16	**585**
3	TELUK PAKEDAI DUA	24	48	53	45	46	40	38	41	43	26	46	29	31	14	14	12	**550**
4	KUALA KARANG	32	92	109	92	54	70	64	60	39	46	56	24	20	19	13	11	**801**
5	SERUAT	4	6	12	13	10	10	11	12	11	10	9	10	2	2	3	3	**128**
6	SUNGAI DERAS	83	173	155	170	174	174	164	131	118	86	82	60	27	22	16	25	**1.660**
7	SELAT REMIS	53	176	198	154	100	94	108	120	108	94	84	59	59	44	26	19	**1.496**
8	MADURA	12	44	54	50	29	30	33	29	21	23	18	15	4	8	0	0	**370**
9	PASIR PUTIH	17	38	47	43	24	31	31	42	24	23	17	18	14	13	6	7	**395**
10	TELUK GELAM	26	45	59	38	31	32	28	19	18	19	18	8	5	4	0	0	**350**
11	TANJUNG BUNGA	18	64	76	85	86	80	66	51	55	47	45	40	24	23	6	12	**778**
12	SUNGAI NIBUNG	38	73	75	68	58	54	56	46	39	28	34	17	14	10	11	12	**633**
13	ARUS DERAS	20	51	38	31	25	38	34	31	33	24	23	10	8	18	6	6	**396**
14	SUNGAI NIPAH	18	42	61	74	52	46	55	35	36	33	27	24	8	8	4	3	**526**
	JUMLAH	**390**	**1.006**	**1.116**	**1.022**	**821**	**817**	**819**	**744**	**672**	**569**	**570**	**401**	**282**	**245**	**144**	**159**	**9.777**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.32 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Teluk Pakedai berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 9.777 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Sungai Deras yaitu sebanyak 1.660 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 20-24 dan 25-29 yaitu sebanyak 174 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 16 jiwa.

Sedangkan untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Seruat yaitu tercatat sebanyak 128 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 15-19 yaitu sebanyak 13 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 60-64 dan 65-69 yaitu sebanyak 2 jiwa.

Tabel 2.33
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Sungai Kakap Berdasarkan Usia Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2015

NO	NAMA DESA	USIA																JUMLAH
		0-4Thn	5-9Thn	10-14Thn	15-19Thn	20-24Thn	25-29Thn	30-34Thn	35-39Thn	40-44Thn	45-49Thn	50-54Thn	55-59Thn	60-64Thn	65-69Thn	70-74Thn	>74 Thn	
1	SUNGAI KAKAP	299	654	666	653	576	594	632	539	456	397	347	271	156	155	92	122	**6.609**
2	SUNGAI ITIK	105	230	249	242	188	201	237	206	187	130	130	94	94	65	37	54	**2.449**
3	JERUJU BESAR	148	345	313	297	186	186	226	199	206	171	154	116	70	48	34	14	**2.713**
4	SUNGAI KUPAH	77	169	200	183	155	128	149	142	128	87	89	65	62	35	39	21	**1.729**
5	SUNGAI RENGAS	477	987	1.062	944	1.018	984	1.023	901	842	732	574	416	305	220	184	178	**10.847**
6	PAL SEMBILAN	431	1.213	1.237	1.151	1.177	1.346	1.382	1.200	1.148	979	893	707	442	321	200	233	**14.060**
7	SUNGAI BELIDAK	66	164	138	129	117	115	152	126	120	90	57	62	35	33	22	29	**1.455**
8	KALIMAS	182	364	359	348	317	340	339	309	267	195	181	159	103	97	91	92	**3.743**
9	PUNGGUR KECIL	254	636	669	689	651	646	553	545	443	366	303	261	198	115	91	96	**6.516**
10	PUNGGUR BESAR	108	346	372	408	334	343	347	324	244	207	225	154	138	83	71	73	**3.777**
11	TANJUNG SALEH	97	245	305	308	234	272	231	228	146	175	110	131	73	104	47	37	**2.743**
12	SEPUK LAUT	51	118	145	145	136	149	143	97	85	78	70	63	32	24	12	17	**1.365**
13	PUNGGUR KAPUAS	42	125	138	127	97	80	97	101	68	47	54	42	42	17	17	20	**1.114**
JUMLAH		**2.337**	**5.596**	**5.853**	**5.624**	**5.186**	**5.384**	**5.511**	**4.917**	**4.340**	**3.654**	**3.187**	**2.541**	**1.750**	**1.317**	**937**	**986**	**59.120**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Data Hasil Konsolidasi Semester II Tahun 2015 Dirjen Dukcapil

Dari tabel 2.33 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan usia jenis kelamin perempuan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 59.120 jiwa. Dimana jumlah penduduk berdasarkan usia jenis kelamin perempuan terbanyak terdapat di Desa Pal Sembilan yaitu sebanyak 14.060 jiwa yang mana sebagian besar terdapat pada kelompok penduduk usia 30-34 yaitu sebanyak 1.382 jiwa dan paling terendah terdapat pada kelompok penduduk usia 70-74 sebanyak 200 jiwa. Sedangkan

untuk desa yang memiliki penduduk berdasarkan usia jenis kelamin terendah berada di Desa Punggur Kapuas yaitu tercatat sebanyak 1.114 jiwa dimana jumlah penduduk tertingginya berada pada kelompok usia 10-14 yaitu sebanyak 138 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok usia 65-69 dan 70-74 yaitu sebanyak 17 jiwa.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan, Angka Kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan produksi dari kegiatan ekonomi yang terdapat didalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Penyediaan kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dapat menjadi indikator semakin membaiknya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Publikasi Tahun 2015 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Rayaberdasarkan data PDRB Harga Konstan Tahun 2010 sebesar Rp. 4.936 Miliar, Tahun 2011 sebesar Rp. 5.258 Miliar, Tahun 2012 sebesar Rp. 5.610 Miliar, dan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.991 Miliar. Dari data diatas

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya meningkat dari Tahun ke Tahun, dan yang memberikan kontribusi terbesar ada pada sektor industri pengolahan. Sedangkan berdasarkan PDRB harga berlaku Tahun 2010 sebesar Rp. 8.800 Miliar, Tahun 2011 sebesar Rp. 9.978 Miliar, Tahun 2012 sebesar Rp. 11.204 Miliar dan Tahun 2013 sebesar Rp. 12.745 Miliar, dengan kontribusi terbesar pada sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 sampai dengan 2014 Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku serta Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.34
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	2011		2012		2013		2014	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pertanian	1.039	19,9	1.089	19,4	1.039	19,9	1.089	19,4
2	Pertambangan & Penggalian	22	0,4	24	0,4	22	0,4	24	0,4
3	Industri Pengolahan	2.366	45,1	2.458	43,8	2.366	45,1	2.458	43,8
4	Listrik,Gas & Air Bersih	28	0,5	32	0,6	28	0,5	32	0,6
5	Konstruksi	65	1,2	74	1,3	65	1,2	74	1,3
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	853	16,2	909	16,2	853	16,2	909	16,2
7	Pengangkutan & Komunikasi	514	9,8	620	11,1	514	9,8	620	11,1
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	117	2,2	130	2,3	117	2,2	130	2,3
9	Jasa-Jasa	249	4,7	272	4,9	249	4,7	272	4,9
	PDRB ADHK	**5.258**	**100**	**5.610**	**100**	**5.258**	**100**	**5.610**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu RayaTahun 2015

Tabel 2.35
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	2011		2012		2013		2014	
		(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%	(Rp. Miliar)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pertanian	1.862	18,7	2.016	18	1.862	18,7	2.016	18
2	Pertambangan & Penggalian	52	0,5	63	0,6	52	0,5	63	0,6
3	Industri Pengolahan	4.549	45,6	4.958	44,3	4.549	45,6	4.958	44,3
4	Listrik,Gas & Air Bersih	57	0,6	66	0,6	57	0,6	66	0,6
5	Konstruksi	285	2,9	360	3,2	285	2,9	360	3,2
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.697	17	1.922	17,2	1.697	17	1.922	17,2
7	Pengangkutan & Komunikasi	849	8,5	1.040	9,3	849	8,5	1.040	9,3
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	234	2,3	281	2,5	234	2,3	281	2,5
9	Jasa-Jasa	393	3,9	498	4,4	393	3,9	498	4,4
	PDRB ADHB	**9.978**	**100**	**11.204**	**100**	**9.978**	**100**	**11.204**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.36
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d Tahun 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	2011		2012		2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pertanian	1.039	1.862	1.089	2.016	1.039	1.862	1.089	2.016
2	Pertambangan & Penggalian	22	52	24	63	22	52	24	63
3	Industri Pengolahan	2.366	4.549	2.458	4.958	2.366	4.549	2.458	4.958
4	Listrik,Gas & Air Bersih	28	57	32	66	28	57	32	66
5	Konstruksi	65	285	74	360	65	285	74	360
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	853	1.697	909	1.922	853	1.697	909	1.922
7	Pengangkutan & Komunikasi	514	849	620	1.040	514	849	620	1.040
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	117	234	130	281	117	234	130	281
9	Jasa-Jasa	249	393	272	498	249	393	272	498
	PDRB	**5.258**	**9.978**	**5.610**	**11.204**	**5.258**	**9.978**	**5.610**	**11.204**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Tabel 2.37
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 s/d Tahun 2013
Kabupaten Kubu Raya

NO	SEKTOR	PERTUMBUHAN	
		Hb (%)	Hk (%)
1	*2*	*3*	*4*
1	Pertanian	19,55	18,09
2	Pertambangan & Penggalian	0,42	0,54
3	Industri Pengolahan	44,38	45,02
4	Listrik,Gas & Air Bersih	0,55	0,55
5	Konstruksi	1,26	2,90
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,21	17,00
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,56	9,16
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan	2.28	2,42
9	Jasa-Jasa	4,80	4,32
	PDRB	**100**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

Dari Tabel diatas maka dapat ditarik beberapa ringkasan sebagai berikut:

1. Nilai Nominal PDRB Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami trend naik baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.
2. Indeks Location Quotient (LQ) yang paling tinggi adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan kemudian lapangan usaha Listrik, Gas dan Air Bersih dan lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu dari 6,69% pada Tahun 2012 meningkat menjadi 6,79% pada Tahun 2013 dan mengalami penurunandi Tahun 2013 sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya menjadi 6,44% pada Tahun 2014.
4. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)Tahun2010 sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 44,38 % diikuti sector pertanian sebesar 19,55 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,21 %, sedangkan atas Harga Konstan (Hk) kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 45,02 % diikuti sektor pertanian sebesar 18,09 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,00 %.

B. Laju Inflasi Kabupaten

Terjadinya kenaikkan harga barang/jasa akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, karena berpengaruh terhadap ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Tingkat perubahan harga digambarkan dengan indeks implisit/inflasi PDRB yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen dan cakupan harganya sangat luas. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cakupannya relatif terbatas beberapa komoditi dengan melihat perubahan harga pada tingkat konsumen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, laju inflasi Kabupaten Kubu Raya semakin turun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Tahun 2012 laju inflasi sebesar 5,25% naik menjadi 5,00% pada Tahun 2013, kemudian laju inflasi tetap 5,00% pada Tahun 2014. Laju Inflasi Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 4,94% menjadi 4,88% pada target Tahun 2016 dan revisi target 2016 inflasi menjadi 4,82%. Laju inflasi Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.38
Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2012 – 2017

Tahun	Kubu Raya	Kalimantan Barat
	Lanju Inflasi ADH	Laju Inflasi ADH
	Produsen (%)	Produsen (%)
(1)	(3)	(5)
2012	5,25	4,41
2013	5,00	4,59
2014	5,00	6,22
2015	4,94	5,88
Target 2016*)	4,88	5,50
Revisi target 2016*)	4,82	5,30
Proyeksi 2017*)	4,76	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
**) Data Sementara*

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Selain masalah efisiensi, salah satu hal yang menjadi masalah klasik dalam perekonomian adalah pemerataan kesejahteraan. Pencapaian PDRB yang tinggi tanpa disertai pemerataan pendapatan maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Namun untuk melihat seberapa jauh pemerataan

pendapatan yang diperoleh masyarakat sangatlah sulit. Indikator ini cukup mendukung untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan PDRB Per Kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB Perkapita Kabupaten Kubu Raya terus mengalami trend meningkat dari 23.186.870,00 di Tahun 2011 menjadi 25.178.181,00 di Tahun 2012 dan diperkirakan menjadi 35.090.000,00 di Tahun 2015.

PDRB Per Kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan Tahun. PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39
PDRB Perkapita Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Nilai PDRB Berlaku (Rp. Juta)	11.864,58	13.105,80	14.695,59	16.756,38	19.143,83
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	511.235	522.174	529.320	538.815	545.409
3.	PDRB Perkapita (Rp/Jiwa)	23.186.870,00	25.178.181,00	27.716.004,00	30.996.554,00	35.090.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
****) Data Sementara***

D. Indeks Gini/Koefisien Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah *(gap)* yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah **G<0,30** berarti ketimpangan rendah, **0,30 ≤ G ≤ 0,50** berarti ketimpangan sedang dan **G > 0,50** berarti ketimpangan tinggi.

Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya

berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 sampai denganTahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Provinsi	**0.36**	**0.36**	**0.37**	**0.35**
Sambas	0.36	0.36	0.37	0.32
Bengkayang	0.33	0.35	0.34	0.30
Landak	0.26	0.34	0.31	0.31
Mempawah	0.31	0.33	0,31	0.31
Sanggau	0.34	0.32	0.32	0.31
Ketapang	0.31	0.38	0.32	0.32
Sintang	0.30	0.30	0.32	0.31
Kapuas Hulu	0.35	0.30	0,29	0.31
Sekadau	0.28	0.30	0.29	0.28
Melawi	0.27	0.33	0.28	0.29
Kayong Utara	0.34	0.33	0.31	0.33
Kubu Raya	**0.34**	**0.38**	**0.38**	**0.33**
Kota Pontianak	0.35	0.30	0.38	0.38
Kota Singkawang	0.31	0.34	0.38	0.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Data berdasarkan Susenas Maret 2015
**) Data sementara*

Dari data diatas menunjukan bahwa Koefisien Gini Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun menunjukan trend naik dari 0,34 % di Tahun 2011, naik menjadi 0,38% pada Tahun 2012, dan Tahun 2013 tetap sebesar 0,38%. Tahun 2014 Koefisien Gini Kabupaten Kubu Raya 0,33% ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin dalam kategori sedang, sama halnya dengan provinsi Kalimantan Barat.

E. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk

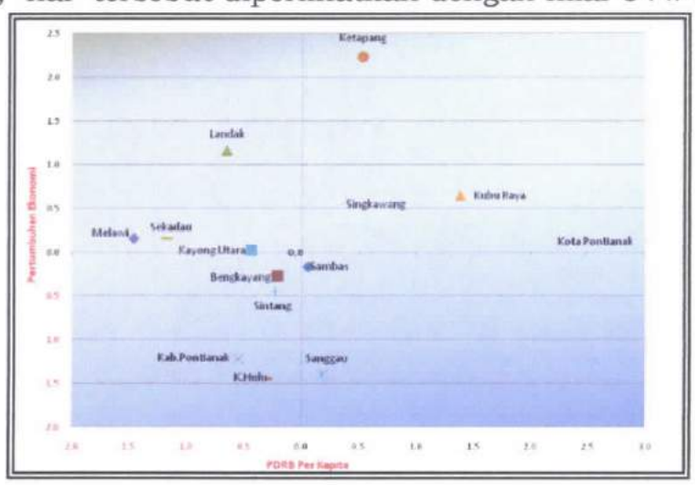
ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

F. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pengukuran kesenjangan regional melalui pendekatan indeks akan digunakan berdasarkan analisis CVw (CV Williamson). Indeks CVw digunakan untuk indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar Kecamatan di suatu Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota di suatu Provinsi dalam waktu tertentu atau untuk mengukur kesenjangan pendapatan regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita. Kesenjangan ekonomi antar wilayah menurut analisis CVw, menunjukan kondisi kesenjangan wilayah dalam Provinsi Kalimantan Barat kecenderungan meningkat, hal tersebut diperlihatkan dengan nilai CVw dari Tahun ke Tahun.



Berkembangnya kawasan Kabupaten Kubu Raya ini didukung oleh keberadaan pusat kota utama yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi

Kalimantan Barat. Poros Pontianak-Mempawah di utara berpotensi berkembang lebih cepat dari sisi penduduk dan ekonomi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, sebagian besar karena dorongan perkembangan konstruksi, manufaktur, perdagangan, jasa, pengeluaran pemerintah, dan bahan bangunan. Bahan bangunan adalah muatan utama dari Mempawah ke Pontianak. Rute itu kemungkinan besar calon yang kuat untuk jalan tol. Poros timur Pontianak-Tayan dilayani dengan baik sekali oleh angkutan sungai. serta koridor selatan Trans Kalimantan ke tenggara, dan koridor utara yang menghubungkan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten di wilayah hulu. Sehingga Kabupaten Kubu Raya menikmati manfaat dari dampak pendapatan akibat peningkatan permintaan akhir atas output seluruh sektor yang lalu lintas di Provinsi Kalimantan Barat. Dari analisis Klassen pada Tahun 2011, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh.

Posisi letak Kabupaten Kubu Raya pada kwadran II berdasarkan typelogi Williamson, dapat dipahami mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah baru pemekaran dan secara geografis berada pada daerah hinterland Kota Pontianak. Kondisi letak strategis tersebut menjadi KabupatenKubu Raya menjadi daerah perlintasan baik daratan maupun moda transportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi ikutan di sektor perdagangan dan jasa serta aktivitas investasi baru lainnya yang menopang kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Kubu Raya.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dibagi dalam 3 (tiga) Fokus yaitu: Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan. Fokus ke 3 (tiga) bidang ini dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dewasa adalah proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau

lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) dapat dipakai sebagai dasar Kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angak Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkankemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan Kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 dari 87,23% menjadi 88,32% pada Tahun 2016, sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kecamatan Tahun 2015 tertinggi yaitu 92,12% di Kecamatan Kuala Mandor B dan terendah di Kecamatan Teluk Pakedai yaitu 69,11%. Angka Melek Huruf Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Angka Melek Huruf Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.41
Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis	479.232	481.558	507.570	384.716	528.758
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	549.399	566.394	596.669	450.677	598.679
	Angka Melek Huruf (%)	**87,23**	**85,02**	**85,32**	**85,24**	**88,32**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.42
Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Batu Ampar	23.725	27.555	86,10
2	Terentang	8.070	9.557	84,44
3	Kubu	27.184	31.921	85,16
4	Teluk Pakedai	10.314	14.924	69,11
5	Sungai Kakap	76.864	92.707	82,91
6	Rasau Jaya	20.335	23.271	87,38
7	Sungai Raya	146.862	171.227	85,77
8	Sungai Ambawang	50.826	57.809	87,92
9	Kuala Mandor B	19.996	21.706	92,12
	Jumlah	**384.176**	**450.677**	**85,24**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap Tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah Tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.43
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016*)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Batu Ampar	6,53	6,10	6,72	6,12	6,53	6,10	6,72	6,12	6,62	6,02
2	Terentang	6,22	6,01	6,35	6,05	6,22	6,01	6,35	6,05	6,25	6,05
3	Kubu	6,40	6,02	6,45	6,07	6,40	6,02	6,45	6,07	6,40	6,07
4	Teluk Pakedai	6,70	6,05	6,75	6,08	6,70	6,05	6,75	6,08	6,70	6,08
5	Sungai Kakap	7,10	6,12	7,15	6,15	7,10	6,12	7,15	6,15	7,10	6,10
6	Rasau Jaya	7,15	6,18	7,20	6,20	7,15	6,18	7,20	6,20	7,20	6,28
7	Sungai Raya	7,25	6,25	7,30	6,28	7,25	6,25	7,30	6,28	7,25	6,20
8	Sungai Ambawang	6,92	6,14	7,01	6,15	6,92	6,14	7,01	6,15	7,01	6,05
9	Kuala Mandor B	6,38	6,02	6,45	6,05	6,38	6,02	6,45	6,05	6,40	6,15
	Jumlah	**6,74**	**6,10**	**6,82**	**6,13**	**6,74**	**6,10**	**6,82**	**6,13**	**6,77**	**6,11**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
****) Data Sementara***

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 Tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 Tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti Angka Patisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan Angka Patisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Angka Patisipasi Murni (APM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 88,89 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 68,15 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 43,24. Untuk Tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 98,83 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 81,44 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 60,18. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	60.840	61.697	63.164	57.515	66.649
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	68.441	69.471	70.500	73.493	67.438
	APM SD/MI (%)	**88,89**	**88,81**	**89,59**	**78,26**	**98,83**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	23.083	23.688	24.294	20.414	26.629
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	33.873	34.803	35.734	37.886	32.698
	APM SMP/MTs (%)	**68,15**	**68,06**	**67,99**	**53,91**	**81,44**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	13.304	14.670	12.025	17.006	16.794
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun	30.769	31.395	32.021	35.927	27.907
	APM SMA/MA/SMK (%)	**43,24**	**46,73**	**37,55**	**47,33**	**60,18**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 Tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator

yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Patisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 115,24 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 82,89 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 71,72. Untuk Tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei untuk Jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 113,83 sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 95,64 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 72,67. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang PendidikanSD/MI	59.982	60.840	61.697	63.164	56.590
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	67.412	68.441	69.471	70.500	67.438
	APK SD/MI (%)	**88,98**	**88,89**	**88,81**	**89,60**	**83,91**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang PendidikanSMP/MTs	22.477	23.083	23.688	24.294	25.587
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	32.943	33.873	34.803	35.734	32.698
	APK SMP/MTs (%)	**68,23**	**68,15**	**66,32**	**67,99**	**78,25**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Jenjang PendidikanSMA/MA/SMK	11.980	13.304	14.670	12.025	13.365
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	30.142	30.769	31.395	32.021	27.907
	APK SMA/MA/SMK	**39,75**	**43,24**	**46,73**	**37,55**	**47,89**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2012 SD sebesar 100, SMP sebesar 96,79 dan SMA sebesar 92,95 sedangkan dari Bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2016 untuk SD sebesar 100, SMP 99,97 dan SMA sebesar 99,98. Sedangkan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) untuk Perguruan Tinggi tidak terdata oleh Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	APT	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SD	100	100	100	100	100
2	SMP	96,79	98,67	99,14	99,77	99,97
3	SMA	92,95	99,63	99,74	99,78	99,98
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

B. Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu Tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya,

kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu Tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 Tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2012 sampai dengaan 2016 sebesar 95,46% dari 57.487 jumlah kelahiran dan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun sebanyak 191 jumlah kematian. Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47
Rekapitulasi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 (*)	Jumlah Kelahiran Hidup Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 (*)	AKB(%) (*)	AKHB (*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Batu Ampar	32	4.567	3,3	96,7
2	Terentang	17	2.736	15,406	84,594
3	Kubu	21	5.979	5,244	94,756
4	Teluk Pakedai	8	2.296	3,98	96,02

5	Sungai Kakap	29	11.647	2,656	97,344
6	Rasau Jaya	4	2.707	1,494	98,506
7	Sungai Raya	43	18.005	2,086	97,914
8	Sungai Ambawang	30	6.948	4,148	95,852
9	Kuala Mandor B	7	2.602	2,576	97,424
	JUMLAH	**191**	**57.487**	**4,54**	**95,46**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
(*) Data Sementara

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata Tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu Tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata Tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu.Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.Angka Harapan HidupKabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya

Hasil Sensus Penduduk				
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tahun 1970	Tahun 1980	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2010
47,7	**52,2**	**59,8**	**65,5**	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari

berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

a. Rendah = di bawah 10 %
b. Sedang = 10-19 %
c. Tinggi = 20-29 %
d. Sangat Tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

C. Kemiskinan

1. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. ***Kemiskinan Relatif***, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.

2. ***Kemiskinan Absolut***, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2 per hari.
3. ***Kemiskinan Struktural,*** kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, dan kemiskinan kultural (karena faktor adat).

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya



Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat bahwa Garis kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 269,835 atau sebesar 6.04% dan Tahun 2014 turun menjadi 286,612 atau sebesar 5,45%. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.49 berikut:

Table 2.49
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 s/d Tahun 2014

Kabupaten/Kota	2010			2011			2012			2013			2014		
	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM	GK	PO	PM
	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)	Rp./Kap/ Bln	%	(000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sambas	203,325	10.08	50.00	232,581	9.38	46,98	266,047	8.88	44.450	278,704	9,9	51,2	314,144	9,46	42,26
Bengkayang	185,843	7.82	16.80	210,755	7.25	15,785	239,006	6.74	14.943	240,704	8,01	18,4	261,184	7,2	16,87
Landak	188,022	14.06	46.50	217,071	13.13	43,691	250,608	12.41	41.331	252,336	14,18	49,5	277,718	13,71	45,55
Pontianak	180,322	6.41	15.00	206,338	5.97	14,094	236,107	5.64	13.334	240,081	6,3	15,6	253,170	6	15
Sanggau	167,522	5.02	20.50	191,732	4.67	19,262	219,441	4.4	18.254	222,877	4,71	20,4	235,298	4,47	19,69
Ketapang	225,545	13.67	58.50	259,1	12.75	54,966	297,647	11.91	52.017	310,504	12,85	58,8	330,786	11,6	54,2
Sintang	253,855	9.76	35.50	288,409	9.07	33,356	327,666	8.55	31.589	358,693	10,09	39	389,160	9,11	35,73
Kapuas Hulu	221,889	11.39	25.30	253,68	10.61	23,772	290,026	9.95	22.509	304,138	11,11	26,4	323,786	10,03	24,26
Sekadau	173,411	6.77	12.20	197,747	6.30	11,557	225,498	5.93	10.971	229,464	6,93	13,2	240,819	6,31	12,12
Melawi	252,821	13.77	24.70	296,06	12.93	23,302	346,694	12.1	22.036	371,723	13,7	26	378,309	12,4	23,97
Kayong Utara	158,862	11.69	11.20	183,174	10.91	10,523	211,207	10.16	9.931	207,989	10,87	11,1	217,147	9.55	9,92
Kubu Raya	***196,633***	***7.14***	***35.90***	***227,635***	***6.67***	***33,731***	***263,525***	***6.27***	***31.871***	***269,835***	***6,04***	***32,1***	***286,612***	***5,45***	***29,47***
Kota Pontianak	242,772	6.62	36.60	274,647	6.15	34,389	310,707	5.77	32.535	341,422	5,56	32,8	369,079	5,15	30,93
Kota Singkawang	237,245	6.12	11.40	271,004	5.69	10,711	309,567	5.32	10.119	320,211	6,5	13	355, 133	5,588	11,97
Provinsi	**198,886**	**9.30**	**400.10**	**219,636**	**8.48**	**376,12**	**239,162**	**7.96**	**355.700**	**270,305**	**8,74**	**407,3**	**298,212**	**8,07**	**382**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat
Data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

D. Kepemilikan Tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)

Jumlah penduduk yang memiliki tanah di Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh Bagian Pertanahan Sekreatariat Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun Instansi teknis yang membidangi yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya.

E. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 150.651 jiwa (65,59%) dan perempuan 79.035 jiwa (34,41%). Sedangkan jumlah penduduk yang mencari kerja (menganggur) untuk laki-laki berjumlah 8.777 jiwa (58%) dan perempuan sebesar 6.355 (42%). Data menurut golongan umur, Rasio Penduduk yang Bekerja dan Mencari Kerja (Menganggur) dengan sampai per Bulan Mei Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2.50
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Kelompok Umur	Angkatan Kerja												Jumlah	% AK
	Bekerja						Mencari Kerja (Menganggur)							
	Laki-laki		Perempuan		L + P		Laki-laki		Perempuan		L + P			
	n	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
15 -19	15.825	6,89	9.279	4,04	25.105	10,93	1.194	7,89	990	6,54	2.184	14,43	27.288	11,15
20 – 24	15.963	6,95	13.620	5,93	29.584	12,88	1.203	7,95	867	5,73	2.070	13,68	31.654	12,93
25 – 29	21.797	9,49	15.021	6,54	36.819	16,03	982	6,49	944	6,24	1.926	12,73	38.745	15,83
30 – 34	23.015	10,02	9.968	4,34	32.983	14,36	987	6,52	884	5,84	1.870	12,36	34.853	14,24
35 – 39	19.431	8,46	9.463	4,12	28.894	12,58	976	6,45	776	5,13	1.752	11,58	30.647	12,52
40 – 44	19.730	8,59	6.753	2,94	26.483	11,53	997	6,59	596	3,94	1.593	10,53	28.076	11,47
45 – 49	13.299	5,79	6.638	2,89	19.937	8,68	788	5,21	525	3,47	1.313	8,68	21.250	8,68
50 – 54	8.246	3,59	4.732	2,06	12.977	5,65	695	4,59	312	2,06	1.006	6,65	13.984	5,71
55 – 59	8.315	3,62	1.631	0,71	9.945	4,33	548	3,62	259	1,71	807	5,33	10.752	4,39
60 – 64	5.030	2,19	1.929	0,84	6.959	3,03	407	2,69	203	1,34	610	4,03	7.569	3,09
Jumlah	150.651	65,59	79.035	34,41	229.686	100,00	8.777	58,00	6.355	42,00	15.132	100,00	244.818	100,00

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Dari data penduduk berdasarkan angkatan kerja menurut golongan umur dan jenis kelamin, golongan umur yang paling tinggi bekerja adalah 30-34 tahun untuk laki-laki sebesar 23.015 orang (10,02%) dan 25-29 tahun untuk perempuan sebesar 15.021 orang (6,54%). Untuk kelompok umur yang terkecil bekerja laki-laki kelompok 60-64 tahun sebesar 5.030 orang (2,19%) dan perempuan kelompok 55-59 tahun sebesar 1.631 orang (0,71%). Sedangkan golongan umur laki-laki yang mencari kerja (pengangguran) terbanyak berumur 15-19 tahun sebesar 1.203 orang (7,95%) dan perempuan golongan umur 15-19 tahun sebesar 990 orang (6,54%). Untuk kelompok umur terkecil yang menganggur laki-laki kelompok 60-64 tahun sebesar 407 orang (2,69%) dan perempuan kelompok 60-64 tahun sebesar 203 orang (1,34%).

F. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Berdasarkan data dari Bagian Operasi Polda Kalimantan Barat angka kriminalitas Angka Kriminalitasberdasarkan jenis criminal sebanyak 165 kejadian dengan jenis kriminal tertinggi pada pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 75 kejadian, diikuti dengan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 44 kejadian, dan penganiayaan berat sebanyak 21 kejadian. Sedangkan jumlah kriminal yang tertangani sebanyak 41 kejadian. Angka Kriminal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.51 berikut:

Tabel 2.51
Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Jenis Kriminal	Kejadian	Tertangani
1	*2*	*3*	*4*
1	Pembunuhan	-	1 (Perkara Tahun 2013)
2	Penganiayaan Berat	21	15
3	Penculikan	1	1
4	Pencurian dengan Kekerasan	17	11
5	Pencurian dengan Pemberatan	75	17
6	Pencurian Ranmor	44	5
7	Pencurian Kawat Telepon	-	-
8	Pemerkosaan	4	1
9	Pembakaran	-	-
10	Senpi/Handak	-	-
11	Pemerasan	3	2
12	Penyelundupan	-	-
13	Kejahatan Terhadap Kepala Daerah	-	-
	Jumlah	**165**	**53**

Sumber : Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2016

2.1.3.3 Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.Menurut data dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 jumlah grup kesenian sebanyak 57 grup kesenian dan 60 jumlah klub olahraga dan 15 Unit jumlah Gedung Olahraga. Tahun 2016 data per Bulan Mei tercatat sebanyak 120 grup kesenian, 86 jumlah klub olahraga dan 27 Unit jumlah Gedung Olahraga. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.52 berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	57	110	117	118	120
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	60	80	80	83	86
4	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	15	18	18	25	27

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**Data sementara*

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Pendidikan Dasar

1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah

murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perkembangan APS Pendidikan Dasar SD/MI mengalami tren naik turun dari Tahun Tahun berikutnya begitu juga dengan SMP/MTs. APS SD/MI Tahun 2012 sebesar 88,98 dan menjadi 89,59 pada Tahun 2015, sedangkan untuk Tahun 2016 angka APS SD/MI data sementara sampai per Bulan Mei 2016 adalah 99,00. APS SMP/MTs Tahun 2012 sebesar 74,05 dan menjadi 67,96 pada Tahun 2015, sedangkan untuk Tahun 2016 angka APS SMP/MTs sementara data per Bulan Mei 2016 adalah 81,86. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	59.982	60.840	61.697	63.164	66.648
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	67.412	68.441	69.471	70.500	67.438
	Rasio APS SD/MI	**88,98**	**88,89**	**88,81**	**89,59**	**99,00**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	22.477	23.083	23.688	24.294	26.629
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15Tahun	32.943	33.873	34.803	35.734	32.698
	Rasio APS SMP/MTs	**74,05**	**68,15**	**68,06**	**67,96**	**81,86**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah untuk Kabupaten Kubu Raya

untuk SD/MI Tahun 2012 sebesar 49,09 dan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 adalah 79,18 ; sedangkan rasio untuk SMP/MTs Tahun 2012 sebesar 33,06 dan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 adalah 69,12. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	336	353	358	367	534
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	68.441	69.471	70.500	73.493	67.438
	Rasio	**49,09**	**50,81**	**50,78**	**49,94**	**79,18**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	112	112	118	131	226
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	33.873	34.803	35.734	37.886	32.698
	Rasio	**33,06**	**32,18**	**33,02**	**34,58**	**69,12**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

1.1.3 Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Di Kabupaten Kubu Raya jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar dari Tahun 2012 terus meningkat dari Tahun ke Tahun begitu juga dengan Jumlah Guru dan Murid untuk Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2012 sebanyak 3.740 guru yang dibagi menurut guru tetap dan guru honorer dengan jumlah murid sebanyak 63.688 siswa dengan Rasio sebesar 58,72; dan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 sebanyak 4.390 guru yang dibagi menurut guru tetap dan guru honorer dengan jumlah murid sebanyak 76.765 siswa dengan Rasio sebesar 57,19. Demikian juga dengan SMP/MTs, pada tahun 2012 jumlah guru SMP/MTs berjumlah 603 dengan jumlah murid 20.719 dengan rasio 29,10. Demikian juga pada tahun 2016 sebanyak 2.455 guru dengan jumlah murid 31.272 dengan rasio 78,50.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.55 berikut:

Tabel 2.55
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Guru	3.740	3.835	3.813	3.869	4.390
	- Guru Tetap	3.271	3.367	3.314	3.357	2.595
	- Guru Honorer	469	486	499	512	1.795
1.2	Jumlah Murid	63.688	68.282	68.284	70.081	76.765
	Rasio	**58,72**	**56,16**	**55,84**	**55,21**	**57,19**
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	603	1.017	1.034	1.048	2.455
	- Guru Tetap	488	893	901	912	854
	- Guru Honorer	115	124	133	136	1.601
2.2.	Jumlah Murid	20.719	22.956	25.568	28.283	31.272
	Rasio	**29,10**	**44,30**	**40,44**	**37,05**	**78,50**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

1.2 Pendidikan Menengah

1.2.1 Angka Partsipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 Tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS untuk jenjang pendidikan menengah tahun 2012 sebesar 47,20, tahun 2013 sebesar 49,64, menjadi 40,45 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 53,11 pada tahun 2015 dan hasil data sementara per bulan Mei untuk tahun 2016 sebesar 45,82.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.56 berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SMA/MAN**					
1.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Tahun	14.228	15.275	17.116	17.006	16.795
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	30.142	30.769	31.395	32.021	27.907
	APS SMA/MAN	**47,20**	**49,64**	**54,52**	**53,11**	**62,84**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SMA/MAN dari Tahun ke Tahun mengalami trend menurun. Pada tahun 2012 Rasio ketersediaan sekolah sebesar 11,74, naik menjadi 27,30 di tahun 2013, kemudian naik kembali menjadi 29,62 pada tahun 2014. Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah SMA/MAN terhadap jumlah penduduk usia 16-18 Tahun sebesar 31,54 dan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 menjadi 40,13.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.57 berikut:

Tabel 2.57
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SMA/MAN**					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	75	84	93	101	112
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	30.142	30.769	31.395	32.021	27.907
	Rasio	**11,74**	**27,30**	**29,62**	**31,54**	**40,13**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

1.2.3 Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah guru SMA/MAN Tahun 2012 sebanyak 500 guru berdasarkan jumlah guru tetap dan guru honorer dengan Jumlah Murid sebanyak 14.228 murid dengan Rasio sebesar 35,14 dan pada Tahun 2016 berdasarkan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 jumlah guru sebanyak 1.289 yang berdasarkan guru tetap dan guru honorer dengan jumlah murid sebanyak 20.280 murid dengan rasio 63,56. Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.58 berikut:

Tabel 2.58
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SMA/MAN**					
1.1.	Jumlah Guru	500	457	496	505	1.289
	- Guru Tetap	424	381	418	424	396
	- Guru Honorer	76	76	78	81	893
1.2.	Jumlah Murid	14.228	15.275	17.116	17.006	20.280
	Rasio Guru : Murid (%)	**35,14**	**29,92**	**28,98**	**29,69**	**63,56**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

2. Kesehatan

1.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan

yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Jumlah Posyandu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat dari 360 Posyandu di tahun 2012 menjadi 371 Posyandu di tahun 2013, sedangkan jumlah Posyandu pada tahun 2014 berjumlah 376 sama dengan tahun 2015, ditargetkan jumlah posyandu menjadi 413 di tahun 2016. Jumlah Balita pada Tahun 2012 adalah 49.926, sedangkan pada tahun 2013 menjadi 53.392 Balita. Untuk Tahun 2014 data jumlah Balita adalah 54.392 dan Tahun 2015 berjumlah 54.927. Jumlah Balita diperkirakan akan bertambah menjadi 55.804 di Tahun 2016. Jumlah Posyandu dan Balita tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya serta Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.59
Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Posyandu	360	371	376	376	413
2.	Jumlah Balita	49.926	53.392	54.392	54.927	55.804
	Rasio	**0,00721**	**0,00695**	**0,00691**	**0,00692**	**0,00740**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.60
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Batu Ampar	46	3.688	1 : 80
2	Terentang	30	1.134	1 : 38
3	Kubu	17	5.195	1 : 306
4	Teluk Pakedai	23	2.091	1 : 91
5	Sungai Kakap	66	11.273	1 : 171
6	Rasau Jaya	21	2.618	1 : 125
7	Sungai Raya	99	20.943	1 : 212
8	Sungai Ambawang	47	7.339	1 : 157
9	Kuala Mandor B	27	2.657	1 : 99
	Jumlah	**376**	**55.804**	**1 : 149**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

1.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah Puskesmas Tahun 2012 sama dengan tahun 2013 sebanyak 19 Unit, Tahun 2014 sama dengan tahun 2015 sebanyak 20 Unit dan Pada Tahun 2016 juga sebanyak 20 Unit. Jumlah Poliklinik pada Tahun 2012 sama dengan Tahun 2013 sebanyak 87 Unit dan di Tahun 2014 sama dengan tahun 2015 serta 2016 sebanyak 112 Unit. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Ketersediaan Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.61
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	20	20	20
2.	Jumlah Poliklinik	87	87	112	112	112
3.	Jumlah Pustu	65	67	71	71	71
4.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
5.	**Rasio Puskesmas (%)**	**0,0034**	**0,0032**	**0,0034**	**0,0034**	**0,00033**
6.	**Rasio Poliklinik (%)**	**0,0154**	**0,0147**	**0,0188**	**0,0188**	**0,0187**
7.	**Rasio Pustu (%)**	**0,0115**	**0,0113**	**0,0117**	**0,0117**	**0,0118**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.62
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio(%)	Jumlah	Rasio(%)	Jumlah	Rasio(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*	*6*	*7=6/3*	*8*	*9=8/3*
1	Batu Ampar	36.472	3	0,0084	16	0,0446	5	0,0139
2	Terentang	13.135	2	0,0158	10	0,0789	8	0,0631
3	Kubu	42.455	2	0,0047	9	0,0212	11	0,0259
4	Teluk Pakedai	20.177	1	0,0047	14	0,0657	8	0,0375
5	Sungai Kakap	121.393	3	0,0025	17	0,0140	10	0,0082
6	Rasau Jaya	30.334	1	0,0034	6	0,0204	2	0,0068
7	Sungai Raya	227.714	4	0,0018	20	0,0088	14	0,0062
8	Sungai Ambawang	76.797	3	0,0039	14	0,0184	8	0,0105
9	Kuala Mandor B	29.025	1	0,0032	6	0,0192	5	0,0160
	Jumlah	**597.502**	**20**	**0,00483**	**112**	**0,2913**	**71**	**0,1883**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

1.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 serta jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.63
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	2	2	2	2	2

4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	2
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	3	3	3	3	4
7.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	597.502
	Rasio (%)	**0,000530**	**0,000507**	**0,000503**	**0,000502**	**0,000669**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
****)Data sementara***

Tabel 2.64
Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	RSU (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio(%)	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio(%)	Jumlah	Rasio(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Batu Ampar	36.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	13.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	42.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	20.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	121.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	30.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	227.714	-	-	-	-	2	0,0009	-	-	2	0,0009	3	0,0022
8	Sungai Ambawang	76.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	29.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**597.502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**0,0009**	**-**	**-**	**2**	**0,0009**	**3**	**0,0022**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

1.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Saat ini rasio dokter umum dan dokter spesialis di Kubu Raya adalah 5,3 per 100.000 penduduk. Artinya tiap 6 dokter melayani 100.000 penduduk. Kondisi ini jauh dari rasio ideal yaitu 30 per 100.000 penduduk (satu dokter untuk 3334 penduduk). Ini artinya Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan 145 dokter lagi.

Jumlah Dokter Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah Dokter. Untuk Tahun 2012 sebanyak 28 Dokter, dan Tahun 2015 menjadi 36 Dokter. Jumlah Dokter Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 serta Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.65
Jumlah Dokter Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Dokter **(a)**	28	32	36	36	36
2	Jumlah Penduduk **(b)**	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
	Rasio a : b	**1:20.228**	**1:18.475**	**1:16.574**	**1:16.597**	**1:16.763**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.66
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*
1	Batu Ampar	36.472	3	0,0082
2	Terentang	13.135	2	0,0152
3	Kubu	42.455	1	0,0023
4	Teluk Pakedai	20.177	3	0,0148
5	Sungai Kakap	121.393	7	0,0057

6	Rasau Jaya	30.334	2	0,0065
7	Sungai Raya	227.714	9	0,0039
8	Sungai Ambawang	76.797	7	0,0091
9	Kuala Mandor B	29.025	2	0,0068
	Jumlah	**597.502**	**36**	**0,0603**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

1.5 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan dari Tahun 2012 sebanyak 375 Tenaga Medis menjadi 429 Tenaga Medis pada Tahun 2016. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 serta Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.67
Jumlah Tenaga Medis
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Tenaga Medis **(a)**	375	377	386	421	429
2	Jumlah Penduduk **(b)**	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
	Rasio a : b (%)	**0,0662**	**0,0638**	**0,0647**	**0,0704**	**0,0711**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.68
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kab. Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*
1	Batu Ampar	36.472	33	0,09048
2	Terentang	13.135	20	0,15226
3	Kubu	42.455	28	0,06595
4	Teluk Pakedai	20.177	15	0,07434
5	Sungai Kakap	121.393	90	0,07414
6	Rasau Jaya	30.334	30	0,09890
7	Sungai Raya	227.714	122	0,05358
8	Sungai Ambawang	76.797	61	0,07943
9	Kuala Mandor B	29.025	22	0,07580
	Jumlah	**597.502**	**421**	**0,07046**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

3. Lingkungan Hidup

3.1 Persentase Penanganan Sampah

Persentase jumlah volume Sampah dan produksi sampah yang terangkut Tahun 2012 sebesar 28,84 % dan sampai Bulan Mei Tahun 2016 diprediksi mencapai 37,33%. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.69
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012 (M^3)	2013 (M^3)	2014 (M^3)	2015 (M^3)	2016*) (M^3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani **(a)**	27.720	27.720	28.710	49.500	50.400
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah **(b)**	96.120	99.360	102.600	105.840	135.000
	Rasio a : b (%)	**28,84**	**27,90**	**27,98**	**46,77**	**37,33**

Sumber : Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.70
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang Ditangani (M^3/hari) (*)	Jumlah Volume Produksi Sampah (M^3/hari) (*)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=3/4*
1	Batu Ampar	-	-	-
2	Terentang	-	-	-
3	Kubu	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-
5	Sungai Kakap	15	65	23,07
6	Rasau Jaya	15	35	42,85
7	Sungai Raya	85	210	40,48
8	Sungai Ambawang	25	65	38,46
9	Kuala Mandor B	-	-	
	Jumlah	**140**	**375**	**37,33**

Sumber: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
**) Data sementara*

3.2 Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.Pada umumnya Penduduk Kabupaten Kubu Raya hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air minum sehari-hari yang ditampung pada gentong/tempayan. Untuk Air leding/PAM di Kabupaten Kubu Raya dari 9 (Sembilan) Kecamatan hanya 3 (tiga) Kecamatan yang mendapat sambungan PDAM yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Kakap dengan 13.593 jumlah sambungan pelanggan. Kecamatan Sungai Raya sebanyak 13.323 sambungan yang terdiri dari 11.991 sambungan dari Unit Sungai Raya, 824 sambungan dari Unit Kuala Dua dan 508 sambungan dari Unit Kapur, Kecamatan Kuala Mandor sebanyak 70 sambungan dan Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 200 sambungan pelanggan.

Jumlah Pelanggan dan Jumlah Air yang terpakai Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71
Jumlah Pelanggan dan Air Terpakai Tahun 2015
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Pelanggan(*)	Jumlah Air Yang Terpakai (M^3) (*)
1	*2*	*3*	*4*
1	Batu Ampar	-	-
2	Terentang	-	-
3	Kubu	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-
5	Sungai Kakap	200	2.403
6	Rasau Jaya	-	-
7	Sungai Raya	*13.323*	*150.511*
	- Sungai Raya	11.991	131.209
	- Kuala Dua	824	11.347
	- Kapur	508	7.955
8	Sungai Ambawang	-	-
9	Kuala Mandor B	70	801
	Jumlah	**13.593**	**153.715**

Sumber: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

3.3 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.72 berikut:

Tabel 2.72
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Luas Area Permukiman Tertata					
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan					
3	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata					

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan KebersihanKabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**Data sementara*

Persentase luas permukiman yang tertata untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

4. Sarana dan Prasarana Umum

4.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan

   Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis *("engineering criteria")* yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

2. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi
   Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat.
3. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan
   Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Kondisi panjang jalan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 sepanjang 542.024 Km, dengan kondisi baik sepanjang 231,378 Km atau sebesar 42,69%, kondisi sedang rusak 0%, kondisi rusak sepanjang 266.668 Km atau sebesar 49,20% dan kondisi rusak berat sepanjang 43.978 Km atau 8,11%. Sedangkan pada Tahun 2014 kondisi panjang jalan sepanjang 529.357 Km dengan kondisi baik sepanjang 202.005 atau sebesar 38,16%, kondisi sedang rusak sepanjang 38.181 atau sebesar 38,16%, kondisi rusak sepanjang 55.416 Km atau 10,47% dan kondisi rusak berat sepanjang 233.755 Km atau sebesar 44,16%. Berdasarkan data yang ada kondisi jalan di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan pada kondisi baik, sedang rusak dan rusak dari Tahun ke Tahun, sedangkan kondisi rusak berat makin meningkat dari Tahun ke Tahun dari 8,11% di Tahun 2012 menjadi 44,16% pada Tahun 2014. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kondisi Baik	217.017	200.017	220.788	202.005	230.000
2.	Kondisi Sedang Rusak	-	-	64.024	38.181	25.080
3.	Kondisi Rusak	290.795	100.700	23.892	55.416	63.007
4.	Kondisi Rusak Berat	34.212	104.212	220.653	233.755	222.211
	Jumlah	**542.024**	**542.024**	**529.357**	**529.357**	**540.298**

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Dari panjang jalan berdasarkan kondisi menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya dapat kita lihat persentase jalan kondisi baik sebesar 38,16%, kondisi sedang rusak sebesar 7,21%, kondisi rusak sebesar 10,47% dan rusak berat sebesar 44,16%. Dari kondisi jalan rusak berat persentase paling tinggi ada pada Kecamatan Sungai Raya sebesar 15,17% diikuti Kecamatan Kubu sebesar 11,25%, sedangkan Kecamatan terentang memiliki kondisi jalan rusak berat terendah yaitu 1,43%.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan Secara Keseluruhan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	45.878	11.249	1.920	11.084	70.131
2	Terentang	5.154	8.367	2.688	7.564	23.773
3	Kubu	8.833	1.298	16.016	59.547	85.694
4	Teluk Pakedai	8.757	2.868	2.596	12.901	27.122
5	Sungai Kakap	44.780	1.258	11.156	14.800	71.994
6	Rasau Jaya	22.732	1.763	7.185	14.007	45.687
7	Sungai Raya	40.691	5.628	3.559	80.288	130.166
8	Sungai Ambawang	18.204	5.750	9.853	16.870	50.677
9	Kuala Mandor B	6.976	-	443	16.694	24.113
	Jumlah	**202.005**	**38.181**	**55.416**	**233.755**	**529.357**

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

4.2 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Jaringan irigasi selain ditunjang oleh sumber dana dari anggaran APBD juga ditunjang dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 747.700.000,00, Tahun 2011 sebesar Rp. 3.810.600.000,00, dan Tahun 2015 sebesar Rp. 5.011.070.000,00. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.75

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jaringan Primer	-	-	-	-	-
2.	Jaringan Sekunder	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Tersier	-	-	-	-	-
4.	Luas Lahan Budidaya	-	-	-	-	-
	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

**) Data sementara*

Tabel 2.76

Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4+5*	*7*	*8=6/7*
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya. Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply* (RWS) merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman.PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.77
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Pasokan Irigasi	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pasok Irigasi Per Area	-	-	-	-	-
2.	Pasok Irigasi Relatif	-	-	-	-	-
3.	Pasok Air Relatif	-	-	-	-	-
4.	Indek Luas Areal	-	-	-	-	-
5.	Rancangan Luas Areal	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.78

Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/dtk)	Total Pasok Air (lt/dtk)	PIA (lt/dtk/ha)	PIR (lt/dtk/ha)	PAR (lt/dtk/ha)	IA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=6/4*	*10=7/5*	*11=8/5*	*12=4/3*
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Rasio Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya.

4.3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya pada Data Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013 Publikasi Tahun 2014, jumlah tempat ibadah Agama Islam Tahun 2013 sebanyak 1.143 tempat ibadah dengan 540 jumlah Mesjid dan 603 Surau dengan jumlah pemeluk sebanyak 413.122 orang dengan rasio sebesar 361,473. Gereja Khatolik sebanyak 68 Gereja dengan jumlah pemeluk sebanyak 27.662 orang dengan rasio sebesar 406,794. Gereja Protestan sebanyak 68 Gereja dengan jumlah pemeluk sebanyak 39.369 dengan rasio sebesar 578,956. Pura sebanyak 5 Pura dengan jumlah pemeluk sebanyak 4.121 dengan rasio sebesar 824,200. Vihara sebanyak 23 Vihara dengan jumlah pemeluk sebanyak 39.780 orang dengan rasio sebesar 1.729,565, sedangkan Kelenteng sebanyak 22 Kelenteng dengan jumlah emeluk sebanyak 5.266 orang dengan rasio sebesar 239,364. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 sampai denganTahun 2013 dan Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.79

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya

NO	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2010			Tahun 2013		
		Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*	*6*	*7*	*8=7/6*
1.	- Mesjid - Surau	538 506	400.411	383,535	540 603	413.122	361,437
2.	Gereja Khatolik	74	31.636	427,514	68	27.662	406,794
3.	Gereja Ptotestan	33	29.043	880,091	53	39.369	742,811
4.	Pura	5	4.203	840,600	5	4.121	824,200
5.	Vihara	23	33.192	1.433,130	23	39.780	1.729,565
6.	Kelenteng	22	2.485	112,955	22	5.266	239,364

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.80
Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Mesjid/Surau				Gereja Khatolik			Gereja Protestan			Pura			Vihara			Kelenteng		
		Mesjid (Unit)	Surau (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	Batu Ampar	50	31	29.129	359,617	6	1.663	277,167	1	1.195	1.195,000	-	-	-	2	2.361	1180,5	1	206	206
2	Terentang	22	30	8.511	163,673	3	987	329,000	5	628	125,600	-	-	-	3	565	188,3333	1	29	29
3	Kubu	54	12	30.102	456,091	13	2.081	160,077	3	2.953	984,333	-	701	-	4	1.464	366	-	133	-
4	Teluk Pakedai	47	24	17.371	244,662	2	243	121,500	-	583	-	-	101	-	-	1.251	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	72	99	96.214	562,655	4	1.426	356,500	2	1.989	994,500	1	276	276	8	7.312	914	6	1.722	287
6	Rasau Jaya	33	54	24.125	277,299	3	379	126,333	3	377	125,667	1	59	59	1	183	183	-	-	-
7	Sungai Raya	137	116	137.139	542,051	8	13.887	1735,875	6	17.654	2.942,333	3	2.785	928,333	5	24.997	4999,4	-	2.423	-
8	Sungai Ambawang*)	68	145	46.836	219,887	27	6.462	239,333	20	13.875	693,750	-	126	-	-	1.492	-	-	753	-
9	Kuala Mandor B	57	92	23.695	159,027	2	534	267,000	13	115	8,846	-	73	-	-	155	-	-	-	-
	Jumlah	**540**	**603**	**413.122**	**361,437**	**68**	**27.662**	**406,794**	**53**	**39.369**	**413.122**	**5**	**4.121**	**413.122**	**23**	**39.780**	**1729,565**	**8**	**5.266**	**658,25**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

a. Fasilitas air bersih
b. Pembuangan tinja
c. Pembuangan air limbah (air bekas)
d. Pembuangan sampah

Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2012 jumlah rumah tinggal 113.375 unit dan di Tahun 2016 diperkirakan berjumlah 125.974 unit. Untuk jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi pada Tahun 2012 berjumlah 40.135 unit dan di Tahun 2016 menjadi 103.159 unit.

Hasil analisis data Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	40.135	62.100	79.055	83.159	103.159
2.	Jumlah Rumah Tinggal	113.375	117.357	119.864	121.864	125.974
	Persentase	**35,40**	**52,92**	**65,95**	**68,24**	**81,89**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.82
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*
1	Batu Ampar	5.905	8.485	69,59%
2	Terentang	1.927	2.857	67,45%
3	Kubu	5.305	9.075	58,46%
4	Teluk Pakedai	2.205	4.548	48,48%
5	Sungai Kakap	25.701	19.933	77,56%

6	Rasau Jaya	4.406	6.362	69,25%
7	Sungai Raya	47.231	44.260	93,71%
8	Sungai Ambawang	14.612	15.909	91,85%
9	Kuala Mandor B	4.606	5.806	79,33%
	Jumlah	**103.159**	**125.974**	**81,89%**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan.

Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.83 berikut:

Tabel 2.83

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011			2014		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung	Jumlah	Luas	Daya Tampung
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	-	-	-	-	-	-
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	-	-	-	-	-	-
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Tempat Pemakaman	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Penduduk (jiwa)	549.216	-	-	596.669	-	-
7	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

4.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah pendudukTahun 2011 sampai denganTahun 2015 berdasarkan Jumlah TPS dirasakan masih kurang karena TPS yang ada hanya mencukupi jumlah penduduk sekitar TPS tidak berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan. Begitu juga halnya dengan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut Kecamatan, selain Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan-Kecamatan lain tidak tersebar secara merata seperti Kecamatan Sungai Kakap hanya ada di Desa Sungai Rengasserta Kecamatan Sungai Ambawang hanya terdapat di Desa Sungai Ambawang Kuala. Sedangkan untuk beberapa Kecamatan tidak ada TPS yang terbangun di Kecamatan seperti Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Kuala Mandor B.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.84

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Jumlah TPS	15	15	15	25
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (M^3)	70	70	72,5	125
3.	Jumlah Penduduk Yang Lokasi ada TPS (Jiwa)	227.974	231.455	236.338	261.891
4.	Rasio Daya Tampung TPS Terhada Jumlah Penduduk (M^3/Jiwa)	0,000307	0,000302	0,000307	0,000477

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Tabel 2.85

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Ada Lokasi TPS (Jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (M^3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/3*
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	22.096	1	5	0,000226
6	Rasau Jaya	-	-	-	-
7	Sungai Raya	226.638	20	100	0,000441
8	Sungai Ambawang	13.157	4	20	0,000152
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	Jumlah	**261.891**	**25**	**125**	**0,000477**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

4.7 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.Rumah layak huni di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2011 sebanyak 67.324 rumah dan 94. 016 rumah di Tahun 2015.

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.86

Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	73.085	81.102	94.016	94.016
	Rasio	**0,1290**	**0,1372**	**0,1576**	**0,1545**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

4.8 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.87

Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Permukiman Layak Huni	-	-	-	-	-
2.	Total Luas Permukiman	-	-	-	-	-
	Rasio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**Data sementara*

Rasio permukiman layak huni untuk saat ini belum tersedia oleh SKPD teknis yang membidangi yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.

5. Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

5.2 Rasio Bangunan ber IMB Per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.Jumlah bangunan yang ber IMB di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mengalami naik dan turun rasio bangunan yang memiliki IMB dari 0,207 pada Tahun 2012 naik menjadi 0,218

di Tahun 2013, kemudian mengalami penurunan 0,157 pada Tahun 2014 dan naik kembali pada Tahun 2015 sebesar 0,164 dan naik lagi per Bulan Mei Tahun 2016 sebesar 0,165. Data bangunan yang memiliki IMB berdasarkan data dari berkas IMB yang masuk dan yang telah disetujui secara teknis.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.88
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.168	1.411	1.600	1.682	1.715
2.	Jumlah Bangunan	5.640	6.464	10.162	10.262	10.376
	Rasio Bangunan Ber-IMB	**0,207**	**0,218**	**0,157**	**0,164**	**0,165**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.89
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2016
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*
1	Batu Ampar	-	-	-
2	Terentang	-	-	-
3	Kubu	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-
5	Sungai Kakap	3.577	274	0,077
6	Rasau Jaya	155	-	-
7	Sungai Raya	4.758	1.043	0,219
8	Sungai Ambawang	1.885	398	0,211
9	Kuala Mandor B	-	-	-
	Jumlah	**10.376**	**1.715**	**0,507**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Dari Tabel diatas daari 10.162 jumlah bangunan hanya 1.682 bangunan yang memiliki IMB.

6. Perhubungan

6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum berdasarkan penumpang bis/angkot dari Tahun ke Tahun menunjukkan penurunan dikarenakan masyarakat sudah banyak memiliki kendaraan sendiri baik sepeda motor maupun kendaraan bermotor lainnya, akan tetapi jumlah penumpang kapal pedalaman mengalami kenaikan jumlah penumpang begitu juga dengan jumlah penumpang pesawat udara mengalami kenaikan jumlah dari Tahun ke Tahun. Jumlah penumpang bis/angkot pada Tahun 2012 berjumlah 349.979 jiwa dan menurun pada Tahun 2015 menjadi 140.929. Jumlah penumpang kapal pedalaman pada Tahun 2012 berjumlah 51.360 jiwa dan data per Bulan Mei Tahun 2016 berjumlah 32.742 jiwa. Sementara jumlah penumpang pesawat udara di Tahun 2012 adalah 2.288.816 jiwa, pada Tahun 2013 naik menjadi 2.242.610 jiwa, kemudian terakhir di Tahun 2014 meningkat lagi 2.568.706 jiwa, sementara mulai Tahun 2015 pendataan dikembalikan ke Angkasa Pura Supadio.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.90
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1.	Jumlah Penumpang Bis/Angkot	349.979	339.271	140.929	140.929	-
2.	Jumlah Penumpang Kapal Pedalaman	51.360	50.995	69.005	69.005	32.742
3.	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	2.288.816	2.242.610	2.568.706	-	-
	Jumlah	**2.690.155**	**2.632.876**	**2.820.827**	**209.934**	**37.472**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.91
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penumpang			Total Jumlah Penumpang
		Bis	Kapal Pedalaman	Pesawat Udara	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	13.725	-	13.725
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	24.538	-	-	24.538
6	Rasau Jaya	-	55.273	-	55.273
7	Sungai Raya	113.471	-	-	113.478
8	Sungai Ambawang	2.920	-	-	2.920
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	Jumlah	**140.929**	**69.005**	**-**	**209.934**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

6.2 Rasio Ijin Trayek

Ijin Trayek untuk trayek perdesaan tidak ada penambahan ijin sehingga dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 berjumlah 62 Ijin. Untuk Ijin Trayek Kapal Pedalaman bertambah dari Tahun-tahun sebelumnya, ijin trayek kapal pedalaman pada Tahun 2012 sebanyak 37 ijin dan di Tahun 2013 sebanyak 42 ijin, di Tahun 2014 naik menjadi 52 ijin dan naik drastis pada Tahun 2015 menjdi 156 ijin dan data per Bulan Mei Tahun 2016 menjadi 213 ijin.

Rasio Ijin Trayek Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.92
Rasio Ijin Trayek Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Izin Trayek Perdesaan	62	62	62	-	-
2.	Izin Trayek Kapal Pedalaman	37	42	52	156	213
3.	Jumlah Izin Trayek	99	104	114	156	213
4.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
6.	Rasio Izin Trayek	0,00017	0,00018	0,00019	0,00026	0,00035

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.93
Rasio Ijin Trayek Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Izin Trayek		Total Jumlah Izin Trayek	Rasio Izin Trayek
			Perdesaan	Kapal Pedalaman		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4+5*	*(7=6/3)*
1	Batu Ampar	35.886	-	6	6	0,000167
2	Terentang	12.673	-	1	1	0,000078
3	Kubu	42.424	-	13	13	0,000306
4	Teluk Pakedai	21.316	-	5	5	0,000235
5	Sungai Kakap	121.231	-	3	3	0,000025
6	Rasau Jaya	29.344	-	20	20	0,000682
7	Sungai Raya	226.638	62	4	66	0,000291
8	Sungai Ambawang	75.964	-	62	62	0,000000
9	Kuala Mandor B	31.193	-	-	-	-
	Jumlah	**596.669**	**62**	**52**	**114**	**0,000191**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

6.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Dari data dibawah jumlah mobil penumpang umum, mobil bus maupun mobil barang pada umumnya lebih sedikit dari jumlah KIR. Untuk mobil penumpang umum Tahun 2012 berjumlah 288 dan yang melakukan KIR berjumlah 280 dan Tahun 2014 berjumlah 115 dan yang melakukan KIR berjumlah 94, data per Bulan Mei Tahun 2016 baru 34 yang melakukan KIR dari total 262 mobil penumpang umum yang ada. Begitu juga untuk Mobil Bus untuk Tahun 2012 berjumlah 84 dan yang melakukan KIR berjumlah 82 dan Tahun 2014 berjumlah 62 dan yang melakukan KIR berjumlah 48, data per Bulan Mei Tahun 2016 baru 27 yang melakukan KIR dari total 81 mobil bus yang ada. Untuk mobil barang mengalami kenaikan jumlah dari Tahun 2012 berjumlah 2.091 yang melakukan KIR sejumlah 1.886 dan di Tahun 2014 berjumlah 2.739 yang melakukan KIR sejumlah 2.988, data per Bulan Mei Tahun 2016 baru 1.628 yang melakukan KIR dari total 3.954 mobil barang yang terdata. Sedangkan Prosentase Jumlah Uji Kir Angkutan menurut Kecamatan tertinggi di Kecamatan terentang sebesar 100% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 71,43%.

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dan Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.94
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016*)		
		Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	Mobil Penumpang Umum	288	280	97,22	303	183	60,40	115	94	81,74	116	24	20,69	262	34	12.98
2.	Mobil Bus	84	82	97,62	90	69	76,67	62	48	77,42	65	13	20,00	81	27	33,33
3.	Mobil Barang	2.091	1.886	90,20	2.700	2.061	76,33	2.739	2.387	87,15	2.988	801	26,81	3.954	1.628	41,17
	Jumlah	**2.463**	**2.248**	**91,27**	**3.093**	**2.313**	**74,78**	**2.916**	**2.529**	**86,73**	**3.169**	**838**	**26,44**	**4.297**	**1.689**	**39,31**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.95
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun pada Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Angkutan Umum	Mobil Penumpang Umum			Mobil Bus			Mobil Barang			Jumlah Angkutan	Jumlah KIR	%
		Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%			
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9*	*10*	*11=10/9*	*12*	*13*	*14=13/12*
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	7	5	71,43	7	5	71,43
2	Terentang	-	-	-	-	-	-	5	3	60,00	5	3	60,00
3	Kubu	-	-	-	-	-	-	44	30	68,18	44	30	68,18
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-	38	25	65,57	38	25	65,79
5	Sungai Kakap	22	8	22,73	-	-	-	469	314	66,95	491	319	64,97
6	Rasau Jaya	-	-	-	1	1	100	168	113	67,26	169	114	67,46
7	Sungai Raya	213	78	23,47	69	39	52,17	2.587	1.734	67,03	2.869	1.820	63,44
8	Sungai Ambawang	16	6	25,00	9	5	55,56	227	152	66,96	252	161	63,89
9	Kuala Mandor B	7	2	28,57	-	-	-	5	3	60,00	12	5	41,67
	Jumlah	**158**	**61**	**23,64**	**79**	**42**	**53,16**	**3.550**	**2.379**	**67,01**	**3.887**	**2.482**	**63,85**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut di Kabupaten Kubu Raya tidak ada, sedangkan pelabuhan udara di Kabupaten Kubu Raya tidak mengalami perubahan dari Tahun 2012 sampai dengan 2016, yaitu berjumlah 1 pelabuhan. Jumlah terminal bis/angkot pada Tahun 2012 sampai dengan 2016 berjumlah 6 terminal bis/angkot. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis/Angkot Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Terminal Bis/Angkot	6	6	6	6	6
	Jumlah	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Penanaman Modal

1.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Perkembangan investor di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terus bertambah baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah Investor Tahun 2011 sebanyak 220 investor yang terdiri dari 207 PMDN dan 13 PMA dan Tahun 2014 sebanyak 229 investor yang terdiri dari 212 PMDN dan 17 PMA. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 sampai dengan 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.97 berikut:

Tabel 2.97
Jumlah Investor PMDN/PMA
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5=3+4*
2012	Jumlah Investor	214	18	232
2013	Jumlah Investor	227	18	245
2014	Jumlah Investor	212	17	229
2015	Jumlah Investor	237	18	255

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

1.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya bahwa realisasi nilai investasi Tahun 2011 sebesar Rp. 1.375.250.921.417,00 dari 141 jumlah proyek dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10.294.129.470.834,00 dari 219 jumlah proyek. Sedangkan Tahun 2015 berdasarkan persetujuan sebesar Rp. 3.486.851.231.878,00 dari 255 jumlah proyek yang akan dilaksanakan. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.98 berikut:

Tabel 2.98
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi (Rp.)	JumlahProyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2012	232	1.910.958.104.857,50	145	1.997.835.880.437,00
2013	245	3.899.636.370.933,80	174	4.658.182.989.341,81
2014	229	3.467.670.977.783,80	219	10.294.129.470.834,00
2015	255	3.486.851.231.878,00	-	-

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

1.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya pada Perusahaan PMDN/PMA Tahun 2012 sebanyak 13.070 tenaga kerja, Tahun 2014 sebanyak 23.244 tenaga kerja, sedangkan data per Bulan Mei Tahun 2016 sebanyak 13.547 tenaga kerja. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.99 berikut:

Tabel 2.99
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	12.287	12.856	23.244	23.780	13.547
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	232	245	229	255	255
3	**Rasio daya serap Tenaga Kerja**	**52,96**	**52,47**	**101,50**	**93,35**	**53,13**

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.1 Persentase Koperasi Aktif

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 ada 312 koperasi aktif dari 381 koperasi yang ada atau sebesar 81,89%. Tahun 2014 ada 369 koperasi aktif dari 445 koperasi atau sebesar 82,92%. Data per Bulan Mei Tahun 2016 ada 402 koperasi aktif dari 478 koperasi yang ada atau 84,60%. Sedangkan persentase koperasi aktif menurut Kecamatan tertinggi Tahun 2012 di Kecamatan Sungai Raya sebesar 36,84% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 2,02%. Tahun 2014 tertinggi di Kecamatan Sungai Raya sebesar 35,50% dan terendah di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 2,71%. Sedangkan persentase koperasi

aktif Tahun 2016 tertinggi di Kecamatan Sungai Raya sebesar 35,82% dan terendah di Kecamatan Sungai Ambawang sebesar 35,82%.

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.100 berikut:

Tabel 2.100
Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Koperasi Aktif	312	344	369	378	402
2	Jumlah Koperasi	381	421	445	454	478
3	**Persentase Koperasi Aktif**	**81,89**	**81,71**	**82,92**	**83,26**	**84,10**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.101
Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016*)		
		Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Batu Ampar	30	20	6,41	35	25	7,27	37	27	7,32	37	27	7,14	41	31	7,71
2	Terentang	15	12	3,85	17	14	4,07	18	15	4,07	18	15	3,97	18	15	3,73
3	Kubu	38	30	9,62	39	31	9,01	48	40	10,84	49	41	10,85	53	45	11,19
4	Teluk Pakedai	13	10	3,21	14	11	3,20	17	14	3,79	17	14	3,70	17	14	3,48
5	Sungai Kakap	53	40	12,82	53	41	11,92	53	42	11,38	53	42	11,11	54	43	10,70
6	Rasau Jaya	42	34	10,90	44	36	10,47	45	37	10,03	45	37	9,79	50	42	10,45
7	Sungai Raya	139	114	36,54	150	125	36,34	156	131	35,50	160	135	35,71	169	144	35,82
8	Sungai Ambawang	49	43	13,78	57	51	14,83	59	53	14,36	60	54	14,29	60	54	13,43
9	Kuala Mandor B	2	9	2,88	12	10	2,91	12	10	2,71	15	13	3,44	16	14	3,48
	Total	**381**	**312**	**100**	**445**	**421**	**100**	**445**	**369**	**100**	**454**	**378**	**100**	**478**	**402**	**100**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
****) Data Sementara***

2.2 Jumlah UKM dan BPR/LKM

Jumlah UKM dan BPR/LKM Tahun 2012 sebanyak 153 terdiri dari 148 jumlah UKM dan 5 jumlah BPR/LKM, Tahun 2014 jumlah UKM dan BPR/LKM sebanyak 182 terdiri dari 174 UKM dan 8 BPR/LKM, dan berdasarkan data per Bulan Mei Tahun 2016 Jumlah UKM dan BPR/LKM sebanyak 318 terdiri dari 301 jumlah UKM dan 17 jumlah BPR/LKM. Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.92 berikut:

Tabel 2.102
Jumlah UKM BPR/LKM
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Seluruh UKM	148	168	174	183	301
2	Jumlah BPR/LKM	5	2	8	8	17
	Jumlah	**153**	**170**	**182**	**191**	**318**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

3. Kependudukan

3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Kabupaten Kubu Raya adalah Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Mempawah (dulu Kabupaten Pontianak). Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.103 berikut:

Tabel 2.103

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun			
	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010
1	2	3	4	5
Sambas	-	-	0,35	0,9
Bengkayang	-	-	-	2,01
Landak	-	-	-	1,59
Pontianak	-	-	-	1,42
Sanggau	-	-	1,79	1,65
Ketapang	-	-	2,8	2,15
Sintang	-	-	2,08	1,62
Kapuas Hulu	-	-	1,41	2,00
Sekadau	-	-	-	1,22
Melawi	-	-	-	1,81
Kayong Utara	-	-	-	1,94
Kubu Raya	-	-	-	***1,69***
Kota Pontianak	-	-	1,82	1,81
Kota Singkawang	-	-	-	2,11
Kalimantan Barat	**2,31**	**1,98**	**1,56**	**1,66**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

3.2 Pengelompokan Penduduk

3.2.1 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis KelaminMenurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.104 berikut:

Tabel 2.104
Proyeksi Penduduk Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kubu Raya

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2016*)	310.018	293.459	**603.477**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur. Proyeksi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Umur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.105 berikut:

Tabel 2.105
Proyeksi Penduduk Tahun 2016 Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0-4	14.523	13.533	28.056
2	5-9	29.966	27.903	57.869
3	10-14	32.134	30.239	62.373
4	15-19	30.349	29.243	59.592
5	20-24	28.212	27.001	55.213
6	25-29	27.991	27.128	55.119
7	30-34	28.500	27.326	55.826
8	35-39	25.405	24.130	49.535
9	40-44	22.155	21.149	43.304
10	45-49	18.859	17.928	36.787
11	50-54	15.275	14.664	29.939
12	55-59	12.478	11.184	23.662
13	60-64	8.704	7.674	16.378
14	65-69	6.360	5.745	12.105
15	70-74	4.412	4.056	8.468
16	75+	4.695	4.556	9.251
	Jumlah	**310.018**	**293.459**	**603.477**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Dari data diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan yaitu laki-laki sebanyak 310.018 jiwa dan perempuan sebanyak 293.459 jiwa. Kelompok umur terbesar ada pada rentang usia 10-14 Tahun yaitu laki-laki sebanyak 31.816 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 29.940 jiwa dan kelompok umur terkecil ada pada rentang umur 70-74 Tahun yaitu laki-laki sebanyak 4.370 jiwa dan perempuan sebanyak 4.016 jiwa.

3.2.2 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk/Geografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya menurut Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sebanyak 597.502 jiwa dengan luas wilayah seluas 6.985,2 Km^2. Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.106 berikut:

Tabel 2.106
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (Km^2)	Kepadatan (jiwa/ Km^2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Batu Ampar	15	36.472	2.002,70	14,72
2	Terentang	10	13.135	786,40	14,09
3	Kubu	20	42.455	1.211,60	14,89
4	Teluk Pakedai	14	20.177	291,90	5,07
5	Sungai Kakap	13	121.393	453,17	17,97
6	Rasau Jaya	6	30.334	111,07	2,21
7	Sungai Raya	20	227.714	929,30	15,31
8	Sungai Ambawang	15	76.797	726,10	12,01
9	Kuala Mandor B	5	29.025	473,00	3,73
	Jumlah		**603.477**	**6.985,2**	**100**

Sumber:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

3.2.3 Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2014 menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya d]untuk perguruan tinggi dibagi dalam pendidikan untuk D.I/D.II, D.III, S1, S2 dan S3 sedangkan menurut tidak sekolah dibedakan menjadi tidak/belum sekolah dan yang tidak tamat SD Sederajat. Jumlah SD/MI sebanyak 182.547 Jiwa, SMP sebanyak 82.168 Jiwa, SMA sebanyak 84,548 Jiwa, Perguruan Tinggi sebanyak 17.532 Jiwa dan yang tidak mempunyai Ijazah SD sebanyak 229.874 Jiwa. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.107 berikut:

Tabel 2.107

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan								Tidak Sekolah		Jumlah
		SD/MI	SMP	SMA	D.I/D.II	D.III	S1	S2	S3	Tidak/Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Batu Ampar	11.547	4.752	2.621	165	98	134	7	2	8.551	8.100	35.977
2	Terentang	3.543	1.601	1.077	57	57	68	2	-	3.835	2.524	12.764
3	Kubu	14.187	5.793	3.406	190	121	194	20	7	10.343	7.754	42.515
4	Teluk Pakedai	6.018	2.171	1.457	66	71	97	5	1	6.638	4.883	21.407
5	Sungai Kakap	42.380	15.846	15.296	497	780	1.664	108	16	25.271	19.509	121.322
6	Rasau Jaya	8.221	5.032	4.993	254	224	490	13	9	6.422	3.777	29.435
7	Sungai Raya	62.903	32.655	43.461	1.594	2.957	5.548	419	16	46.574	30.614	226.743
8	Sungai Ambawang	23.673	11.057	10.093	332	358	862	58	3	15.874	13.739	76.055
9	Kuala Mandor B	10.188	3.380	1.806	74	37	90	4	1	9.345	6.359	31.284
	Jumlah	**182.666**	**82.287**	**84.667**	**3.229**	**4.703**	**9.147**	**636**	**55**	**132.853**	**97.259**	**597.502**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

**Data sementara*

4. Ketenagakerjaan

4.1 Angkatan Kerja

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, diketahui penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 177.179 orang dan perempuan sebanyak 172.291 orang. Sementara penduduk laki-laki yang mencari pekerjaan sebanyak 8.776 orang dan perempuan sebanyak 6.356 orang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya diketahui penduduk menurut golongan umur tertinggi ada pada golongan umur 15 – 19 Tahun sebanyak 35.665 orang dengan 33.504 orang yang bekerja dan 2.161 yang mencari pekerjaan. Sedangkan golongan umur yg terendah ada pada golongan umur 60 - 64 Tahun sebanyak 9.601 dengan 9.018 orang bekerja dan 583 yang mencari pekerjaan. Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.108

Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

No	Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	15-19	33.504	2.161	35.665
2.	20-24	29.663	1.913	31.576
3.	25-29	28.940	1.866	30.806
4.	30-34	27.254	1.758	29.012
5.	35-39	24.901	1.606	26.507
6.	40-44	21.784	1.405	23.189
7.	45-49	17.743	1.144	18.887
8.	50-54	14.013	904	14.917
9.	55-59	10.193	657	10.850
10.	60-64	9.018	583	9.601
11.	65+	-	-	-
	Jumlah	**217.013**	**13.997**	**231.010**

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**Data sementara*

4.2 Kesempatan Kerja

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usahaTahun 2014 berdasarkan data wajib lapor perusahaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Rayakeseluruhan jumlah tenaga kerja

sebanyak 22.958 tenaga kerja dengan rincian 13.278 Pekerja Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 9.626 Pekerja Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), 54 Tenaga Kerja Asing (TKA). Penduduk Bekerja Tahun 2015 Menurut Lapangan Usaha Kebupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.109

Penduduk Bekerja Tahun 2015 Menurut Lapangan UsahaKabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Lapangan Usaha								Jumlah Tenaga Kerja			
		Pertanian, Perkebunan, Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyara-katan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	PKWT	PKWTT	TKA	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*`10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Batu Ampar	7	-	-	1	-	-	1	-	558	270	1	829
2	Terentang	2	1	-	-	-	-	-	-	1.061	1.781	2	2844
3	Kubu	3	1	-	-	-	-	-	-	413	1.932	2	2.347
4	Teluk Pakedai	2	2	-	-	-	-	-	-	1.880	1.607	18	3.505
5	Sungai Kakap	-	-	-	1	-	-	-	-	49	-	-	49
6	Rasau Jaya	3	-	-	-	-	-	-	-	24	317	-	341
7	Sungai Raya	15	32	3	66	9	40	23	5	8.131	3.209	19	11.359
8	Sungai Ambawang	5	6	1	6	-	-	-	-	1.162	510	12	1.684
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**37**	**42**	**4**	**74**	**9**	**40**	**24**	**5**	**13.278**	**9.626**	**54**	**22.958**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

**Data sementara*

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011 sampai denganTahun 2015 Kabupaten Kubu Raya yang menduduki Jabatan Eselon II dari Tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 2 Orang, yang menduduki Jabatan Eselon III pada Tahun 2011 sebanyak 22 Orang dan Tahun 2015 sebanyak 26 Orang dan yang menduduki Eselon IV pada Tahun 2011 sebanyak 97 Orang dan 86 Orang pada Tahun 2015 sedangkan jumlah pekerja perempuan di Pemerintahan sebanyak 2,191 orang pada Tahun 2011 dan 2.697 Orang pada Tahun 2015. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 jumlah pekerja perempuan sebanyak 3.021 jiwa atau 72,52%, dan berdasarkan data sementara sampai dengan Bulan Mei 2015 jumlah pekerja perempuan sebanyak 6.247 jiwa atau 43,17%.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.110 berikut:

Tabel 2.110
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IIb	2	2	2	2	2
2	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IIIa dan IIIb	23	24	25	26	26
3	Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IVa dan IVb	66	79	72	86	106
4	Pekerja Perempuan Di Pemerintah	2.780	2.743	2.685	2.697	
5	Jumlah Pekerja Perempuan	3.016	5.729	6.247	6.300	6.589
6	Persentase Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah	92,18	47,88	42,98	43,17	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu RayaTahun 2016
BP3AKB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

5.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Jumlah perempuan di Lembaga Swasta dari Tahun ke Tahun terjadi peningkatan begitu juga dengan jumlah pekerja perempuan. Pada Tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta, dari 236 Orang menjadi 2.986 Orang di Tahun 2013. Pada Tahun 2014 sebesar 3.562 orang, Tahun 2015 berjumlah 3.550 orang dan data per Bulan Mei Tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Lembaga swasta berjumlah 3.612 orang. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.111 berikut:

Tabel 2.111
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Perempuan Yang Bekerja Di Lembaga Swasta	236	2.986	3.562	3.550	3.612
2	Jumlah Pekerja Perempuan	3.016	5.729	6.247	6.300	6.589
3	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga swasta	7,82	52,12	57,02	56,35	54,82

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

5.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dimana pada Tahun 2011 sebanyak 54 KDRT atau 0,05%, meningkat menjadi 78 KDRT di Tahun 2012 atau sebesar 0,06% dan menjadi 94 KDRT atau 0,08% pada Tahun 2013. Sedangkan untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak terdata Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Rasio KDRT Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.112 berikut:

Tabel 2.112
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah KDRT	78	94	-	-	-
2	Jumlah Rumah Tangga	120.025	121.660	-	-	-
	Rasio KDRT	**0,06**	**0,08**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

5.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak didapati angka Pekerja anak usia 5-14 Tahun, akan tetapi Jumlah Pekerja Usia 15 Tahun keatas mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 sebanyak 13,070 pekerja anak 15 Tahun keatas yang terdata dan meningkat menjadi 23.244 anak pada Tahun 2014. Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.113 berikut:

Tabel 2.113

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	-	-	-	-	
2	Jumlah Pekerja Usia 15 Tahun Keatas	12.287	12.856	23.244		
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	**0%**	**0%**	**0%**	**-**	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya Tahun 2016

6. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

6.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga.Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sebesar 1,78 dari 189.553 jumlah anak dan 106.259 jumlah keluarga. Tahun 2014 sebesar 1,91 dari 217.903

jumlah anak dan 113.830 jumlah keluarga. Untuk Tahun 2015 sampai saat ini masih mengikuti jumlah pada Tahun 2014. Sedangkan jumlah anak per keluarga menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya rata-rata jumlah anak per keluarga tertinggi ada pada Kecamatan Sungai Kakap yaitu sebesar 2,4 dari 44.739 jumlah anak dan 16,581 jumlah keluarga, dan terendah adalah Kecamatan Terentang sebesar 1,1 dari 4.387 jumlah anak dan 3.879 jumlah keluarga.

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dan Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.114
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Anak	199.818	210.757	217.903	217.903	
2	Jumlah Keluarga	108.955	109.200	113.830	113.830	
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	**1,83**	**1,93**	**1,91**	**1,91**	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tabel 2.115
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2016
Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
1	*2*	*3*	*4*	*5=3/4*
1	Batu Ampar	14.322	10.847	1,3
2	Terentang	4.431	3.918	1,1
3	Kubu	15.215	10.776	1,4
4	Teluk Pakedai	8.121	6.685	1,2
5	Sungai Kakap	45.186	16.747	2,4
6	Rasau Jaya	10.148	6.916	1,4
7	Sungai Raya	80,661	34.996	2,3
8	Sungai Ambawang	30.890	15.268	2,1
9	Kuala Mandor B	10.107	6.745	1,6
	Jumlah	**220.082**	**113.830**	**1,90**

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

6.2 Rasio Akseptor KB

Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Kubu Raya mengalami trend turun naik dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 jumlah akseptor KB sebanyak 22.210 dari 85.582 jumlah pasangan usia subur atau ratio sebesar 0,25. Tahun 2012 jumlah akseptor KB berkurang menjadi 12.144 dari 92.430 usia pasangan subur atau rasio sebesar 0,13. Pada Tahun 2013 jumlah akseptor KB naik 12.144 menjadi 31,846 dari 92.625 pasangan usia subur atau rasio sebesar 0,34, akan tetapi pada Tahun 2014 turun menjadi 19.300 jumlah akseptor KB dari 96,199 atau ratio sebesar 0,20. Menurut Kecamatan, KecamatanSungai Raya memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar, 0,33 dari 9.334 jumlah akseptor KB dan 28.090 jumlah pasangan subur, sedangkan terendah di KecamatanTeluk Pakedai dan Kuala Mandor B sebesar 0,07. Rasio Akseptor KB Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dan Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Rayadisajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.116
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabuapten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Akseptor KB	12.144	31.846	19.300	19.300	
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	92.430	92.199	96.199	96.199	
	Rasio Akseptor KB	**0,13**	**0,34**	**0,20**	**0,20**	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

Tabel 2.117
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan
Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	*2*	*3*	*4*	*5=3/4*
1	Batu Ampar	1.344	9.678	0,13
2	Terentang	443	4.734	0,09
3	Kubu	842	9.591	0,08
4	Teluk Pakedai	386	5.380	0,07
5	Sungai Kakap	3.312	14.043	0,23
6	Rasau Jaya	1.256	6.185	0,20
7	Sungai Raya	9.334	28.090	0,33
8	Sungai Ambawang	1.843	10.966	0,16

9	Kuala Mandor B	540	7.532	0,07
	Jumlah	**19.300**	**96.199**	**0,20**

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

7. Komunikasi Dan Informasi

7.1 Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.Jaringan Komunikasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6 jaringan pada Tahun 2011 dan 8 jaringan di Tahun 2015. Jaringan Komunikasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.118 berikut:

Tabel 2.118

Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	6	8	10
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	-	-	-
	Jumlah	**6**	**8**	**10**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

7.2 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Wartel/Warnet yang ada di Kabupaten Kubu Raya masih tergolong sedikit hanya terdapat 50 warnet di Tahun 2011 dan menjadi 49 warnet di Tahun 2015. Sedangkan untuk Wartel tidak ada sama sekali. Menurut data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2015, dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya hanya 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki warnet yaitu Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 9 Warnet, kecamatan Sungai Raya sebanyak 32 Warnet dan Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 8 Warnet. Rasio Warnet Per 1000 Penduduk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.119 berikut:

Tabel 2.119
Rasio Warnet Per 1000 Penduduk
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	2011			2014			2016*)		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Warnet	Rasio Warnet	Jumlah Penduduk	Jumlah Warnet	Rasio Warnet			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Batu Ampar	33.660	-	-	35.886	-	-			
2	Terentang	10.375	-	-	12.673	-	-			
3	Kubu	36.929	-	-	42.424	-	-			
4	Teluk Pakedai	19.064	-	-	21.316	-	-			
5	Sungai Kakap	103.966	9	0,008657	121.231	9	0,007424			
6	Rasau Jaya	24.084	-	-	29.344	-				
7	Sungai Raya	191.929	32	0,016673	226.638	32	0,014119			
8	Sungai Ambawang	67.207	9	0,013391	75.964	8	0,010531			
9	Kuala Mandor B	24.121	-	-	31.193	-	-			
	Jumlah	**511.235**	**50**	**0,038721**	**596.669**	**49**	**0,032074**			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

7.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.Surat Kabar yang ada di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada perubahan.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sebanyak 13 Surat Kabar dan Tahun 2015 sebanyak 13 Surat Kabar. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.120 berikut:

Tabel 2.120
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	5	5	
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	8	8	
	Jumlah	**13**	**13**	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

7.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Kubu Raya tersaji pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2011	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	5	5	
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	-	-	
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	5	5	
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	11	11	
	Jumlah	**21**	**21**	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
**) Data Sementara*

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

8. Pertanahan

8.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2012 Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Rayadisajikan pada Tabel 2.122 berikut:

Tabel 2.122
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Luas Wilayah Daratan	-	-	-	-	-
2.	Luas Tanah Bersertifikat HGB	-	-	-	-	-
3.	Luas Tanah Bersertifikat HGU	-	-	-	-	-
4.	Luas Tanah Bersertifikat HM	-	-	-	-	-
5.	Luas Tanah Bersertifikat HPL	-	-	-	-	-
6.	Total Luas Tanah Bersertifikat	-	-	-	-	-
7.	Prosentase HGB Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
8.	Prosentase HGU Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
9.	Prosentase HM Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
10.	Prosentase HGPL Dibanding Luas Daratan	-	-	-	-	-
11.	Prosentase Total Luas Lahan Bersertifikat	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
****) Data Sementara***

Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kubu Raya untuk saat ini belum tersedia oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun oleh Instansi teknis yang membidangi sertifikat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya.

9. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 bahwa jumlah LPM sebanyak jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya, yang artinya terdapat 1 LPM di setiap Desa. Tahun 2012 sebanyak 117 LPM, Tahun 2013 menjadi 118 LPM dan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 terdapat sebanyak 118 LPM. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 sama dengan Tahun 2015. Jumlah LPM mengikuti jumlah Desa yang ada. Jumlah LPM Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.123 berikut:

Tabel 2.123
Jumlah LPM Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016*)
		Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah LPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	15	15	15	15	15

2	Terentang	9	10	10	10	10
3	Kubu	20	20	20	20	20
4	Teluk Pakedai	14	14	14	14	14
5	Sungai Kakap	13	13	13	13	13
6	Rasau Jaya	6	9	9	9	9
7	Sungai Raya	20	20	20	20	20
8	Sungai Ambawang	15	15	15	15	15
9	Kuala Mandor B	5	5	5	5	5
	Jumlah	**117**	**118**	**118**	**118**	**118**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

10. Perpustakaan

10.1 Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan.Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.124 berikut:

Tabel 2.124
Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Perpustakaan	40	53	64	71	79

	Milik Pemerintah Daerah (Pemda)					
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda	-	-	-	-	-
	Jumlah	**40**	**53**	**64**	**71**	**79**

Sumber: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Dari data Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya diatas bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya terus bertambah dari 18 jumlah perpustakaan menjadi 71 perpustakaan pada Tahun 2015, dan data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 berjumlah 179 perpustakaan.

10.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) Tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.125 berikut:

Tabel 2.125
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	1.100	928	464	280	
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Non Pemda	-	-	-	-	
	Jumlah	**1.100**	**928**	**464**	**280**	

Sumber: Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Dari data Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya diatas bahwa jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya naik turun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013, akan tetapi jumlah pengunjung berkurang drastis pada Tahun 2014 yang hanya 464 pengunjung dibandingkan Tahun 2013 sebanyak 928 pengunjung. Data pengunjung perpustakaan harusnya beriringan dengan naiknya jumlah perpustakaan yang ada, akan tetapi di Kabupaten Kubu Raya meningkatnya jumlah perpustakaan tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Penurunan pengunjung tersebut dikarenakan adanya perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan pada setiap Kecamatan juga dikarenakan sejak Tahun 2013 Perpustakaan Daerah tidak menambah buku-buku baru.

11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

11.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.126 berikut :

Tabel 2.126
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	112	181	171	178	184

2.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	608.602
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,019744	0,030616	0,028659	0,029247

Sumber: Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

11.2 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio Linmas Tahun 2012 sebesar 0,229964 dan Tahun 2014 0,211675, sedangkan data per Bulan Mei Tahun 2016 rasio sebesar 0,21138. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.127 berikut:

Tabel 2.127
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Linmas	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
2.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	608.602	597.502
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	0,22299	0,213634	0,211675	0,207525	0,21138

Sumber: Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

11.3 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) Tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan

ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Keberadaan Poskamling tiap Desa di Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) poskamling di tiap Desa. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada tabel 2.128 berikut:

Tabel 2.128
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio (%)	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio (%)	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio (%)	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio (%)	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Batu Ampar	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100
2	Terentang	9	9	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
3	Kubu	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100
4	Teluk Pakedai	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14	14	100
5	Sungai Kakap	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100
6	Rasau Jaya	6	6	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100	6	6	100
7	Sungai Raya	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100
8	Sungai Ambawang	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100
9	Kuala Mandor B	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
	Jumlah	**117**	**117**	**100**	**118**	**118**	**100**	**118**	**118**	**100**	**118**	**118**	**100**	**118**	**118**	**100**

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

12. Pemuda dan Olahraga

12.1 Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan Tahun pengukuran.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Jumlah Organisasi yang terdata oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya yaitu jumlah organisasi pemuda hanya terdapat di Kecamatan Sungai Raya. Untuk Tahun 2012 tercatat sebanyak 23 jumlah organisasi pemuda dan Tahun 2015 tercatat sebanyak 24 jumlah organisasi pemuda. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.129 berikut:

Tabel 2.129
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	23	23	24	24	27
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	Jumlah	**23**	**23**	**24**	**24**	**27**

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

12.2 Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan Tahun pengukuran.Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggabarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Jumlah organisasi pemuda keseluruhan Tahun 2012 sebanyak 30 organisasi pemuda, terbanyak di Kecamatan Sungai Raya dengan 8 organisasi pemuda, Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Ambawang masing-masing 5 organisasi pemuda, sedangkan di Kecamatan lain masing-masing 2 organisasi pemuda. Sedangkan Tahun 2016 sebanyak 41 organisasi pemuda, terbanyak di Kecamatan Sungai Raya dengan 14 organisasi pemuda, terendah Kecamatan Terentang, Kubu, dan Kuala Mandor B masing-masing 2 organisasi pemuda.

Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.130 berikut:

Tabel 2.130
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	2	3	3	3	3
2	Terentang	2	2	2	2	2
3	Kubu	2	2	2	2	2
4	Teluk Pakedai	2	2	2	3	3
5	Sungai Kakap	2	2	3	2	3
6	Rasau Jaya	5	5	5	6	7
7	Sungai Raya	8	8	9	9	14
8	Sungai Ambawang	5	5	5	5	5
9	Kuala Mandor B	2	2	2	2	2
	Jumlah	**30**	**31**	**33**	**34**	**41**

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

12.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau *"event"* kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) Tahun.Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut data dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga kegiatan kepemudaan hanya terpusat di Kecamatan Sungai Raya, Tahun 2012 sebanyak 8 kegiatan, Tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan dan berdasarkan data sementara per Bulan Mei 2016 ada 10 kegiatan kepemudaan. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.131 berikut:

Tabel 2.131
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	-	-	-	-	1
2	Terentang	-	-	-	-	1
3	Kubu	-	-	-	-	1
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	1
5	Sungai Kakap	-	-	-	1	2
6	Rasau Jaya	-	-	-	1	1
7	Sungai Raya	8	6	2	4	3
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8**	**6**	**2**	**6**	**10**

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

12.4 Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau *"event"* olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau *"event"* olahraga dalam periode 1 (satu) Tahun.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jumlah kegiatan olahraga Tahun 2012 sebanyak 50 kegiatan olahraga dan sebanyak 73 pada Tahun 2015. Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.132 berikut:

Tabel 2.132
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Batu Ampar	5	6	8	8	7
2	Terentang	5	6	6	6	7
3	Kubu	5	6	7	7	8
4	Teluk Pakedai	5	6	7	8	9
5	Sungai Kakap	5	6	8	9	11
6	Rasau Jaya	5	6	7	8	9
7	Sungai Raya	10	11	11	12	15
8	Sungai Ambawang	5	7	7	8	9
9	Kuala Mandor B	5	7	7	7	8
	Jumlah	**50**	**61**	**68**	**73**	**83**

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

2.1.5 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Rasio konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2010 sebesar 50.075.39, tahun 2011 sebesar 54.601.481. Kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 60.024.995, rasio ini naik lagi pada tahun 2013 menjadi 66.437.038 (dan Tahun 2014 belum dilakukan perhitungan secara rinci. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.133 berikut:

Tabel 2.133
Angka Konsumsi RT Per Kapita
Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Total Pengeluaran RT (dalam Triliun)	5,76623	6,41622	7,20450	8,08273	8,93130
2.	Jumlah RT	115.151	117.510	120.025	121.660	-
	Rasio	**50.075.379**	**54.601.481**	**60.024.995**	**66.437.038**	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kubu Raya– PDRB Kab. Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.134 berikut:

Tabel 2.134

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat

NO	Bulan	Indeks yang diterima petani (It)	Indeks yang dibayar petani (Ib)	NTP
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Januari	105,27	108.94	96,62
2.	Februari	105,29	109.45	96,21
3.	Maret	105,83	109,78	96,40
4.	April	106,64	109,93	97,01
5.	Mei	107,38	110,18	97,46
6.	Juni	107,91	111,19	97,05
7.	Juli	108,12	111,91	96.61
8.	Agustus	108,73	112,36	96,77
9.	Sepetember	108,72	112,47	96,67
10.	Oktober	109,50	112,45	96,81
11.	Nopember	108,86	114,17	95,91
12.	Desember	111,72	116,36	96,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - Statistik NTP Prov. Kalbar 2014

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat terendah pada Tahun 2014 terjadi padaNopember 2014 yaitu sebesar 95,91 poin karena penurunan harga bahan makanan hasil tanaman bahan makanan, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi tercatat di bulan Mei 2014 sebesar 97,46. Tetapi secara keseluruhan dari bulan Januari - Desember 2014 indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat rata-rata di bawah 100 yang artinya petani mengalami

penurunan daya beli karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dari kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal juga mempengaruhi tinggi rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP).

Indeks harga yang diterima petani di Kalimantan Barat pada 2014 mengalami trend kenaikan, itu terendah tarjadi pada bulan Januari 2014 yaitu sebesar 105,27 poin dan itu tertinggi pada bulan Desember 2014 yaitu sebesar 111,72 poin. Kenaikan pada bulan Desember 2014 dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 109,50 pada bulan Nopember 2014 menjadi 111,72 pada Desember 2014 dipengaruhi oleh kenaikan indeks Tanaman Padi dan Palawija sebesar 1,87 persen, indeks Hortikultura turun sebesar 1,17 persen, indeks Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) naik sebesar 3,18 persen, dan indeks Peternakan naik sebesar 1,97 persen, dan indeks Perikanan naik sebesar 2,15 persen. Perkembangan selama bulan Januari - Desember 2014 berfluktuatif setiap bulannya, terendah tercatat di bulan Januari 2014 yaitu sebesar 105,27 sedangkan tertinggi tercatat pada bulan Desember 2014 yaitu sebesar 111,72. Desember 2014 (2012=100) tercatat 111,72 berarti tingkat harga produk pertanian mengalami kenaikan harga secara rata-rata 1,11 kali dibandingkan dengan tingkat harga produk yang sama pada Tahun dasar 2012.

Sedangkan Indeks harga yang dibayar petanipada bulan Desember 2014 Ib Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 2,48 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya. yaitu dari 114,36 pada Nevember 2014 menjadi 117,20 pada Desember 2014. Komponen pendukungnya yaitu indeks konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 2,72 persen dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,93 persen.

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Persentase konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2010 sebesar 45,98%, Tahun 2013 sebesar 45,75%, dan untuk Tahun 2014 diperkirakan naik 0,79 menjadi 46,54%. Rasio Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.135
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan (dalam Triliun)	2,65170	2,95502	3,28871	3,69820	4,15677
2.	Total Pengeluaran RT (dalam Triliun)	5,76623	6,41622	7,20450	8,08273	8,93130
	Persentase	**45,98**	**46,05**	**45,65**	**45,75**	**46,54**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kubu Raya– PDRB Kab. Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014
****) Data Sementara***

4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat

13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Produktivitas per sektor Kabupaten Kubu Raya di kelompokkan berdasarkan Horga Konstan dan Harga Berlaku. Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan dan Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku disajikan pada Tabel 2.136 berikut:

Tabel 2.136
Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Konstan

No.	SEKTOR	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.008,93	17,79	2.065,51	17,16	2.220,78	17,31	2.153,54	15,78	2.210,64	15,28
2	Pertambangan dan Penggalian	410,43	3,63	407,04	3,38	413,66	3,23	440,27	3,23	464,89	3,21
3	Industri Pengolahan	3.835,34	33,96	4.039,89	33,55	4.211,34	32,84	4.501,97	33,01	4.780,28	33,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,74	0,17	19,80	0,16	23,24	0,18	30,92	0,23	31,88	0,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,42	0,05	5,45	0,05	5,49	0,04	5,31	0,04	5,04	0,03
6	Konstruksi	945,98	8,38	1.101,41	9,15	1.252,84	9,77	1.412,27	10,35	1.541,95	10,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.167,94	10,34	1.253,85	10,41	1.338,10	10,44	1.475,40	10,82	1.577,19	10,89
8	Transportasi dan Pergudangan	901,82	7,98	964,67	8,01	1.017,88	7,94	1.087,85	7,98	1.158,88	8,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189,28	1,68	205,26	1,70	216,75	1,69	227,74	1,67	238,57	1,65
10	Informasi dan Komunikasi	374,02	3,31	436,23	3,62	483,45	3,77	540,67	3,96	593,84	4,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	161,54	1,43	180,81	1,50	194,69	1,52	207,07	1,52	220,85	1,52
12	Real Estat										

		319,75	2,83	345,67	2,87	362,98	2,83	392,91	2,88	409,21	2,82
13	Jasa Perusahaan	53,98	0,48	55,42	0,46	60,50	0,47	63,87	0,47	68,71	0,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312,11	2,76	334,25	2,78	356,08	2,78	380,08	2,79	414,19	2,86
15	Jasa Pendidikan	364,65	3,23	399,27	3,32	431,89	3,37	473,52	3,47	514,67	3,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,45	0,87	100,46	0,83	104,77	0,82	109,38	0,80	113,59	0,78
17	Jasa Lainnya	125,65	1,11	125,88	1,05	128,10	1,00	136,32	1,00	142,37	0,98
PDRB ADHK		**11.294,03**	**100,00**	**12.040,87**	**100,00**	**12.822,54**	**100,00**	**13.639,09**	**100,00**	**14.486,75**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 dan Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015

****) Data Sementara***

Tabel 2.137
Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kubu Raya Menurut Harga Berlaku

No.	SEKTOR	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%	(Rp. Milyar)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.101,28	17,70	2.229,92	17,02	2.400,83	16,34	2.356,81	14,06	2.492,55	13,01
2	Pertambangan dan Penggalian	412,55	3,48	417,06	3,18	450,71	3,07	493,49	2,94	611,39	3,19
3	Industri Pengolahan	4.075,27	34,35	4.310,30	32,89	4.705,88	32,02	5.533,31	33,02	6.274,68	32,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,92	0,15	18,93	0,14	20,98	0,14	28,69	0,17	38,59	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,58	0,05	5,66	0,04	5,80	0,04	5,90	0,04	5,84	0,03
6	Konstruksi	971,44	8,19	1.217,12	9,29	1.516,33	10,32	1.884,06	11,24	2.211,31	11,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.264,71	10,66	1.386,11	10,58	1.522,40	10,36	1.777,56	10,61	1.948,61	10,18
8	Transportasi dan Pergudangan	935,32	7,88	1.131,97	8,64	1.352,90	9,21	1.601,13	9,56	1.998,86	10,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,54	1,72	230,69	1,76	253,79	1,73	276,83	1,65	298,02	1,56
10	Informasi dan Komunikasi	378,06	3,19	433,97	3,31	455,14	3,10	493,56	2,95	608,43	3,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,25	1,42	193,15	1,47	223,32	1,52	243,95	1,46	271,66	1,42
12	Real Estat	337,23	2,84	391,22	2,99	455,90	3,10	511,26	3,05	575,31	3,01
13	Jasa Perusahaan										

		56,82	0,48	58,73	0,45	66,06	0,45	71,29	0,43	77,73	0,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315,49	2,66	371,97	2,84	451,51	3,07	531,24	3,17	635,08	3,32
15	Jasa Pendidikan	390,77	3,29	473,55	3,61	557,59	3,79	667,90	3,99	789,48	4,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,63	0,86	103,97	0,79	116,42	0,79	122,97	0,73	135,02	0,71
17	Jasa Lainnya	128,72	1,08	131,47	1,00	140,04	0,95	156,43	0,93	171,25	0,89
PDRB ADHB		**11.864,58**	**100,00**	**13.105,79**	**100,00**	**14.695,60**	**100,00**	**16.756,38**	**100,00**	**19.143,81**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya - PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 dan Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015

**) Data Sementara*

2.1.5.2 Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

1. Aksesibilitas Daerah

1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, Panjang jalan Tahun 2012 adalah 394,45 Km^2 dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.463 dengan ratio sebesar 6,24, Tahun 2014 panjang jalan 752,07 Km^2 dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.916 dengan rasio 3,88. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 panjang jalan masih mengikuti panjang jalan Tahun 2015, yaitu 759,59 Km^2 dengan jumlah kendaraan sebanyak 3.367 dengan rasio 4,39. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.138 berikut:

Tabel 2.138
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang Jalan	394,45	548,16	752,07	759,59	759,59
2.	Jumlah Kendaraan	2.463	3.093	2.916	3.169	3.367
	Rasio	**6,24**	**5,64**	**3,88**	**4,21**	**4,39**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan KebersihanKabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

1.2 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Kubu Raya dariTahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami

peningkatan jumlah baik jumlah orang maupun jumlah barang. Jumlah Orang di Tahun 2011 sebanyak 2.488.220 orang menjadi 2.777.482 orang pada Tahun 2014 begitu juga dengan jumlah barang, di Tahun 2011 sebanyak 31.654,042 Ton menjadi 45.790.446 Ton pada Tahun 2014.

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.139 berikut:

Tabel 2.139
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Jumlah Orang	Orang	2.647.263	2.589.210	2.774.482	2.774.482	
2.	Jumlah Barang	Ton	43.077,693	45.790.446	45.790.466		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

1.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) Tahun. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.140 berikut:

Tabel 2.140
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2012 s/d Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		
1.	Dermaga	8.468	17.681	7.329	18.727	10.011	34.236	-	-		
2.	Bandara	2.288.816	43.060.012	2.242.610	41.645.691	2.568.706	45.756.210	-	-		
3.	Terminal	-	-	339.271	-	198.765	-	25.324	-		
	Jumlah	**2.647.263**	**43.077.693**	**2.589.210**	**41.664.418**	**2.777.482**	**45.790.446**	**25.324**	-		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data sementara*

2. Penataan Wilayah

2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Bahwa sampai saat ini RTRW Kabupaten Kubu Raya belum memiliki rencana umum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun rencana rinci Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rasio Ketaatan Terhadap RTRW sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 belum dapat dilakukan penilaian lebih lanjut. Kesesuaian terhadap RTRW selama ini menggunakan peraturan yang lebih tinggi sebagai landasan dalam menentukan kebijakan terkait penataan ruang.

Tabel 2.141
Rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

NO	Uraian	Luas (Ha)
1	*2*	*3*
1.	Luas Wilayah	872.585,06
2.	Wilayah Produktif	-
3.	Wilayah Industri	-
4.	Wilayah Kebanjiran	-
5.	Wilayah Kekeringan	-
6.	Wilayah Perkotaan	-
7.	Luas Wilayah Budidaya	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya data Tahun 2013 publikasi Tahun 2014 dalam Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014 bahwa jenis BUMN/BUMD ada 3 (tiga) yaitu Perusahaan Listrik Negara Ranting Rasau Jaya, Perum Pegadaian Cabang Sungai Raya dan Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Kubu Raya sedangkan jenis Bank ada 3 (tiga) yaitu BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya, BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya dan BPR Dana Tirta Raya. Sedangkan jumlah pegawai pada PLN Ranting Rasau Jaya sebanyak 84 pegawai, Perum Pegadaian Cabang Sungai Raya sebanyak 13 pegawai, BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya sebanyak 32 pegawai, BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya sebanyak 25 pegawai, BPR Dana Tirta Raya sebanyak 10 pegawai dan PDAM Kabupaten Kubu Raya sebanyak

62 pegawai. Banyaknya pegawai BUMN/BUMD dan Bank menurut jenis kelamin di Kabupaten Kubu Raya dan banyaknya pegawai BUMN dan Bank menurut tingkat pendidikan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.142
Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kubu Raya

NO	Kantor/Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PLN Ranting Rasau Jaya *)	80	4	84
2	Perum Pegadaian Cab. Sungai Raya *)	6	7	13
3	BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya	21	11	32
4	BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya	12	13	25
5	BPR Dana Tirta Raya	4	6	10
6	PDAM Kabupaten Kubu Raya *)	56	6	62
	2013	**179**	**47**	**226**
	2012	**182**	**44**	**226**
	2011	**175**	**44**	**219**
	2010	**119**	**31**	**150**

Sumber : Badan Pusat Statistk Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014
**) Data Tahun 2012*

=

Tabel 2.143
Banyaknya Pegawai BUMN/BUMD dan Bank Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

NO	Kantor/Instansi	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI/DII	DIII/ DIV/S1	S2/S3	
1	PLN Ranting Rasau Jaya *)	-	1	78	-	5	-	84
2	Perum Pegadaian Cab. Sungai Raya *)	-	-	1	2	9	1	13
3	BPR Cahaya Wiraputra Sungai Raya	1	-	18	-	13	-	32
4	BPR Lokadana Sentosa Sungai Raya	-	-	13	-	10	2	25
5	BPr Dana Tirta Raya	-	-	7	-	2	1	10
6	PDAM Kabupaten Kubu Raya *)	1	1	37	-	22	1	62
	2013	**2**	**2**	**154**	**2**	**61**	**5**	**226**
	2012	**2**	**5**	**156**	**2**	**57**	**4**	**226**
	2011	**1**	**4**	**153**	**2**	**51**	**8**	**219**
	2010	**1**	**4**	**89**	**2**	**49**	**4**	**150**

Sumber : Badan Pusat Statistk Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014
**) Data Tahun 2012*

4. Ketersediaan Air Bersih

4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih*(clean Water) adalah* air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.Air Minum*(drinking water)* Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air minum utama dibedakan atas:

1. Air Kemasan Bermerek
2. Air Isis Ulang
3. Leding Meteran
4. Sumur Terlindungi
5. Sumur Tidak Terlindungi
6. Air Sungai
7. Air Hujan

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014, yaitu data Tahun 2013 yang dipublikasi pada Tahun 2014, persentase jumlah rumah tangga menurut jenis sumber air minum utama untuk air kemasan bermerek menunjukan trend menurun dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yaitu 3,49% pada Tahun 2010 menurun menjdi 1,08% pada Tahun 2013. Air isi ulang Tahun 2010 sebesar 4,75% naik menjadi 8,30% pada Tahun 2013. Berdasarkan sumber air minum dari leding meteran sebesar 0,64%, Air Sungai sebesar 0,33% pada Tahun 2010, dan sumber dari air hujan sebesar 91,43% pada Tahun 2010 menurun menjadi 90,62%.

Persentase jumlah Rumah Tangga menurut jenis sumber air minum utama Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.144 berikut:

Tabel 2.144

Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Air Kemasan Bermerek	3,49	1,42	1,55	1,08
2.	Air Isi Ulang	4,75	5,71	6,72	8,30
3.	Leding Meteran	-	0,64	-	-
4.	Sumur Terlindungi	-	-	-	-
5.	Sumur Tak Terlindungi	-	-	-	-

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	Air Sungai	0,33	1,55	0,12	-
7.	Air Hujan	91,43	90,68	91,61	90,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014
**) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013*

5. Fasilitas Listrik dan Telepon

5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Dari data yang ada berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sungai Raya Wilayah Kalimantan Barat, data keseluruhan yang didapat dari kebutuhan beban tenaga listrik tidak bisa dihitung hanya berdasarkan kebutuhan bebang tenaga listrik untuk Kabupaten Kubu Raya saja, akan tetapi juga mencakup kebutuhan beban tenaga listrik untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.145 berikut:

Tabel 2.145
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**Kebutuhan**	**GWH**	**182,86**	**193,05**	**201,04**	**213,09**	-
	- Rumah Tangga	GWH	102,61	108,33	112,81	119,57	-
	- Komersial	GWH	44,13	46,59	48,51	51,42	-
	- Publik	GWH	20,65	22,59	23,78	16,10	-
	- Industri	GWH	13,60	14,36	14,95	15,85	-
2.	**Susut & Losses (T&D)**	**%**	*	*	**13**	**12**	-
3.	**Susut Pemakaian Sendiri**						-
	- Area Pontianak Isolated	%	0,88	0,38	0,27	0,18	-
	- Sektor Kapuas	%	1,82	1,64	1,33	1,34	-
4.	**Total Susut & Losses**	**%**	*	*	**0,08**	**0,08**	-
5.	**Faktor Beban**						-
	- Area Pontianak Isolated	%	19,67	18,76	12,10	15,13	-
	- Sektor Kapuas	%	58,94	60,45	57,71	61,06	-
6.	**Produksi**						-
	- Area Pontianak Isolated	GWH	6,41	7,43	9,90	6,39	-
	- Sektor Kapuas	GWH	1.229,31	1.406,18	1.494,33	631,18	-

NO	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	- 0.63 Sektor Kapuas	GWH	774,46	885,90	941,43		-
7.	**Beban Puncak**						-
	- Area Pontianak Isolated	MW	1,74	2,02	3,87	3,99	-
	- Sektor Kapuas	MW	184,18	191,00	252,11	256,70	-
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	116,03	120,33	158,83		-
8.	**Kapasitas Terpasang (Existing)**						-
	- Area Pontianak Isolated	MW	5,08	4,44	9,62	9,62	-
	- Sektor Kapuas	MW	259,40	289,25	295,60	295,60	-
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	163,42	182,23	186,23	186,23	-
9.	**Cummulated Commited Projects**	**MW**	*	*	*	*	-
10.	**TOTAL KAPASITAS SISTEM**						-
	- Area Pontianak Isolated	MW	4,42	2,61	5,72	5,73	-
	- Sektor Kapuas	MW	254,45	244,30	252,49	265,40	-
	- 0.63 Sektor Kapuas	MW	160,30	153,91	159,07		-
11.	**DAYA YANG DIBUTUHKAN***						-
	- Area Pontianak Isolated	MW	*	*	*	*	-
	- Sektor Kapuas	MW	*	*	*	*	-

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2016

**) Data sementara*

5.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik disajikan pada Tabel 2.146 berikut:

Tabel 2.146
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	RT Dengan Daya 450 watt	119.188	122.198	124.532	124.961	126.210
2.	RT Dengan Daya 900 watt	65.758	73.712	80.631	83.877	84.715
3.	RT Dengan Daya 1.300 watt	34.101	36.494	38.036	38.230	38.612
4.	RT Dengan Daya 2.200 watt	13.107	15.090	16.081	16.259	16.421
5.	RT Dengan Daya > 2.200 watt	4.674	5.829	6.474	789	
6.	Total Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Listrik	236.828	253.323	265.754	267.767	270.444
7.	Jumlah Rumah Tangga	251.146	254.222	362.084	365.704	366.069
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	94,30	99,65	73,40	73,22	73,87

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2016
**) Data sementara*

Data diatas adalah data keseluruhan data yang ada di Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat karena Area Sungai Raya mencakupi untuk kapasitas Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya ditambah dengan Kota Singkawang. Untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya disuplay dari Rayon Pontianak Kota, Rayon, Sei Jawi, Rayon Siantan, Rayon Rasau Jaya dan Rayon Sungai Kakap. Adapun jumlah pelanggan secara keseluruhan adalah jumlah pelanggan yang berada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dikarenakan sebagian pelanggan Kabupaten Kubu Raya berasal dari Rayon Pontianak Kota, Rayon, Sei Jawi, dan Rayon Siantan yang merupakan Rayon yang berada di Kota Pontianak.

5.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi

dan informasi.Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.147 berikut:

Tabel 2.147
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penduduk Yang Memiliki HP	-	-	-	-	
2.	Penduduk Yang Memiliki Telepon PSTN	-	-	-	-	
3.	Total Jumlah Penduduk Yang Memiliki HP/Telepon (1+2)	-	-	-	-	
4.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
5.	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (3/4)	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon PSTN di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini tidak terdata pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari PT. Telekomunikasi Indonesia, begitu juga dengan jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon sehingga angka persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon tidak bisa dipersentasekan.

6. Ketersediaan Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.148 berikut:

Tabel 2.148
Jenis, Kelas dan Jumlah RestoranKabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2011		2015*)	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Usaha Restoran Golongan Tertinggi	-	-	-	-
2.	Usaha Restoran Golongan Menengah	-	-	-	-
3.	Usaha Restoran Golongan Terendah	-	-	-	-
4.	Usaha Rumah Makan Kelas A	-	-	-	-
5.	Usaha Rumah Makan Kelas B	-	-	-	-
6.	Usaha Rumah Makan Kelas C	-	-	-	-
7.	Usaha Rumah Makan Kelas D	-	-	-	-
8.	Usaha Rumah Makan Kelas	-	-	-	-
9.	Jenis Usaha Restoran	-	-	-	-
10.	Jenis Usaha Rumah Makan	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemudah dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduKabupaten Kubu Raya
****) Data Sementara***

Jumlah Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini tidak tersedia data dari SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga maupun dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

7. Ketersediaan Penginapan

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar

dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

b. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.149 berikut:

Tabel 2.149
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis Penginapan/Hotel	2011			2014		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	-	-	-	-	-	-
3.	Hotel Bintang 3	-	-	-	-	-	-
4.	Hotel Bintang 2	2	114	154	3	170	213
5.	Hotel Bintang 1	1	38	38	1	38	38
6.	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan Penginapan Lainnya)	5	44	48	5	44	48
	Jumlah	**8**	**196**	**240**	**9**	**252**	**299**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2014

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya pada Data Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2013 Publikasi Tahun 2014, jumlah Hotel yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada pada Tahun 2012 sebanyak 8 Hotel dengan 2 Hotel Bintang 2 dengan 114 kamar dan 154 tempat tidur, 1 Hotel Bintang 1 dengan 38 kamar dan 38 tempat tidur dan 5 Penginanpan dengan 44 kamar dan 48 tempat tidur. Sedangkan pada Tahun 2014 Hotel di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 9 Hotel dengan 3 Hotel Bintang 2 dengan 170 kamar dan 213 tempat tidur, 1 Hotel Bintang 1 dengan 38 kamar dan 38 tempat tidur dan 5 Penginapan dengan 44 kamar dan 48 tempat tidur.

2.1.5.3 Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

1.1 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada Tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) Tahun.

Angka kriminalitas di Kabupaten Kubu Raya mengalami trend menurun dari Tahun ke Tahun. Tahun 2011 jumlah angka kriminal sebanyak 580 jenis kriminal dan jenis tertinggi pada kasus pencurian sebanyak 382 kejadian, diikuti dengan kasus penganiayaan sebanyak 116 kejadian dan kasus penipuan sebanyak 67 kejadian. Begitu juga pada Tahun 2014 jumlah angka kriminalitas sebanyak 361 jenis kriminal dan jenis tertinggi pada kasus pencurian sebanyak 223 kejadian, diikuti dengan kasus penganiayaan sebanyak 79 kejadian dan kasus penipuan sebanyak 36 kejadian. Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.150 berikut:

Tabel 2.150
Angka Kriminalitas Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Kasus Narkoba	-	-	3	1	1
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	2	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	13	11	20	11	12
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	113	114	79	30	24
5.	Jumlah Kasus Pencurian	400	376	223	69	80
6.	Jumlah Kasus Penipuan	33	35	36	9	7
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	**Total**	**560**	**538**	**361**	**120**	**124**
9.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
	Angka Kriminalitas	**0,00099**	**0,00091**	**0,00061**	**0,00020**	**0,00020**

*Sumber : Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2016 (*) Data Sementara)*

1.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) Tahun.Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah demonstrasi menurut data dari Biro Operasi Polda Kabar bahwa jumlah demonstrasi dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 pada bidang politik sebanyak 3 kejadian demonstrasi yaitu pada Tahun 2013 sebanyak 2 kejadian demonstrasi dan Tahun 2014 sebanyak 1 kejadian. pada bidang ekonomi terjadi 1 kejadian yaitu pada Tahun 2012, sedangkan pada kasus pemogokan kerja sebanyak 5 kejadian yaitu 2 kejadian Pada Tahun 2011, 1 kejadian pada Tahun 2012 dan sampai dengan Mei 2015 telah terjadi 2 kejadian kasus pemogokan kerja. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 terjadi demonstrasi sebanyak 6 kejadian, di bidang politik 2 kejadian, bidang ekonomi 1 kejadian dan asus pemogokan kerja 3 kejadian.

Jumlah DemonstrasiKabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.151 berikut:

Tabel 2.151
Jumlah DemonstrasiKabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bidang Politik	-	2	1	-	2
2	Ekonomi	1	-	-	-	1
3	Kasus Pemogokan Kerja	1	-	-	2	3
	Jumlah	**2**	**2**	**1**	**2**	**6**

*Sumber : Biro Operasi Polda Kalbar Tahun 2016 (*) Data Sementara)*

2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.152 berikut:

Tabel 2.152
Lama Proses Perijinan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maksimal Rupiah)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**SIUP**	3 Hari	9 Syarat	Tanpa Biaya
2.	**TDP**	3 Hari	8 Syarat	Tanpa Biaya
3.	**IUI**	3 Hari	12 Syarat	Tanpa Biaya
4.	**TDI**	5 Hari	7 Syarat	Tanpa Biaya
5.	**IMB**			
	- **SKRK**	17 Hari	6 Syarat	Tanpa Biaya
	- **IMB Sementara**	8 Hari	10 Syarat	Ada Biaya
	- **IMB Tetap**	7 Hari	7 Syarat	Ada Biaya
	- **IMB Pemutihan**	17 Hari	7 Syarat	Ada Biaya
6.	**HO**	12 Hari	14 Syarat	Ada Biaya

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Dari data diatas diketahui lama proses mengurus SIUP di Kabupaten Kubu Raya adalah 3 hari, 9 persyaratan/dokumen dengan proses tidak dipungut biaya sesuai Permendagri Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011. Lama proses TDP selama 3 hari, 8 tpersyaratan/dokumen proses tidak dipungut biaya. Lamanya proses IUI selama 3 hari, 12 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya sesuai dengan Permperind Nomor 122/M-IND/PER/12/2014. Sedangkan untuk proses TDI selama 5 hari, 7 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya sesuai dengan Permperind Nomor 122/M-IND/PER/12/2014. Untuk IMB dibedakan dalam urusan SKRK, IMB Sementara, IMB Tetap dan IMB Pemutihan. Proses SKRK selama 17 hari, 6 persyaratan/dokumen dan proses tidak dipungut biaya. Proses IMB Sementara selama 8 hari, 10 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Proses IMB Tetap 7 hari, 7 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Proses IMB Pemutihan selama 17 hari, 10 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010. Dan untuk

proses HO selama 12 hari,14 persyaratan/dokumen dan proses dipungut biaya sesuai Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010.

3. Penggunaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.*Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi DaerahYang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.153
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim InvestasiKabupaten Kubu Raya

No.	Uraian	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1	Hasil Pajak Daerah	82.538.049.986,00	54.864.886.735,52	87.781.508.500,00	89.398.264.095,00
2	Hasil Retribusi Daerah	7.274.697.775,00	6.003.747.900,46	7.565.488.000,00	7.565.456.493,00
	- Retribusi Jasa Umum	711.306.500,00		1.541.034.512,14	1.541.009.136,87
	- Retribusi Jasa Usaha	237.791.275,00		245.390.322,57	245.389.570,00
	- Retribusi Perizinan tertentu	5.565.600.000,00		5.779.063.165,29	5.779.057.786,13

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

3.1 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.154
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim UsahaKabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	-	3	-	1	-
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	-	2	-	2	-
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	-	-	-	2	-

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

Tahun 2013 Peraturan Daerah terkait perijinan sebanyak 3 (tiga) Perda dan 2 (dua) Perda terkait lalu lintas barang dan jasa yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Tahun 2015 Peraturan Daerah terkait perijinan sebanyak 1 (satu) Perda, 2 (dua) Perda terkait lalu lintas Barang dan Jasa dan 2 (dua) Perda terkait ketenagakerjaan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

4. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di

sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya
   Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa
   Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada
   Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta

sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju dengan pengertian diatas

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi Tipologi Desa yang bersumber dari Data Profil Desa Prodeskel Tahun 2013 dan Tahun 2014 terdapat 99 Desa dengan status Swadaya dan dan 19 Desa dengan Status Swakarya. Untuk Tahun 2015 dan 2016 masih mengacu pada Tahun 2014 karena sampai saat ini belum adanya pemekaran Desa di Kabupaten Kubu Raya. Jika mengacu pada klasifikasi diatas dapat dikatakan bahwa Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Akan tetapi harus tetap dikaji kembali berkenaan dengan status desa tersebut agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/kelurahan. Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.155 berikut:

Tabel 2.155
Satatus Desa Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Desa Swadaya	-	99	99	99	99
2.	Jumlah Desa Swakarya	-	19	19	19	19
3.	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4.	**Jumlah Desa**	**117**	**118**	**118**	**118**	**118**

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya
**) Data Sementara*

2.1.5.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Kelulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Rasio kelulusan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 tidak terdata dengan baik. Untuk Tahun 2014 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya jumlah kelulusan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3) sebanyak 5.983 orang dengan 5.548 lulusan S1, 419 orang lulusan S2 dan 16 orang lulusan S3 dengan Rasio sebesar 0,0100. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 jumlah kelulusan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3) sebanyak 6.142 orang dengan 5.609 lulusan S1, 498 orang lulusan S2 dan 35 orang lulusan S3 dengan rasio sebesar 0,0102. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.156 berikut:

Tabel 2.156
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Lulusan S1	-	-	5.548	5.603	5.609
2.	Jumlah Lulusan S2	-	-	419	457	498
3.	Jumlah Lulusan S3	-	-	16	23	35
4.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	-	-	5.983	6.083	6.142
5.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	-	-	**0,0100**	**0,0102**	**0,0102**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Data Sementara*

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependencyratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.157 berikut:

Tabel 2.157
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	145.553	148.997	144.149	146.825	148.293
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	24.173	25.022	29.611	29.530	29.825
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)	169.726	174.019	173.760	176.355	178.118
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	396.668	417.178	422.909	421.147	419.384
	Rasio Ketergantungan (%)	**42,78**	**41,71**	**41,08**	**41,87**	**42,47**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
****) Data Sementara***

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Tahun 2012 sebanyak 169.726 jiwa penduduk usia tidak produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 42,78%. Tahun 2013 naik sebesar 5.293 jiwa menjadi 174.019 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 41,71% dan Tahun 2014 naik menjadi 173.760 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 41,08%, sedangkan Tahun 2015 naik lagi menjadi 176.355 jiwa dengan rasio ketergantungan 41,87%. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016

penduduk usia tidak produktif sebesar 178.118 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 42,47%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu serta Tahun-Tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program Tahun lalu terhadap RPJMD.Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu mdiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Beberapa hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) 2016		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja SKPD 2015		Realisasi Renja SKPD 2015		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8 = (7/6 x 100%))		(9)		(10=(5+8))		(11=(10/4))	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2019		REALISASI 2014		TARGET 2015		REALISASI 2015				TARGET 2016		REALISASI 2016			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang sinergis dan partisipatif		22.564.659,00		13.538.795,40		18.564.000,00		18.564.000,00		100,00		8.820.000,00	-	8.820.000,00	-	39,09
	1 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan SIPPD	1 Laporan	10.210.253,00	1 Laporan	6.126.151,80	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	8.820.000,00	1 Laporan	8.820.000,00	1 Laporan	86,38
	2 Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Renja SKPD	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	6.615.000,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
	3 Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Renstra SKPD	1 Laporan	12.354.406,00	1 Laporan	7.412.643,60	1 Laporan	10.164.000,00	1 Laporan	10.164.000,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.046.775.475,00		208.065.285,00		274.134.256,20		274.134.256,20		100,00		307.840.969,05		307.840.969,05		29,41
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (1 tahun)	1 Tahun	1.148.653,00	1 Tahun	689.191,80	1 Tahun	945.000,00	1 Tahun	945.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	992.250,00	1 Tahun	992.250,00	1 Tahun	86,38

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik (1 tahun)	1 Tahun	104.910.344,00	1 Tahun	62.946.206,40	1 Tahun	86.310.000,00	1 Tahun	86.310.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	90.625.500,00	1 Tahun	90.625.500,00	1 Tahun	86,38
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Service dan Pajak Kendaraan kantor (1 tahun)	1 Tahun	1.786.794,00	1 Tahun	1.072.076,40	1 Tahun	1.470.000,00	1 Tahun	1.470.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	1.543.500,00	1 Tahun	1.543.500,00	1 Tahun	86,38
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa admnistrasi Keuangan (1 tahun)	1 Tahun	4.594.614,00	1 Tahun	2.756.768,40	1 Tahun	3.780.000,00	1 Tahun	3.780.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	3.969.000,00	1 Tahun	3.969.000,00	1 Tahun	86,38
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (1 tahun)	1 Tahun	20.803.389,00	1 Tahun	12.482.033,40	1 Tahun	17.115.000,00	1 Tahun	17.115.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	17.970.750,00	1 Tahun	17.970.750,00	1 Tahun	86,38
	6	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa honorarium petugas pekerja	1 Tahun	700.000.000,00	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK (1 tahun)	1 Tahun	31.857.264,00	1 Tahun	19.114.358,40	1 Tahun	26.209.050,00	1 Tahun	26.209.050,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	27.519.502,54	1 Tahun	27.519.502,54	1 Tahun	86,38
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	1 Tahun	29.751.400,00	1 Tahun	17.850.840,00	1 Tahun	24.476.550,00	1 Tahun	24.476.550,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	25.700.377,50	1 Tahun	25.700.377,50	1 Tahun	86,38

	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	1.914.422,00	1 Tahun	1.148.653,20	1 Tahun	1.575.000,00	1 Tahun	1.575.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	1.653.750,00	1 Tahun	1.653.750,00	1 Tahun	86,38
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah (1 tahun)	1 Tahun	8.423.458,00	1 Tahun	5.054.074,80	1 Tahun	6.930.000,00	1 Tahun	6.930.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	7.276.500,00	1 Tahun	7.276.500,00	1 Tahun	86,38
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor (1 tahun)	1 Tahun	7.657.689,00	1 Tahun	4.594.613,40	1 Tahun	6.300.000,00	1 Tahun	6.300.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	6.615.000,00	1 Tahun	6.615.000,00	1 Tahun	86,38
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	73.401.817,00	1 Tahun	44.041.090,20	1 Tahun	60.387.856,20	1 Tahun	60.387.856,20	1 Tahun	100,00	1 Tahun	63.407.249,01	1 Tahun	63.407.249,01	1 Tahun	86,38
	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	25.525.631,00	1 Tahun	15.315.378,60	1 Tahun	21.000.000,00	1 Tahun	21.000.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	22.050.000,00	1 Tahun	22.050.000,00	1 Tahun	86,38
	14	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	-
	15	Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)	Laporan SOP	1 Laporan SOP	35.000.000,00	1 Laporan SOP	21.000.000,00	1 Laporan SOP	17.635.800,00	1 Laporan SOP	17.635.800,00	1 Laporan SOP	100,00	1 Laporan SOP	18.517.590,00	1 Laporan SOP	18.517.590,00	1 Laporan SOP	52,91

3	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur**		**631.378.295,00**		**378.826.977,00**		**473.722.200,00**		**473.722.200,00**		**100,00**		**545.408.310,00**		**545.408.310,00**		**86,38**
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas	Motor dan Mobil Dinas	55.566.000,00	-	33.339.600,00	-	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-	86,38
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	55.472.302,00	1 Tahun	33.283.381,20	1 Tahun	45.637.200,00	1 Tahun	45.637.200,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	47.919.060,00	1 Tahun	47.919.060,00	1 Tahun	86,38
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	41.160.080,00	1 Tahun	24.696.048,00	1 Tahun	33.862.500,00	1 Tahun	33.862.500,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	35.555.625,00	1 Tahun	35.555.625,00	1 Tahun	86,38
	4	Pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur kantor	1 Tahun	78.108.432,00	1 Tahun	46.865.059,20	1 Tahun	64.260.000,00	1 Tahun	64.260.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	67.473.000,00	1 Tahun	67.473.000,00	1 Tahun	86,38
	5	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Sewa Gedung Dinas Dukcapil	1 Tahun	344.596.022,00	1 Tahun	206.757.613,20	1 Tahun	283.500.000,00	1 Tahun	283.500.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	297.675.000,00	1 Tahun	297.675.000,00	1 Tahun	86,38
	6	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service mobil dan bbm selama 1 tahun	1 Tahun	28.333.451,00	1 Tahun	17.000.070,60	1 Tahun	23.310.000,00	1 Tahun	23.310.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	24.475.500,00	1 Tahun	24.475.500,00	1 Tahun	86,38
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Service	1 Tahun	9.189.227,00	1 Tahun	5.513.536,20	1 Tahun	7.560.000,00	1 Tahun	7.560.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	7.938.000,00	1 Tahun	7.938.000,00	1 Tahun	86,38
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (1 tahun)	1 Tahun	18.952.781,00	1 Tahun	11.371.668,60	1 Tahun	15.592.500,00	1 Tahun	15.592.500,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	16.372.125,00	1 Tahun	16.372.125,00	1 Tahun	86,38

		Gedung kantor																
4	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Ketaatan dan dan kepatuhan tupoksi, waktu dan atribut sebagai APARATUR**		**51.822.137,00**		**31.093.282,20**		**18.655.969,32**		**52.336.200,00**		**280,53**		-		**54.953.010,00**		**106,04**
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas PNS	Pakaian Dinas PNS	20.101.435,00	Pakaian Dinas PNS	12.060.861,00	Pakaian Dinas PNS	16.537.500,00	Pakaian Dinas PNS	16.537.500,00	Pakaian Dinas PNS	100,00	Pakaian Dinas PNS	17.364.375,00	Pakaian Dinas PNS	17.364.375,00	Pakaian Dinas PNS	86,38
	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian khusus hari-hari tertentu	-	pakaian khusus hari-hari tertentu	-	pakaian khusus hari-hari tertentu	26.096.700,00	pakaian khusus hari-hari tertentu	26.096.700,00	pakaian khusus hari-hari tertentu	100,00	pakaian khusus hari-hari tertentu	27.401.535,00	pakaian khusus hari-hari tertentu	27.401.535,00	pakaian khusus hari-hari tertentu	-
	3	Pengadaan Pakaian Olahraga	Pengadaan pakaian olahraga	pakaian olahraga PNS	31.720.702,00	pakaian olahraga PNS	19.032.421,20	pakaian olahraga PNS	9.702.000,00	pakaian olahraga PNS	9.702.000,00	pakaian olahraga PNS	100,00	pakaian olahraga PNS	10.187.100,00	pakaian olahraga PNS	10.187.100,00	pakaian olahraga PNS	32,11
5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**		**Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD**		**241.484.437,00**		**144.890.662,20**		**104.881.761,00**		**104.881.761,00**		**100,00**		**174.125.849,68**		**174.125.849,68**		**72,11**
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek	Bimtek	95.721.117,00	Bimtek	57.432.670,20	Bimtek	78.750.000,00	Bimtek	78.750.000,00	Bimtek	100,00	Bimtek	82.687.500,00	Bimtek	82.687.500,00	Bimtek	86,38

	2	In House Trainning	Trainning	Train ning	79.000.000,0 0	Train ning	47.400.000,0 0	Trainni ng	-	Trainni ng	-	Trainni ng	-	Trainni ng	64.000.000,0 0	Trainni ng	64.000.000,0 0	Trainni ng	81,01
	3	Pengemba ngan Wawasan	Studi Banding	Studi Bandi ng	35.000.000,0 0	Studi Bandi ng	21.000.000,0 0	Studi Bandin g	-	Studi Bandin g	-	Studi Bandin g	-	Studi Bandin g	-	Studi Bandin g	-	Studi Bandin g	-
	4	Penyusuna n Analisis Jabatan SKPD	Laporan ANJAB	1 Lapor an	31.763.320,0 0	1 Lapor an	19.057.992,0 0	1 Lapora n	26.131.761,0 0	1 Lapora n	26.131.76 1,00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	27.438.349,6 8	1 Lapora n	27.438.349,6 8	1 Lapora n	86,38
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Meningkatnya sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD**		**82.958.302,0 0**		**49.774.981,2 0**		**68.250.000,0 0**		**68.250.00 0,00**		**100,00**		**71.662.500,0 0**		**71.662.500,0 0**		**86,38**
	1	Penyusuna n laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan LAKIP dan TAPKIN	1 Lapor an	12.762.816,0 0	1 Lapor an	7.657.689,60	1 Lapora n	10.500.000,0 0	1 Lapora n	10.500.00 0,00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	11.025.000,0 0	1 Lapora n	11.025.000,0 0	1 Lapora n	86,38
	2	Penyusuna n Laporan Keuangan Semestera n	Laporan Keuangan Semesteran	1 Lapor an	19.144.223,0 0	1 Lapor an	11.486.533,8 0	1 Lapora n	15.750.000,0 0	1 Lapora n	15.750.00 0,00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	16.537.500,0 0	1 Lapora n	16.537.500,0 0	1 Lapora n	86,38
	3	Penysunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lapor an	38.288.447,0 0	1 Lapor an	22.973.068,2 0	1 Lapora n	31.500.000,0 0	1 Lapora n	31.500.00 0,00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	33.075.000,0 0	1 Lapora n	33.075.000,0 0	1 Lapora n	86,38
	4	Penyusuna n Laporan Pertanggun gjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan LPPD	1 Lapor an	12.762.816,0 0	1 Lapor an	7.657.689,60	1 Lapora n	10.500.000,0 0	1 Lapora n	10.500.00 0,00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	11.025.000,0 0	1 Lapora n	11.025.000,0 0	1 Lapora n	86,38

7	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**		**Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jenis)**		**1.950.685.307,00**		**1.170.411.184,20**		**1.578.477.677,70**		**1.578.477.677,70**		**100,00**		**1.665.075.311,59**		**1.665.075.311,59**		**85,36**
	1	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlaksananya pelatihan SIAK	1 paket	165.916.603,00	1 paket	99.549.961,80	1 paket	136.500.000,00	1 paket	136.500.000,00	1 paket	100,00	1 paket	143.325.000,00	1 paket	143.325.000,00	1 paket	86,38
	2	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya pelayanan publik administrasi kependudukan	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	527.055.787,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	316.233.472,20	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	433.610.100,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	433.610.100,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	100,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	455.290.605,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	455.290.605,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	86,38
	3	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisai kebijakan kependudukan	9 kecamatan	60.636.469,00	9 kecamatan	36.381.881,40	9 kecamatan	49.885.773,00	9 kecamatan	49.885.773,00	9 kecamatan	100,00	9 kecamatan	52.380.061,65	9 kecamatan	52.380.061,65	9 kecamatan	86,38
	4	Penyediaan cetak administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tersedianya blangko cetak administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 paket	253.341.890,00	1 paket	152.005.134,00	1 paket	208.425.000,00	1 paket	208.425.000,00	1 paket	100,00	1 paket	218.846.250,00	1 paket	218.846.250,00	1 paket	86,38
	5	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	194.649.050,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	116.789.430,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	160.138.255,20	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	160.138.255,20	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	100,00	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	168.145.167,96	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	168.145.167,96	honor non pns dan pelayanan 12 bulan	86,38
	6	Penyusunan kebijakan pencatatan sipil	Terlaksananya penyusunan kebijakan pencatatan sipil	1 paket	74.744.153,00	1 paket	44.846.491,80	1 paket	61.492.200,00	1 paket	61.492.200,00	1 paket	100,00	1 paket	64.566.810,00	1 paket	64.566.810,00	1 paket	86,38

	7	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan	1 paket	28.029.058,00	1 paket	16.817.434,80	1 paket	23.059.575,00	1 paket	23.059.575,00	1 paket	100,00	1 paket	24.212.553,75	1 paket	24.212.553,75	1 paket	86,38
	8	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan	12 bulan	4.681.592,00	12 bulan	2.808.955,20	12 bulan	3.851.557,50	12 bulan	3.851.557,50	12 bulan	100,00	12 bulan	4.044.135,38	12 bulan	4.044.135,38	12 bulan	86,38
	9	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya akses informasi administrasi kepada masyarakat	1 paket	6.011.286,00	1 paket	3.606.771,60	1 paket	4.945.500,00	1 paket	4.945.500,00	1 paket	100,00	1 paket	5.192.775,00	1 paket	5.192.775,00	1 paket	86,38
	10	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (KTP-el)	Terlaksananya pelayanan perekaman, pencetakan, dan pendistribusian KTP elektronik	pelayanan ktp-el 12 bulan	287.838.300,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	172.702.980,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	236.805.282,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	236.805.282,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	100,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	248.645.546,10	pelayanan ktp-el 12 bulan	248.645.546,10	pelayanan ktp-el 12 bulan	86,38
	11	Fasilitasi pelayanan pindah datang dan penduduk rentan	Terlaksananya pelayanan pindah datang penduduk	1 paket	6.834.743,00	1 paket	4.100.845,80	1 paket	5.622.960,00	1 paket	5.622.960,00	1 paket	100,00	1 paket	5.904.108,00	1 paket	5.904.108,00	1 paket	86,38
	12	Penyusunan profil perkembangan kependudukan	Terlaksananya penyusunan profil perkembangan penduduk	1 kali	28.180.297,00	1 kali	16.908.178,20	1 kali	23.184.000,00	1 kali	23.184.000,00	1 kali	100,00	1 kali	24.343.200,00	1 kali	24.343.200,00	1 kali	86,38

	13	Fasilitasi pelayanan pencatatan sipil mobile	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil mobile	mobile kecamatan	58.338.830,00	mobile kecamatan	35.003.298,00	mobile kecamatan	47.995.500,00	mobile kecamatan	47.995.500,00	mobile kecamatan	100,00	mobile kecamatan	50.395.275,00	mobile kecamatan	50.395.275,00	mobile kecamatan	86,38
	14	Fasilitasi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, status anak dan kewarganegaraan	Terlaksananya pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, status anak dan kewarganegaraan	1 paket	8.662.761,00	1 paket	5.197.656,60	1 paket	7.126.875,00	1 paket	7.126.875,00	1 paket	100,00	1 paket	7.483.218,75	1 paket	7.483.218,75	1 paket	86,38
	15	Verifikasi database kependudukan	Terlaksananya Verifikasi database kependudukan	1 paket	27.605.970,00	1 paket	16.563.582,00	1 paket	22.711.500,00	1 paket	22.711.500,00	1 paket	100,00	1 paket	23.847.075,00	1 paket	23.847.075,00	1 paket	86,38
	16	Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM)	Terlaksananya Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM)	1 paket	12.762.816,00	1 paket	7.657.689,60	1 paket	10.500.000,00	1 paket	10.500.000,00	1 paket	100,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	86,38
	17	Pelatihan petugas register kependudukan di tingkat kecamatan dan desa	Jumlah petugas register yang terlatih	1 paket	163.878.381,00	1 paket	98.327.028,60	1 paket	134.823.150,00	1 paket	134.823.150,00	1 paket	100,00	1 paket	141.564.307,50	1 paket	141.564.307,50	1 paket	86,38
	18	Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah kuisioner terkumpul dari masyarakat	1 paket	9.481.496,00	1 paket	5.688.897,60	1 paket	7.800.450,00	1 paket	7.800.450,00	1 paket	100,00	1 paket	8.190.472,50	1 paket	8.190.472,50	1 paket	86,38
	19	Pelayanan legalisir dokumen kependudu	Terlaksananya legalisir dokumen kependudukan	12 bulan	8.883.325,00	12 bulan	5.329.995,00	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-

		kan																
	20	Verifikasi Dokumen kependudukan	Terlaksananya Verifikasi Dokumen kependudukan	1 paket	23.152.500,00	1 paket	13.891.500,00	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	7.673.750,00	1 paket	7.673.750,00	1 paket	33,14
8	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**		**terpenuhinya kebutuhan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**		**21.441.530,00**		**12.864.918,00**		**17.640.000,00**		**17.640.000,00**		**100,00**		**18.522.000,00**		**18.522.000,00**		86,38
	1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya kegiatan pengolahan dan penyimpanan arsip	dinas dukcapil	21.441.530,00	dinas dukcapil	12.864.918,00	dinas dukcapil	17.640.000,00	dinas dukcapil	17.640.000,00	dinas dukcapil	100,00	dinas dukcapil	18.522.000,00	dinas dukcapil	18.522.000,00	dinas dukcapil	86,38
9	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD (tahun)**		**25.877.885,00**		**15.526.731,00**		**21.289.800,00**		**21.289.800,00**		**100,00**		**22.354.290,00**		**22.354.290,00**		86,38
	1	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	Tersedianya tenaga pengelola keuangan	1 paket	12.762.816,00	1 paket	7.657.689,60	1 paket	10.500.000,00	1 paket	10.500.000,00	1 paket	100,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	86,38
	2	Fasilitasi pengelolaan aset	Tersedianya tenaga pengelola aset	1 paket	13.115.069,00	1 paket	7.869.041,40	1 paket	10.789.800,00	1 paket	10.789.800,00	1 paket	100,00	1 paket	11.329.290,00	1 paket	11.329.290,00	1 paket	86,38

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) 2016		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja SKPD 2015		Realisasi Renja SKPD 2015		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9		10=(5+8)		11=(10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																		
1	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang sinergis dan partisipatif		14.641.000,00		8.784.600,00		10.000.500,00		10.000.500,00		100,00		-	-	-	-	-
	1 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan SIPPD	1 Laporan	14.641.000,00	1 Laporan	8.784.600,00	1 Laporan	10.000.500,00	1 Laporan	10.000.500,00	1 Laporan	100,00		-	-	-	-	-
2	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Kelancaran Proses Bansos/ Hibah dan Ketepatan dalam Penggunaannya		21.961.500,00		13.176.900,00		14.999.550,00		14.999.550,00		100,00		25.000.000,00		25.000.000,00		113,84
	1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos	Laporan Monitoring Hibah/Bansos	1 Laporan	21.961.500,00	1 Laporan	13.176.900,00	1 Laporan	14.999.550,00	1 Laporan	14.999.550,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	113,84
3	**Program Peningkatan dan**	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset		22.693.550,00		13.616.130,00		9.994.700,00		9.994.700,00		100,00		-		-		-

	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		SKPD															
	1	Fasilitasi Pengelolaan Aset Pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	1 Laporan	22.693.550,00	1 Laporan	13.616.130,00	1 Laporan	9.994.700,00	1 Laporan	9.994.700,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
4	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		504.607.920,00		302.764.752,00		346.043.350,00		326.642.950,00		94,39		363.343.400,00		363.343.400,00		72,01
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (1 tahun)	1 Tahun	82.209.215,00	1 Tahun	49.325.529,00	1 Tahun	61.200.000,00	1 Tahun	27.200.000,00	1 Tahun	44,44	1 Tahun	20.400.000,00	1 Tahun	20.400.000,00	1 Tahun	24,81
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik (1 tahun)	1 Tahun	30.746.100,00	1 Tahun	18.447.660,00	1 Tahun	31.000.000,00	1 Tahun	39.600.000,00	1 Tahun	127,74	1 Tahun	54.000.000,00	1 Tahun	54.000.000,00	1 Tahun	175,63
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Service dan Pajak Kendaraan kantor (1 tahun)	1 Tahun	47.290.430,00	1 Tahun	28.374.258,00	1 Tahun	32.298.000,00	1 Tahun	32.298.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	37.134.000,00	1 Tahun	37.134.000,00	1 Tahun	78,52
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa admnistrasi Keuangan (1 tahun)	1 Tahun	5.929.605,00	1 Tahun	3.557.763,00	1 Tahun	62.720.000,00	1 Tahun	62.720.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	63.869.000,00	1 Tahun	63.869.000,00	1 Tahun	1.077,12
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (1 tahun)	1 Tahun	59.588.870,00	1 Tahun	35.753.322,00	1 Tahun	40.700.000,00	1 Tahun	40.700.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	41.069.000,00	1 Tahun	41.069.000,00	1 Tahun	68,92
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK (1 tahun)	1 Tahun	33.674.300,00		20.204.580,00		14.399.550,00		14.399.550,00		100,00		11.752.200,00		11.752.200,00		34,90

	7	Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	1 Tahun	13.235.464 ,00	1 Tahun	7.941.278,40	1 Tahun	9.040.000,0 0	1 Tahun	9.040.000,0 0	1 Tahun	100,00	1 Tahun	10.636.000, 00	1 Tahun	10.636.000, 00	1 Tahun	80,36
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	4.597.274, 00	1 Tahun	2.758.364,40	1 Tahun	10.000.000, 00	1 Tahun	16.000.000, 00	1 Tahun	160,00	1 Tahun	19.425.000, 00	1 Tahun	19.425.000, 00	1 Tahun	422,53
	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah (1 tahun)	1 Tahun	7.466.910, 00	1 Tahun	4.480.146,00	1 Tahun	5.100.000,0 0	1 Tahun	5.100.000,0 0	1 Tahun	100,00	1 Tahun	5.100.000,0 0	1 Tahun	5.100.000,0 0	1 Tahun	68,30
	1 0	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor (1 tahun)	1 Tahun	13.176.900 ,00	1 Tahun	7.906.140,00	1 Tahun	9.000.000,0 0	1 Tahun	9.000.000,0 0	1 Tahun	100,00	1 Tahun	10.930.000, 00	1 Tahun	10.930.000, 00	1 Tahun	82,95
	1 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	93.621.874 ,00	1 Tahun	56.173.124,4 0	1 Tahun	30.945.000, 00	1 Tahun	30.945.000, 00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	39.840.000, 00	1 Tahun	39.840.000, 00	1 Tahun	42,55
	1 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	57.363.438 ,00	1 Tahun	34.418.062,8 0	1 Tahun	30.120.000, 00	1 Tahun	30.120.000, 00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	39.960.000, 00	1 Tahun	39.960.000, 00	1 Tahun	69,66
	1 3	Penyusuna n Standar Operasiona l Prosedure (SOP)	Laporan SOP	1 Lapora n SOP	55.707.540 ,00	1 Lapora n SOP	33.424.524,0 0	1 Lapora n SOP	9.520.800,0 0	1 Lapora n SOP	9.520.400,0 0	1 Lapora n SOP	100,00	1 Lapora n SOP	9.228.200,0 0	1 Lapora n SOP	9.228.200,0 0	1 Lapora n SOP	16,57

5	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur		80.679.526,00		48.407.715,60		140.888.800,00		137.958.400,00		97,92		217.968.200,00		217.968.202,00		270,17
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas	1 Motor Dinas	15.000.000,00	-	-	-	77.488.800,00	-	77.488.400,00	-	100,00	-	48.638.200,00	-	48.638.202,00	-	324,25
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	14.641.000,00	1 Tahun	8.784.600,00	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	74.700.000,00	1 Tahun	74.700.000,00	1 Tahun	510,21
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	32.210.200,00	1 Tahun	19.326.120,00	1 Tahun	22.000.000,00	1 Tahun	22.000.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	24.400.000,00	1 Tahun	24.400.000,00	1 Tahun	75,75
	4	Pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur kantor	1 Tahun	9.955.880,00	1 Tahun	5.973.528,00	1 Tahun	16.800.000,00	1 Tahun	16.800.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	56.400.000,00	1 Tahun	56.400.000,00	1 Tahun	566,50
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sewa gedung kantor	1 Tahun	4.538.710,00	1 Tahun	2.723.226,00	1 Tahun	11.670.000,00	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	9.875.000,00	1 Tahun	9.875.000,00	1 Tahun	217,57
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (1 tahun)	1 Tahun	4.333.736,00	1 Tahun	2.600.241,60	1 Tahun	2.930.000,00	1 Tahun	11.670.000,00	1 Tahun	398,29	1 Tahun	3.955.000,00	1 Tahun	3.955.000,00	1 Tahun	91,26
6	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		Ketaatan dan dan kepatuhan tupoksi, waktu dan atribut sebagai APARATUR		6.000.000,00		3.600.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		100,00		14.000.000,00		14.000.000,00		233,33
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Pengadaan pakaian dinas PNS	Pakaian Dinas PNS		Pakaian Dinas PNS	-	Pakaian Dinas PNS	-	Pakaian Dinas PNS	-	Pakaian Dinas PNS	#DIV/0!	Pakaian Dinas PNS	14.000.000,00	Pakaian Dinas PNS	14.000.000,00	Pakaian Dinas PNS	#DIV/0!

		Perlengkapannya																
	2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Pengadaan pakaian olahraga		6.000.000,00		3.600.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		100,00		-		-		-
7	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**		Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD		125.212.979,00		75.127.787,40		28.305.500,00		28.305.500,00		100,00		39.518.200,00		39.518.200,00		31,56
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek	Bimtek	107.904.170,00	Bimtek	64.742.502,00	Bimtek	23.730.000,00	Bimtek	23.730.000,00	Bimtek	100,00	Bimtek	26.160.000,00	Bimtek	26.160.000,00	Bimtek	24,24
	2	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Laporan ANJAB	1 Laporan	17.308.809,00	1 Laporan	10.385.285,40	1 Laporan	4.575.500,00	1 Laporan	4.575.500,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	13.358.200,00	1 Laporan	13.358.200,00	1 Laporan	77,18
8	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		Meningkatnya sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD		103.594.443,00		62.156.665,80		53.056.200,00		53.057.000,00		100,00		59.782.500,00		59.782.500,00		57,71
	1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan LAKIP dan TAPKIN	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	7.497.750,00	1 Laporan	7.497.750,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	7.309.500,00	1 Laporan	7.309.500,00	1 Laporan	36,55
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semestera	Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	17.719.460,00	1 Laporan	10.631.676,00	1 Laporan	10.600.000,00	1 Laporan	10.600.800,00	1 Laporan	100,01	1 Laporan	13.798.000,00	1 Laporan	13.798.000,00	1 Laporan	77,87

		n																
	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	29.272.483,00	1 Laporan	17.563.489,80	1 Laporan	19.962.750,00	1 Laporan	19.962.750,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	24.407.500,00	1 Laporan	24.407.500,00	1 Laporan	83,38
	4	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan LPPD	1 Laporan	36.602.500,00	1 Laporan	21.961.500,00	1 Laporan	14.995.700,00	1 Laporan	14.995.700,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	14.267.500,00	1 Laporan	14.267.500,00	1 Laporan	38,98
9	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**		Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat pedesaan		570.000.000,00		342.000.000,00		42.309.450,00		42.309.450,00		100,00		253.556.900,00		253.556.902,00		44,48
	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Pembinaan terhdap lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan	2 Kecamatan	125.000.000,00	2 Kecamatan	75.000.000,00	2 Kecamatan	-	2 Kecamatan	-	2 Kecamatan	#DIV/0!	2 Kecamatan	157.152.000,00	2 Kecamatan	157.152.002,00	2 Kecamatan	125,72
	2	Fasilitasi Sistem Informasi POSYANDU	Meningkatnya Manajemen Posyandu di Kab. Kubu Raya	9 Kecamatan	60.000.000,00	9 Kecamatan	36.000.000,00	9 Kecamatan	21.838.450,00	9 Kecamatan	21.838.450,00	9 Kecamatan	100,00	9 Kecamatan	25.664.000,00	9 Kecamatan	25.664.000,00	9 Kecamatan	42,77
	3	Pemberdayaan Lembaga Adat Istiadat Desa	Penguatan Lembaga Adat Istiadat Desa	2 Kecamatan	135.000.000,00	2 Kecamatan	81.000.000,00	2 Kecamatan	20.471.000,00	2 Kecamatan	20.471.000,00	2 Kecamatan	100,00	2 Kecamatan	40.573.100,00	2 Kecamatan	40.573.100,00	2 Kecamatan	30,05
	4	Fasilitasi dan Pendampingan	Meningkatnya Pengembangan Pusat Kemasyarakatan	2 Kecamatan	250.000.000,00	2 Kecamatan	150.000.000,00	2 Kecamatan	-	2 Kecamatan	-	2 Kecamatan	#DIV/0!	2 Kecamatan	30.167.800,00	2 Kecamatan	30.167.800,00	2 Kecamatan	12,07

		Program Pengembangan Pusat Kemasyarakatan																	
10	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**		Berkembangnya Lembaga Ekonomi Perdesaan		301.597.300,00		180.958.380,00		105.924.600,00		105.924.600,00		100,00		87.904.900,00		87.904.904,00		29,15
	1	Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa	Pembinaan Manajemen BUMDESa	9 Desa	130.000.000,00	9 Desa	78.000.000,00	9 Desa	18.090.400,00	9 Desa	18.090.400,00	9 Desa	100,00	9 Desa	43.844.700,00	9 Desa	43.844.702,00	9 Desa	33,73
	2	Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Penguatan Posyantek untuk penyebaran Informasi TTG kedesa-desa	9 Posyantek	224.000.000,00	9 Posyantek	134.400.000,00	9 Posyantek	68.106.550,00	9 Posyantek	68.106.550,00	9 Posyantek	100,00	9 Posyantek	35.050.000,00	9 Posyantek	35.050.002,00	9 Posyantek	15,65
	3	Pengelolaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	2 Desa	77.597.300,00	2 Desa	46.558.380,00	2 Desa	37.818.050,00	2 Desa	37.818.050,00	2 Desa	100,00	2 Desa	52.854.900,00	2 Desa	52.854.902,00	2 Desa	68,11
11	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa		960.000.000,00		576.000.000,00		561.868.500,00		561.868.500,00		100,00		535.329.300,00		535.329.300,00		55,76

	1	Fasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya musyawarah desa dan tersedianya dokumen perencanaan desa sesuai dengan RPJMDes	24 Desa	200.000.000,00	24 Desa	120.000.000,00	24 Desa	31.690.000,00	24 Desa	31.690.000,00	24 Desa	100,00	24 Desa	21.454.850,00	24 Desa	21.454.850,00	24 Desa	10,73
	2	Pelaksanaan Perlombaan Desa	Pelaksanaan Perlombaan Desa	9 Desa	195.000.000,00	9 Desa	117.000.000,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	100,00	9 Desa	125.959.900,00	9 Desa	125.959.900,00	9 Desa	64,59
	3	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-royong	Pelaksanaan BBGR	9 Kecamatan	65.000.000,00	9 Kecamatan	39.000.000,00	9 Kecamatan	364.276.150,00	9 Kecamatan	364.276.150,00	9 Kecamatan	100,00	9 Kecamatan	62.468.500,00	9 Kecamatan	62.468.500,00	9 Kecamatan	96,11
	4	Fasilitasi Pameran Teknologi Tepat Guna	Pelaksanan Pameran TTG	3 Inovasi	145.000.000,00	3 Inovasi	87.000.000,00	3 Inovasi	79.062.850,00	3 Inovasi	79.062.850,00	3 Inovasi	100,00	3 Inovasi	67.872.000,00	3 Inovasi	67.872.000,00	3 Inovasi	46,81
	5	Fasilitasi Pembinaan Desa Model	Pelaksanaan Pembinaan Desa Model	1 Desa	105.000.000,00	1 Desa	63.000.000,00	1 Desa	-	1 Desa	-	1 Desa	#DIV/0!	1 Desa	37.832.000,00	1 Desa	37.832.000,00	1 Desa	36,03
	6	Fasilitasi Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	PKK	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	110.395.000,00	-	110.395.000,00	-	81,77
	7	Fasilitasi dan Pendampingan Desa Binaan	Pelaksanaan Pendampingan Desa Binaan	2 Desa	115.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	109.347.050,00	-	109.347.050,00	-	95,08
1 2	**Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD		68.000.000,00		40.800.000,00		-		-		#DIV/0!		17.000.000,00		17.000.000,00		25,00
	1	Peningkatan Kapasitas	Bimtek	2 Bimte	68.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	17.000.000,	-	17.000.000,	-	25,00

		Pengelolaan Keuangan SKPD		k	,00										00		00		
13	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		1.746.033.023,00		1.047.619.813,80		387.275.550,00		387.275.550,00		100,00		317.772.500,00		317.772.500,00		18,20
	1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Pelatihan	95.151.263,00	1 Pelatihan	57.090.757,80	1 Pelatihan	42.688.100,00	1 Pelatihan	42.688.100,00	1 Pelatihan	100,00	1 Pelatihan	81.693.000,00	1 Pelatihan	81.693.000,00	1 Pelatihan	85,86
	2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	30 Desa	192.666.760,00	30 Desa	115.600.056,00	30 Desa	77.696.750,00	30 Desa	77.696.750,00	30 Desa	100,00	30 Desa	-	30 Desa	-	30 Desa	-
	3	Peresmian dan Penggantian Anggota BPD	Peresmian dan Penggantian anggota BPD	118 Desa	105.896.000,00	118 Desa	63.537.600,00	118 Desa	40.760.700,00	118 Desa	40.760.700,00	118 Desa	100,00	118 Desa	45.410.000,00	118 Desa	45.410.000,00	118 Desa	42,88
	4	Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	Raker Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	118 Desa	152.319.000,00	118 Desa	91.391.400,00	118 Desa	63.793.850,00	118 Desa	63.793.850,00	118 Desa	100,00	118 Desa	126.216.000,00	118 Desa	126.216.000,00	118 Desa	82,86
	5	Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Laporan Penyelengg	Pelaksanaan Penyusunan RPJMDES	1 Pelatihan	105.000.000,00	1 Pelatihan	63.000.000,00	1 Pelatihan	96.336.150,00	1 Pelatihan	96.336.150,00	1 Pelatihan	100,00	1 Pelatihan	-	1 Pelatihan	-	1 Pelatihan	-

		araan Pemerinta h Desa																
	6	Fasilitasi Pelaksanaa n Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa	30 Desa	1.000.000. 000,00	30 Desa	600.000.000, 00	30 Desa	66.000.000, 00	30 Desa	66.000.000, 00	30 Desa	100,00	30 Desa	-	30 Desa	-	30 Desa	-
	7	Pembinaan Administra si Desa	Tertib Administrasi Desa	118 Desa	95.000.000 ,00	118 Desa	57.000.000,0 0	118 Desa	-	118 Desa	-	118 Desa	#DIV/0!	118 Desa	64.453.500, 00	118 Desa	64.453.500, 00	118 Desa	67,85
1 4	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**		Meningkatnya Peran Perempuan		125.000.00 0,00		75.000.000,0 0		60.388.000, 00		60.388.000, 00		100,00		78.695.900, 00		78.695.902, 00		62,96
	1	Fasilitasi Kegiatan Peningkata n Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terfasilitasinya Kegiatan P2WKSS	1 Desa	125.000.00 0,00	1 Desa	75.000.000,0 0	1 Desa	60.388.000, 00	1 Desa	60.388.000, 00	1 Desa	100,00	1 Desa	78.695.900, 00	1 Desa	78.695.902, 00	1 Desa	62,96
1 5	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa		534.000.00 0,00		320.400.000, 00		319.279.500 ,00		319.279.50 0,00		100,00		460.656.80 0,00		460.656.80 0,00		86,27
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaa n Keuangan Desa	Laporan Pengelolaan ADD	118 Desa	120.000.00 0,00	118 Desa	72.000.000,0 0	118 Desa	53.570.000, 00	118 Desa	53.570.000, 00	118 Desa	100,00	118 Desa	71.497.900, 00	118 Desa	71.497.900, 00	118 Desa	59,58

	2	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan APBDES	Pembinaan penyusunan APBDES	118 Desa	130.000.000,00	118 Desa	78.000.000,00	118 Desa	124.088.800,00	118 Desa	124.088.800,00	118 Desa	100,00	118 Desa	127.731.800,00	118 Desa	127.731.800,00	118 Desa	98,26
	3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	118 Desa	145.000.000,00	118 Desa	87.000.000,00	118 Desa	141.620.700,00	118 Desa	141.620.700,00	118 Desa	100,00	118 Desa	128.882.400,00	118 Desa	128.882.400,00	118 Desa	88,88
	4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Bimtek	118 Desa	139.000.000,00	118 Desa	83.400.000,00	118 Desa	-	118 Desa	-	118 Desa	#DIV/0!	118 Desa	132.544.700,00	118 Desa	132.544.700,00	118 Desa	95,36
16	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM**		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan PNPM		279.000.000,00		167.400.000,00		79.743.000,00		79.743.000,00		100,00		165.060.000,00		165.060.002,00		59,16
	1	Fasilitasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas	Pembinaan PNPM GSC	9 Kecamatan	279.000.000,00	9 Kecamatan	167.400.000,00	9 Kecamatan	79.743.000,00	9 Kecamatan	79.743.000,00	9 Kecamatan	100,00	9 Kecamatan	165.060.000,00	9 Kecamatan	165.060.002,00	9 Kecamatan	59,16
17	**Program Penataan Wilayah Pemerintahan Desa**		Tertatanya Wilayah Adminstrasi Pemerintahan Desa		561.512.000,00		336.907.200,00		253.225.300,00		253.225.300,00		100,00		708.985.000,00		708.985.000,00		126,26

	1	Pembentukan, pemekaran dan penghapusan Desa	Terlaksananya Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	2 Desa	105.343.000,00	2 Desa	63.205.800,00	2 Desa	21.850.150,00	2 Desa	21.850.150,00	2 Desa	100,00	2 Desa	355.042.300,00	2 Desa	355.042.300,00	2 Desa	337,03
	2	Pemetaan dan Pemanfaatan Tata Batas Desa	Terselesainya Tata Batas Desa	5 Desa	400.200.000,00	5 Desa	240.120.000,00	5 Desa	209.037.300,00	5 Desa	209.037.300,00	5 Desa	100,00	5 Desa	331.604.800,00	5 Desa	331.604.800,00	5 Desa	82,86
	3	Penyusunan Profil Desa	Laporan Profil Desa	3 Profil Desa	55.969.000,00	3 Profil Desa	33.581.400,00	3 Profil Desa	22.337.850,00	3 Profil Desa	22.337.850,00	3 Profil Desa	100,00	3 Profil Desa	22.337.900,00	3 Profil Desa	22.337.900,00	3 Profil Desa	39,91
18	**Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa**		Meningkatnya Pengelolaan Aset Desa		245.680.000,00		147.408.000,00		54.165.000,00		54.165.000,00		100,00		102.615.550,00		102.615.550,00		41,77
	1	Fasilitasi dan Pendampingan Inventarisasi Aset-Aset Desa	Laporan Inventarisasi Aset Desa	10 Data Inventarisasi Aset Desa	108.757.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	65.254.200,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	54.165.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	54.165.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	100,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	45.299.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	45.299.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	41,65
	2	Bimbingan Teknis Pengeloaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Aset Desa	1 Bimtek	136.923.000,00	1 Bimtek	82.153.800,00	1 Bimtek	-	1 Bimtek	-	1 Bimtek	#DIV/0!	1 Bimtek	57.316.550,00	1 Bimtek	57.316.550,00	1 Bimtek	41,86
							-												

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Tenaga pendidik masih yang kurang di daerah pesisir atau terpencil baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK berdampak pada penangkapan pada bidang studi yang diajarkan;
2) Anggaran yang belum mencukupi berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan lomba siswa dan pendidik demi peningkatan kualitas pendidik baik ditingkat Kabupaten, provinsim maupun internasional;
3) Masih banyaknya gedung sekolah yang rusak terutama SD, kurang USB/RKB untuk SMP dan SMA/SMK;
4) Belum dilakukan analisis/ kajian dari aspek terkait beban kerja, aspek SDM, keuangan, serta prioritas visi dan misi;
5) Terdapat aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan terkait penempatannya.

2.3.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
2) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi didaerah perkotaan.
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta minimnya prasarana pendukung.
4) Masih adanya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan derajat kesehatan seperti kematian dan yang berhubungan dengan persalinan, masih terjadinya lonjakan penyakit seperti Demam berdarah pada Tahun 2014.

2.3.3 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya penanganan terhadap potensi Sumber Daya Alam yang ada;
2) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

3) Lemahnya/rendahnya kapasitas dan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup;
4) Pelaksanaan SPM salah satu belum masuk rencana Kerja Kerja yang telah ditetapkan, yaitu terkait dengan parameter penelitian kerusakan tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan dan holtikultura;
5) Gedung dan SDM Laboratorium Daerah belum ada, sementara sarana dan prasarana berupa kendaraan dan peralatan laboratorium dari anggaran DAK dan APBD Kabupaten Kubu Raya telah tersedia dan disimpan diruangan kantor Badan Lingkungan Hidup yang belum maksimal difungsikan.

2.3.4 Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi adalah :

A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
2) Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
3) Kondisi jalan lingkungan kualitasnya masih rendah berupa jalan tanah/kerikil dalam kondisi rusak, kondisi jembatan/gertak yang ada masih memprihatinkan, sebagian besar belum memiliki jembatan yang layak untuk dilewati.
4) Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas.
5) Volume sampah semakin besar.
6) Keterbatasan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah. TPA yang ada saat ini di Rasau Jaya dengan luas lahan 3,4 Ha sudah sangat tidak memadai.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka melaksanakan tugas, seperti Keterbatasan jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah. Kondisi saat ini hingga Tahun 2014 jumlah dump truck sebanyak 6 unit, truck arm roll sebanyak 3 unit, semua armada tersbut dalam kondisi baik, namun untuk mengangkut seluruh volume sampah di Kabupaten Kubu Raya masih perlu penambahan armada.

8) Penerangan jalan umum masih sangat terbatas.

B. Dinas Bina Marga dan Pengairan

1) Pengembangan Kabupaten Kubu Raya

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya .peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan.

Pengembangan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan selama ini dirasakan belum optimal. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

a. Kondisi awal saat pemekaran wilayah Kabupaten, jaringan jalan dan jembatan yang tersedia dalam kondisi rusak dan belum memiliki perkerasan;
b. Panjang jalan yang belum sesuai dengan sebaran penduduk dan sistim aktivitas yang padat;
c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi sehingga memperngaruhi kegiatan perekonomian masyarakat
d. Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah rawan banjir dan diperlukan konstruksi jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, namun konstruksi jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement)/aspal.

2) Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan akibat jaringan drainase dan saluran yang belum memadai di bidang kebinamargaan dan pengairan. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan :

a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi pada saluran sungai;

b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai);
c. Belum terintergrasinya sistem jaringan drainase dari satu kawasan lainnya;
d. Naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan.

3) Keawetan Konstruksi Jalan

Pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagian besar masih menggunakan metode manual sehingga hasilnya kurang sempurna baik terhadap kualitas dan umur konstruksi dibanding bila dilaksanakan dengan metode mekanis, sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat ketahanan konstruksi.

4) Daerah Perbatasan Antar Wilayah

Daerah perbatasan antar wilayah, khususnya yang transportasinya dilayani dengan jalan lokal masih merupakan wilayah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah ini harus mendapat perhatian khusus.

5) Sungai

Selama ini paradigma sungai sebagai bagian paling belakang dan kurang diperhatikan estetikanya. Paradigma ini harus diubah dan harus memperhatikan factor estetika dan sanitasi lingkungan sehingga dapat mendukung sektor pariwisata.

6) Masalah Sempadan Sungai

Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai merupakan penyebab kekumuhan dan gagguan aliran sungai. Pengumpulan (konglomerasi) permukiman kumuh banyak dimulai dari dua daerah ini. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganan kota karena sungai merupakan potret dari sebuah peradaban masyarakat kota.

7) Penggundulan Daerah Aliran Sungai

Kawasan terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk dihijaukan. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan erosi dan pengikisan daerah tepian sungai sehingga terjadinya sedimentasi akibat erosi dan gerusan aliran sungai serta terjadinya pendangkalan badan sungai ersebut. Disamping itu, Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dengan debit aliran yang lebih besar.

2.3.5 Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tata bangunan dan lingkungan yang harmonis, serasi dan berkelanjutan;
2) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
3) Masih sangat terbatasnya perangkat regulasi operasional dan sumber daya manusia dalam perizinan bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4) Masih rendahnya kendali aparat dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
5) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya tanpa memiliki IMB;
6) Belum terjamahnya taman – taman kota, dan pemakaman yang ada, secara memadai, layak dan terjadwal.

2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan serta tantangan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Perubahan kebijakan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);

3) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4) Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7) Belum lengkapnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8) Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
9) Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu;
10) Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan;
11) Sarana dan prasarana belum menunjuang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

2.3.7 Urusan Perumahan

Permasalahan Urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

1) Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat minim, diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan umum;
2) Masih banyaknya jumlah rumah tradisional masyarakat dalam kondisi yang tidak layak huni dan memerlukan pembenahan/penataan.

2.3.8 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor:

1) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan pembinaan generasi muda;
2) Kurangnya minat peserta dalam mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten dikarenakan tidak dilaksanakannya seleksi setiap Tahun.

B. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan:

1) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan seleksi serta pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka) Tingkat Kabupaten;
2) Alokasi dana untuk kegiatan seleksi dan pemusatan latihan paskibra belum optimal;
3) Pihak sekolah sebagai sumber rekrutmen calon anggota paskibraka hendaknya melaksanakan seleksi tingkat sekolah sebelum dikirim ketingkat Kabupaten.

C. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi POPDA:

1) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang terpusat dalam suatu kawasan sehingga beberapa cabang olahraga dilaksanakan di kota Pontianak.

D. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan TC serta Pengiriman Kontingen Kejurda:

1) Minimnya anggaran untuk memberi penghargaan kepada atlit berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah;
2) Penghargaan belum bisa diberikan kepada atlit yang berprestasi.;
3) Masih lemahnya organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu pengembangan olahraga.

E. Kegiatan Pemilihan Bhakti Pemuda Antar Provinsi/Jambore Pemuda Indonesia:

1) Minimnya peserta untuk mengikuti seleksi;
2) Tim seleksi belum memiliki buku panduan sebagai standar.

F. Kegiatan Hari Olahraga Nasional:

1) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga sehingga tempat kegiatan dilaksanakan diaula kantor Bupati dan masih dalam tahap perbaikan.

G. Kegiatan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Tinju (Ring Tinju):

1) Sarana dan prasarana olahraga cabang olahraga tinju yaitu berupa matras dan ring tinju, dikarenakan lamanya proses pengadaan dan Tekhnis Laporan serta dekatnya waktu penutupan kas akhir Tahun Daerah;
2) Tidak Bisa diserap karena pihak ketiga mengalami masalah tekhnis.

2.3.9 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1) Belum tersedianya Peta Investasi;
2) Belum terjaringnya jumlah investasi secara riil;
3) Belum tersedianya buku neraca investasi daerah;
4) Penyelesaian izin melalui spipise yang masih terlambat.

2.3.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Anggaran :

   Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

   a) Belanja Jasa Administrasi Keuangan

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
e) Penyediaan makan dan minum rapat
f) Pengadaan peralatan gedung kantor
g) Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
h) Pengadaan mebeleur
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, karena pada Sekretariat dan Bidang masih ada yang belum mempunyai staf, sehingga masih banyak memerlukan tenaga honorer, disamping itu pengetahuan teknis PNS masih terbatas.

2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Tenaga

Untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tenaga operator yang bertugas melayani pembuatan KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil. Jumlah tenaga sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural. Jumlah tenaga operator yang ada saat ini masih belum ideal untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang maksimal terhadap sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, juga terjadi kekurangan tenaga pengadministrasian umum, pulahta kepegawaian, dan arsiparis untuk membantu kelancaran administrasi surat–menyurat maupun kepegawaian.

2) Dana

Untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terkendala keterbatasan dana. Dana yang dimiliki anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan ke sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.

3) Sarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki keterbatasan belum memiliki gedung kantor. Keberadaan gedung kantor saat ini merupakan gedung sewa berupa ruko. Sarana lain yang sangat diperlukan adalah kendaraan operasional untuk kegiatan pelayanan keliling yang dapat menjangkau kecamatan dan desa.

4) Network

Jaringan SIAK online yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah jaringan yang dipinjamkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk jaringan online ke sembilan Kecamatan di Kab. Kubu Raya menggunakan jaringan milik Dinas Komunikasi dan Informatikan Kab. Kubu Raya.

2.3.12 Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar dan belum adanya data ril Ketenagaan kerjaan yang valid.

2.3.13 Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan data base Ketahananan Pangan untuk penyusunan Renstra pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kubu Raya masih belum sempurna;
2) Penyusunan data base potensi produksi pangan masih belum sempurna;
3) Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (tingkat Kabupaten dan Kecamatan) belum dapat terlaksana dengan baik;
4) Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber bahan pangan lokal belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat;
5) Sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif (pada hari pangan sedunia) belum

secara menyeluruh di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya;

6) Belum semua program kegiatan pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan dana yang tersedia;
7) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, sehingga terhambatnya proses penyelesaian kegiatan, administrasi dan teknis di lapangan;
8) Untuk program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya bersumber dari dana Dekonsentrasi Provinsi Kalbar (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik sedangkan dana APBD kegiatannya berupa pembinaan dan pendampingan non fisik;
9) Perlunya dana sharing dari APBD dalam mendukung program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, pada kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan serta Daerah Rawan Pangan terutama dalam pembinaan dan evaluasi; serta penguatan modal kelompok yang sudah berjalan;
10) Perlu adanya keberpihakan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 100 ton ekuivalen setara beras untuk antisipasi bencana alam, banjir musim paceklik dan gagal panen.

2.3.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Belum terbentuknya Unit Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
2) Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional;
3) Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD terkait cakupan Indikator rehabilitasi sosial, walaupun TIM jejaring telah terbentuk;
4) Terbatasnya anggaran yang tersedia atau belum tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

5) Belum adanya sarana atau shelter untuk penampungan korban;
6) Sulitnya melakukan pengumpulan data, dikarenakan data yang dibutuhkan terkait dengan Kejaksaan Negeri, pengadilan Negeri dan Polres yang keberadaannya diluar wilayah Kabupaten Kubu Raya;
7) Adanya 2 (dua) Polres pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPPA Polres Kota dan UPPA Polres Pontianak di Mempawah).

2.3.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB khususnya dalam penggunaan KB MKJP;
3) Masih kurangnya penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang dibiayai oleh APBD;
4) Masih kurangnya media luar ruang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang KB KS;
5) Masih kurang terkoordinirnya sistem pelaporan dari desa dan Kecamatan.

2.3.16 Urusan Perhubungan

Permasalahan Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya tenaga PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bentuan operasional;
3) Kesadaran PNS dalam melaksanakan Tupoksi belum optimal;
4) Pengawasan berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
5) Fungsi koordinasi diantara Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
6) Terbatasnya Anggaran SKPD.

2.3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1) Bandwith di Kominfo hanya 5 MB, sedangkan kebutuhan untuk melayani SKPD dan Kecamatan se-Kab Kubu Raya kurang lebih 50 MB;
2) Konektivitas jaringanantara SKPD tidak terkoneksi dengan baik;
3) Kurangnya fasilitasss ruanagan maintenance server dan sistem LPSE;
4) Kurangnya tenaga operator pengelolaan website Kubu Raya;
5) Kementerian Kominfo tidak melakukan koordinasi dalam mendistribusikan PLIK dan PLIK wifi di Kab. Kubu Raya;
6) Kekuatan sinyal program Teleinfo tuntas dari Kementerian Kominfo di Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya kurang maksimal sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat;
7) Perubahan SPK MPLIK dari PT. WEB terhadap pembiayaan membingungkan karena anggaran yang sudah terealisasi tak bisa digunakan, karena pasal pada SPK yang baru tidak memperbolehkan biaya operasional dibebankan pada APBD.

2.3.18 Urusan Pertanahan

Permasalahan Urusan Pertanahan adalah lambatnya penyelesaian penerbitan sertipikat hak pakai selama dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dikarenakan masalah personil seksi pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terbatas dan alas ha katas tanah yang tidak ada sehingga sulit untuk mengajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

2.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1) Personalia terbatas (8 orang) berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang;
2) Terbatasnya sarana/prasarana kerja berdampak pada kecepatan dan ketepatan waktu kerja.

2.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Bagian Pemerintahan

Permasalahan Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya segmen batas antar daerah dan segmen batas wilayah kecamatan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
2) Keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang memiliki kemampuan teknis serta waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
3) Penegasan Batas Wilayah antar Daerah harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
4) Kesulitan dalam memperoleh data dari SKPD sebagai bahan penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dan Memori Bupati Kubu Raya Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 serta batas batas waktu yang diberikan dalam penyampaian dokumen-dokumen tersebut;
5) Kesulitan dalam memperoleh data sebagai syarat kelengkapan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Pemekaran / Pembentukan Kecamatan;
6) Belum terakomodir Program/Kegiatan dan anggaran fasilitasi kegiatan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Unsur Alami pada TA. 2013.

2. Bagian Hukum dan HAM

Permasalahan Bagian Hukuim dan HAM adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya sarana tempat penyimpanan arsip/produk hukum;
2) Tidak tersedianya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan didaerah yang jauh;

3) Kurangnya fasilitas komputer, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan computer (komputer yang ada dalam keadaan rusak).

3. Bagian Umum

Permasalahan Bagian Umum adalah sebagai berikut:

1) Jumlah anggaran yang dibutuhkan belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai program yang diminta;
2) Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berada di Bagian Umum belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk penata taman, pramusaji baik dirumah Bupati dan Wakil Bupati maupun di lingkungan Kantor Bupati, serta untuk operator komputer;
3) Sarana dan prasarana untuk ruangan kami belum memenuhi standar, ruangan yang belum layak bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan dalam melaksanakan tugas sering mendapatkan hambatan.

4. Bagian Administrasi

Permasalahan Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:

1) Tenaga honor dan jumlah honor yang dibayarkan bagi tenaga kerja non PNS di lingkungan Setda Kabupaten Kubu Raya masih belum mendekati UMP Provinsi Kalbar;
2) Masih adanya unit kerja tertentu / bagian jika mengirim surat menyurat tidak melewati bagian TU dan kepegawaian Bagian Administrasi;
3) Data yang diberikan oleh unit kerja / bagian masih belum valid sehingga menghambat penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4) Anggaran untuk pemeliharaan rutin/berkala sistem komputerisasi dan santel sangat kurang;
5) Belum diberikan bimbingan teknis penataan arsip bagi pegawai di bagian administrasi.

5. Bagian Organisasi

Permasalahan Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

1) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan analisis jabatan (Anjab) serta masih kesulitan dalam menyusun Anjab;
2) Masih beberapa SKPD yang belum/terlambat dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja sehingga mempersulit dalam menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Kubu Raya;
3) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Renstra SKPD yang masih pada tahap verifikasi;
4) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lengkap dan menyeluruh;
5) Ada beberapa SKPD yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Permasalahan Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerja;
2) Masih kurang tanggapnya SKPD dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya dan koordinasi antara instansi terkait belum optimal;
3) Belum tersedianya dukungan database dan sistem informasi monitoring dan evaluasi dalam menyajikan data pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian dan pembangunan.

7. Bagian Kesejahteraan Sosial

Permasalahan Bagian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

1) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;

2) Perlu penambahan dan perbaikan peralatan pendukung seperti Komputer PC serta Pengadaan Sistem Komputerisasi Data Base Hibah dan Bansos dengan tujuan keakuratan data dan meminalisir kesalahan dalam hal pemberian bantuan sosial dan hibah.

8. Bagian Hubungan Masyarakat

Permasalahan Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 ini masih terbatas, sehingga untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Humas masih belum dapat optimal;
2) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
3) Perlu peningkatan kualitas SDM pada Bagian Humas dengan memberikan kesempatan mengikuti diklat bidang kehumasan, fotografi, editing dan lainnya;
4) Perlu penambahan peralatan pendukung seperti tripod kamera, lampu sorot kamera video, media penyimpanan digital, PC pengelola dan penyimpan data, dan lainnya;
5) Perlu kendaraaan operasioanl berupa mobil dinas untuk kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkab Kubu Raya.

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah

Permasalahan Urusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan dan tantangan internal
   a. Sumber daya manusia yang terbatas baik segi jumlah maupun kualitas;
   b. Sarana dan prasarana pendukung terutama ruang kerja yang belum dapat menampung seluruh pegawai DPPKAD.

2) Permasalahan dan tantangan eksternal
   a. Belum tertib dan belum disiplinnya SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   b. Adanya peningkatan beban kerja secara signifikan, sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan maupun peningkatan anggaran Pemerintah Kabupaten.

10. Sekretariat DPRD

Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sudah memadai, hal ini terkait dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Plapond dan kebijakan Anggaran yang ada walaupun pada kegiatan tertentu ada yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
2) Sumber Daya Manusia.
   Kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD masih kurang terutama pada Bidang Risalah dan Persidangan, sedangkan bagian tekhnis lainnya yaitu Bagian Umum dan Aparatur serta Keuangan dari jumlah data Kepegawaian yang ada perlu penambahan Personil untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas.
3) Sarana dan Prasarana.
   Dari segi sarana dan Prasarana masih perlu ditambah berkaitan dengan kondisi Ruang Sidang dan Ruangan lain dilantai 3 (Tiga) masih terasa sempit atau kurang luas yang mana untuk anggota Fraksi-Fraksi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda belum tertampung pada suatu ruangan yang luas dan memadai.
4) Permasalahan Internal dan Eksternal
   Pada dasarnya dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya yang baru maka untuk lingkungan kantor yang ada seperti sekarang dapat kita maklumi hubungan Internal sudah cukup baik dan hubungan dengan pihak luar juga baik, hanya perlu peningkatan pada masa yang akan datang.
5) Untuk kantor dibuat pada lokasi yang lebih memadai dan permanen, Kantor DPRD seperti kita lihat pada daerah-

daerah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

11. Inspektorat Daerah

Permasalahan Urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian tugas pemeriksaan regular belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sebagaimana telah di atur dalam PKPT;
2) Beberapa lokasi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua, terutama pada musim penghujan, sehingga pemeriksaanya ditunda atau belum diperiksa;
3) Sarana kendaraan roda empat, roda dua, kendaraan air dan peralatan lainnnya (peralatan untuk uji kualitas bangunan/jalan, dll) untuk menunjang tugas kelapangan sangat terbatas/belum tersedia;
4) Sarana komputerisasi dirasakan masih sangat terbatas terutama Komputer Jinjing (Laptop) untuk digunakan para pemeriksa dilapangan belum tersedia;
5) Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kwalitasnya masih belum memadai dan perlu ditingkatkan;
6) Obyek pemeriksaan (Objek) kadang-kadang terlambat menanggapi hasil pemeriksaan (temuan) yang disebabkan kurangnya keseriusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunya penilaian terhadap kinerja APIP dan keterlambatan pembuatan LHP;
7) Lambannya obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

12. Badan Kepegawaian Daerah

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kepegawaian adalah belum terselesaikannya permasalahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kubu Raya (CPNS) Tahun 2010 dan hasil seleksi ulang CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2012.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya SDM, yang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
3) Kesejahteraan yang kurang, dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dihadapi;
4) Belum tersedianya tenaga Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan Urusan Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1) Masih kurangnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib;
2) Masih kurangnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal;
3) Belum terselenggaranya upaya pemenuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4) Belum terbentuknya system koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

15. Kecamatan Sungai Raya

Permasalahan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;

2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, kegiatan.

16. Kecamatan Sungai Kakap

Permasalahan Kecamatan Sungai Kakap adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya personil, terbatasnya sumber daya manusia sehingga terkendalanya dalam memproses laporan.
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

17. Kecamatan Sungai Ambawang

Permasalahan Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Aparatur

   Masih terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada PNS dan masyarakat. Masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan, wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

   Sarana dan prasarana kerja yang tersedia saat ini belum memadai, seperti peralatan komputer, meubelair, sarana telekomunikasi, dan kendaraan operasional sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pelayanan dan pembinaan kepada PNS dan masyarakat. Masih kurangnya dukungan pengadaan sarana dan prasarana kerja dari

pemerintah tingkat atas sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

3) Pembiayaan

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Langsung (program dan kegiatan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Tidak Langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

18. Kecamatan Kuala Mandor B

Permasalahan Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya SDM personil/staf yang dibutuhkan di kecamatan baik secara kuantitas mau pun secara kualitas;
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan ;
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

19. Kecamatan Rasau Jaya

Permasalahan Kecamatan Rasau Jaya adalah sebagai berikut:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia (Personil) yang belum memadai;
2) Proses Pelaksanaan Kegiatan maupun penyusunan laporan cenderung lamban sehingga menghambat penyerapan dana anggaran untuk kegiatan dan memperlambat kegiatan;
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

20. Kecamatan Teluk Pakedai

Permasalahan Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut:

1) Kondisi Wilayah

Keadaan wilayah/medan Kecamatan Teluk Pakedai terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan sungai, lokasi

pemukiman penduduk di sekitar pegunungan cukup jauh, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sungai sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas lapangan dan memerlukan waktu, biaya yang besar, serta tidak semua jenis pertanian/ dapat berkembang dengan baik karena jenis tanah yang terdapat di dataran rendah yaitu gambut.

2) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai.

3) Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai, seperti jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Tanjung Bunga, sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya.

5) Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh

terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat.

6) Dukungan Pembiayaan, Personil dan Perlengkapan Kerja
Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan pembiayaan, personil dan perlengkapan kerja. Alokasi ketiga faktor tersebut.

7) Batas Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Teluk Pakedai baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi.

21. Kecamatan Kubu

Permasalahan Kecamatan Kubu adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas masupun secara kualitas;
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

22. Kecamatan Terentang

Permasalahan Kecamatan Terentang adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas masupun secara kualitas;
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;

3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

23. Kecamatan Batu Ampar

Permasalahan Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan, listrik yang belum nyala 24 jam dan kelengkapan kerja.

2.3.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

a. Belanja Jasa Administrasi Keuangan
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
e. Penyediaan makan dan minum rapat
f. Pengadaan peralatan gedung kantor
g. Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
h. Pengadaan mebeleur
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Kondisi SDM

Untuk SDM di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, pada eselon IV kekurangan 2 jabatan struktural yang sampai Desember 2014 belum terisi. Sedangkan jumlah pegawai BPMPD yang berjumlah 23 orang masih dianggap kurang. Untuk

mengatasi kekurangan staf tersebut dengan merekrut beberapa tenaga honorer untuk diperbantukan di Sekretariat dan bidang.

3) Lingkungan Internal

Untuk hubungan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya sangat baik dan rasa kekeluargaan.

4) Lingkungan Eksternal

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintahan Desa Kabupaten Kubu Raya untuk koordinasi dengan Legeslatif, antar SKPD Kabpaten, Provinsi dan pusat dalam rangka koordinasi dan konsultasi berjalan baik dan tidak ada permasalahan. Demikian dengan Aparatur Pemerintahan di Desa berlangsung baik dalam rangka pembinaan pemperdayaan pemerinntah dan masyarakat desa.

2.3.22 Urusan Sosial

Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Sosnakertrans;
2) Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang riil di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.23 Urusan Kebudayaan

Permasalahan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) Masih belum terakomodirnya para pekerja seni, budayawan, yang berprestasi sedangkan mereka perlu sebuah penghargaan khusus dari pemerintah setempat;
2) Dalam pelaksanaanya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat menampilkan seluruhnya kesenian yang berakar pada tradisi dikarenakan terbentur oleh keterbatasan dana yang dimilkinya. Untuk menampilkan kesenian tradisional berbentuk seni tari dan music tradisional;
3) Kurangnya berbagai elemen suku yang berada di Kab. Kubu Raya dalam peran serta pada kegiatan pagelaran lintas budaya dikarenakan keterbatasan waktu yang dinilai kurang siap oleh

para paguyuban keluarga besar suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya;

4) Kurangnya penghargaan yang diperoleh para pelaku seni dan ruang pengapresiasian karya seni yang telah dihasilkan oleh sanggar dan para pekerja seni;
5) Budaya dan kesenian tradisional semakin punah, banyak orang mulai melupakan atau bahkan tidak mengetahui ragam seni budaya, maka sesuai program dan kegiatan yang ada di bidang kebudayaan, agar dapat mengenalkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjada dan melestarikan budaya daerah;
6) Kurangnya pemahaman masyarakat akan kekayaan budaya berupa barang peninggalan sejarah dan asset budaya baik benda dan tak benda.

2.3.24 Urusan Statistik

Permasalahan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

1) Data PDRB dan Kabupaten Dalam Angka belum bisa tersaji pada Tahun berjalan;
2) Pemerintah dearah masih tergantung terhadap data-data BPS, dalam kaitanya dengan perencanaan pembangunan daerah tidak semua data dapat disediakan oleh BPS;
3) Keterlambatan mitra kerja dalam hal ini BPS dalam menyelesaikan produk pekerjaan;
4) Sering terjadi perbedaan data antara BPS dengan SKPD di Pemerintahan Kabupten Kubu Raya;
5) Jarangnya sinkronisasi antara BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.25 Urusan Kearsipan

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam

Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.26 Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.27 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Secara umum indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014 telah tercapai, diantaranya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap, pengolahan hasil perikanan serta peningkatan sarana

dan prasarana perisisir telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi pencapaian indikator kinerja ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat perikanan karena peningkatan pendapatan masyarakat masih rendah karena usaha yang dimiliki masyarakat pembudidaya ikan pada umumnya masih skala kecil;

2) Sarana dan prasarana dinas perikanan yang diserahkan kepada masyakat banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu dinas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perikanan. Salah satu program yang ada adalah pemberdayaan masyarakat, melalalui kegiatan bantuan kepada masyarakat perikanan, yang menjadi menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah usulan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan masih banyak yang belum dapat diakomodir karena terbatasnya jumlah anggaran yang ada;
4) Terbatasnya jumlah SDM khususnya staf, karena itu dalam penyelesaian pekerjaan banyak yang belum tepat waktu dan banyak kegiatan yang baru dapat diselesaikan pada akhir Tahun.
5) Masih banyak Desa yang belum memiliki Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2.3.28 Urusan Pertanian

Permasalahan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Masalah Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan "the right man on the right place" belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

2) Masalah Sarana dan Prasarana

   Di samping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

3) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

   Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.29 Urusan Kehutanan

Permasalahan Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya upaya pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
2) Kemampuan pasokan produksi kayu bulat dari hutan alam semangkin berkurang yang berimbas banyaknya industri pengolahan kayu yang tutup;
3) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan;
4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan, perkebunan dan pertambangan;
5) Masih sering terjadi gangguan keamanan hutan (illegal logging, kebakaran hutan) maupun klaim terhadap lahan perkebunan oleh masyarakat;
6) Adanya kecenderungan konflik sosial antara masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan;
7) Tingkat ekonomi sosial masyarakat sekitar hutan masih rendah;
8) Belum adanya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran dibidang kehutanan dan perkebunan;
9) Kemampuan dan potensi hasil perkebunan dalam memenuhi kebutuhan industri dan mengakomodir kebutuhan lokal masyarakat belum tercukupi dengan baik dan belum terkelola dengan azas manfaat;

10) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
11) Kebakaranhutandan lahan masih sering terjadi dimusim kemarau dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan atau penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar;
12) Rehabilitasi hutan melalui program belum dapat mengimbangi laju kerusakan hutan dan rehabilitasi lahan masih bertumpu pada dana yang dikucurkan oleh pemerintah sehingga pengurangan lahan kritis berjalan lambat;
13) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan;
14) Pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
15) Keberadaan fungsi kawasan hutan masih kerap berbenturan dengan masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan;
16) Usaha pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa rotan, damar, kulit medang dan lain-lain masih memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum digali dan dikelola dengan baik;
17) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
18) Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

1) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang pertambangan.
2) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan.
3) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan pertambangan.

2.3.31 Urusan Pariwisata

Permasalahan Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Promosi (Arakan Pengantin)

   Permasalahan :

   Dalam pelaksanaan kegiatan Promosi ini (Festival Arakan Pengantin) merupakan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 yang menjadikannya terlalu mendadak untuk dilaksanakan sehingga waktu untuk melakukan persiapan dalam mengikuti kegiatan ini menjadi terlalu sempit.

2) Kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi

   Hambatan :

   Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi ini adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masalah Plotting Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menampilkan hiburan musik tersebut masih belum terakomodir.

3) Kegiatan Pengembangan Desain Kreatif

   Hambatan :

   Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desain Kreatif ini tidak mengalami kendala yang berarti, hanya saja dalam proses pencetakan terhambat karena file Desain dengan hasil yang diaplikasikan kemesin cetak mengalami perubahan sehingga harus di Desain ulang untuk menyesuaikan lagi, belum adanya usaha cetak batik di Kabupaten Kubu Raya sehingga proses pencetakan sedikit mengalami kesulitan karena harus mencetak di luar Kabupaten Kubu Raya.

4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek Pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

   Hambatan :

   Belum adanya pengelolaan terhadap objek dan atraksi wisata di Kabupaten Kubu Raya serta kurangnya koordinasi dengan lembaga/dunia usaha.

5) Penyusunan rencana pengembangan wisata Gunung Ambawang

   Hambatan :

   Belum terencananya pengembangan objek wisata yang difokuskan pada wisata alam untuk pemanfaatan keasrian alam dan aksesibilitas yang kurang memadai.

6) Kajian potensi dan peluang Investasi Pariwisata Daerah KKR

Hambatan :

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan pada 3 (tiga) objek Wisata Unggulan Kabupaten Kubu Raya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih minimnya Atraksi Wisata yang ditawarkan pada masing-masing objek Wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Rendahnya akses menuju objek Wisata terutama Pantai Paloh Nibung dan Gunung Ambawang.
3. Minimnya sarana Wisata di objek-objek Wisata di Kabupaten Kubu Raya mulai dari sarana pokok, sarana pelengkap hingga sarana penunjang Pariwisata.

7) Valuasi Ekonomi Pembangunan Pariwisata KKR

Hambatan :

Kurangnya usaha kecil pada sektor Pariwisata yang berdampak pada penggandaan pendapatan ekonomi Pariwisata.

8) Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Hambatan :

Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pengiriman kontingen Promosi Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Explore Exotica Of Borneo yang diselenggarakan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII Jakarta Tahun 2014 ini adalah kurangnya anggaran dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

9) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2014 ada beberapa hambatan dan kendala tetapi dapat diantisipasi dengan melibatkan Duta-duta Wisata Kabpaten Kubu Raya yang dikenal dengan nama GEMA, hanya saja peserta yang dikirim dari Kecamatan banyak yang tidak memenuhi persyaratan diantaranya kurangnya tinggi badan yang sudah ditentukan oleh Tingkat Nasional.

10) Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan di bidang Pariwisata

Hambatan :

1. Kurangnya kuantitas SDM untuk menangani perizinan saat turun kelapangan.
2. Belum maksimalnya penyampaian laporan tingkat hunian kamar (THK) dari pengusaha hotel kepada dinas.

2.3.32 Urusan Indsutri

Permasalahan Urusan Industri adalah sebagai berikut:

1) Pagu anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM masih minim karena masih banyak pelaku IKM belum terbina;
2) Tidak maksimalnya penyerapan uji analisa laboratorium dan belanja bahan percontohan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER5/2009 tentang ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa. Arahan dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

2.3.33 Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1) Banyak agenda pameran yang tidak dapat diikuti karena anggaran tidak mencukupi untuk memehui semua undangan kegiatan pameran;
2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, tidak maksimalnya penyerapan dikarenakan kesulitan dalam hal mencari pihak kompeten sebagai tenaga ahli dalam tim monitoring gula terpadu;
3) Belum terlasananya penataan PKL yang diharapakan dapat berdagang dengan lokasi yang layak;
4) Belum terdatanya seluruh PKL dan pedangan tradisional di Kubu Raya dengan akurat.

2.3.34 Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan Urusan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

1) Minimnya kuantitas dan terbatasnya SDM yang ada, bila dibandingkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosnakertran Kabupaten Kubu Raya;
2) Minimnya anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 serta proyeksi perekonomian tahun 2017 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kubu Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Dengan adanya review RPJMD tahun 2016 ini, maka ada perubahan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, yaitu adanya isu Good Governance dan isu Kewilayahan dan Infrastruktur.

Isu Good Governance ini muncul karena adanya prioritas nasional (Nawa Cita no.2), yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. Isu ini juga di dukung dengan adanya prioritas nomor 4 Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik. Untuk mendukung dan memperkuat prioritas di atas, salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD 2014-2019 adalah Mewujudkan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga dalam program pembangunannya di nomor D memprioritaskan Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa.

Isu Kewilayahan dan Infrastruktursesuai dengan Nawa Cita Nomor 4, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dalam sasaran pokok pembangunan nasional nomor 4 dan 5 adalah Sasaran Pembangunan dimensi Pemerataan dan Dimensi Kewilayahan dan antar Wilayah. Prioritas Nasional dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ini didukung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat nomo 7, yaitu : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai, serta Ketahanan Budaya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung isu Kewilayahan dan Infrastruktur ini dengan Prioritas Peningkatan Infrastruktur.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Kubu Raya kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat ini harus di dukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi : (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai langkah antisipasi dan informasi penting arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 harus menggambarkan:

a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.Sesuai dengan sasaran nasional kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, untuk itu konsep pembangunan ekonomi yang pro poor, pro job dan pro growth akan terus dilanjutkan.

Sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran

serta pemerataan distribusi pendapatan. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkah-langkah strategis di atas tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komfrehensif berkenaan dengan kondisi ekonomi makro daerah dan trend perkembangannya yang tentunya menjadi dasar untuk dilakukan perkiraan/proyeksi perkembangan ekonomi di tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi didorong untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan minat investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, dan diupayakan memberikan insentif dan kemudahan investasi, harmonisasi kebijakan di semua tingkatan dan sektor, mendorong fasilitasi pembiayaan, memberikan fasilitasi ekspor.

Berbagai tantangan yang dikemukakan di atas tentunya memerlukan kebijakan yang handal dengan menggunakan berbagai potensi yang ada serta berbagai prospek yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah :

1. Potensi jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang besar untuk memperkuat dan mendukung kebijakan ekonomi daerah. Berdasarkan jumlah penduduk yang dilansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di semester 2 tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berjumlah 597.502 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 306.949 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 290.553 jiwa.
2. Potensi sumber daya alam yang berlimpah, diantaranya perikanan, baik perikanan laut dan perikanan umum maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut sebesar 7.906,4 ton dan senilai 110,06 milyar rupiah. Produksi perairan umum sebanyak 124,9 ton dan nilai produksinya sebesar 1,41 milyar rupiah, sdangkan produksi ikan budidaya sebanyak 1.601,5 ton dan nilai produksinya sebesar 26,74 milyar rupiah.
3. Potensi pertanian dan kehutanan, Sektor pertanian memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya yang cukup signifikan di

tahun 2011 sebesar 18,66% dari total PDRB. Semenatra berdasarkan data Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan luas hutan lebih kurang 831.679 hektar dengan rincian 388.392,73 hektar atau 46,70% merupakan kawasan hutan lindung dan 443.286,83 hektar merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan lahan dengan kondisi yang sangat kritis seluas 875,11 hektar.

4. Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur adalah fokus fasilitas wilayah atau ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 176, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana.
5. Kebijakan nasional yang memperkuat kelembagaan di desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian di perkuat dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka memperkuat keberadaan dan peningkatan kesejahteraan 118 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
6. Pertumbuhan ekonoi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 sebesar 6,44% dan meningkat sedikit pada tahun 2015 sebesar 6,54%. Target Pertumbuhan Ekonomi Kubu Raya tahun 2016 di targetkan mencapai 6.80%, dan proyeksi tahun 2017 menjadi 6,94%. Sektor ekonomi yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 15,69% serta sektor pengangkutan dan komunikasi 12,45%.
7. Angka Kemiskinan Tahun 2013 berjumlah 6,04% dan turun 0,47% pada tahun 2014 menjadi 5,57%. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan menjadi 5,50% dan target tahun 2016 akan turun menjadi 5,44% serta di proyeksi pada tahun 2017 menjadi 5,31%.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan ragam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dalam bentuk indikator makro sangat diperlukan untuk melihat gambaran tentang kondisi suatu daerah yang dilihat dari perspektif masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang,

serta perkembangan kinerja perekonomian daerah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi.Adapun Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2017

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	Revisi Target 2016	Proyeksi 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,54	6,61	6,66	6,44	6,54	6,67	6,80	6,94
2	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)	11.864,58	13.105,80	14.670,64	16.701,41	16.951,93	17.206,21	17.464,30	17.726,27
3	PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta)	11.294,02	12.040,89	12.842,74	13.669,89	13.874,94	14.083,06	14.294,31	14.508,72
4	Jumlah Penduduk	511.235,00	522.174,00	529.320,00	596.699,00	605.649,49	614.734,23	623.955,24	633.314,57
5	Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp Ribu)	23.100,00	25.100,00	27.700,00	30.900,00	35.090,00	-	-	-

8	Inflasi (%)	6,46	5,25	5,00	5,00	4,94	4,88	4,82	4,76
9	Angkatan Kerja (Jiwa)	253.598,00	227.891,00	222.970,00	244.818,00	248.490,27	252.217,62	256.000,89	259.840,90
10	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	11.468,00	13.808,00	20.650,00	15.132,00	14.950,42	14.771,01	14.593,76	14.418,63
11	Tingkatan Pengangguran (%)	4,52	6,06	9,26	6,18	6,07	5,96	5,85	5,75
12	Penduduk yang Bekerja (Jiwa)	242.130,00	214.083,00	202.320,00	229.686,00	233.131,29	236.628,26	240.177,68	243.780,35
13	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	31.900,00	32.800,00	32.100,00	29.470,00	28.939,54	28.418,63	27.907,09	27.404,77
14	Angka Kemiskinan (%)	6,67	6,27	6,04	5,57	5,50	5,44	5,37	5,31
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,56	63,42	63,94	64,52	65,49	66,47	67,47	68,48
	- Angka Melek Huruf (%)	81,04	87,23	85,02	85,32	88,32	89,64	90,99	92,35
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,37	66,43	66,83	69,64	70,68	71,74	72,82	73,91
	- Pengeluaran Riil Perkapita (Rp. 000/bln)	626,22	629,72	632,59	797,00	808,96	821,09	833,41	845,91
	- Lama Sekolah (Tahun)	6,74	6,83	6,91	7,03	7,14	7,24	7,35	7,46
16	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	4,52	6,27	6,04	5,57	5,65	5,74	5,82	5,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan berada diatas rata-rata Kalimantan Barat. Perekonomian Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif yang menunjukan angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 6,54% pada tahun 2011, tahun 2012 mencapai 6,61%, dan pada tahun 2013 naik menjadi 6,66%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,44%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah terjadinya perubahan ekonomi secara global dan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2014. Namun pada tahun 2015 naik lagi menjadi 6,54%, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 menjadi 6,80%, serta diproyeksikan tahun 2017 menjadi 6,94%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya ini diikuti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 5,57% pada tahun 2014, dan tahun 2015 menjadi 5,50%. Ditargetkan tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 5,37% serta diproyeksikan menjadi 5,31% pada tahun 2017. Tren Penurunan angka kemiskinan ini bersamaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang cenderung naik dan Pemerintah Daerah mendorong positif investasi masuk dengan bekerjasama Polda, TNI dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik lokal.

Akan tetapi pertumbuhan positif perekonomian dan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya tidak diiringi dengan penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014 yang mencapai angka 6,18%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya mengalami trend naik yakni dari 4,52 % pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 6,06 % di tahun 2012, dan tahun 2013 TPT ini mencapai 9,26%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya perlu mendapat perhatian yaitu sebagian besar atau sekitar 31,01% penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja tidak mendapatkan upah secara resmi, dan produktivitasnya juga cenderung belum/kurang optimal. Angka pengangguran terbuka Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya menempati urutan tertinggi di Kalimantan Barat.

Selain upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, upaya untuk menurunkan penduduk miskin juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Upaya tersebut akan didorong oleh berbagai program

yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaanya dengan akses dan harga terjangkau. Hal ini mulai tampak pada tahun 2014, dimana TPT Kabupaten Kubu raya turun menjadi 6,18% dan 6,07% pada tahun 2015. Diprediksi TPT Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 menjadi 5,85% dan diproyeksikan tahun 2017 tersisa 5,75%.

Sementara itu, Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar 64,52 dan tahun 2015 sebesar 64,49 sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 67,47 dan Proyeksi Tahun 2017 Sebesar 68,48. IPM dibentuk dengan 3 dimensi, yaitu Umur panjang dan hidup sehat (unsur kesehatan yang diukur dengan Usia harapan Hidup), Pengetahuan (Unsur Pendidikan yang diukur dari Rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah), dan Standar Hidup Layak (yang diukur dari Pendapatan Nasional Bruto per kapita). Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2014 ini didasarkan pada Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Sebesar (7,03 tahun) dan tahun 2015 Sebesar (7,14 tahun) sedangkan target Tahun 2016 Sebesar (7,24 tahun) dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar (7,46 tahun). Pengeluaran Riil Perkapita pada Tahun 2014 Sebesar 797.000,00/bulan dan tahun 2015 Sebesar 808.000,96/bulan, sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 821.000,09/bulan dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar 845.000,91/bulan.

Usia Harapan Hidup pada tahun 2014 yaitu Sebesar 69,64 tahun dan tahun 2015 Sebesar 70,68 tahun sedangkan target tahun 2016 Sebesar 71,74 tahun dan diproyeksikan tahun 2017 Sebesar 73,91 tahun.

PDRB Harga Berlaku di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 16.701,41 Juta dan tahun 2015 Sebesar Rp. 16.951,93 Juta sedangkan target Tahun 2016 Sebesar Rp. 17.464,30 Juta dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar Rp. 17.726,27 Juta. Sedangkan PDRB Harga Konstan 2000 pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 13.669,89 Juta dan tahun 2015 Sebesar Rp. 13.874,94 Juta sedangkan target Tahun 2016 Sebesar Rp. 14.294,31 Juta dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar Rp. 14.508,72 Juta, Inflasi yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Sebesar 5,00% dan tahun 2015

sebesar 4,94% sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 4,82% dan Proyeksi Tahun 2017 Sebesar 4,76%.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan.

Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94% pada Tahun 2017 tersebut, tidak semata–mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Ditargetkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 5,37% pada tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan sisa 5,31%.
c. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan tingkat pengangguran.
d. Upaya pencapaian dari sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tujuan MDG's, Standar Pelayanan Minima (SPM), Food Estate serta penanganan komoditi unggulan secara signifikan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan memecahkan permasalahan penting dan mendesak menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sektor), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Prinsip-prinsip keuangan daerah sebagai berikut :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungbjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. Semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
5. Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan surplus penerimaan daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan pokok-pokok kebijakan suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya. Secara umum pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017, didasarkan pada :

a. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan kegiatan yang mendukung *program pro growth, pro poor, pro job dan pro environtment.*

b. Pelaksanaan kebijakan keuangan didasarkan pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan penggunaanya diarahkan kepada upaya mengatasi masalah pembangunan dengan intensitas keterdesakan tinggi, yang menjadi kendala utama pembangunan.

c. Kebijakan Keuangan Daerah mengedepankan keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.

e. Keuangan daerah dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh pengeluaran maupun penerimaan.

f. Meningkatkan peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antar golongan pendapatan.

g. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada upaya menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

h. Keuangan daerah harus dapat memberikan keleluasaan kepada para pelaksanannya untuk memaksimumkan pengelolaan dananya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk seluruh siklus anggaran pengeloaan keuangan daerah harus taat azas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggung-jawabannya baik dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka administrasi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2013-2015 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengingat

besarnya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan–kebijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

a. Upaya peningkatan pendapatan daerah selain *Pendapatan Asli Daerah (PAD).*
b. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya. Untuk mewujudkan pendapatan daerah pada tahun 2017, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
2. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan publik.
3. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi PAD dan penerimaan daerah lainnya.
4. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti, sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak.
5. Optimalisasi hasil usaha Badan Hukum Milik Daerah (BHMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi,Target dan Proyeksi Pendapatan DaerahKabupaten Kubu Raya Tahun 2014 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	(%)	Target 2016 *)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	***97.407.483.796,39***	***118.088.916.074,71***	***86.450.579.334,38***	***73,21***	***132.323.164.813,71***	***133.939.888.901,71***
1.1.1	Pajak Daerah	64.729.599.444,05	82.538.049.986,00	54.864.886.735,52	66,47	87.781.508.500,00	89.398.264.095,00
1.1.2	Retribusi Daerah	25.180.126.655,62	7.274.697.775,00	6.003.747.900,46	82,53	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	563.736.663,41	2.750.000.000,00	1.724.724.757,82	62,72	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.934.021.033,31	25.526.168.313,71	23.857.219.940,58	93,46	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71
1.2	***Dana Perimbangan***	***841.715.445.482,00***	***892.894.089.000,00***	***891.952.775.985,00***	***97,59***	***1.208.962.825.500,00***	***1.208.962.825.500,00***
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	38.796.383.958,00	68,54	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	100	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00	100	371.479.160.000,00	371.479.160.000,00
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	***153.166.891.640,91***	***247.118.941.315,90***	***248.315.565.779,10***	***100,48***	***149.475.800.315,90***	***151.476.339.138,00***
1.3.1	Hibah	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi 2014	Target 2015 *)	Realisasi 2015	(%)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	27.118.612.640,91	65.936.946.315,90	68.862.470.779,10	104,44	66.564.316.315,90	68.564.855.138,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	100	0,00	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	136.041.442.000,00	98,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	100	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00
A	**JUMLAH PENDAPATAN**	**1.092.289.820.919,30**	**1.258.101.946.390,61**	**1.209.853.801.071,48**	**976,91**	**1.490.761.790.629,61**	**1.494.379.053.539,71**

**) Perubahan APBD 2015*

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Sedangkan Target Pendapatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	***14.843.909.619,00***	***88.138.698.876,80***	***94.308.407.744,21***	***100.909.996.286,90***	***107.973.639.025,72***
1.1.1	Pajak Daerah	8.902.316.568,20	47.122.347740,00	50.420.912.082,00	53.950.375.928,00	57.726.902.242,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.219.980.489,00	10.831.710.970,00	11.589.930.738,00	12.401.225.890,00	13.269.311.702,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.721.612.561,80	30.184.640.166,80	32.297.564.924,21	34.558.394.468,90	36.977.482.081,72
1.2	***Dana Perimbangan***	***623.799.571.814,020***	***837.455.694.000,00***	***921.263.400.000,00***	***100.909.996.286,90***	***1.114.653.527.704,00***
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.922.298.160,00	55.678.984.000,00	61.246.882.400,00	67.371.570.640,00	74.108.727.704,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.838.274.854,00	699.700.430.000,00	769.670.473.000,00	846.637.520.000,00	931.301.272.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.038.998.800,00	82.076.280.000,00	90.283.908.000,00	99.312.298.000,00	109.243.528.000,00
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	***33.003.513.049,20***	***144.403.606.735,00***	***191.810.967.408,00***	***210.992.064.149,00***	***232.091.270.534,00***
1.3.1	Hibah	10.980.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.700.858.049,20	56.525.330.000,00	62.177.863.000,00	68.395.649.300,00	75.235.214.200,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	10.321.905.000,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	30.000.000,00	33.000.000.000,00	36.300.000.000,00	39.930.000.000,00

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	0,00	87.848.276.735,00	96.633.104.408,00	106.296.414.849,00	116.926.056.334,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**JUMLAH PENDAPATAN**	**671.646.994.482,20**	**1.069.997.999.611,80**	**1.207.320.638.552,21**	**1.325.223.449.075,90**	**1.454.718.494.263,72**

*Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014*
***) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019*

Dari Tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 955.668.022.681,27 atau naik sebesar 42,29% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 671.646.994.482,20 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.277.117.327,27 atau naik sebesar 333,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun2009-2014 sebesar Rp. 14.843.909.619,00. Dana Perimbangan Rp. 774.980.539.716,00 atau naik sebesar 24,24% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 623.799.571.814,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 116.410.365.638,00 atau naik sebesar 252,72% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 33.003.513.513.049,20.

Tahun 2014 target pendapatan sebesar Rp. 1.218.198.405.395,00 atau naik sebesar 0,90% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.069.997.999.611,80 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.150.899.043,10 atau naik sebesar 4,07% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 88.138.698.876,80. Dana Perimbangan Rp. 892.894.089.000,00 atau turun sebesar 3,07% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 837.455.694.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 227.153.417.351,00 atau naik sebesar 18,43%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 144.403.606.735,00.

Tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp. 1.218.198.405.395,00atau naik sebesar 0,90% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.150.899.043,10 atau naik sebesar 4,07% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 94.308.407.744,21, Dana Perimbangan Rp. 892.894.089.000,00 atau turun sebesar 3,07% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019dengan target sebesar Rp. 921.201.263.400,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 227.153.417.351,00 atau naik sebesar 18,43%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 191.810.967.408,00.

Tahun 2016 target pendapatan sebesar Rp. 1.490.761.790.629,61atau naik sebesar12,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Meningkatnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dikarenakan pada Tahun 2016 adanya tambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari pemerintah pusat. Sedangkandari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 targetsebesar Rp. 132.323.164.813,71 atau naik sebesar 31,13% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 100.909.996.286,90.Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah target sebesar Rp. 149.475.800.315,90 atau turun sebesar 28,16% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 210.992.064.149,00, dikarenakan adanya pemindahan pos pendapatan sertifikasi guru yang pada tahun 2016 termasuk dalam DAK Non Fisik. Sedangkan Tahun 2017 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.494.379.053.539,71atau naik sebesar 2,73% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang menargetkan sebesar Rp. 1.454.718.494.263,72. Meningkatnya target pendapatan Tahun 2017 ada pada ketiga komponenyaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dearah Yang Sah. Untuk Target PAD 2017 sebesar Rp. 133.939.888.901,71 atau naik sebesar 24,05% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang hanya sebesar Rp. 107.973.696.025,72. Target Dana Perimbangan pada Tahun 2017 masih mengikuti angka Tahun 2016 sebesar Rp. 1.208.962.825.500,00 atau naik sebesar 8,46% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.114.653.527.704,00. Untuk target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 .

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja

langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan Belanja Langsung.

Belanja Daerah yang akan disusun dalam Alokasi Belanja Tak Langsung dan Alokasi Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

a. Tujuan, Sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
b. Indikator kinerja harus jelas;
c. Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus tetap memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai, dan diprioritaskan kepada strategi untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 yaitu:

a. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
c. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Daerah;
d. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Realisasi,Target dan Proyeksi Belanja DaerahKabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015 *)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	***Belanja Tidak Langsung***					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	576.428.603.053,00	666.471.709.995,00	894.932.515.775,00
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.963.000.000,00	8.344.000.000,00	15.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	68.269.968.100,00	144.772.114.200,00	171.494.550.200,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	150.000.000,00	8.043.198.065,00	2.000.000.000,00
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**486.854.901.789,60**	**522.075.355.561,23**	**652.188.571.153,00**	**829.131.022.260,00**	**1.085.427.065.975,00**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	48.635.195.726	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	261.315.963.686,00	-	-

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015 *)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	375.190.877.245,00	-	-
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**461.487.906.788,00**	**509.807.831.069,00**	**685.142.036.657,00**	**719.713.368.139,61**	**403.451.987.564,71**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**948.342.808.577,60**	**1.031.883.186.630,23**	**1.337.330.607.810,00**	**1.548.844.390.399,61**	**1.488.879.053.539,71**
	Surplus/(Defisit)	**7.325.214.103,67**	**60.406.634.289,07**	**(58.147.261.419,39)**	**(58.082.599.770,00)**	**5.500.000.000,00**

*) Perubahan APBD 2015

Sumber : Data Diolah Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Sedangkan Target Pendapatan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Belanja Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	***Belanja Tidak Langsung***					
2.1.1	Belanja Pegawai	533.014.991.714,00	444.158.038.679,00	488.573.842.547,00	537.431.226.802,00	591.174.349.482,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.075.916.500,00	24.102.000.000,00	24.584.000.000,00	25.075.000.000,00	25.577.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.280.281.709,00	6.067.000.000,00	6.370.000.000,00	6.688.000.000,00	7.023.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.118.060.200,00	25.519.680.000,00	27.306.057.000,00	29.217.481.000,00	31.262.705.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.196.150.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**577.685.400.123,00**	**500.146.718.679,00**	**547.433.899.547,00**	**599.311.707.802,00**	**656.237.054.482,00**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	19.614.405.536,00	47.385.176.742,00	49.754.435.579,00	52.242.157.358,00	54.854.265.225,00

NO	Uraian	Jumlah Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.888.435.864,00	209.778.988.022,04	230.756.886.824,21	253.832.575.506,90	279.215.833.058,00
2.2.3	Belanja Modal	146.129.585.063,00	373.641.971.060,00	379.375.416.602,00	419.837.008.409,00	464.411.341.499,00
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**250.632.426.463,00**	**630.806.135.824,04**	**659.886.739.005,21**	**725.911.741.273,90**	**798.481.439.782,00**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**828.317.826.586,00**	**1.130.952.854.503,04**	**1.207.320.638.552,21**	**1.325.223.449.075,90**	**1.454.718.494.264,00**
	Surplus/(Defisit)	**(156.670.832.103,80)**	**(60.954.854.891,24)**	**0,00**	**0,00**	**(0,28)**

*Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014*
***) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019*

Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 948.342.808.577,60 atau naik sebesar 14,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 828.317.826.586,00. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 486.854.901.789,60 atau turun sebesar 15,72% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp.577.685.400.123,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 461.487.906.788,00 atau naik sebesar 84,13% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 250.632.426.463,00.

Pada Perubahan APBD Tahun 2015 jumlah Belanja Daerah sebesar Rp.1.337.330.607.810,00atau naik sebesar 10,77% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.1.207.320.638.552,21. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.652.188.571.153,00atau naik sebesar 19,14% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.547.433.899.547,00.Belanja Langsung sebesar Rp. 685.142.036.657,00 atau naik sebesar 3,83% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 659.886.739.005,21.

Tahun 2016 Target jumlah Belanja Daerah sebesar Rp.1.548.844.390.399,61 atau naik sebesar 16,87% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.1.325.223.449.075,90. Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.829.131.022.260,00,00 atau naik sebesar 38,35% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.599.311.707.802,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp.719.713.368.139,61 atau turun sebesar 0,85% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.725.911.741.273,90.

Dan Proyeksi Tahun 2017 Belanja Daerah sebesar Rp.1.488.879.053.539,71 atau naik sebesar 2,35% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.454.718.494.264,00.Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.085.427.065.975,00 atau naik sebesar 65,40% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.656.237.054.482,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp.403.451.987.564,71 atau turun sebesar 97,91% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp.798.481.439.782,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah diantaranya pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang semakin besarnya peran pengeluaran konsumsi rumah tangga menyebabkan sifat pertumbuhan ekonominya kurang berkualitas, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seperti yang telah menjadi target pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk menyediakan infrastruktur yang memadai memerlukan

biaya yang sangat besar, yang tidak mungkin dibiayai oleh APBD saja, perlu digali alternatif-alternatif sumber pembiayaan daerah pada umumnya, dan khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

Tabel 3.6

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**34.409.039.026,65**	**8.210.627.130,32**	**61.617.261.419,39**	**66.707.599.770,00**	**0,00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	8.375.000.000,00	5.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	970.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**33.523.626.000,00**	**7.000.000.000,00**	**3.470.000.000,00**	**8.625.000.000,00**	**5.500.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**885.413.026,65**	**1.210.627.130,32**	**58.147.261.419,39**	**58.082.599.770,00**	**(5.500.000.000,00)**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Jumlah pengeluaran pembiayan netto Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 885.413.026,65 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 34.409.039.026,65 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 33.523.626.000,00. Tahun 2014 jumlah pengeluaran pembiayaan netto sebesar Rp. 1.210.627.130,32 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Untuk APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp. 58.147.261.419,39 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 61.617.261.419,39 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.470.000.000,00. Sedangkanuntuk target Tahun 2016 sebesar Rp. 58.082.599.770,00 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 66.707.599.770,00 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.8.625.000.000,00. Dan proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dari jumlah pengeluaran pembiayaan.

Dari jumlah realisasi pendapatan dikurangi jumlah realisasi belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 terdapat Surplus sebesar Rp. 7.325.214.103,67 begitu juga Tahun 2014 Surplus sebesarRp. 60.406.634.289,07. Tahun 2015 data sementara masih terdapat defisit sebesar Rp. 57.647.261.419,39 yang diakibatkan dari target pendapatan yang belum tercapai dari target pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk lebih jelas Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	***64.277.117.327,27***	***97.407.483.796,39***	***118.088.916.074,71***	***132.323.164.813,71***	***133.939.888.901,71***
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	82.538.049.986,00	87.781.508.500,00	89.398.264.095,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.274.697.775,00	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	25.526.168.313,71	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71
1.2	***Dana Perimbangan***	***774.980.539.716,00***	***841.715.445.482,00***	***913.975.489.000,00***	***1.208.962.825.500,00***	***1.208.962.825.500,00***
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	124.602.430.000,00	371.479.160.000,00	371.479.160.000,00
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	***116.410.365.638,00***	***153.166.891.640,91***	***247.118.941.315,90***	***149.475.800.315,90***	***151.476.339.138,00***
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	65.936.946.315,90	66.564.316.315,90	68.564.855.138,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	34.437.653.000,00	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00
A	**JUMLAH PENDAPATAN**	**955.668.022.681,27**	**1.092.289.820.919,30**	**1.279.183.346.390,61**	**1.490.761.790.629,61**	**1.494.379.053.539,71**
2.1	***Belanja Tidak Langsung***					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	576.428.603.053,00	666.471.709.995,00	894.932.515.775,00
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.963.000.000,00	8.344.000.000,00	15.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	68.269.968.100,00	144.772.114.200,00	171.494.550.200,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	150.000.000,00	8.043.198.065,00	2.000.000.000,00
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**486.854.901.789,60**	**522.075.355.561,23**	**652.188.571.153,00**	**829.131.022.260,00**	**1.085.427.065.975,00**
2.2	***Belanja Langsung***					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	48.635.195.726	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	261.315.963.686,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	375.190.877.245,00	-	-
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**461.487.906.788,00**	**509.807.831.069,00**	**685.142.036.657,00**	**719.713.368.139,61**	**403.451.987.564,71**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**948.342.808.577,60**	**1.031.883.186.630,23**	**1.337.330.607.810,00**	**1.548.844.390.399,61**	**1.488.879.053.539,71**
	Surplus/(Defisit)	**7.325.214.103,67**	**60.406.634.289,07**	**(58.147.261.419,39)**	**(58.082.599.770,00)**	**5.500.000.000,00**
3.1	***Penerimaan Pembiayaan***					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**34.409.039.026,65**	**8.210.627.130,32**	**61.617.261.419,39**	**66.707.599.770,00**	**0,00**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	8.375.000.000,00	5.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	970.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**33.523.626.000,00**	**7.000.000.000,00**	**3.470.000.000,00**	**8.625.000.000,00**	**5.500.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**885.413.026,65**	**1.210.627.130,32**	**58.147.261.419,39**	**58.082.599.770,00**	**(5.500.000.000,00)**
G	**Sisa Lebih Pembiayaan**	**8.210.627.130,32**	**61.617.261.419,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Anggaran Tahun Rencana (SILPA)					
H	**PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G $_{\text{tahun lalu}}$ + A + E) – (B+F)**	**477.909.161.048,64**	**633.042.353.907,78**	**746.759.298.076,39**	**719.713.368.139,61**	**403.451.987.564,71**

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
**) Proyeksi Sementara Tahun 2016*

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna memadukan langkah para pemangku kepentingan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dari masalah-masalah yang ada, maka disusunlah sasaran-sasaran pencapaiannya menunjukkan tingkat kinerja program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 sebagai tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memiliki arti strategis karena meletakkan landasan bagi pencapaian target-target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dan melanjutkan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja pembangunan tahun 2017 tersebut tidak terlepas dan saling terkait pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yaitu : ***"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Hormonis dan Berbudaya, serta Memiliki Daya Saing"*** yang dapat dijelaskan bahwa:

Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Harmonis dan Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa ***(isu Good Governance)*** ;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas (***isu Sosial-Budaya***) ;

3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah (***isu Ekonomi***) ;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat (***isu Kewilayahan dan Infrastruktur***).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Visi dan Misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, telah ditetapkan dan dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

TAHUN					
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat	**Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**	Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah	Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, maka arah kebijakan tahunan yang akan menjadi Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yaitu **Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.**

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 memprioritaskan fokus pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah, serta membuka isolasi daerah dan mendorong berkembangnya sektor perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2016 ini juga sudah dilakukan peningkatan dan pemantapan Infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan identitas hukum, perlindungan,

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Mengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan serta memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya pada Tahun 2018 pembangunan infrastruktur wilayah dan prasarana umum lain masih terus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah melalui sektor-sektor unggulan Kabupaten Kubu Raya terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pada Tahun 2019 dalam rangka memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan, peningkatan keunggulan dan daya saing daerah serta pengembangan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan Kabupaten Kubu Raya khususnya pada kawasan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan tanaman pangan berkelanjutan (food estaat), kawasan industri, jasa dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan nilai tambah pada usaha-usaha ekonomi berbasis agroindustri, sumber daya alam dan potensi masyarakat.

Pada akhir RPJMD kedua Tahun 2019 diharapkan target-target prioritas pembangunan jangka menengah sebagian besar sudah dapat dicapai sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan pada semua aspek prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur wilayah sehingga dapat memberikan daya tarik dan nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi tujuan investasi yang kondusif dan tempat hunian yang didukung oleh infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang memadai.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RKPD 2017 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing
MISI I	:	Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa (*Good Governance*)
TEMA RKPD 2017	:	"Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing"

RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019				RKPD KABUPATEN KUBU RAYA 2017	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI RKPD**	**ARAH KEBIJAKAN RKPD**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional	1. Memberi peluang yang seluas-luasnya kepada aparatur teknis dan fungsional untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	1. Peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif

			2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	2. Penataan SKPD/Badan dalam rangka efisinsi dan efektifitas	2. Memperkuat SOPD dalam kerangka efisiensi, efektivitas, trasparansi dan akuntabilitas public
			3. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi	3. Penajaman analisis jabatan dan analisis SWOT birokrasi	3. The right man on the right place
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan	1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel	1. Pembiayaan pembangunan harus berorientasi manfaat dan prioritas	1. Perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dan terpadu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
			2. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)	2. Menyusun perencanaan pembangunan dengan program IT dan melatih operatornya secara berkala	2. Memperkuat dan mempercepat penyusunan perencanaan pembangunan secara transparan dan mudah di akses

2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik	1. Mengembangkan kapasitas dan mengefektifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat	1. Meningkatkan fasilitas sapras dalam mempercepat pelayanan publik
			2. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2. Memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan SOP pelayanan publik	2. Pemberdayaan sumber daya aparatur yang profesional
					3. Memperkuat pelaksanaan SOP dengan disiplin dan konsisten
			3. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja	1. Membiasakan penggunaan IT dalam proses pelayanan publik	1. Sosialisasi dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan publik
					2. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
		2. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat	1. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsif dan akuntabel	1. Unit yang mempermudah konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada	1. Membangun unit layanan pengaduan yang efektif dan efisien

			2. Memberikan kemudahan/fasilitasi dalam pelayanan pengaduan publik	2. Meningkatkan respon balik yang tepat sebagai layanan yang profesional	2. Meningkatkan kualitas fasilitas dalam pelayanan publik

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing
MISI II	:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas Dan Memiliki Kreativitas (Isu Sosial Budaya)
TEMA RKPD 2017	:	"Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing"

RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019				**RKPD KABUPATEN KUBU RAYA 2017**	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI RKPD**	**ARAH KEBIJAKAN RKPD**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM	1. Peningkatan pelayanan pendidikan dasa dan menengah bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali
			2. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi siswa	1. Membantu dan mempermudah keluarga miskin dan anak yang putus sekolah (rentan putus sekolah) untuk mendapatkan akses untuk bersekolah	1. Memperluas bantuan Program Indonesia Pintar dan beasiswa

			3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak	1. Memprioritaskan anggaran untuk kepentingan fisik dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dengan prasarana yang layak
			4. Pemerataan jumlah sekolah	1. Mendata secara valid jumlah usia anak sekolah dengan ketersediaan sekolah yang ada	1. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan bersekolah
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	1. Memberikan kesempatan secara objektif kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi	1. Rekruitmen tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan dan keahlian
			2. Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata	1. Rekruitmen terbuka dengan penempatan bekerja sesuai dengan analisis kebutuhan	1. Meningkatkan pengelolaan penempatan tenaga pendidik
		3. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin	1. Pendataan yang valid untuk penduduk miskin dalam kerangka bantuan pendidikan yang sistematik dan komprehensif	1. Selektif dalam pemberian beasiswa dan reward untuk siswa
				2. Tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan	

			2. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan	1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan info tentang sekolah / pendidikan	1. Pendataan online status siswa dan sekolah yang bisa diakses oleh stakeholder
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat	1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	1. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat	1. Memperluas kepesertaan program SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
			2. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah	1. Meningkatkan sarana kesehatan di masyarakat	1. Pemenuhan sapras fasilitas layanan kesehatan
			3. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			4. Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan desa siaga	1. Memenuhi persyaratan desa siaga	1. Memperkuat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			5. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pedesaan	1. Peningkatan kualitas lingkungan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak	1. Meningkatkan pengadaan air bersih dan ODF / tidak ada buang air besar sembarangan

			6. Meningkatkan kualitas surveilance berbasis masyarakat	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam memperhatikan kualitas kesehatan lingkungan	1. Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan memelihara kesehatan bersama
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan suami-istri dalam kepesertaan KB Mandiri	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
		2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	1. Peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan dan rekruitmen SDM kesehatan yang transparan dan berkualitas	1. Penyediaan dan penempatan Sumber Daya Manusia kesehatan
			2. Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk tetap bersih dan sehat	1. Penguatan sistem informasi dan akses masyarakat terhadap masalah kesehatan
			3. Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit	1. Menggalakan pola hidup sehat dan disiplin mengimplementasikannya	1. Memperkuat upaya promotif dan preventif

3. Meningkatkan peran stakeholder dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam melestarikan seni dan budaya	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh	1. Pengembangan destinasi pariwisata daerah
					2. Pemantapan nilai-nilai positif (kebiasaan) dalam kehidupan bermasyarakat
			2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kratif	1. Internalisasi nilai-nilai kesenian dalam proses pembelajaran ekstra di sekolah	1. Pengembangan nilai-nilai seni dengan memperkuat kelembagaannya
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1. Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat	1. Memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan	1. Memberi akses dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan
			2. Membina kerukunan kehidupan beragama	1. Meningkatkan pemberan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan ibadahnya	1. Meningkatkan toleransi antar umat beragama
			3. Mengembangkan lembaga pembina keagamaan	1.	1. Mengayomi dan membina semua lembaga keagamaan yang diakui negara

		2. Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder	1. Penataan sistem aktivitas dan kualitas kehidupan beragama	1. Membangun komunikasi efektif dalam kerangka hubungan antar umat beragama
			2. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan	1. Meningkatkan pembangunan rumah ibadah dan penunjang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat	1. Memperkuat dalam keberpihakan anggaran daerah untuk kepentingan sapras keagamaan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing
MISI III	:	Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah (Isu Ekonomi)
TEMA RKPD 2017	:	"Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing"

RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019				**RKPD KABUPATEN KUBU RAYA 2017**	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI RKPD**	**ARAH KEBIJAKAN RKPD**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	1. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah		1. Peningkatan daya saing dan produktivitas
			2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat		
			3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah		
			4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif		1. Menciptakan kondisi yang stabil dan nyaman dalam berusaha

		2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi / usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat	1. Meningkatkan akses pemodalan bagi UMKM dan koperasi	1. Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro	1. Memberi kemudahan dalam proses permodalan dan pemasaran
			2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna	1. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi	1. Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan (koperasi)
			3. Memfasilitasi pemenuhan standar mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi		1. Mengoperasionalkan pusat layanan usaha terpadu
					2. Memfasilitasi pelatihan dan bimtek bagi UMKM
	2. Meningkatnya investasi penanaman moidal daerah	1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk	1. Mempermudah proses perizinan	1. Menyederhanakan peraturan dan perizinan	1. Memperkuat kepastian berusaha yang baik
			2. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah		

		menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	3. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang mengolah komoditi utama daerah	1. Mendorong tumbuhnya industri yang mengolah komoditi utama daerah yang mendukung pengembang sektor primer
		2. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja		
			2. Meningkatkan dan mengembangkan diverifikasi usaha		
			3. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah		

	3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat		
			2. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri		
			3. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha		
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawanan strategis yang berkelanjutan	1. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan		
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh		

		2. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup	1. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		
			2. Melakukan perlindungan / konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan		
	2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan		
			2. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian		
			3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan		

			4. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan		
		2. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agrobisnis dan agroindustri	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan		
			2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian		
			3. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri		
			4. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri		

		3. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	1. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan		
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan		
			3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan		
	3. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup	1. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
			2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup		
			3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup		

			4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup		

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing
MISI IV	:	Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat (Isu Kewilayahan)
TEMA RKPD 2017	:	"Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing"

RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019				**RKPD KABUPATEN KUBU RAYA 2017**	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI RKPD**	**ARAH KEBIJAKAN RKPD**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak	1. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi	1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah 2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman	1. Peningkatan pelayanan kualitas dan kuantitas angkutan transportasi	1. Pengembangan infrastruktur transportasi, perhubungan (darat, danau, sungai, laut) dan penyeberangan guna memudahkan aliran barang, jasa dan orang 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau disertai sarana dan prasarana yang memadai

			3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar	1. Mempercepat pembangunan jalan dan jembatanyang menghubungkan sentra-sentra produksi barang dan jasa menuju pasar	1. Mendorong peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten dan provinsi dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi
				2. Peningkatan sapras daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra produksi	
			4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitasi penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi	1. Kerjasama dengan stakeholder media dan jaringan komunikasi dalam mempercepat penyediaan sapras informasi	

	2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	1. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir	1. Melakukan diversifikasi dan konversi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT diwilayah yang masih terisolir
					2. Peningkatan penggunaan PLTS
			2. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	1. Penelitian, pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan	1. Mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan
					2. Memantapkan pemahaman kepada masyarakat bahwa energi terbarukan harus ramah lingkungan
	3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengadaan air bersih yang ramah lingkungan	1. Menjamin ketersediaan air bersih dengan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air bersih dan pengelolaan sanitasi
					2. Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku secara optimal dan merata

			2. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah		1. Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih
			3. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih	1. Mendorong pembangunan sapras air baku dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat	1. Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi dan pengendalian daya rusak air
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	1. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kebutuhan jalan, listrik, air bersih dan perangkat infrastruktur lainnya sebagai landasan utama untuk berinvestasi	1. Meningkatkan akses kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak, aman dan terjangkau
			2. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak	1. Memberikan kemudahan kepada pengembang untuk membangun kawasan perumahan yang layak

			3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan pembangunan sapras permukiman	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung sapras yang memadai
			4. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih		1. Penambahan sumber-sumber air baku yang bebas dari logam berat dan pencemaran lingkungan
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya	1. Menetapkan rencana umum dan rencana rinci Kabupaten Kubu Raya	1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan		1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
		2. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan	1. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup		1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Mendorong peran aktif masyarakat	1. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat lingkungan hidup yang sehat untuk generasi berikutnya

			3. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan		1. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan
			4. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air beku untuk air bersih		
		3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang	1. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat		
		4. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang	1. Penetapan ruang terbuka hijau		
	2. Terkendalinya pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Persampahan	1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif	1. Peningkatan jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di setiap kecamatan	1. Pemenuhan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah sementara
			2. Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) persampahan yang layak	1. Peningkatan luas TPA yang sudah ada, dan menginventarisir lahan alternatif lainnya	1. Pemenuhan lahan TPA yang representatif dan jauh dari permukiman
					2. Adanya pengurangan volume sampah dari sumber ke TPA
			3. Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan	1. Penambahan jumlah armada dump truck, armada roll, container sampah dan unit TPS	1. Peningkatan jumalh armada, pekerja (supir, pekerja, operator dan KPL) dan teknologi pengolahan persampahan
			4. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi	1. Peningkatan pengolahan sampah di TPA	

		2. Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan	1. Penambahan petugas pengelolaan persampahan	1. Rekruitmen SDM pengelola persampahan	1. Peningkatan jumlah SDM pengelola persampahan
			2. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan	1. Memberikan kemudahan akses mengenai SJSN	1. Peningkatan keikutsertaan SJSN Kesehatan dan SJSN Ketenagakerjaan

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020 atau disebut ***"Nawa Cita"*** adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan Nasional Tahun 2017 yang berkenaan dengan Nawacita adalah ***"Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah"***, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah ***"Hilirisasi Pembangunan Industri Bderbasis Sumber Daya Alam dan Modernisasi Infrastruktur Perdagangan untuk Kalimantan Barat yang berdaya Saimg dan Berkeadilan"***

Dengan mengacu agenda Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, maka tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah ***"Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing"***

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu kepada Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Kubu Raya dengan

pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat Dan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

NASIONAL	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA
1	*2*	*3*
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatgan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah	***Hilirisasi Pembangunan Industri Berbasis Sumber Daya Alam dan Modernisasi Infrastruktur Perdagangan untuk Kalimantan Barat yang berdaya Saimg dan Berkeadilan***	***Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing***

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa tema pembangunan daerah tahun 2017 secara umum selaras dan saling terkait, dimana pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai pondasi menunjang pembangunan ekonomi yang berkualitas dalam rangka membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan antar wilayah. Sementara di Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kuu Raya juga sama memfokuskan pembangunan infrastruktur dalam kerangka mendukung pembangunan industry dan peningkatan ekonomi kerakyatan agar mampu meningkatkan kualitas produk dan berdaya saing untuk menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi dengan Kabupaten Kubu Raya yang tercermin dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur, didukung dengan upaya:
   a. Peningkatan Infrastruktur.

b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
c. Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota.
d. Peningkatan Pembangunan Maritim dan Kelautan.

2. Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Dasar, didukung dengan upaya:
   a. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan.
   b. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa.
   c. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual.
   d. Peningkatan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum.
3. Mendorong Percepatan Pembangunan, didukung dengan upaya:
   a. Peningkatan Kesejahteraan.
   b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.
   c. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif.

Selain keselarasan tema, keselarasan prioritas pembangunan juga sangat menetukan terwujudnya sinkronisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dengan Prioritas Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, Dan Nasional

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan**	- Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat ***(Prioritas 1)*** - Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia ***(Prioritas 2)*** - Meningkatnya Derajat Kesehatan	- Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat ***(Sasaran No.2)*** ; (Pendidikan dan Kesehatan)	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ***(NC.5)***

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Masyarakat ***(Prioritas 3)***		
2	**Peningkatan Kesejahteraan**	- Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat ***(Prioritas 1)***	- Sasaran Makro ***(Sasaran No.1)*** ; (Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Ekonomi Makro)	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ***(NC.5)***
3	**Peningkatan Infrastruktur**	- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar ***(Prioritas 5)***	- Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan ***(Sasaran No.3)***	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional ***(NC.6)*** dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ***(NC.7)***
4	**Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa**	- Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik ***(Prioritas 4)***	- Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ***(Sasaran No.6)*** ; (Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah)	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya ***(NC.2)***
5	**Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spritual**	- Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, keadilan, Aman, Damai erta Ketahanan Budaya ***(Prioritas 7)***	- Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat ***(Sasaran No.2)***	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa ***(NC.8)*** dan Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial ***(NC.9)***
6	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang	- Meningkatny a Derajat Kesejahteraa	Sasaran Pembangunan Sektor	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Berwawasan Lingkungan	n Masyarakat ***(Prioritas 1)***	Unggulan ***(Sasaran No.3)***	Internasional ***(NC.6)*** dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ***(NC.7)***
7	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah	- Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat ***(Prioritas 1)*** - Meningkatnya Kecerdasan Sumber Daya Manusia ***(Prioritas 2)*** - Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan ***(Prioritas 6)***	Sasaran Makro ***(Sasaran No.1)*** ; (Pembangunan Manusia dan Ekonomi Makro)	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional ***(NC.6)*** dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ***(NC.7)***
8	Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	- Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan ***(Prioritas 6)*** - Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya ***(Prioritas 7)***	Sasaran Pembnagunan Sektor Unggulan ***(Sasaran 3)***	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional ***(NC.6)*** dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ***(NC.7)***
9	Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya ***(Prioritas 7)***	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan ***(Sasaran No.4)*** dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah ***(Sasaran No.5)***	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan ***(NC.4)*** dan Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara ***(NC. 1)***
10	Meningkatkan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum	Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Masyarakat ***(Prioritas 3)***	Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ***(Sasaran No.6)***	Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara ***(NC. 1)*** dan Memperkuat kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya ***(NC.4)***
11	Meningkatkan Pembangunan Maritim dan Kelautan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar (Prioritas 5) dan Meningkatnya Pmerataan Pembangunan Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya ***(Prioritas 7)***	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan ***(Sasaran No.3)***	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional ***(NC.6)*** dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ***(NC.7)***

Prioritas pembangunnan Kabupaten Kubu Raya menentukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu dengan menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat dengan melihat indikator :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
c. Kemiskinan.
d. Tingkat Pengangguran.
e. Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran pembangunan kewilayahan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Keselarasan Kewilayahan Tahun 2017

NO	INDIKATOR SASARAN KEWILAYAHAN	TAHUN 2014/2015		
		NASIONAL	KALBAR	KUBU RAYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	IPM	68,90/69,55	64,89/NA	64,52/65,49
2	IPMas	0,55/-	-	-
3	Kemiskinan (%)	10,97/11,22	8,07/8,44	5,57/5,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94/6,18	4,04/4,81	6,18/6,07
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02/4,80	5,02/4,81	6,44/6,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2016

IPMas adalah Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut di atas, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 naik dari 64,52 tahun 2014 menjadi 65,49, berada masih berada dibawah IPM Provinsi Kalbar Dan IPM Nasional. Sementara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar 5,57% dan turun pada tahun 2015 menjadi 5,50%, angka ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalbar dan Nasional yang sudah mencapai dua digit. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sebesar 6,54% berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional yamg masing-masing 4,81% dan 4,80%.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya prioritas nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Kubu Raya, sinkronisasi dalam menyusun RKPD 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional harus sejalan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD. RKP 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan. Sedangkan RKPD 2017 Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Untuk lebih memahami penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Tahun 2017 pada table 4.6 di bawah ini :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

PENJELASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN, SASARAN, DAN PRIORITAS RKP 2017

NO	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017			RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017	
	PRIORITAS	SASARAN	TUJUAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAWACITA VIII :	**MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA**				
NAWACITA IX :	**MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL**				
1	REVOLUSI MENTAL	A Meningkatnya Integritas	1 Meningkatkan perilaku anti korupsi	a Memberikan tauladan di lingkungan bekerja dan masyarakat	- Meningkatkan pelayanan publik dengan cepat, mudah, ringkas, trasparan, dan birokrasi yang responsif
				b Peningkatan kampanye publik "Perilaku Anti Korupsi" di media-media	- Reformasi tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa
			2 Indeks penegakan hukum berkualitas	a Tegas dalam pemberian sanksi/hukuman dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku	- Pendidikan yang berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras)
				b Meningkatkan sosialisasi akan sadar hukum di masyarakat	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dan memilih

		3 Persentase aparatur pemerintah/penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum	a Penegakan disiplin/hukum tanpa pandang bulu dan status	- Fokus pada prioritas pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan atas azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
		4 Persentase kepuasan publik atas penangan perkara	a Penanganan perkara dengan menjunjung asas kebenaran dan keadilan	- Harmonisasi dan simplifikasi perda dan aturan lainnya untuk mendorong kreativitas masyarakat
		5 Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan Perguruan Tinggi	a Meningkatkan pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia	- Peningkatan peran lembaga dan media dalam pembangunan karakter bangsa
			b Pejabat dan pemimpin daerah harus menjadi tauladan	- Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan bekerja berorientasi pada hasil yang bermutu dan nilai tambah
			c Penggalakan baca-tulis Al-Qur'an dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	- Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat
		6 Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan	a Sosialisasi perda secara efektif dan efisien	- Peningkatan semangat kerja keras, kreatif dan profesional

		7 Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya, dan kualitas)	a Belanja berdasarkan prioritas program	- Meningkatkan semangat berkompetisi sehat dalam berkarya
			b Semua belanja Pemda harus dipertanggungjawabkan	- Meningkatkan perilaku kerja sehat dan selamat di tempat kerja
	B Meningkatnya Etos Kerja	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, legislatif, dan pemerintah daerah	a Meningkatkan kualitas SDM di K/L, legislatif, dan pemerintah daerah	- Percaya diri dan selalu bangga pada karya anak bangsa
			b Saling memperkuat fungsi dan tugas masing-masing kelembagaan	- Meningkatkan karya cipta dan inovasi yang siap bersaing dengan daerah bahkan negara lain
		2 Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)	a Meningkatkan perlindungan hasil karya intelektual induvidu maupun masyarakat	- Peningkatan kontribusi produk daerah dalam konsumsi rumah tangga
			b Memberikan akses kepada masyarakat untuk	- Meningkatkan etos kerja dan disiplin bekerja
		3 Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja	a Meningkatkan kinerja guru denagn monev secara berkala	
		4 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	a Meningkatkan dan memotivasi masyarakat cinta dan bangga memakai produk dalam negeri	

		5 Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)	a Promosi dan mutasi secara berkala dan sesuai aturan	
		6 Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih, dan sehat	a Memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari hidup sederhana dan bersahaja	
			b Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di tempat bekerja	
	C Meningkatnya Gotong Royong	1 Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	a Mengaktifkan kembali kerja bakti rutin di lingkungan tempat tinggal	- Meningkatnya toleransi, gotong royong dan rasa aman masyarakat
			b Meningkatkan kualitas toleransi kepada teman yang berbeda SARA	- Menurunnya angka perceraian dan anak telantar
		2 Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	- Peneguhan jati diri sebagai anak bangsa dengan jiwa patriot dan cinta damai
		3 Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme	a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	- Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan
		4 Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak telantar)	a Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan keluarga	

				b Menjaga dan mengawasi pergaulan anak dengan lingkungan	
			5 Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme, dan pornografi	a Meningkatkan kualitas kegiatan rohani, olahraga dan berorganisasi yang bermanfaat	
NAWACITA V :		**MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA**			
2 PENDIDIKAN	A Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	1 Meningkatkan ketepatan waktu menamatkan pendidikan dasar 9 tahun		a Memberikan latihan dan try out secara rutin dan berkala khususnya kepada siswa kelas 9 SMP/MTs	- Melanjutkan layanan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas
		2 Meningkatkan angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun		a Menambah dan memperkuat kelompok belajar dalam pelaksanaan Keaksaraan Fungsional	- Memperkuat jaminan kualitas pelayanan pendidikan
		3 Meningkatkan rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya		a	- Memperkuat kurikulum dan sistem penilaian yang komprehensif dan kredibel
				b	- Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan

			c	- Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
	B Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	1 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	a Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Mempersiapkan persyaratan administrasi dan faktual untuk keperluan akreditasi sekolah
		2 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	a Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan agama, kewargaan dan karakter
		3 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	a Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
	C Penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata	1 Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV	a Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya yang linear serta pemberian beasiswanya	- Membangun budaya sekolah yang kondusif dan menyenangkan bagi penciptaan lingkungan belajar
		2 Persentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge)	a Guru diberi kesempatan dan kemudahan untuk mengikuti pelatihan dan kursus dalam rangka meningkatkan kompetensinya	

			b	
	D Pengembangan pembelajaran yang berkualitas	1 Kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman	a Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri dan kemampuan dasar	- Peningkatan kualitas standarisasi pendidikan nasional
			b Penguatan kerjasama dan umpan balik guru, kepsek, dan pengawas untuk mendukung efektivitas pembelajaran	- Penerapan Muatan Lokal dalam pembelajaran
			c Diversifikasi kurikulum	- Peningkatan kualitas pelaksanaan OSN, D2SN, FLS2N dan kompetisi lainnya
		2 Nilai test PISA dan rangking (dari 65 negara) : Matematika (rangking 64 dari 65 negara), Sains (rangking 64 dari 65 negara), Membaca (rangking 60 dari 65 negara)		- Implementasi pendidikan tanpa kekerasan
		3 Persentase pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment)	a Peningkatan pendidikan mengenal lingkungan (orientasi) dengan program yang menyenangkan tanpa kekerasan	- Peningkatan pemahaman pendidikan seksualitas

	E Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter	1 Pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia	a Menguatkan internalisasi nilai-nilai agama : akhlak mulia, toleran, saling menghormati	- Memperkuat praktek nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti
			b Guru harus menjadi role model, memberikan teladan bagi siswa dan meningkatkan kompetensi dirinya	- Membangun dan meningkatkan lingkungan tempat tinggal dan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dalam bergaul dan berinteraksi
			c Membina siswa untuk meningkatkan kualitas budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik	- Pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap pergaulan anak dan lingkungan
		2 Tingkat integritas lingkungan pendidikan SD-SMP (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)	a Diberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang melakukan kejahatan pendidikan	- Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan
			b Meningkatkan kualitas kejujuran dan tanggung jawab kepada insan pendidikan	- Meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan agama, kewargaan dan karakter
	F Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif	1 Bantuan biaya operasional pendidikan	a Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana BOS dan BOSDA sesuai aturan	- Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS

	2.4	Terlaksananya pelaksanaan program, Evaluasi dan Pelaporan	2.4a	Pembinaan dan pengawasan Program, Evaluasi dan Pelaporan	2.4a.1	Peningkatan kualitas program, evaluasi dan pelaporan	2.d Jumlah program yang terlaksana dan semakin tingginya evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
	2.5	Tercapainya publikasi dan sosialisasi PAUD	2.5a	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.5a.1	Promosi dan sosialisasi PAUD	2.e Jumlah publikasi dan sosialisasi PAUD
	2.6	Terlaksananya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	2.6a	Pengembangan Kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.6a.1	Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pengembangan kurikulum	2.f Persentase daya serap pelaksanaan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
	2.7	Tercapainya program meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah	2.7a	Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) TK	2.7a.1	Peningkatan kualitas program bantuan operasional TK	2.g Jumlah siswa TK yang mendapatkan BOS Daerah
	2.8	Terlaksananya penyelenggaraan dan pengembangan PAUD	2.8a	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.8a.1	Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu	2.h Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan PAUD
3 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	3.1	Terlaksananya pembinaan guru TK	3.1a	Pembinaan berkala Guru TK secara berjenjang dan sistematis	3.1a.1	Peningkatan kualitas pembinaan guru TK	3.a Jumlah guru TK yang diberikan pembinaan

		3.2	Terlaksananya bantuan Gugus TK (KKG)	3.2a	Bantuan Gugus TK (KKG)	3.2a.1	Membangun kerjasama positif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal bantuan gugus TK	3.b	Jumlah bantuan Gugus TK (KKG) yang diberikan
		3.3	Terlaksananya pembentukan musyawarah kerja kepala TK dan realisasi programnya	3.3a	Mendorong dan mendukung secara finansial dan program	3.3a.1	Pembentukan Musyawarah Kerja Kepala TK dan penusunan program kerjanya	3.c	Jumlah pertemuan atau kegiatan yang dilaksanakan musyawarah kerja kepala TK
		3.4	Terlaksananya Porseni Guru TK	3.4a	Lomba TK / Porseni TK Guru	3.4a.1	Mendorong dan meningkatkan kreativitas guru TK melalui Pekan Olahraga dan Seni	3.d	Jumlah cabang dan bidang porseni yang dilombakan, serta jumlah pemenangnya
		3.5	Tercapainya pelatihan kompetisi tenaga pendidik PAUD	3.5a	Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik PAUD	3.5a.1	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD	3.e	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang dilatih
4	Apresiasi seni, budaya dan olahraga siswa TK/PAUD	4.1	Terlaksananya Perayaan Hari Anak Nasional dan Gebyar Pengembangan PAUD	4.1a	Kegiatan HAN dan Gebyar Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	4.1a.1	Meningkatkan kualitas perayaan Hari Anak Nasional	4.a	Jumlah kegiatan dan peserta HAN serta Gebyar Pengembangan PAUD
		4.2	Terlaksananya Porseni Anak TK	4.2a	Lomba TK / Porseni TK anak	4.2a.1	Mendorong dan meningkatkan kreativitas anak TK melalui Pekan Olahraga dan Seni	4.b	Jumlah cabang dan bidang porseni yang dilombakan, serta jumlah pemenangnya
		4.3	Terpenuhinya Alat Permainan Edukatif anak-anak PAUD	4.3a	Peningkatan kualitas Pengadaan APE PAUD PNF yang berbasis lokal/tradisional	4.3a.1	Memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk APE	4.c	Jumlah APE yang diadakan

II. PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN								
1	Pembangunan dan rehabilitasi gedung SD dan SMP	1.1	Terpenuhinya ruang belajar, ruang pendukung, pagar dan atau gedung SD dan SMP	1.1a	Pembangunan ruang kelas, ruang pendukung, pagar dan atau gedung SD dan SMP	1.1a.1	Jumlah ruang, pagar dan atau gedung SD dan SMP yang dibangun	1.a	Penyediaan subsidi dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah
		1.2	Terpenuhinya buku-buku perpustakaan	1.2a	Pengadaan buku-buk perpustakaan	1.2a.1	Jumlah buku perpustakaan yang diadakan	1.b	
		1.3	Terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas dan ruang pendukung	1.3a	Rehabilitasi ruang kelas dan ruang pendukung SD-SMP	1.3a.1	Jumlah ruang kelas dan ruang pendukung yang direhabilitasi	1.c	Penyediaan dukungan terhadap pengembangan MBS dan keterlaksanaan akreditasi sekolah
2	Peningkatan mutu dan pelayanan SD-SMP	2.1	Tercapainya pengadaan alat praktik siswa, alat laboratorium, dan mebeleur sekolah	2.1a	Pengadaan alat praktik siswa, alat laboratorium, dan mebeleur sekolah	2.1a.1	Peningkatan kualitas pra sarana SD-SMP	2.a	Jumlah alat praktek, alat lab dan mebeleur yang diadakan
		2.2	Terpenuhinya pelaksanaan ujian pendidikan dasar 9 tahun	2.2a	Pelaksanaan ujian pendidikan dasar 9 tahun	2.2a.1	Peningkatan kualitas lulusan peserta didik Pendas	2.b	Jumlah siswa yang mengikuti ujian dan yang lulus ujian pendidikan dasar 9 tahun
		2.3	Terlaksananya akreditasi SD-SMP	2.3a	Penyelenggaraan Akreditasi SD-SMP	2.3a.1	Peningkatan kualitas akreditasi SD-SMP	2.c	Jumlah SD-SMP yang diakreditasi
		2.4	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SD-SMP	2.4a	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SD-SMP	2.4a.1	Peningkatan kualitas monev dan pelaporan SD-SMP	2.d	Jumlah program yang terlaksana dan semakin tingginya evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

	2.5	Tercapainya program meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah	2.5a	Bantuan Operasional Sekolah (BOS pusat maupun BOSDA)	2.5a.1	Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangakuan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah	2.e Jumlah siswa SD-SMP yang mendapatkan BOS maupun BOSDA
	2.6	Terpenuhinya penyelenggaraan Paket A dan Paket B	2.6a	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	2.6a.1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	2.f Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Paket A dan Paket B
	2.7	Terlaksananya Try Out SD dan SMP atau yang sederajat	2.7a	Try Out SD/MI dan SMP/MTs	2.7a.1	Jumlah siswa yang mengikuti Try Out SD dan SMP atau yang sederajat	2.g Jumlah siswa yang mengikuti Try Out SD dan SMP atau yang sederajat
	2.8	Terlaksananya pelaksanaan MBS di SD-SMP	2.8a	Tata kelola pendidikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	2.8a.1	Peningkatan kualitas pelaksanaan MBS di SD-SMP	2.h Jumlah SD-SMP yang telah melaksanakan MBS
	2.9	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN/FLS2N SD-SMP	4.2a	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN/FLS2N SD-SMP	4.2a.1	Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik dan penjaringan bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar	2.i Jumlah cabang olahraga, bidang seni dan pemenang O2SN/FLS2N SD-SMP
	2.10	Terlaksananya LSS SD-SMP	4.3a	Lomba Sekolah Sehat (LSS) SD-SMP	4.3a.1	Peningkatan kualitas lomba LSS SD-SMP	2.j Jumlah sekolah dan pemenang yang mengikuti LSS
	2.11	Terlaksananya pemilihan siswa berprestasi SD-SMP	4.4a	Penghargaan bagi siswa berprestasi	4.4a.1	Peningkatan kualitas pemilihan siswa berprestasi	2.k Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan jumlah pemenang siswa berprestasi SD-SMP

3	Pelaksanaan SPM	3.1	Terlaksananya SPM dengan indikator yang telah ditetapkan	3.1a	Pelaksanaan SPM pendidikan	3.1a.1	Pelaksanaan SPM secara bertahap dan bertanggung jawab	3.a	Jumlah indikaor SPM yang dapat dicapai (13 indikator satuan pendidikan dan 14 indikator kabupaten)
III. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL									
1	Pembangunan dan rehabilitasi ruang/gedung pendidikan Non formal beserta prasarananya	1.1	Terpenuhinya ruang belajar dan ruang pendukung lainnya	1.1a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	1.1a.1	Peningkatan kualitas pengadaan ruang belajar baru dan ruang pendukung lainnya	1.a	Jumlah ruang dan atau gedung yang di bangun dan direhabilitasi
2	Peningkatan kualitas pendidikan Non Formal	2.1	Terpenuhinya bantuan operasional pendidikan Non formal	2.1a	Pemberian Operasional Pendidikan Non Formal	2.1a.1	Selektivitas pemberian bantuan kepada pendidikan Non Formal	2.a	Jumlah siswa dan lembaga yang mendapatkan bantuan operasional pendidikan
		2.2	Terpenuhinya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	2.2a	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	2.2a.1	Peningkatan pembinaan pendidikan Non Formal	2.b	Jumlah kursus yang diberikan pembinaan
		2.3	Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan	2.3a	Pengembangan pendidikan keaksaraan	2.3a.1		2.c	Jumlah kelompok dan orang yang memperoleh pengembangan pendidikan keaksaraan
		2.4	Terwujudnya pengembangan pendidikan kecakapan hidup (SKB)	2.4a	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (SKB)	2.4a.1	Perluasan pendidikan kecakapan hidup di masyarakat	2.d	Jumlah lembaga dan orang yang mendapatkan pendidikan kecakapan hidup
		2.5	Terpenuhinya pengembangan sertifikasi pendidikan Non formal	2.5a	Pengembangan sertifikasi pendidikan Non formal	2.5a.1	Peningkatan akses dan pengembangan sertifikasi pendidikan	2.e	Jumlah pendidik yang mendapatkan sertfikasi

		2.6	Terpenuhinya publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal	2.6a	Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal	2.6a.1	Peningkatan kampanye pendidikan Non Formal	2.f	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal yang dilaksanakan
		2.7	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.7a	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.7a.1	Pelaksanaan monev dan pelaporan secara berkala	2.g	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporang yang dilaksanakan
		2.8	Terlaksananya pembinaan kesetaraan Paket A, B dan C	2.8a	Pembinaan Kesetaraan Paket A, B dan C	2.8a.1	Peningkatan pembentukan kelompok belajar kesetaraan Paket A, B, dan C	2.h	Jumlah kelompok dan peserta yang mengikuti kesetaraan Paket A, B dan C
3	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	3.1	Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PNFI	3.1a	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNFI	3.1a.1	Peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan PTK PNFI	3.a	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PNFI yang mengikuti pelatihan kompetensi
		3.2	Terwujudnya Jambore PTK PNF (Karya Tulis dan Olah Raga) SKB	3.2a	Jambore PTK PNF (Karya Tulis dan Olah Raga) SKB	3.2a.1	Peningkatan kualitas pelaksanaan Jambore PTK PNF	3.b	Jumlah peserta dan pemenang Jambore PTK PNF
		3.3	Terlaksananya ujian Paket A dan B	3.3a	Ujian Paket A dan B	3.3a.1	Jumlah PTK yang terlibat dalam pelaksanaan ujian Paket A dan B	3.c	Jumlah PTK yang terlibat dalam pelaksanaan ujian Paket A dan B
		3.4	Terpenuhinya Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal	3.4a	Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal	3.4a.1	Peningkatan kualitas Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non Formal	3.d	Jumlah PTK yang mengikuti Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal
		3.5	Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan Non formal	3.5a	Sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan non formal	3.5a.1	Peningkatan kualitas sosialisasi ujian pendidikan Non Formal	3.e	Jumlah PTK yang melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan Non formal
		3.6	Terselenggaranya POR Paket A, B dan C	3.6a	POR Paket A, B dan C	3.6a.1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan POR paket A dan B	3.f	Jumlah PTK yang mengikuti POR Paket A dan B

		3.7	Terpenuhinya data base PNFI	3.7a	Pembuatan Data Base pendidikan Non Formal dan informal	3.7a.1	Peningkatan kualitas data base PNFI	3.g	Jumlah PTK yang terlibat dalam pembuatan data base PNFI
IV. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	1.1	Terlaksananya sertifikasi Guru dan pengawas yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan faktual	1.1a	Mendata PNS atau guru honorer yang memiliki NUPTK dan minimal S-1 sesuai ijazah	1.1a.1	Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan nominasi dalam data dapodik	1.a	Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan nominasi dalam data dapodik
2	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	2.1	Guru yang memenuhi persyaratan untuk Pendidikan Lanjutan	2.1a	Memberi kesempatan yang terbuka kepada semua pendidik untuk melanjutan pendidikan kejjenjang yang lebih tinggi	2.1a.1	Jumlah Pendidik yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2.a	Jumlah Pendidik yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan
3	Pengawasan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.1	Meningkatkan disiplin dan kinerja Tenaga Kependidikan	3.1a	Peningkatan kualitas kontrol dan pengawasan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.1a1	Jumlah Tenaga Kependidikan yang dikontrol dan diawasi	3.a	Jumlah Tenaga Kependidikan yang dikontrol dan diawasi
4	Bimtek Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Ilmiah Bagi Tenaga Pendidikan	4.1	Pengawas yang terhambat dalam pengurusan kepangkatan dan golongan	4.1a	Kepala Sekolah dan guru yang mengikuti seleksi calon Pengawas	4.1a.1	Pengawas Sekolah yang belum atau dalam proses penulisan karya tulis ilmiah	4.a	Pengawas Sekolah yang belum atau dalam proses penulisan karya tulis ilmiah
5	Pengembangan Mutu dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	5.1	Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (SD-SMP)	5.1a	Kepala Sekolah mempersiapkan persyaratan yang diminta untuk penilaian kinerjanya	5.1a.1	Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah terakreditasi	5.a	Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah terakreditasi

		2 Bantuan peningkatan prestasi	a Selektif dan terseleksi dengan terbuka dan transparan	- Selektivitas dalam pemberian beasiswa dan reward untuk siswa yang berprestasi	
		3 Bantuan afirmasi penduduk tidak mampu/daerah khusus	a Selektif dan tepat sasaran dalam memberikan bantuan	- Pendataan on line status siswa dan sekolah yang bisa di akses oleh stakeholder	
	G Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Peningkatan ketersediaan ruang belajar dan ruang penunjang lainnya	a Pendataan yang valid terhadap kondisi fisik sekolah	- Rehabilitasi sedang atau berat terhadap ruang kelas sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan gedung penunjang lainnya	
			b Pengisian DAPODIK yang jujur dan selalu di evaluasi secara rutin dan berkala	- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan ruang penunjang belajar lainnya	
		2 Peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM	a Pelaksanaan SPM secara efektif dan efisien		
3 KESEHATAN	A Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), diukur dengan proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%)	a	- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat - Meningkatkan usia harapan hidup	

		2 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), diukur dengan proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (%)		- Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (%)		- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
		4 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)		- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI)
	B Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Prevalensi HIV (%)		- Memperkuat upaya promotif dan prefentif
		2 Prevalensi Tuberkulosis (%)		- Menurunkan kasus penyakit menular dan tidak menular
		3 Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%)		
		4 Prevalensi tekanan darah tinggi (%)		
		5 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)		

	C Meningkatnya Perlindungan Finansial	1 Penduduk yang menjadi peserta BPJS - kesehatan (%)		- Menggalakan Gerakan Masyarakat Sehat - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
	D Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	a Membangun rumah sakit yang representatif disertai kelengkapan tenaga medis dan peralatannya	- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
		2 Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	b Peningkatan pemahaman keluarga akan pentingnya imunisasi dan kesehatan bayi	- Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
		3 Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	c Tersedianya tenaga medis berkualitas untuk masyarakat	- Pemerataan sapras kesehatan di 9 kecamatan KKR
	E Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Meningkatnya IPM KKR dari aspek kesehatan	a Peningkatan indikator IPM (kesehatan) masyarakat	- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			b Pelibatan dan pemberdayaan aktif masyarakat dalam promosi kesehatan (pencegahan dan pengobatan)	- Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan - Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan

4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	A Akses air minum dan sanitasi yang layak	1 Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	a Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi	- Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan , perubahan sikap dan perilaku dalm pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi	
				b Pembangunan infrastuktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan	- Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan dari perencanaan, penganggaran, investasi dan pemeliharaan	
				c Rehabilitasi infrastruktur air minum dan sanitasi yang menua dan kena bencana	- Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di kabupaten, kecamatan dan desa	
				d Inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase	- Efektivitas dan efisiensi infrastruktur air minum dan sanitasi	
				e Penyehatan pengelolaan infrastruktur air minum, limbah, dan persampahan	- Peningkatan akses masyarakat berpendapat rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau	
			2 Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi	a Restrukturisasi dan reposisi manajemen PDAM secara efisien dan transparan	- Penyediaan saran dan prasarana serta utilitas yang memadai	

			b Peningkatan kualitas rencana dan implementasi RI-SPAM dan SSK	- Diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah
			c Integrasi peningkatan promosi higiene dan sanitasi dalam rangka demand genaration	
			d Advokasi kepada stackholder	
		3 Peningkatan ketersediaan air baku	a Jaga air	
			b Simpan air	
			c Hemat air	
			d Bauran Air Domestik	
	B Kawasan permukiman kumuh perkotaan	1 Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan permukiman kumuh	a Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru dan berkualitas	- Penataan dan pembangunan sarana-prasarana pendukung di kawasan perumahan / pemukiman kumuh secara bertahap

				b Penguatan tata kelola pembangunan perumahan	- Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bahan baku bangunan yang terjangkau, sehingga mereka mampu membangun dan/atau memperbaiki tempat tinggalnya
				c Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan	
				d Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang murah dan aman	
				e Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan	
NAWACITA VI : **MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR TRADISIONAL** **NAWACITA VII** : **MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**					
5	KEDAULATAN PANGAN	A Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan	1 Produksi Pangan Utama (Padi)	a Menahan konversi sawah	- Peningkatan produksi padi dan cadangannya
				b Revitalisasi penyuluhan dan sistem pembenihan	- Persediaan gudang untuk masa paceklik

			2 Diversivikasi Pangan (Jagung, Kedelai, dan Gula)	a Penggunaan pangan lokal non beras	- Penguatan cadangan pangan dan stabilitas harga pangan
			3 Peningkatan Produksi Sumber Protein (Daging Sapi, dan Ikan)	a Meningkatkan konsumsi protein seperti telur, ikan, daging, sayur dan buah	- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
		B Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Irigasi	1 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Permukaan, Air Tanah dan Rawa	a	-
			2 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Air Tanah dan Rawa		- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan
			3 Pembangunan Irigasi Tambak		
			4 Pembangunan Waduk		
6	KEDAULATAN ENERGI				- Percepatan dan penyederhanaan proses pengadaan tanah
					- Inventarisir aset daerah secara administrasi dan hukum

					- Pengembangan sistem PTSP
					- Pembenahan iklim ketenagakerjaan yang tidak memberatkan dunia usaha
7	KEDAULATAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN	A Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim	1 Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal	a Peningkatan penegakan hukum perikanan dan kelautan	- Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dan kelautan - Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda
			2 Meningkatkan Ketaatan Pelaku Perikanan	a Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum kepada stakeholder perikanan	
		B Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan		a	- Percepatan pengembangan ekonomi kelautan

	C Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	1 Peningkatan Produksi Hasil Kelautan (seperti ikan, rumput laut, dan garam)	a Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan produksi hasil kelautan	- Meningkatkan dan mempertahankan kualitas , daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
		2 Pengembangan Pelabuhan Perikanan	a Peningkatan pengadaan pelabuhan perikanan	- Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK kelautan
		3 Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Laut	a Memperkuat ketahanan dan kelestarian kawasan konservasi laut	- Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
8 PARIWISATA DAN INDUSTRI	A Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1 Peningkatan devisa atau PAD	a Meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata	- Pemasaran pariwisata dengan pembangunan destinasinya
		2 Peningkatan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa lokal	a Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pendidikan/penyuluhan, pendanaan, dan kemudahan berusaha	- Pembangunan industri pariwisata dengan memperkuat kelembagaan pariwisata
	B Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 Memanfaatkan potensi lokal dengan menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja	a Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha	- Pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan sumber daya alam

			b Pengembangan SDM, IPTEK, regulasi dan kebijakan	- Peningkatan daya saing dan produktivitas
NAWACITA III : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN				
9 PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN	A Penciptaan Lapangan Kerja	1 Penyediaan lapangan kerja	a Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas	- Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas
			b Mendorong pengeluaran Pemda dan penciptaan investasi yang padat karya	- Pengembangan ekonomi produktif
	B Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Pekerja	1 Pelatihan kerja untuk mendapatkan sertifikasi	a Peningkatan kompetensi dan keahlian kerja melalui pelatihan yang berstandar ISO dan bersertifikasi	- Peningkatan profesional pekerja dan pelaku usaha dalam menghadapi MEA
	C Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil	1 Diklat dan Pendampingan Usaha serta Subsidi KUR	a Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha	- Adanya perlindungan dan kepastian dalam berusaha
			b Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha	- Meningkatkan kualitas perizinan satu atap dan bebas pungli
			c Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro	- Meningkatkan kerjasama dengan pihak Bank, CU atau lembaga keuangan lainnya

	D Akses Terhadap Pelayanan Dasar	1 Kepemilikan Akte Lahir	a Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana	- Perluasan peningkatan pelayanan dasar	
		2 Akses Perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan	b Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar		
	E Perlindungan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	1 Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (Induvidu)	a Penataan asistensi sosial KIS, KIP, dan KKS	- Pendataan yang valid penduduk miskin dan rentan miskin	
		2 Bantuan tunai bersyarat / PKH (Keluarga)	b Efektifitas program Bidik Misi	- Pemberian bantuan dan jaminan sosial / pendidikan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	
		3 Bantuan pendidikan / KIP (anak usia sekolah)	c Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat / PKH		
		4 Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)			
10 PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	A Pembangunan Perdesaan	1 Penurunan desa tertinggal	a Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi	- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan pedesaan/transmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman	

			b Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah	- Pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
		2 Pembangunan perkotaan	a Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, danlayak huni	- Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/pemukiman transmigrasi
			b Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	- Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan/transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota - Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan - Pengembangan kota cerdas yang bedaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
NAWACITA IV :	**MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA**			

11	KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM	A Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat	1 Pembangunan kesadaran hukum yang berkualitas	a Masyarakat menjadi pelopor utama kesadaran hukum	- Penghormatan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia	
				b Pelaksanaan hukum dan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu		
		B Memberikan tauladan dan sikap hidup sederhana dan bersahaja	2 Menumbuhkan perilaku hidup hemat dan tidak boros	a Membiasakan diri melakukan penghematan biaya kegiatan dan operasional di kantor	- Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif - Menerapkan pola hidup sederhana	
		C Mencegah dan melawan perilaku korupsi	3 Mengutamakan pencegahan dan meminimalisasi resiko kesalahan administrasi dan kebijakan	a Setiap kegiatan wajib mengikuti juknis dan juklak yang telah ditentukan	- Gerakan hidup hemat, bersahaja dan banyak bersedekah	
NAWACITA I : MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERI RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA						
12	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	A Membangun lingkungan masyarakat bersih dari	1 Birokrasi yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	a Tes urine untuk deteksi dini kepada birokrasi yang menggunakan narkoba	- Gerakan hidup sehat tanpa rokok, tanpa narkoba dan rutin berolahraga	

	penyalahgunaan narkoba		b Penyuluhan dan pendampingan secara sistematis dan berkala kepada birokrasi mengenai bahaya laten narkoba	- Memberikan sanksi kepada birokrasi yang menggunakan bahkan pengedar narkoba sesuai aturan yang berlaku
	B Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme	1 Kondisi aman dan nyaman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara	a Memberikan akses dan informasi kepada birokrasi mengenai bahaya laten paham radikalisme dan ancaman terorisme	- Pendataan penduduk yang valid dan meningkatkan tali silaturahim di masyarakat
NAWACITA IX :	**MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL**			
13 POLITIK DAN DEMOKRASI	A Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil	1 Memperkuat hak-hak sipil dalam memilih dan dipilih	a Memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya	- Aspirasi masyarakat menggunakan hak pilih semakin meningkat
		2 Pelaksanaan demokrasi (pilkada, pilkades) dapat berjalan dengan aman dan jujur	a Pilkada dan Pilkades adalah proses memperkuat kebhinekaan dan memperkoko NKRI	- Membantu dan memperkuat pendanaan dalam pelaksanaan pilkada dan pilkades
	B Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalam masyarakat	1 Menghilangkan traumatis dan mencegah munculnya tindak kekerasan yang baru	a Komunikasi sosial dan toleransi (baik inter maupun antar agama)	- Meningkatkan komunikasi sosial

NAWACITA II :	**MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA**				
14	TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI	A Pemingkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan	1 Mewujudkan birokrasi yang bersih, trasparan, dan akuntabel	a Mempertahankan laporan keuangan Opini WTP dan Skor B LAKIP	- Meningkatkan disiplin birokrasi dan sanksi yang tegas
		B Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimtek Pelaksanaan RB	1 Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien	a Meningkatkan kompetensi dan profesional birokrasi	- Meningkatkan sikap keteladanan birokrasi agar menjadi panutan masyarakat
		C Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan	1 Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani	a Meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin percaya dengan birokrasi pemerintah	- Menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil
				b Akses perizinan yang mudah dan sederhana tanpa pungli	- Deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan daerah dan pusat

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dan strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Nasional Pembangunan untuk memenuhi Nawa Cita. Nawa Cita merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni :

(1). Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja ;

(2). Tiga Dimens Pembangunan ;

(3). Kondisi Perlu ; serta

(4). Quick wins dan program lanjutan lainnya.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017. Pembuatan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 harus sinkron dengan tiga dimensi tersebut. Dalam table 4.7 [table 4.7.a (Revolusi Mental), 4.7.b (Pendidikan), 4.7.c (Kesehatan), dan 4.7.d (Perumahan dan Permukiman)], dilanjutkan dengan table 4.8 (table 4.8.a (Kedaulatan Pangan), 4.8.b (Maritim dan Kelautan), 4.8.c (Kedaulatan Energi), dan 4.8.d (Pariwisata)] serta table 4.9 [(table 4.9.a (Antar kelompok Pendapatan) dan 4.9.b (Pemerataan desa dan Kota)] di bawah dijelaskan uraian strategi dan arah kebijakan Dimens Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sektor-Sektor Unggulan dan Pemerataan-Kewilayahan yang terkait dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	REVOLUSI MENTAL									
	KEGIATAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	
	I. MENINGKATKAN INTEGRITAS									
1	Melanjutkan reformasi birokrasi secara sistematis, terencana dan bertanggung jawab	1.1.	Sikap dan tindakan PNS memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitar	1.1a	Memberikan tauladan di lingkungan bekerja dan masyarakat	1.1a.1	Reformasi tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa	1.a	Semakin banyaknya PNS yang menjadi conth baik di masyarakat	
		1.2	Persentase PNS yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan hukum	1.2a	Penegakan disiplin tanpa pandang bulu dan status	1.2a.2	Penerapan disiplin yang simpatik dan tegas dalam birokrasi	1.b	Turunnya jumlah PNS yang terkena sanksi disiplin dan pelanggaran hukum	
2	Peningkatan mutu pelayanan publik	2.1.	Pelayanan yang memuaskan dan tercapainya target yang canangkan	2.1a	Bekerja dengan hati dan senyum dalam memberikan pelayanan publik	2.1a.1	Meningkatkan pelayanan publik dengan cepat, mudah, ringkas, trasparan, dan birokrasi yang responsif	2.a	Publik sangat puas dengan pelayanan yang diberikan	
		2.2	Terlaksananya sikap/tindakan Tegas dan taat terhadap SOP yang dijalankan	2.2a	Kualitas pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan pelayanan yang prima	2.2a.2	Peningkatan ketaatan dan kedisiplinan pelayanan publik berdasarkan SOP yang ada	2.b	SOP yang pendek dan tidak berbelit-belit	

3	Peningkatan pendidikan karakter di rumah dan sekolah	3.1	Efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan	3.1a	Meningkatkan pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia	3.1a.1	Pendidikan yang berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras)	3.a	Peningkatan nilai-nilai karakter dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
4	Fokus pada prioritas pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan atas azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif	4.1	Belanja harus tepat sasaran dan kegunaannya sesuai prioritas yang telah ditetapkan	4.1a	Belanja berdasarkan prioritas program	4.1a.1	Memprioritaskan program layanan dasar, pembangunan manusia dan masyarakat, sektor-sektor unggulan dan kewilayahan	4.a	Pelaksanaan prioritas lebih terserap dan berhasil dilaksanakan sesuai perencanaan awal
		4.2	Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja Pemda	4.2a	Semua belanja Pemda harus dipertanggungjawabkan	4.2a.2	Membangun perencanaan yang sinergis dengan kemampuan belanja dan pendapatan daerah	4.b	Semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berjalan
5	Harmonisasi dan simplifikasi perda dan aturan lainnya untuk mendorong kreativitas masyarakat	5.1	Kualitas perda yang dikeluarkan dan penurunan kuantitas perda dan aturan lainnya	5.1a	Sosialisasi perda secara efektif dan efisien	5.1a.1	Peningkatan kualitas pembuatan Perda	5.a	Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perda yang ada
		5.2	Memaksimalkan pelaksanaan perda yang ada	5.2a	Penurunan jumlah/kuantitas perda tiap tahunnya	5.2a.2	Pemda menyesuaikan dengan Perda-perda yang dibatalkan dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada di atasnya	5.b	Semakin efektif dan efisiennya kepatuhan masyarakat terhadap perda yang diberlakukan

6	Peningkatan peran lembaga dan media dalam pembangunan karakter bangsa	6.1	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga dan media dalam mengkampanyekan contoh-contoh perilaku dan perbuatan yang terpuji	6.1a	Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan media dalam kerangka memberikan tontonan dan bacaan yang positif kepada masyarakat	6.1a.1	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan media dalam mengkampanyekan karakter positif dalam kehidupan	6.a	Semakin meningkatnya tontonan dan bacaan yang positif dalm mengubah atau mempengaruhi pembaca atau publik
		6.2	Terpenuhinya kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan yang kuat	6.2a	Meningkatkan kerjasama antara eksekutif dan yudikatif secara komprehensif	6.2a.1	Perkuat kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	6.b	Semakin erat dan kokohnya koordinasi anatar lembaga dalam menalankan tugas masing-masing
		6.3	Terwujudnya pelaksanaan tupoksi lembaga-lembaga dan perannya di masyarakat	6.3a	Saling memperkuat fungsi dan tugas masing-masing kelembagaan	6.3a.1	Menata dan mereformasi tupoksi kelembagaan	6.c	Semakin kuat dan berwibawanya lembaga-lembaga yang ada
7	Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat	7.1	Terselenggaranya kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi lembaga peradilan	7.1a	Meningkatkan sosialisasi akan sadar hukum di masyarakat	7.1a.1	Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi lembaga peradilan	7.a	Semakin meningkatnya disiplin dan pelaksanaan hukum oleh aparat pemerintah dan penegak hukum
		7.2	Terwujudnya integritas aparat hukum dalam menjalankan tugasnya	7.2a	Meningkatkan kepercayaan lembaga yudikatif melalui tauladan SDM nya	7.2a.2	Peningkatan integritas aparat hukum dalam menjalankan tugasnya	7.b	Semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum

8	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dan memilih sebagau	8.1	Terselenggaranya Pendidikan dan penghormatan politik di masyarakat	8.1a	Meningkatkan semangat bhinneka tunggal ika dalam kerangka persatuan dan kesatuan	8.1a.1	Pendidikan dan penghormatan politik di masyarakat	8.a	Semakin rendahnya atau hilangnya pepecahan atau konflik horizontal di masyarakat
		8.2	Terpenuhinya Kesadaran perempuan-perempuan akan hak politiknya	8.2a	Meningkatkan peran perempuan dalam berpolitik praktis	8.2a.2	Peningkatan hak-hak politik perempuan dalam berbangsa dan bernegara	8.b	Semakin tingginya penggunaan hak politik perempuan
II. MENINGKATKAN ETOS KERJA									
1	Peningkatan semangat kerja keras, kreatif dan profesional	1.1	Terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan hati dan profesional	1.1a	Membangun suasana kerja yang mampu meningkatkan etos kerja	1.1a.1	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dengan hati dan profesional	1.a	Semakin meningkatnya loyalitas terhadap organisasi
		1.2	Terpenuhinya anak bangsa dalam rangka menyebarkan 'virus' interpreneur	1.2a	Memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk kreatif dan menghasilkan karya	1.2a.2	Pemantapan nilai-nilai inovasi dan interpreneur	1.b	Semakin meningkatnya anak bangsa berkarya dan tidak tergantung dengan pemerintah daerah
2	Percaya diri dan selalu bangga pada karya anak bangsa	2.1	Terwujudnya produktivitas dan daya saing masyarakat	2.1a	Meningkatkan dan memotivasi masyarakat untuk percaya diri dalam berkarya	2.1a.1	Memacu produktivitas dan daya saing masyarakat	2.a	Semakin meningkatnya produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa
		2.2	Terwujudnya Masyarakat tidak konsumerisasi dan pelaku usaha kecil	2.2a	Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi	2.2a.2	Peningkatan nilai-nilai hidup hemat dan bersahaja serta sikap memanfaatkan potensi-potensi yang produktif	2.b	Menekan kebiasaan konsumsi yang berlebihan dan tekun menghasilkan brang dan jasa

3	Meningkatkan perilaku kerja sehat dan selamat di tempat kerja	3.1	Tercapainya keselamatan dan keamanan bekerja di kantor	3.1a	Menjalankan semua SOP yang berlaku di kantor	3.1a.1	Meningkatkan keselamatan dan keamanan bekerja di kantor	3.a	Semakin tingginya tingkat keselamatan bekerja di kantor
		3.2	Terpenuhinya tempat kerja yang menyenangkan dan mendukung mobilisasi kerja	3.2a	Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di tempat bekerja	3.2a.2	Membangun suasana tempat kerja yang menyenangkan dan mendukung mobilisasi kerja	3.b	Semakin meningkatkan kebiasaan yang bersih di tempat kerja
4	Peningkatan kontribusi produk daerah dalam konsumsi rumah tangga	4.1	Terwujudnya sikap Mencintai dan bangga produk dalam negeri	4.1a	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan kesadaran produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri	4.1a.1	Terwujudnya sikap Mencintai dan bangga produk dalam negeri	4.a	Semakin meningkatnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
		4.2	Terlaksananya sikap senang dan bangga masyarakat menggunakan barang-barang produksi anak bangsa	4.2a	Menggunakan barang-barang hasil karya bangsa sendiri	4.2a.2	Mengajak dan menteladani masyarakat menggunakan barang-barang produksi anak bangsa	4.b	Semakin tingginya masyarakat membeli dan memanfaatkan barang-barang yang berasal dari dalam negeri
5	Meningkatkan karya cipta dan inovasi yang siap bersaing dengan daerah bahkan negara lain	5.1	Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berbudaya yang memacu daya cipta dan daya saing	5.1a	Terbangun budaya swadesi Do It Yourself (DIY)	5.1a.1	Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan berbudaya yang memacu daya cipta dan daya saing	5.a	Peningkatan kemandirian ekonomi lokal dan daya saing
		5.2	Terwujudnya budaya inovasi di masyarakat	5.2a	Membangun suasana yang kondusif dalam mendukung kreativitas dan inovasi	5.2a.2	Meningkatkan budaya inovasi di masyarakat	5.b	Semakin banyak dan berkualitas inovasi-inovasi yang dibuat masyarakat

6	Membangun semangat berkompetisi sehat dalam berkarya	6.1	Terwujudnya nilai-nilai berkompetisi wirausaha dalam berkompetisi	6.1a	Membangun dan mendukung suasana berkompetisi yang sehata dalam berkarya	6.1a.1	Meningkatnya nilai-nilai berkompetisi wirausaha dalam berkompetisi	6.a Jumlah wirausaha yang dihasilkan
		6.2	Terbangunnya motivasi dan rasa optimis dalam berusaha	6.2a	Mengatur persaingan usaha dengan perda dan aturan pendukung lainnya	6.2a.2	Meningkatnya motivasi dan rasa optimis dalam berusaha	6.b Semakin meningkatnya kemandirian dan pantang menyerah dari sikap pelaku usaha
7	Meningkatkan persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete) dan bekerja berorientasi pada hasil yang bermutu dan nilai tambah	7.1	Terlaksananya persaingan usaha yang dinamis dan sehat	7.1a	Mengatur persaingan usaha dengan perda dan aturan pendukung lainnya	7.1a.1	Peningkatan persaingan usaha yang dinamis dan sehat	7.a Jumlah konflik atau sengketa dalam berusaha menurun
		7.2	Tercapainya pelaksanaan nilai-nilai positif dalam menghasilkan nilai tambah	7.2a	Menerapkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam menghasilkan nilai tambah suatu produk barang dan jasa	7.2a.2	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai positif dalam menghasilkan nilai tambah	7.b Jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari produk atau jasa yang dihasilkan
III. MENINGKATKAN GOTONG ROYONG								
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	1.1	Meningkatnya toleransi, gotong royong dan rasa aman masyarakat	1.1a	Mengaktifkan kembali kerja bakti rutin di lingkungan tempat tinggal	1.1a.1	Membangun nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan	1.a Semakin tingginya kesadaran Masyarakat yang hidup bertetangga
		1.2	Lingkungan atau komplek perumahan	1.2a	Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	1.2a.2	Memantapkan nilai-nilai rasa saling percaya dan menjaga rasa aman di lingkungan tempat tinggal	1.b Semakin menurunnya tindakan kriminal di lingkungan sekitar tempat tinggal

2	Menurunnya angka perceraian dan anak telantar	2.1	Keluarga yang rentan dalam perceraian atau brokenhome	2.1a	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan keluarga	2.1a.1	Membangun nilai-nilai rumah tangga yang sakina, mawaddah dan arrahmah	2.a	Semakin meningkatnya indeks ketahanan keluarga
		2.2	Anak-anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian dari keluarga atau lingkungan	2.2a	Menebar kasih sayang dalam keluarga dan pergaulan	2.2a.2	Memantapkan nilai-nilai kasih sayang dalam keluarga terutama terhadap anak-anak	2.b	Semakin tingginya perhatian terhadap anak-anak yang terlantar atau kurang mendapat perhatian keluarga dan lingkungan
3	Peneguhan jati diri sebagai anak bangsa dengan jiwa patriot dan cinta damai	3.1	Menurunnya jumlah konflik karena SARA	3.1a	Meningkatkan toleransi bermasyarakat	3.1a.1	Meningkatkan kesadaran atas perbedaan SARA sebagai fitrah dari Sang Pencipta	3.a	Semakin rendahnya konflik horizontal di masyarakat karena SARA
		3.2	Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap remaja dan pemuda	3.2a	Melaksanakan kegiatan yang memotivasi rasa nasionalisme dan patriotisme remaja dan pemuda	3.2a.2	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap remaja dan pemuda	3.b	Semakin tinggi kesadaran remaja akan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme
4	Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan	4.1	Terwujudnya daya tangkal masyarakat dan lingkungan dari pengaruh kekerasan, radikalisme, terorisme, pornografi dan kebencian	4.1a	Proses rekruitmen siswa secara terbuka dan transparan	4.1a.1	Peningkatan daya tangkal masyarakat dan lingkungan dari pengaruh kekerasan, radikalisme, terorisme, pornografi dan kebencian	4.a	Semakin meningkatnya kepercayaan diri peserta didik baru untuk bersekolah di lingkungan yang bebas kekerasan dan intimidasi
		4.2	Terselenggaranya pengawasan dan kontrol kegiatan siswa di internal sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah	4.2a	Kontrol sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah	4.2a.2	Peningkatan pengawasan dan kontrol kegiatan siswa di internal sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah	4.b	Semakin meningkatnya kenyamanan siswa dalam bergaul di sekolah dan sekitarnya

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PENDIDIKAN									
	KEGIATAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	
	I. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								
1	Pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan TK	1.1	Terpenuhinya ruang belajar TK Pembina	1.1a	Pembangunan Gedung TK Pembina	1.1a.1	Peningkatan kualitas pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan TK	1.a	Jumlah TK Pembina yang akan di bangun
		1.2	Terpenuhinya ruang belajar PAUD Non Formal	1.2a	Pembangunan Gedung PAUD Non Formal	1.2a.1	Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana PAUD Non Formal yang merata dan berkeadilan di setiap desa	1.b	Jumlah gedung PAUD yang dibangun
		1.3	Terpenuhinya rehabilitasi gedung PAUD PNF	1.3a	Rehabilitasi Gedung PAUD PNF	1.3a.1	Mendukung pemenuhan standar mutu dan keterlaksanaan akreditasi lembaga PAUD	1.c	Jumlah PAUD Non Formal yang akan di rehabiltasi
2	Peningkatan mutu dan pelayanan PAUD dan TK	2.1	Terpenuhinya alat praktik siswa dan alat bermain anak	2.1a	Pengadaan alat praktik siswa dan alat bermain anak	2.1a.1	Peningkatan kualitas pengadaan alat praktek dan alat bermain anak	2.a	Jumlah alat praktik siswa dan alat bermain anak
		2.2	Terpenuhinya mebeuler sekolah	2.2a	Pengadaan mebeuler sekolah	2.2a.1	Pengadaan mebeuler sekolah yang berkualitas	2.b	Jumlah mebeleur sekolah yang diadakan
		2.3	Terlaksananya akreditasi PAUD Non formal	2.3a	Akreditasi Lembaga PAUD Non formal	2.3a.1	Peningkatan kualitas PAUD yang diakreditasi	2.c	Jumlah PAUD Non formal yang di akreditasi

6	Pendidikan dan Pelatihan Menulis Buku Non Fiksi Bagi Guru SD dan SMP	6.1	Guru SD dan SMP	6.1a	Diklat yang melibatkan penulis buku eksternal dan bekerjasama dengan Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	6.1a.1	Minimal 100 guru SD dan SMP yang ikut Diklat	6.a	Minimal 100 guru SD dan SMP yang ikut Diklat
7	Pelatihan Pengawas Sekolah	7.1	Pengawas Sekolah Pendas	7.1a	Syarat wajib untuk pengawas dalam melaksanakan tugasnya	7.1a.1	Jumlah Pengawas Sekolah yang ikut pelatihan	7.a	Jumlah Pengawas Sekolah yang ikut pelatihan
8	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operator Dapodik	8.1	Tenaga Operator Dapodik yang jujur dan berintegritas	8.1a	Pengadaan Diklat Tenaga Operator Dapodik secara rutin setiap tahun	8.1a.1	minimal 1 tenaga operator dapodik yang dilatih	8.a	minimal 1 tenaga operator dapodik yang dilatih
9	Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Pendidik Daerah Terpencil	9.1	Guru dan Pengawas di daerah terpencil	9.1a	Memperketat kontrol kewajiban guru dan pengawas untuk mendapatkan tunjangan	9.1a.1	Jumlah guru dan pengawas yang menapat tunjangan daerah terpencil	9.a	Jumlah guru dan pengawas yang menapat tunjangan daerah terpencil
10	Bimtek Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah Bagi Pendidik	10.1	Guru mata pelajaran yang di ujikan di sekolah	10.1a	Dipilih guru yang cakap dan berkompetensi tinggi untuk mengikuti Bimtek	10.1a.1	Tersusunnya Bank Soal untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah	10.a	Tersusunnya Bank Soal untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah
11	PCR Guru Nasional	11.1	Guru yang mempunyai kemampuan dan kompetensi olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan dalam POR Guru Nasional	11.1a	Konsolidasi internal guru dalam menghadapi POR Guru Nasional	11.1.a.1	Juara Umum Tingkat Propinsi Kalimantan Barat	11.a	Juara Umum Tingkat Propinsi Kalimantan Barat
12	OSN Guru	12.1	Guru yang berprestasi di bidang sains dan teknologi	12.1a	Diberi latihan dan dikarantina minimal sebulan oleh instruktur yang berpengalaman di bidang sains dan	12.1a.1	Juara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	12.a	Juara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

				teknologi				
13	Pelaksanaan PORSENI Mahasiswa Kubu Raya	13.1	Mahasiswa Universitas Terbuka	13.1a	Koordinasi dan konsolidasi mahasiswa UT untuk menghadapi PORSENI	13.1a.1	Juara umum Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	13.a	Juara umum Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
14	Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.1	Sekolah dan Tenaga Pendidik	14.1a	Peningkatan kualitas penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.1a.1	Tercapainya Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.a	Tercapainya Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah
15	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSENI Guru Nasional	15.1	Guru yang berprestasi dibidang olahraga dan seni	15.1a	Seleksi yang ketat dan terbuka kepada guru yang mengikuti PORSENI Guru Nasional	15.1a.1	Jumlah juara yang diperoleh dalam PORSENI Guru Nasional	15.a	Jumlah juara yang diperoleh dalam PORSENI Guru Nasional
16	Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.1	Pendidik dan Tenaga Pendidik yang masih kecil Angka Kreditnya	16.1a	Peningkatan penyelesaian administrasi persyaratan Penilaian Angka Kredit	16.1a.1	Terpenuhinya Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.a	Terpenuhinya Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17	Pendidikan dan Pelatihan Guru Kesenian	19.1	Guru Kesenian SD-SMP yang berlatar belakang kompetensi kesenian	19.1a	Pelaksanaan Diklat Guru Kesenian yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mengangkat akar budaya dan seni lokal	19.1a.1	Jumlah Guru Kesenian yang mengikuti Diklat	17.a	Jumlah Guru Kesenian yang mengikuti Diklat
18	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah	20.1	Kepala Sekolah yang baru di lantik	20.1a	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	20.1a.1	Terpenuhinya pelaksanaan MBS di sekolah	18.a	Terpenuhinya pelaksanaan MBS di sekolah

19	Pendidikan dan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP	21.1	Guru SD-SMP	21.1a	Diklat Tindakan Kelas yang berkala dan sistematis	21.1a.1	Jumlah guru SD-SMP yang melaksanakan Diklat Tindakan Kelas	19.a	Jumlah guru SD-SMP yang melaksanakan Diklat Tindakan Kelas
20	Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Bagi Guru SD dan SMP	22.1	Guru SD-SMP selaku pembina dan Pelatih Pramuka di SD-SMP	22.1a	Diklat kepramukaan terpadu untuk guru SD-SMP	22.1a.1	Terpenuhinya jumlah pembina dan pelatih pramuka di SD-SMP	20.a	Terpenuhinya jumlah pembina dan pelatih pramuka di SD-SMP
V. MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN									
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	1.1	Terwujudnya SD dan SMP yang mendapatkan bantuan DAK	1.1a	Pelaksanaan DAK Pendas harus mengikuti semua juknis yang berlaku pada tahun pelaksanaannya	1.1a.1	Peningkatan sarana dan prasarana SD-SMP yang berkualitas dari APBN melalui DAK	1.a	Jumlah SD-SMP yang mendapatkan DAK fisik dan mutu sesuai aturan yang berlaku
2	Verifikasi Bantuan Sosial/Hibah	2.1	Terwujudnya bantuan hibah dan bansos untuk SD-SMP	2.1a	Memperhatikan peraturan baru tentang hibah dan bansos	2.1a.1	Peningkatan bantuan hibah dan bansos pendidikan	2.a	Jumlah hibah dan bansos yang diberikan
3	Pelaksanaan Operasional Sekolah	3.1	Terwujudnya Semua siswa SD-SMP yang bersekolah gratis	3.1a	Peningkatan Sosialisasi dan pendataan siswa yang teratur di Dapodik	3.1a.1	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab	3.a	Jumlah siswa yang terdata dalam Dapodik
4	Penyediaan Buku Raport Siswa	4.1	Terlaksananya penyediaan Buku Raport Siswa untuk Pendas	4.1a	Peningkatan kualitas pengadaan raport siswa secara trasparan dan terbuka	4.1a.1	Laporan kemajuan akademik dan non akademik siswa	4.a	Jumlah raport yang dicetak untuk siswa SD-SMP
5	Pembinaan Forum Komite Sekolah Kecamatan	5.1	Terselenggaranya Pembinaan Forum Komite Sekolah Kecamatan	5.1a	Peningkatan pembinaan Komite Sekolah di setiap Kecamatan	5.1a.1	Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua stakeholder di sekolah	5.a	Jumlah Komite Sekolah yang mendapatkan pembinaan
6	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendidikan	6.1	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendidikan	6.1a	Peningkatan koordinasi dan konsolidasi organisasi dan program	6.1a.1	Konsolidasi organisasi dan program pendidikan	6.a	Jumlah Rakor dengan Stakeholder Pendidikan minimal sekali dalam satu

				pendidikan				semester
7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi	7.1	Semua Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas yang memenuhi persyaratan	7.1a	Sosialisasi dan proses pemilihan yang jujur, terbuka dan dapat dipertangungjawabkan ke publik	7.1a.1	Peningkatan selektivitas pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi	7.a	Terpilihnya Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas (minimal salah satunya) berprestasi dari Kabupaten Kubu Raya
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (evaluasi terpadu)	8.1	Semua kegiatan yang dibiayai daerah, negara maupun partisipasi masyarakat	8.1a	Perencanaan dan pelaksanaan yang wajib diukur setiap semester	8.1a.1	Peningkatan Monev dan pelaporan kegiatan, terutama bansos dan hibah	8.a	Jumlah kegiatan yang di monev dan membuat laporan
9	Pembuatan Profil Pendidikan	9.1	Terwujudnya pembuatan Profil Sekolah untuk SD-SMP, UPT, SKB, serta lembaga pendidikan lainnya	9.1a	Memasukkan isu-isu strategis pendidikan yang terkini dan strategis	9.1a.1	Peningkatan kualitas buku Profil Pendidikan	9.a	Jumlah Profil Pendidikan yang dicetak
10	Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	10.1	Sekolah yang belum mendapatkan akreditasi sekolah dan atau sekolah yang mau meningkatkan akreditasi sekolah	10.1a	Mendorong dan membantu sekolah-sekolah dalam kesiapan administrasi dan non administrasi sekolah	10.1a.1	Pelaksanaan Akreditasi SD-SMP	10.a	Jumlah sekolah yang diakreditasi
11	Pelatihan Tenaga Operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas	11.1	Tenaga operator yang profesional dan bertanggung jawab	11.1a	Peningkatan mutu pelatihan secara sistematis minimal setahun sekali	11.1a.1	Peningkatan kemampuan operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas	11.a	Jumlah tenaga operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas yang mendapatkan pelatihan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	KESEHATAN									
	KEGIATAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	
I. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN										
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.1	Terpenuhinya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.1a	Peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.1a1	Peningkatan kualitas obat dan perbekalan kesehatan dan gartis	1.a	Jumlah obat dan perbekalan yang tersedia
2	Pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1	Terpenuhinya pelatihan pemanfaatn TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1a	Peningkatan pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1a1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2.a	Terlaksananya pelatihan pemanfaatna TOGA dan BATRA
3	Peningkatan pengawasan sarana distribusi obat dan perbekalan kesehatan	3.1	Tercapainya pengawasan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	3.1a	Pengawasan yang komprehensif dan penegakan hukum atas pidana distribuasi dan pemanfaatan obat-obatan	3.1a1	Menurunkan dan mengendalikan jumlah penyakit yang disebabkan faktor lingkungan	3.a	Tercapainya pengawasan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
II. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1.1	Masyarakat yang tidak terbiasa atau takut dengan tenaga medis	1.1a	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	1.1a.1	Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sadar gizi	1.a	Jumlah orang sakit yang dapat diatasi/diobati

2	Peningkatan kesehatan masyarakat	2.1	Tercapainya pola hidup sehat masyarakat	2.1a	Memberikan teladan secara kolektif kepada masyarakat pentingnya pola hidup sehat dan bersih	2.1a.1	Memenuhi kebutuhan obat, mengawasi keamanan obat dan makanan serta pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan pemberdayaan pengobat tradisional (BATRA)	2.a Jumlah rujukan masyarakat ke puskesmas terdekat
3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	3.1	Terpenuhinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	3.1a	Peningkatan koordinasi program dalam pencapaian tujuan	3.1a.1	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	3.a Jumlah tenaga medis yang proaktif melayani masyarakat
4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	4.1	Masyarakat miskin dan jauh dari akses kesehatan	4.1a	Memberikan kemudahan dan akses BPJS kesehatan	4.1a.1	Memenuhi akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praarana kesehatan	4.a Jumlah masyarakat yang mendapatkan BPJS kesehatan
5	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	5.1	Terpenuhinya lingkungan yang sehat dan menyenangkan	5.1a	Menjadikan beberapa rumah/kepala keluarga sebagai pelopor kesehatan	5.1a.1	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu	5.a Jumlah rumah yang dilibatkan sebagaipelopor kesehatan lingkungan
6	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	6.1	Kegiatan prioritas dan terkait langsung dengan pelayanan publik	6.1a	Monev dengan melibatkan stakholder	6.1a.1	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita	6.a Jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

III. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN							
1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1.1	Terpenuhinya rasa aman masyarakat belanja di Warung, toko, mall yang menjual makanan dan minuman kemasan	1.1a	Pengawasan yang berkala dan berkuaitas dalam pengamanan makana dan minuman yang bereadr di pasaran	1.1a1	Meningkatkan upaya pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.a	Jumlah makanan dan minuman yang aman dari bahan berbahaya yang beredar di masyarakat
2	Sosialisasi program BPJS kesehatan untuk warga	2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang murah dan gratis	2.1a	Pendataan peserta BPJS dengan valid dan jujur	2.1a1	Peningkatan dan perluasan akses BPJS kesehatan	2.a	Jumlah peserta BPJS kesehatan
3	Bimbingan teknis penggunaan obat dengan metode CBIA	3.1	Terpenuhinya bimbingan teknis penggunaan obat dengan metode CBIA	3.1a	Peningkatan bimbingan teknis pengunaan obat dengan metode CBIA	3.1a1	Menurunkan jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	3.a	Jumlah ibu menjadi bagian dari Cara Belajar Insan Aktif
IV. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1.1	Terwujudnya Masyarakat Kubu Raya yang sadar akan kesehatan	1.1a	Peningkatan kampanye dan kegiatan yang mendukung sadar hidup sehat	1.1a.1	Meningkatkan peran media dalam memberikan informasi pentingnya sadar hidup sehat	1.a	Terpenuhinya informasi strategis dan valid tentang sadar hidup sehat
2	Peningkatan kompetensi tenaga penyuluhan kesehatan	2.1	Tersedianya tenaga penyuluhan yang lulus administrasi dan persyaratan	2.1a	Memberikan kesempatan dan beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga penyuluhan kesehatan	2.1a.1	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan	2.a	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang mendapat beasiswa pendidikan lanjut
3	Pembinaan UKBM	3.1	Terwujudnya UKBM yamg baru atau belum berpengalaman menjadi berkulitas	3.1a	Peningkatan kualitas pembinaan UKBM	3.1a.1	Peningkatan pembinaan UKBM	3.a	Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam UKBM

4	Reorientasi bidan desa terhadap percepatan desa siaga	4.1	Terutama dusun-dusun di daerah yang sulit akses transportasi	4.1a	Rekruitmen bidan honor maupun PNS dalam menambah SDM untuk ditempatkan di dusun-dusun	4.1a.1	Peningkatan peran bidan desa di dusun	4.a	Jumlah bidan siaga di 401 dusun
V. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT									
1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	1.1	Terselenggaranya perbaikan gizi masyarakat	1.1a	Peningkatan penggunaan data primer dan menjalin komunikasi efektif dengan warga	1.1a.1	Peningkatan gizi masyarakat	1.a	Jumlah masyarakat kurang gizi
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.1	Terpenuhinya tambahan makanan dan vitamin untuk Ibu hamil KEK, balita kurus	2.1a	Peningkatan pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.1a.1	Peningkatan vitamin untuk ibu hamil dan balita	2.a	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurus yang kurang makanan tambahan dan vitamin
3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	3.1	Terwujudnya Ibu hamil, Balita gizi buruk, remaja putri dari bahaya KEP dan GAKY	3.1a	Peningkatan penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY	3.1a.1	Peningkatan kesadaran akan KEP dan GAKY	3.a	Jumlah ibu hamil, balita dan remaja putri yang terkena KEP, GAKY, dan anemia gizi besi
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1	Terpenuhinya KK untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1a	Peningkatan pemberdayaan KK untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1a.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan sadar gizi	4.a	Jumlah KK yang sadar gizi

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT								
1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1.1	Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat	1.1a	Fokus pada pengkajian isu-isu strategis kesehatan di lingkungan sekitar	1.1a.1	Peningkatan kualitas pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1.a Jumlah kajian yang dilakukan
2	Penyuluhan dalam menciptakan lingkungan sehat	2.1	Terwujudnya lingkungan yang sehat	2.1a	Prioritas pada penyuluhan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan	2.1a.1	Peningkatan penyuluhan dalam menciptakan lingkungan sehat	2.a Jumlah penyuluhan yang dilakukan
3	Bimbingan teknis Program Penyakit Berbasis Binatang (P2B2)	3.1	Terwujudnya masyarakat terbebas dari penyakit yang disebabkan hewan/binatang	3.1a	Pelaksanaan bimbingan teknis P2B2 secara terpadu	3.1a.1	Peningkatan pengetahuan P2B2	3.a Jumlah penyakit yang disebabkan hewan/binatang yang ditemukan
4	Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	4.1	Terwujudnya Sanitasi Berbasis Masyarakat yang sehat	4.1a	Pelaksanaan STBM secara terpadu	4.1a.1	Peningkatan STBM	4.a Jumlah Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diadakan
VII. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR								
1	Penyemprotan/foging sarang nyamuk	1.1	Terwujudnya lingkungan yang bebas dari penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk	1.1a	Penyemprotan/foging sarang nyamuk secara berkala dan merata	1.1a.1	Peningkatan kualitas penyemprotan sarang nyamuk	1.a Jumlah orang yang terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk
2	Pelayanan vaksinasi kepada masyarakat	2.1	Terwujudnya pencegahan dan kekebalan dari penyakit	2.1a	Peningkatan kualitas dan keamanan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat	2.1a.1	Peningkatan kualitas dan keamanan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat	2.a Jumlah balita dan anak yang diberikan vaksinasi

3	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.1	Terwujudnya masyarakat terbebas dari penyakit menular	3.1a	Pelayanan dan penanganan yang cepat dan tepat dalam mengatasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.1a.1	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.a	Jumlah orang yang terkena penyakit menular
4	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1	Terselenggaranya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1a	Fokus kepada akar permasalahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1a.1	Peningkatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.a	Jumlah orang yang terkena penyakit endemik/epidemik
5	Peningkatan imunisasi	5.1	Terwujudnya kekebalan dan perkembangan pada bayi dan batita	5.1a	Peingkatan kualitas dan keamanan imunisasi kepada bayi dan batita	5.1a.1	Pemberian imunisasi berkala dan tepat waktu kepada bayi dan batita	5.a	Jumlah bayi dan batita yang diberikan imunisasi
6	Penanggulangan penyakit tidak menular	6.1	Terselenggaranya penanggulangan penyakit tidak menular	6.1a	Fokus pada penanggulangan penyakit tidak menular yang meresahkan masyarakat	6.1a.1	Peningkatan penanggulangan penyakit tidak menular	6.a	Penanggulangan penyakit tidak menular
7	Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1	Terlaksananya pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1a	Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1a.1	Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.a	Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria
VIII. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN									
1	Jaminan kesehatan penduduk miskin	1.1	Jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan kesehatan	1.1a	Penduduk miskin yang terdata di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	1.1a.1	Peningkatan jaminan kesehatan penduduk miskin	1.a	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan

2	Jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)	2.1	Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat miskin	2.1a	Peningkatan akses untuk mendapatkan JAMKESNAS	2.1a.1	Memperkuat sistem penanganan JAMKESNAS	2.a	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan JAMKESNAS
3	Rapat koordinasi program BPJS	3.1	Terpenuhinya program BPJS kepada masyarakat	3.1a	Konsolidasi stakeholder program BPJS	3.1a.1	Meningkatkan konsolidasi BPJS dengan pemerintah daerah	3.a	Jumlah peserta program BPJS
4	Sosialisasi program SJSN	4.1	Tercapainya program SJSN sesuai dengan rencana yang dibuat	4.1a	Peningkatan program SJSN kepada masyarakat	4.1a.1	Kampanye sistematis dan terstruktur program SJSN	4.a	Jumlah peserta program SJSN
5	Pelayanan kapitasi pusat kesehatan masyarakat	5.1	Terlaksananya kapitasi puskesmas	5.1a	Peningkatan akses pelayanan kapitasi puskesmas	5.1a.1	Peningkatan akses pemberian BPJS kesehatan	5.a	Jumlah pasien kapitasi puskesmas
6	Pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1	Terlaksananya pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1a	Peningkatan pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1a.1	Peningkatan akses pemberian BPJS kesehatan	6.a	Jumlah pasien non kapitasi rujukan pasien BPJS
7	Pelayanan non kapitasi persalinan	7.1	Terpenuhinya pelayanan non kapitasi persalinan	7.1a	Peningkatan pelayanan non kapitasi persalinan	7.1a.1	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu yang sedang mengalami persalinan	7.a	Jumlah pasien non kapitasi persalinan
8	Kapitasi untuk rawat inap	8.1	Tercapainya pasien binaan dokter keluarga untu rawat inap	8.1a	Peningkatan pasien kapitasi untuk rawat inap	8.1a.1	Peningkatan perlengkapan puskesmas dengan fasilitas rawat inap	8.a	Jumlah pasien yang mendapatkan kapitasi rawat inap

IX. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANAN DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA									
1	Pengadaan puskesmas keliling	1.1	Terselenggaranya puskesmas keliling di setiap kecamatan	1.1a	Pengadaan puskesmas keliling setiap kecamatan	1.1a.1	Peningkatan pengadaan puskesmas keliling	1.a	Jumlah puskesmas keliling yhang ada di setiap kecamatan
2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2.1	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas	2.1a	Pembiayaan diprioritaskan kepada sapras yang sangat penting dan mendesak	2.1a.1	Peningkatan kualitas sapras puskesmas	2.a	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang diadakan
3	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	3.1	Tercapainya rehabilitasi puskesmas yang rusak minimal 30%	3.1a	Peningkatan rehab sedang/berat puskesmas	3.1a.1	Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas	3.a	Persentase puskesmas yang di rehabilitasi
X. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA									
1	Perencanaan pembangunan rumah sakit umum daerah	1.1	Terwujudnya rumah sakit umum daerah	1.1a	Pembiayaan sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat	1.1a.1	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1.a	Terbangun 1 rumah sakit umum daerah di tempat yang strategis
XI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA									
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	1.1	Tercapainya kesehatan balita yang berkualitas	1.1a	Meningkatkan pemahaman orang tua akan pentingnya kesehatan sejak balita	1.1a.1	Peningkatan penyuluhan kesehatan untuk anak balita	1.a	Jumlah balita sehat yang terdata di puskesmas atau poli kesehatan
2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	2.1	Terlaksananya pelatihan dan pendidikan perawatan balita	2.1a	Peningkatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	2.1a.1	Peningkatan kompetensi perawa/bidan/tenaga kesehatan dalam merawat anak balita	2.a	Jumlah perawat bayi atau orang tua yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan merawat balita

3	Surveilance/pelacakan kasus kematian bayi	3.1	Terselenggaranya pelacakan kasus kematian bayi	3.1a	Pemberian akses kepada masyarakat mengenai data kelahiran bayi	3.1a.1	Peningkatan pelacakan kasus kematian bayi	3.a	Jumlah kematian bayi yang ditemukan
XII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA									
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	1.1	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan berbasis Masyarakat	1.1a	Peningkatan kebiasaan hidup sehat dan teratur serta lingkungan yang bersih	1.1a.1	Peningkatan pemeliharaan kesehatan secara komprehensif	1.a	Jumlah permukiman dan perumahan yang sadar akan pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan
2	Pelayanan kesehatan	2.1	Terlaksananya SPM kesehatan secara konsisten dan terencana	2.1a	Peningkatan pelayanan kesehatan	2.1a.1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2.a	Jumlah orang yang puas terhadap pelayanan kesehatan
XIII. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK									
1	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	1.1	Tercapainya pemeliharaan kesehatan ibu hamil secara rutin	1.1a	Peningkatan perawatan dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil	1.1a.1	Peningkatan pelayanan dan perawatan kepada ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1.a	Jumlah ibu hamil yang rutin periksa ke puskesmas atau poliklinik
2	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	2.1	Terpenuhinya persalinan gratis bagi ibu hamil yang kurang mampu	2.1a	Peningkatan persalinan dengan bidan secara gratis	2.1a.1	Peningkatan kualitas persalinan ibu dari keluarga kurang mampu	2.a	Jumlah keselamatan ibu melahirkan
3	Kemitraan bidan dan dukun	3.1	Terlaksananya kemitraan bidan dan dukun	3.1a	Kerjasama positif antara teknik modern kesehatan dangan tradisi turun temurun keluarga ataupun lingkungan	3.1a.1	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder kesehatan ibu dan anak	3.a	Jumlah bidan dan dukun yang tersedia di setiap dusun

XIV. PROGRAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN								
1	Pengumpulan data kesehatan	1.1	Terselenggaranya data kesehatan yang lengkap dan valid	1.1a	Selain data sekunder, diutamakan memperoleh data primer	1.1a.1	Validasi dan realibitas data kesehatan	1.a	Dokumen kesehatan masyarakat (jumlah dan jenis kesehatan masyarakat)
XV. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN								
1	Peningkatan mutu manajemen kesehatan	1.1	Terpenuhinya manajemen kesehatan yang berkualitas dan standar mutu yang baik	1.1a	Melaksanakan SOP dari perencanaan sampai MONEV dan pelaporan	1.1a.1	Reformasi manajemen kesehatan secara utuh dan terpadu	1.a	Jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan semakin profesional dan baik
2	Penyusunan dokumen perencanaan program SPM dan MDGS	2.1	Tercapainya tujuan pembangunan millenium kesehatan	2.1a	Pelaksanaan SPM secara bertahap dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan millenium kesehatan	2.1a.1	Peningkatan kualitas SPM dan MDGS	2.a	Jumlah SPM kesehatan yang terlaksana di masyarakat
3	Evaluasi pengelolaan keuangan	3.1	Tercapainya SOP keuangan yang transparan dan akuntabilitas	3.1a	Pemanfaatan keuangan dengan prioritas kebutuhan dan tercatat dengan baik dan disiplin	3.1a.1	Pelaporan kegiatan fisik dan keuangan secara transparan dan akuntabel	3.a	Jumlah keuangan yang masuk dengan efisiensi yang diterapkan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								
	KEGIATAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	
	I. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN								
1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	1.1	Terpenuhinya sarana dan prasarana di kawasan/pemukiman kumuh	1.1a	Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kawasan perumahan/pemukiman kumuh secara bertahap, seperti ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan	1.1a.1	Menjaga ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi	1.a	Jumlah MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan meningkat
		1.2	Terpenuhinya Penampungan Air Hujan buat masyarakat miskin khususnya	1.2a	Penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH)	1.2a.1	Stop buang sampah dan air besar sembarangan serta gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1.b	Jumlah Penampungan Air untuk masyarakat miskin semakin bertambah
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.1	Terlaksananya pemberdayaan komunitas perumahan	2.1a	Pembersihan parit dan bahan baku	2.1a.1	Meningkatkan akses masyarakat berpendapat rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta tertib pengurusan IMB	2.a	Jumlah kegiatan pemberdayaan komunitas perumahan meningkat

3	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	3.1	Terpenuhinya perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	3.1a	Pendataan yang akurat untuk memperbaiki perumahan akibat bencana alam/sosial	3.1a.1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendataan infrastruktur air minum dan sanitasi	3.a	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial
II. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN									
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.1	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	1.1a	Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman baik berupa kegiatan pembangunan secara bertahap	1.1a.1	Peningkatan pemeliharaan dan tertib pengurusan lahan pemakaman	1.a	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara setiap tahunnya

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	KEDAULATAN PANGAN								
	KEGIATAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	
	I. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN								
1	Peningkatan produksi padi	1.1	Terlaksananya peningkatan produksi padi Kubu Raya	1.1a	Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lainnya	1.1a.1	Percetakan sawah baru	1.a	Produksi padi (pangan utama) meningkat dari tahun sebelumnya
2	Rapat koordinasi evaluasi DEMAPAN, P2KP dan daerah rawan pangan	2.1	Terlaksananya rapat koordinasi masalah pangan	2.1a	Peningkatan koordinasi dan konsolidasi organisasi dan program pangan	2.1a.1	Peningkatan konsolidasi organisasi dan kegiatan DEMAPAN, P2KP dan daerah rawan pangan	2.a	Minimal setiap 3 bulan sekali rapat koordinasi masalah pangan
3	Peningkatan teknologi pertanian dan perikanan	3.1	Terpenuhinya alat dan mesin pertanian dan perikanan	3.1a		3.1a.1	Bantuan alat dan mesin pertanian-perikanan	3.a	Setiap desa di setiap kecamatan mendapatkan bantuan alat dan mesin
4	Peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.1	Terpenuhinya rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.1a	Memprioritaskan Kecamatan yang menjadi lumbung desa untuk pertanian Kubu Raya	4.1a.1	Rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.a	Setiap kecamatan minimal 1 rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan 2 waduk
5	Peningkatan diversifikasi pangan dan sumber protein	5.1	Terlaksananya produksi pangan lainnya (diversifikasi pangan : jagung, kedelai, gula) dan produksi sumber protein	5.1a	Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan dan protein yang sehat	5.1a.1	Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat	5.a	Meningkatnya produksi diversifikasi pangan dan produksi sumber protein (daging sapi dan ikan)

6	Peningkatan penyaluran subsidi pupuk dan benih serta pengembangan Desa Mandiri Benih	6.1	Terpenuhinya pupuk dan benih kepada masyarakat tani	6.1a	Kelancaran distribusi subsidi pupuk dan akses benih kepada masyarakat	6.1a.1	Penyaluran subsidi pupuk dan benih serta pengembangan Desa Mandiri Benih	6.a	Meningkatnya persediaan pupuk dan benih di tengah-tengah petani
7	Penyaluran beras sejahtera (Rastra) KKR	7.1	Terpenuhinya beras sejahtera untuk RTSPM	7.1a	Pendataan yang valid untuk masyarakat yang berhak mendapatkan Rastra	7.1a.1	Bantuan penyaluran beras sejahtera (Rastra)	7.a	Semua Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
8	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	8.1	Terlaksananya penanganan gangguan terhadap produksi pangan	8.1a	Bantuan input produksi akibat bencana dan pengembangan budaya adptif	8.1a.1	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	8.a	Meningkatnya penanganan gangguan terhadap produksi pangan
9	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	9.1	Terpenuhinya pangan dan gizi masyarakat	9.1a	Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	9.1a.1	Advokasi diversifikasi konsumsi (termasuk ikan)	9.a	Peningkatan pangan dan gizi masyarakat
10	Penyelenggaraan peringatan HKP, HPS dan PKK Tingkat Propinsi	10.1	Terselenggaranya peringatan HKP, HPS dan PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi	10.1a	Penyelenggaraan HKP, HPS, dan PKK dari tingkat desa sampai provinsi	10.1a.1	Mendorong kreativitas dan inovasi rumah tangga dalam memaknai peringatan HKP, HPS dan PKK	10.a	Di setiap Desa menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peringatan HKP, HPS, dan PKK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	KEMARITIMAN DAN KELAUTAN									
	KEGIATAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	
I. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN									
1	Peningkatan produksi penangkapan ikan legal	1.1	Terlaksananya keamanan nelayan lokal dan penegakan hukum perikanan liar	1.1a	Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan (KKP, Bakamla, Polair)	1.1a.1	Pemberantasan tindakan perikanan liar (ilegal)	1.a	Jumlah perikanan liar yang dapat ditangani/ditangkap
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi maritim dan kelautan	2.1	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang berwawasan dan berbudaya bahari dalam kehidupan sehari-hari	2.1a	Memasukan wawasan dan budaya bahari dalam muatan lokal	2.1a.1	Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek Kelautan	2.a	Jumlah sekolah yang memasukan wawasan dan budaya bahari dalam muatan lokal
3	Peningkatan kompetensi SDM dan Iptek Kelautan	3.1	Terpenuhinya SDM dan Iptek Kelautan yang berkualitas	3.1a	Konsolidasi dengan pusat dalam rangka dukungan real akan SDM dan Iptek Kelautan	3.1a.1	Peningkatan bantuan SDM dan Iptek Kelautan	3.a	Jumlah SDM dan Iptek Kelautan semakin meningkat

4	Distribusi penjualan hasil laut oleh nelayan setempat/lokal	4.1	Terpenuhinya distribusi penjualan hasil laut tanpa ijon	4.1a	Membantu dalam proses penjualan dan distribusi pasar (tidak diatur oleh ijon, tapi ada koperasi yang mewadahi)	4.1a.1	Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakata pesisir	4.a	Jumlah tangkapan ikan oleh nelayan setempat
5	Meningkatkan pengadaan armada sungai/laut	5.1	Terselenggaranya sistem transportasi lokal dan kewilayahan secara aman dan tertib	5.1a	Meningkatkan pembangunan sistem transportasi lokal dan kewilayahan	5.1a.1	Membina dan ikut menjaga keseimbangan transportasi sungai/laut yang berorientasi lokal dan kewilayahan	5.a	Jumlah armada transportasi sungai/laut meningkat
6	Peningkatan kualitas lingkuangan air	6.1	Terselenggaranya pelestarian lingkungan air khususnya	6.1a	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, swasta, LSM dan masyarakat pesisir dalam menjaga kestabilan ekosistem sungai dan rawa	6.1a.1	Konservasi kawasan perairan dan rehabilitasi pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkuangan sungai dan rawa	6.a	Jumlah lahan dan area yang direhabilitasi dan tidak terkena perusakan atau pencemaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	KEDAULATAN ENERGI									
	KEGIATAN		STRATEGI		SASARAN		TARGET 2017		ARAH KEBIJAKAN	
1	2		3		4		5		6	
I. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN										
1	Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	1.1	Memberi pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas ekosistem lingkungan/hutan	1.1a	Tercapainya kelestarian lingkungan dan pelaksanaan AMDAL	1.1a.1	Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1.a	Jumlah kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan
II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN										
1	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.1	Permudah akses bantuan PLTS atau pembangunan pembangkit listrik dengan energi alternatif	1.1a	Terpenuhinya listrik di daerah 3T	1.1a.1	Peningkatan kualitas pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.a	Jumlah pengguna PLTS dan tenaga listrik dengan sumber energi alternatif lainnya

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	PARIWISATA				
	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				
1	Pelaksanaan promosi pariwisata	1.1 Terselenggaranya promosi pariwisata ke daerah terdekat dan negara yang berbatasan langsung dengan Kalbar	1.1a Bekerjasama dengan daerah dan negara tetangga terdekat dalam membangun kerjasama promosi	1.1a.1 Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan nusantara dan mendorong peningkatan wisatawan manca negara	1.a Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat 10% dari tahun sebelumnya
		1.2 Memperkuat sinergisasi dengan stakeholder pariwisata di Kalbar	1.2a Terlibat langsung dalam kepanitiaan dan ikut serta menjadi sponsorship kegiatan	1.2a.1 Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai pendidikan formal dan teknis fungsional	1.b Terlaksananya minimal 2 kali event besar bekerjasama dengan Provinsi Kalbar
		1.3 Wisatawan nusantara yang belum mengenal dan mengetahui Kabupaten Kubu Raya	1.3a Membangun kerjasama yang solid dengan stakeholder pariwisata yang ada di derah terdekat atau yang sudah berpengalaman	1.3a.1 Meningkatan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan	1.c Terpenuhinya program mempromosikan keunggulan dan ciri khas Kabupaten Kubu Raya

		1.4	wisatawan nusantara dan mancanegara, terutama negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalbar	1.4a	Pelaksanaan yang sinergis dengan program propinsi dan nasional sehingga memudahkan pengkondisian dan promosi	1.4a.1	Membangun kerjasama khusunya dengan Negara Malaysia yang mempunya 5 wilayah perbatasan langsung dengan malaysia	1.d	Selama 3 hari pelaksanaan dikunjungi masyarakat di luar kalbar minimal 1jt orang
II. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									
1	Pengembangan 10 destinasi wisata	1.1	Terpenuhinya pengembangan 10 destinasi wisata oleh penggeliat wisata khususnya dan masyarakat umumnya	1.1a	Menawarkan paket-paket wisata yang menarik dan tidak mahal serta ramah lingkungan	1.1a.1	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	1.a	Bergairahnya persaingan usaha travel dan menghidupkan potensi unggulan daerah
		1.2	Memperkuat koordinasi stakeholder pariwisata di Kabupaten Kubu Raya	1.2a	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	1.2a.1	Koordinasi lintas sektoral dalam penetapan kawasan pariwisata di dalam RTRW dan perancangan kawasan pariwisata di dalam RDTR	1.b	Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tentang Tata Ruang Wilayah Kubu Raya Tahun 2016-2036
		1.3	Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang sehat	1.3a	Penciptaan Destinasi Wisata yang aman dan tertib	1.3a.1	Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban Destinasi Wisata	1.c	Kenyamanan Destinasi Wisata yang dibuat/dibangun
		1.4	Terwujudnya promosi andalan dua tempat wisata andalan Kabupaten Kubu Raya	1.4a	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas umum lainnya	1.4a.1	Meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata	1.d	Meningkatnya Sadar wisata dan sapta pesona masyarakat Kubu Raya

		1.5	Pembangunan dan pemeliharaan Keraton untuk tidak lupa dengan sejarah	1.5a	Pendanaan dari Pemda, masyarakat dan swasta secara rutin dan berkala untuk Keraton Kubu	1.5a.1	Penataan Kawasan Keraton Kubu	1.e	Terpeliharа dan tertatanya Keraton Kubu sebagai ikon Kabupaten Kubu Raya
III. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN									
1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	1.1	Terwujudnya pengembangan SDM yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata	1.1a	Pelatihan yang rutin dilaksanakan lembaga kepariwisataan dengan pelaku usaha pariwisata (hotel, kuliner, dan pengelola destinasi wisata)	1.1a.1	Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional	1.a	Setiap tahun 100 orang dilibatkan dalam peningkatan kompetensi dan seni
2	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	2.1	Terwujudnya SDM pariwisata yang handal dan bertanggung jawab	2.1a	Memberikan kesempatan kepada stakeholder kepariwisataan untuk bekerjasama dengan daerah atau lembaga pendidikan kepariwisataan dan hotel yang sudah maju	2.1a.1	Membangun sumber daya manusia pariwisata	2.a	Owner hotel dan restoran yang kompeten dan profesional
3	Pelatihan Pemandu Wisata	3.1	Terlaksananya pelatihan Pemandu wisata asing khususnya	3.1a	Pemda bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata untuk memberikan pelatihan kepada pemandu wisata	3.1a.1	Meningkatkan kompetensi pemandu wisata terutama pemandu wisata lokal setempat	3.a	Minimal 50 pemandu wisata yang dilatih setiap tahunnya

4	Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha / kegiatan di bidang pariwisata	4.1	Terselenggaranya monitoring terhadap Hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Kubu Raya	4.1a	Tim monev yang lintas sektoral dalam rangka pembinaan yang komprehensif dan terpadu	4.1a.1	Peningkatan kualitas monitoing terhdap usaha kepariwisataan	4.a	Monev dilaksanakan setiap 4 bulan sekali
5	Pelaksanaan pagelaran dan promosi pariwisata tingkat nasional	5.1	Terlaksananya promosi Kabupaten Kubu Raya yang dikenal luas dari sabang sampai merauke	5.1a	Menggalakkan potensi lokal dan keunggulan kompetitif lainnya sebagai bahan promosi pariwisata	5.1a.1	Peningkatan sosialisasi dan promosi potensi lokal Kabupaten Kubu Raya	5.a	Minimal satu kali dalam setahun
6	Sosialisasi Peraturan Kepariwisataan	6.1	Terselenggaranya sosialisasi Perda kepariwisataan kepada Owner dan stakehlder kepariwisataan khususnya	6.1a	Pemberian sanksi yang tegas kepada owner hotel dan restoran yang tidak mengikuti sosialisasi	6.1a.1	Peningkatan kualitas Perda kepariwisataan	6.a	Dalam satu tahun terlaksana 2 kali sosialisa peraturan kepariwisataan kepada stakeholder pariwisata
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BIDANG EKONOMI KREATIF									
1	Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	1.1	Terselenggaranya Bimtek Pengembangan Industri dan Usaha Kecil Pariwisata	1.1a	Pelaku usaha ekonomi kreatif	1.1a.1	Dalam satu tahun terlaksana 2 kali Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	1.a	Menyusun dan menggunakan informasi pembangunan bidang pariwisata ekonomi kreatif
2	Sosialisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	2.1	Terlaksananya sosialisasi aturan HKI kepada masyarakat	2.1a	Pelaku dan plagiat ekonomi kreatif khususnya, dan masyarakat umumnya	2.1a.1	Semakin tingginya kesadaran pelaku dan plagiat ekonomi kreatif untuk tidak plagiat atau meniru tanpa izin	2.a	Menguatkan kelembagaan pariwisata ekonomi kreatif

3	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Kreatif	3.1	Monev yang sinergis dengan perencanaan dan pelaksanaan sehingga terukur parametger yang dicapai	3.1a	Semua stake holder melakukan evaluasi bersama untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian target	3.1a.1	Peningkatan perbaikan manajemen ekonomi kreatif	3.a	Minimal setiap TW anggaran dilaksanakan monev
4	Workshop Animasi	4.1	Terselenggaranya workshop animasi	4.1a	Membangun komunukasi efektif dan kegiatan yang fokus kepada acara animasi	4.1a.1	Semakin banyaknya yang berminat dengan kegiatan animasi	4.a	Jumlah workshop animasi yang diadakan dan yang diikuti
5	Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.1	Kabupaten Kubu Raya terlibat aktif dalam peserta Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.1a	Potensi-potensi unggulan dan pelaku ekonomi kreatif dan sektor-sektor unggulan di prioritaskan	5.1a.1	Minimal 50 pelaku ekonomi kreatif dan sektor-sektor unggulan mengikuti Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.a	Jumlah event yang diikuti Kabupaten Kubu Raya di Tingkat Provinsi
6	Festival Seni dan Musik Tradisional	6.1	Melibatkan masyarakat dan pelaku seni dan musik tradisional secara komprehensif	6.1a	SDM yang terkait dengan pelaku seni dan musik tradisional	6.1a.1	Menjadi unggulan tahunan kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kubu Raya	6.a	Jumlah festival seni dan musik tradisional yang dilaksanakan setiap tahun

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILYAHAN

NO	PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN									
	KEGIATAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TARGET	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	
I. PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF										
1	Pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dan aparatur desa	1.1	Terlaksananya pendampingan masyarakat desa dan aparatur desa	1.1a	Peningkatan pendampingan desa sesuai aturan positif dengan memperhatikan tradisi desa setempat	1.1a.1.	Memperkuat pendampingan masyarakat desa dan aparatur desa	1.a	Jumlah pendamping dan didampingi yang terlibat dan kegiatan desa
2	Menggalakan pembentukan lembaga keuangan mikro (non Bank)	2.1	Terwujudnya lembaga keuangan mikro (non Bank) yang dapat menunjang usaha masyarakat	2.1a	Mendorong dan meyakinkan masyarakat akan pentng dan bergunanya lembaga keuangan yang berbasis komunitas/anggota	2.1a.1.	Memperkuat lembaga keuangan berbasis komunitas (perekonomian perdesaan)	2.a	Jumlah lembaga keuangan mikro (non Bank) dan anggota yang terlibat
3	Penggalakan pemuda sebagai penggerak dan pelopor ekonomi pedesaan	3.1	Terbentuknya wirausaha-wirausaha yang handal dan pantang menyerah	3.1a	Memasukan nilai-nilai kewirausahaan semenjak pendidikan dasar (anak dan remaja)	3.1a.1.	Memantapkan nilai-nilai kewirausahaan kepada masyarakat desa	3.a	Jumlah wirausaha yang ada di Kubu Raya
II. PROGRAM PENINGKATAN TARAF HIDUP PENDUDUK YANG BEREKONOMI TERBAWAH										
4	Membuka lapangan kerja dan berusaha	4.1	Terlaksananya investasi padat karya	4.1a	Mendorong aktivitas ekonomi untuk mendukung investasi padat karya	4.1a.1.	Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya	4.a	Jumlah investasi padat karya yang diciptakan

5	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	5.1	Penguatan sistem yang terkait dengan penyediaan layanan dasar	5.1a	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung pelayanan dasar	5.1a.1	Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat desa	5.a	Jumlah pelayanan dasar yang dapat diberikan
6	Peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan bertanggung jawab	6.1	Terlaksananya penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif	6.1a	Membantu penyaluran Bidik Misi, KIS, KIP, KKS, perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH secara tepat sasaran dan bertanggung jawab	6.1a.1	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan miskin dengan membantu pemerintah pusat dalam menyukseskan program Bantuan Sosial	6.a	Jumlah lahan dan area yang direhabilitasi dan tidak terkena perusakan atau pencemaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

NO	PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDESAAN/TRANSMIGRASI				
1	Peningkatan pembangunan perdesaan dan transmigrasi berfokus pada pelayanan dasar	1.1 Terlaksananya pembangunan yang berfokus pada pelayanan dasar	1.1a Pembangunan yang berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perumahan-permukiman	1.1a.1 Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa	1.a Jumlah anak yang bersekolah, rujukan masyarakat ke puskesmas, ketersediaan sanitasi dan pemukiman yang layak huni
2	Pembangunan desa terpadu	2.1 Terwujudnya pembangunan desa terpadu	2.1a Sinergi pembangunan desa terpadu	2.1a.1 Pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota	2.a Jumlah desa terpadu yang dapat dibangun
3	Pembangunan perdesaan/transmigrasi yang berwawasan lingkungan	3.1 Terwujudnya ruang kawasan perdesaan/transmigrasi yang berwawasan lingkungan	3.1a Penataan ruang kawasan perdesaan/transmigrasi menuju klasterisasi permukiman	3.1a.1 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan	3.a Jumlah permukiman yang terbentuk
4	Pembangunan sumber daya insani perdesaan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal	4.1 Terwujudnya SDM perdesaan/transmigrasi yang handal dan tetap menjaga kearifan lokal	4.1a Peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan mempertahankan modal masyarakat desa/transmigrasi	4.1a.1 Pembangunan SDM, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa	4.a Jumlah SDM yang menjadi pelopor dan inovator dalam membangun desa/transmigrasi

II. PEMBANGUNAN PERKOTAAN									
5	Meningkatkan daya saing dan penerapan sistem on line satu atap dalam pengurusan perizinan	5.1	Terlaksananya pembangunan perkotaan yang berdaya saing dan berbasis TIK	5.1a	Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan	5.1a.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang berdaya saing dan berbasis TIK	5.a	Jumlah keluhan dan kritikan masyarakat menurun dalam pelayanan yang diberikan
6	Pembangunan Kota yang berbasis pada ketahanan iklim dan bencana	6.1	Terwujudnya Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	6.1a	Pelaksanaan pembangunan kota yang wajib memperhatikan lingkungan dan pencemaran	6.1a.1	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	6.a	Luasan areal yang dapat digunakan untuk ketahanan iklim dan bencana

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

NO	REFORMASI BIROKRASI				
	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN				
1	Peningkatan proses perijinan dengan sistem IT secara transparan dan bertanggung jawab	1.1 Terlaksananya pembuatan perijinan melalui sistem IT	1.1a Membangun sistem IT (e-comerce) dalam melayani perijinan	1.1a.1 Memperkuat sistem IT dalam proses perijinan	1.a Jumlah perijinan yang dikeluarkan melalui IT
2	Peningkatan kompetensi dan memperkuat integritas birokrat dalam melayani publik	2.1 Terwujudnya birokrat yang profesional, melayani dan berorientasi hasil	2.1a Membangun dan memperkuat birokrat yang profesional, melayani dan berorientasi hasil	2.1a.1 Birokrasi yang berorientasi melayani, bukan dilayani	2.a Jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan birokrasi
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas perijinan	3.1 Terwujudnya proses perijinan satu pintu dan jalur yang lebih sederhana	3.1a Memperkecil jalur/proses perijinan menjadi lebih sederhan dan cepat	3.1a.1 Proses perijinan satu pintu tanpa pungli dan tepat waktu yang telah ditentukan	3.a Jumlah perijinan yang dikeluarkan tepat waktu tanpa pungli

II. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				
4 Meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi	4.1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan transparan	4.1a Membangun manajemen birokrat yang kuat dan bersih	4.1a.1 Membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel	4.a Jumlah temuan 'eror' dalam pelaporan keuangan
5 Menerapkan aturan dan hukum yang tegas terhadap birokrat	5.1 Terwujudnya aturan dan hukum yang tegas bagi birokrat yang melanggar aturan	5.1a Menegakan disiplin dan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada birokrat yang melanggar aturan	5.1a.1 Memberikan sanksi yang tegas dan terukur sesuai dengan aturan yang berlaku	5.a Jumlah sanksi yang diberikan kepada birokrat
6 Pelaksanaan pengawasan dan monev kegiatan	6.1 Terlaksananya pengawasan dan monev yang terencana dan berkala	6.1a Melaksanakan pengawasan dan monev secara rutin setiap TW pekerjaan	6.1a.1 Pengawasan, monev, dan pelaporan keuangan yang terukur dan bertanggung jawab	6.a Jumlah monev dan pelaporan yang disampaikan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

5.1 Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, Prioritas pembangunan daerah dikelompokan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa (terkait dengan isu good governance);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas (terkait dengan isu sosial-budaya);
3. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah (terkait dengan isu ekonomi); serta
4. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasrana Layanan Dasar Masyarakat (terkait dengan isu infrastruktur/kewilayahan).

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program pembangunan tersebut dikelompokan menurut urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

A. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Meringankan Biaya Pendidikan
8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12. Program Penyehatan Lingkungan
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
18. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
19. Program Keluarga Berencana
20. Program Pelayanan Kontrasepsi
21. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
22. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
23. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
24. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
26. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
27. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Harus menjadi program prioritas tersendiri dan melibatkan semua SKPD/Badan/Kecamatan)
28. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
29. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

B. Peningkatan Kesejahteraan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C. Peningkatan Infrastruktur

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
21. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi (LLAJ)

22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
28. Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota (Dalam RKP 2017 terdapat Tiga Dimensi Pembangunan, salah satunya adalah Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang terdiri atas Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan, Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pengembangan Konektivitas Nasional). Dipertegas kembali dalam 9 Program Prioritas Nasional (NAWACITA) di Nomor 3 di sebutkan bahwa "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
29. Peningkatan Pembangunan Maritim dan Kelautan (Masih terkait dengan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dipertegas dalam MISI PEMBANGUNAN NASIONAL yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 di nomor 1 dan 6, yaitu "Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan", dan "Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional", fakta juga menunjukan bahwa Kabupaten Kubu Raya mengandalkan transportasi sungai dan laut, pencarian nafkah masyarakatnya nelayan, serta potensi perikanan dan kelautan yang berlimpah),

D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan
13. Peningkatan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum (Sesuai dengan isu strategis daerah dan nasional, yaitu pelaksanaan Pilkada Daerah 2017, 2018 dan Pemilu 2019), Dalam MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 di nomor 2 disebutkan bahwa "Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan Negara hukum".

E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Program analisis mengenai dampak lingkungan harus menjadi program prioritas karena kondisi iklim dan perubahan alam yang begitu drastis menjadikan ruang hidup dan berusaha semakin terbatas)
19. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
5. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peingkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2017

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten diperkirakan sebesar Rp. 1.488.879.053.539,71 Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.085.427.065.975,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 403.451.987.564,71.

Proyeksi dari Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.494.379.053.539,71 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 133.939.888.901,71 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak semuanya terakomodir dalam dokumen RKPD.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 894.932.515.775,00 dengan rincian Belanja Gaji Pokok/Tunjangan Total sebesar Rp. 461.807.665.775,00 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 241.907.950.000,00, Belanja Hibah

sebesar Rp. 15.000.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.000.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 171.494.550.200,00 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 77.211.484.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 93.283.066.200,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 403.451.987.564,71 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rekapitulasi estimasi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425.229.423.085,00	85.053.855.709,00	510.283.278.794,00
2	Dinas Kesehatan	48.075.861.101,00	51.435.033.928,00	99.510.895.029,00
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	3.960.162.392,00	100.497.947.884,00	104.458.110.276,00
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan	3.526.450.682,00	99.088.692.888,00	102.615.143.570,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.015.955.074,00	3.910.804.452,00	6.926.759.526,00
6	Dinas Perhubungan	4.410.434.829,00	4.379.420.100,00	8.789.854.929,00
7	Badan Lingkungan Hidup	2.353.305.325,00	4.639.854.048,00	6.993.159.373,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.182.406.368,00	2.200.000.000,00	5.382.406.368,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.687.211.119,00	5.917.891.500,00	8.605.102.619,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	3.890.075.607,00	2.900.000.000,00	6.790.075.607,00
11	Dinas Koperasi dan UMKM	2.788.845.687,00	3.100.000.000,00	5.888.845.687,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.736.785.873,00	2.900.000.000,00	5.636.785.873,00
13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	2.293.425.566,00	2.900.000.000,00	5.193.425.566,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	859.989.532,00	600.000.000,00	1.934.823.475,00

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.334.823.475,00	4.590.028.500,00	5.450.018.032,00
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.954.735.100,00	-	11.954.735.100,00
17	Bupati dan Wakil Bupati	588.554.221,00	-	588.554.221,00
18	Sekretariat Daerah	10.143.859.000,00	59.000.000.000,00	69.143.859.000,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.727.235.473,00	19.000.000.000,00	21.727.235.473,00
20	Inspektorat Daerah	4.104.432.983,00	3.100.000.000,00	7.204.432.983,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	2.802.241.864,00	5.000.000.000,00	7.802.241.864,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.939.671.885,00	6.000.000.000,00	10.939.671.885,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	2.225.622.568,00	5.700.000.000,00	7.925.622.568,00
24	Kecamatan Sungai Raya	2.197.430.490,00	690.000.000,00	2.887.430.490,00
25	Kecamatan Kuala Mandor B	1.489.228.428,00	590.000.000,00	2.079.228.428,00
26	Kecamatan Sungai Ambawang	1.660.468.905,00	600.000.000,00	2.260.468.905,00
27	Kecamatan Terentang	1.431.711.709,00	600.000.000,00	2.031.711.709,00
28	Kecamatan Batu Ampar	1.770.104.733,00	700.000.000,00	2.470.104.733,00
29	Kecamatan Kubu	1.779.069.042,00	580.000.000,00	2.359.069.042,00
30	Kecamatan Rasau Jaya	1.696.563.058,00	640.000.000,00	2.336.563.058,00

31	Kecamatan Teluk Pakedai	1.624.725.080,00	620.000.000,00	2.244.725.080,00
32	Kecamatan Sungai Kakap	1.994.046.883,00	800.000.000,00	2.794.046.883,00
33	Dinas Pedapatan Daerah	3.193.881.772,00	4.400.000.000,00	7.593.881.772,00
34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.492.237.594,00	2.700.000.000,00	5.192.237.594,00
35	Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	1.217.501.663,00	900.000.000,00	2.117.501.663,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.331.704.009,00	3.000.000.000,00	5.331.704.009,00
37	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.178.177.307,00	34.423.952.000,00	39.602.129.307,00
38	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	9.053.993.613,00	4.086.157.500,00	13.140.151.113,00
39	Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan	8.609.951.617,00	9.099.076.765,00	17.709.028.382,00
40	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.591.046.193,00	9.981.063.626,00	13.572.109.819,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.799.473.922,00	9.981.063.626,00	7.229.663.722,00
	Sub Total (A)	**603.942.824.827,00**	**550.753.968.700,00**	**1.154.696.793.527,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Belanja Hibah	6.261.473.230,00	-	6.261.473.230,00
2	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.312.653.000,00	-	124.312.653.000,00
4	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	-	550.000.000,00
	Sub Total (B)	**133.624.126.230,00**	**-**	**133.624.126.230,00**
	Jumlah Total (A + B)	**737.566.951.057,00**	**550.753.968.700,00**	**1.288.320.919.757,00**

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 :

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 ini, dikemukakan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Tahun 2017. Rencana Program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Lampiran I.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 419 usulan program dan 2.507 kegiatan yang berhasil dihimpun dengan mencantumkan asal sumber dana untuk program dan kegiatan yang mereka usulkan. Dari usulan tersebut usulan yang bersumber pendanaan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 905.220.210.300, Pendanaan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 389.900.010.100, Pendanaan dari APBN Rp. 1.174.527.500.000 sedangkan dari APBDes sebesar Rp. 1.467.500.000. Akan tetapi usulan hasil musrenbang Kecamatan ini akan dipertimbangkan oleh SKPD yang memang menjadi kewenangan mereka dan kegiatan tersebut memang telah masuk dalam Renstra SKPD mereka.

BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2017 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang juga merupakan penjabaran dari tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah pada tahun awal periode RPJMD di Tahun 2017. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2017 dengan mendasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2017 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian Visi ***"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing".***

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Mei 2016
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 14

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI